

Nanda Amalia

HARMONISASI & KONFLIK

TANAH PERTAPAKAN UNIMA MASIH MILIK MASYARAKAT
KARENA BELUM ADA GANTI RUGI YANG LAYAK
YANG ADA DI RUMAH ATAU IMBALAN RP 40/METER
BIYUNG HUKUM PASAL 591 UNDANG-UNDANG PERPRES NO36 TAHUN 2005

TANAH PERTAPAKAN
UNIMA

**Studi tentang Interaksi Sosial, Akulturasi dan Konflik
antara Komunitas Kampus Universitas Malikussaleh
dengan Masyarakat Reuleut dan Blang Pulo**

UNIMAL PRESS

Harmonisasi dan Konflik

Nanda Amalia, S.H., M.Hum

Harmonisasi dan Konflik

**Studi Tentang Interaksi Sosial, Akulturasi dan Konflik
antara Komunitas Kampus Unimal dengan Masyarakat
Reuleut dan Blang Pulo**

Diterbitkan oleh:

Unimal Press

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Nanda Amalia., S.H., M.Hum.

Harmonisasi dan Konflik

Unimal Press

xviii, 162 hlm; 245 x 347 mm (UNESCO Standard)

ISBN

1. Harmonisasi 2. Konflik 3. Nanda Amalia., S.H., M.Hum

I. Malikussaleh, Univ.

Universitas Malikussaleh:

Jl. Panglatah No. 10,
Keude Aceh, Lhokseumawe
P.O. Box 141,
Nanggroe Aceh Darussalam
INDONESIA
☎ +62-0645-41373-40915
📠 +62-0645-44450



Alamat Penerbit:

Unimal Press
Jl. Panglatah No. 10,
Keude Aceh, Lhokseumawe 24351
Nanggroe Aceh Darussalam
INDONESIA
☎ +62-0645-47146
📠 +62-0645-47512

Contact person. 0813 6033 4005

Email: unimalpress@unimal.ac.id

unimalpress@gmail.com

Website: www.unimal.ac.id/unimalpress

Hak Cipta © 2013, Nanda Amalia., S.H.,
M.Hum. *All rights reserved.*

Harmonisasi dan Konflik

Penulis:

Nanda Amalia., S.H., M.Hum

Editor:

Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum
Al Chaidar, S.IP
T. Nazaruddin, S.H., M. Hum
Malahayati, S.H., L.L.M.
Laila M. Rasyid, S.H., M.Hum

Hak Penerbitan:

Unimal Press

Layout dan Design Cover:

Eriyanto DN

Dicetak oleh:

Unimal Press

No parts of this book may be reproduced by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

Pengantar Penulis

Inspirasi awal penulisan buku ini timbul saat membaca tulisan Bambang M. Pranowo (1988) “Orang Kampus dan Orang Kampung” dengan mendasarkan pada kondisi faktual yang dialami oleh Unimal dalam relasi sosialnya dengan kampung-kampung di sekitar kampus. Untuk itu, pada tahun 2012 dengan dukungan dana dari Centre for Peace and Conflict Resolution Study (CPCRS – Universitas Syah Kuala) studi ini dilakukan. Ide untuk membukukan penelitian ini berkat saran dan rekomendasi yang diberikan oleh rekan sejawat dari kalangan civitas akademika Universitas Malikussaleh serta beberapa pihak pada saat penulis mempresentasikan hasil penelitian ini pada beberapa seminar ilmiah.

Penelitian tentang interaksi sosial, akulturasi dan konflik antara komunitas Kampus Unimal dengan masyarakat Reuleut dan Blang Pulo ini memperlihatkan hasil bahwa konflik sudah terjadi sejak tahun 2001 dan mengalami eskalasi hingga tahun 2011. Upaya resolusi konflik sudah dilakukan oleh banyak pihak, diantaranya dilakukan oleh pihak Unimal sendiri, baik itu dari kalangan pejabat kampus, mahasiswa serta civitas akademika lainnya. Perhatian terhadap konflik ini juga diberikan oleh Pemerintah Daerah Aceh Utara serta aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan dan pengadilan). Namun tampaknya, penyelesaian tuntas terhadap kondisi ini tidak terjadi, bahkan - sampai dengan dituliskannya buku ini – konflik yang terjadi semakin mengkrystal dan belum terlihat adanya upaya-upaya dengan antusiasme tinggi dari para pihak berkonflik untuk mengubah konflik menjadi konsensus.

Studi ini selain menemukan adanya potensi konflik yang terjadi juga menemukan terjadinya interaksi sosial antara komunitas kampus dengan masyarakat kampung di sekitarnya. Terdapat jalinan hubungan yang saling mempengaruhi, saling membutuhkan, saling bekerja-sama, saling asih-asah-asuh yang membentuk kesadaran dan cara berpikir yang baru di kedua-belah pihak. Namun demikian, perlu disadari bahwa hubungan sosial ini akan mengalami penurunan dalam kualitas, dan proses akulturasi akan mengalami kegagalan jika konflik antara

masyarakat kampung dengan komunitas kampus Unimal dibiarkan berlarut-larut.

Akulturası yang terjadi dalam interaksi antara warga kampung dengan komunitas kampus Unimal sangat sedikit atau minim dikarenakan kedua pihak sulit terhubungkan satu sama lainnya; warga kampung mengalami kesulitan dan distorsi dalam memanfaatkan kampus dan pihak kampus juga cenderung *reluctant* (enggán) dalam memanfaatkan kampung sebagai peluang dan tantangan akademis. Kedua pihak hampir tidak memiliki kreativitas dalam menghasilkan konsensus-konsensus dan kerja-sama yang produktif.

Konflik tidak akan selesai dengan sendirinya atau dengan pembiaran. Sejak 2010 Unimal tidak bersedia melanjutkan pembicaraan musyawarah tentang konflik di Reuleut maupun di Blang Pulo sehingga intrusi pihak *gampong* ke wilayah kampus semakin menjadi-jadi. Tembok-tebok pembatas bukit di sepanjang jalan masuk ke Kampus Bukit Indah yang melewati *gampong* Blang Pulo dan Padang Sakti semakin banyak yang tergerus, sebagiannya karena masyarakat membuat tempat-tempat usaha. Warung-warung pun semakin ramai bermunculan di depan pintu masuk Kampus Bukit Indah. Di Reuleut, ternak sapi dan kambing warga semakin bebas memasuki areal kampus dan mengotori jalan-jalan dan teras gedung perkuliahan. Kasus-kasus pencurian pun merajalela tanpa ada upaya tegas dan kreatif untuk mengatasinya. Setidaknya bisa diupayakan adanya program-program kerjasama atau kemitraan yang saling menguntungkan, semacam simbiosis mutualisme antara kampus dan kampung.

Ketidakmampuan Unimal dalam mengatasi persoalan konflik dengan warga *gampong* sekitar kampus juga berasal dari masalah internal lembaga ini yang sudah berlarut-larut sejak lama, kusut-masai dan centrang-prenang yang mengakibatkan manajemen tak berfungsi secara optimal. Upaya pembenahan terhadap permasalahan internal khususnya pada masalah perencanaan dan keuangan tampaknya menyita perhatian para pejabat kampus sehingga terlihat adanya sikap-sikap yang kurang antusias dalam berkomunikasi dengan *gampong-gampong* di sekitarnya.

Pada saat buku ini disusun, Unimal kembali menghadapi gugatan ganti rugi dari sebahagian warga kampung yang masih menganggap bahwa ganti rugi yang telah diberikan pada saat itu belum selesai. Informasi awal yang penulis dapatkan, bahwa sampai dengan saat ini telah terdapat lebih kurang belasan kali agenda persidangan yang harus diikuti di PN Lhoksukon. Ada keinginan yang besar dari penulis untuk menunggu terlebih dahulu hasil Putusan Pengadilan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa proses hukum yang sedang berjalan bisa jadi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Untuk itu, dengan niat tulus maka buku ini saya persembahkan untuk Universitas Malikussaleh. Semoga upaya kecil ini dapat menjadi bagian untuk mengharmoniskan interaksi antara komunitas kampus Unimal dengan orang kampung Reuleut dan Blang Pulo.

Penulis menyadari bahwa kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam buku ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, dan akhirnya kepada Allah jualah penulis menyerah diri. Semoga karya kecil ini bermanfaat adanya.

Amiin Ya Allah, Amiin Yaa Mujiibassailiin.

Lhokseumawe, September 2013

Nanda Amalia

UCAPAN TERIMA KASIH

Hanya kepada Allah SWT saya memanjatkan puji dan syukur – atas segala rahmat dan inayah – yang telah diberikan-Nya. Saya yakin, hanya karena dan berkat petunjuk Allah SWT – lah maka segala kemudahan saya dapatkan sepanjang proses penelitian sampai dengan buku ini diterbitkan. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebaikan dan kebenaran bagi segenap ummat manusia.

Keseluruhan rangkaian kegiatan penelitian dalam penulisan buku ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan Malahayati, S.H., L.LM, dan Laila M. Rasyid, S.H., M.Hum yang telah membantu saya khususnya dalam mengumpulkan data lapangan dan melakukan beberapa wawancara di lapangan yang tidak terjangkau oleh saya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ridwan A. Rahman, S.IP., dan adik-adik mahasiswa Chaidir Anhar, Dara Quthni Effida, yang telah menuliskan transkripsi wawancara dalam penelitian ini. Terima kasih untuk Rahmad Ramadhani dan M. Amin atas bantuannya mendampingi tim lapangan. Saya yakin, tanpa bantuan yang diberikan oleh tim peneliti lapangan ini, maka laporan penelitian ini akan “hambar”.

Terima kasih tidak terhingga juga saya sampaikan kepada tim editor buku ini: kepada Prof. Jamaluddin, S.H., M.Hum, Al Chaidar S.IP, T. Nazaruddin, S.H., M.Hum, Malahayati, S.H., L.LM, dan Laila M. Rasyid, S.H., M.Hum. atas catatan-catatan kecil yang membuat saya selalu mengingat bahwa proses belajar itu tidak akan pernah berhenti. Terima kasih juga untuk kesediaannya membaca keseluruhan hasil penelitian ini.

Saya juga berterimakasih kepada para nara-sumber yang telah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan penting penelitian bahkan ketika saya berulang kali harus mewawancarai para narasumber tersebut. Kepada nara-sumber di kampung sekitar kampus utama Universitas Malikussaleh Reuleut, Keuchik Jakfar Hanafiah (Reuleut Timur), Tgk. Fajri (Mantan Tuha Peut Reuleut Timur), Tgk. Muhammad (Tgk Imuem Reuleut Barat), Jamaluddin (Reuleut Barat), Keuchik Syaokani (Paya Gaboh), Bpk. Mukhlis (Ketua Pemuda Gampong Paya Gaboh), Bpk. Salahuddin (Keuchik Cot Kemuneng), Bpk. Jailani (Sekdes

Cot Kemuneng), Bpk. Rusli Daud (Mantan Keuchik Cot Kemuneng), Tgk. Suryadi (Tgk. Imuem Cot Kemuneng), Tgk. M. Yakob (Tetua Gampong Cot Kemuneng), Bpk. Salahuddin, Bpk. Matsyah Raban, Bpk. Abdul Bahri, - ketiganya adalah Penerima Kuasa Masyarakat untuk pengurusan sengketa tanah kampus Unimal, Ibu Rukiah, Ibu Hanifah dan Bpk. Marzuki Ali – ketiganya adalah sebagian warga kampung yang masih mengharapkan kejelasan atas status tanah miliknya. Kepada Ibu Yusniar dan Maryati, rasa terimakasih juga penulis sampaikan atas kesediaannya untuk diwawancarai mewakili orang kampung yang juga merupakan orang kampung sekitar kampus utama Reuleut. Terima kasih kepada Bpk. Syaiful Basri – Camat Muara Batu dan Bpk. Amsidar – Mukim Mane, yang telah memberikan inspirasi solusi atas permasalahan kampus Unimal.

Terima kasih kepada para nara-sumber di kampung sekitar kampus Bukit Indah: Bpk. Keuchik Blang Pulo, Bpk. Abdul Manan (Tuha Peut Blang Pulo), Bpk. Feri Irawan (Ketua RT Dusun Arungan), Bpk. Sanusi Hamid (Bendahara Desa Blang Pulo) yang telah menyediakan waktu untuk berdiskusi. Terimakasih juga saya sampaikan kepada Keuchik Cot Trieng, Bang Feran, Bpk. Syarifuddin (Tuha Peut Gampong Blang Pulo), dan Bpk. Razali, Bpk. Amir – keduanya adalah pedagang di warung sekitar kompleks kampus Bukit Indah.

Terima kasih kepada para nara-sumber dari internal kampus Universitas Malikussaleh: Prof. A. Hadi Arifin, Prof. Jamaluddin, Bpk. Apridar (Rektor), Dahlan A. Rahman (Pembantu Rektor III), Iskandar Zulkarnaen (Pembantu Rektor IV), Teuku Nazaruddin (Sekretaris Senat), Sumiadi (dekan FH), Fauzi (Dekan FISIP), Syamsul Bahri (Mantan Dekan FT), Moh. Heikal (Kepala Bagian Humas), Husen (mantan Kepala Bagian Humas), Yulius Rief Alkahali (Kepala UPT. Perencanaan), Arif Rahman (Ka. Biro Akademik), Zulfan (Kabag. Kepegawaian), Asnawi (Kasubag. Kemahasiswaan), Amrizal J. Prang dan Darmadi, (mantan Ketua BEM Unimal), Zulfikar, Agustiar – keduanya dari unsur BEM Universitas dan Fakultas, adik-adik mahasiswa yang juga telah memberikan “warna” dalam pemberian informasi penelitian ini, Ferry Afrinal, Haris Munandar, Martunis, Nurlaila, Razni Ramadhani, Aisyah, Jamaluddin, dan Sri Mulyani. Terimakasih juga kepada teman-teman dosen di Unimal, kepada Ust. Damanhur, Bpk. Munardi, untuk data yang diberikan tentang distribusi zakat Unimal.

Terimakasih kepada Bpk. Azis (Asisten III Bidang Pemerintahan), dan Bpk. Azhari *Cage* (Ketua Komisi C DPRK Aceh Utara) turut kami sampaikan atas pandangan dan kesediaannya untuk berdiskusi dengan peneliti.

Terima kasih, tidak lupa saya sampaikan kepada teman-teman dan kolega saya di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - khususnya: Bpk. Sulaiman, Bpk. Harun, Ibu Manfarisyah, Ibu Marlia Sastro, Ibu Elidar Sari, Bpk. Arif Rahman, Bpk. Faisal, Bpk. Mukhlis, Bpk. (Abu) Yusrizal, Bpk. Yusrizal (YH), Bpk. Amrizal, Bpk. Husni, Ibu Nasrianti, Ibu Herinawati, Bpk. Romy Asmara, Bpk. Mirza Alfath S, Bpk. Sofyan Jafar, Bpk. Hasan Basri, Ibu Cut Asmaul Husna, Bpk. Jumadiyah, Bpk. Muh. Hatta, Bpk. Johari, Bpk. Joelman Subaidi, Bpk. Fatahillah, Bpk. Dedi Iskandar, Bpk. Hadi Iskandar, Ibu Fauzah Nur Aksa, Ibu Nuribadah, Bpk. Nassir, Bpk. M. Nur, Bpk. Hamdani, LLM, Bpk. T. Yudi Afrizal, Bpk. Hamdani, MA, Ibu Eny Dameria, Ibu Yulia, Ibu Ramziati, Ibu Idaryani, Bpk. Zul Akli, Bpk. Iskandar, Ibu Arnita, Ibu Nurarafah, Bpk. Muhibuddin, Bpk. Zainal Abidin, Ibu Ade Irma Suryani dan Bpk. Zulfadhli Ilmard – kesemua mereka, sebahagiannya telah sangat ikhlas membantu saya dalam menangani kelas-kelas perkuliahan yang sering kali harus saya tinggalkan dengan alasan “perlu ketemu dengan nara-sumber”, sebahagian mereka juga telah memberikan insiprasi kepada saya untuk terus belajar menulis. Terima kasih juga untuk teman-teman di akademik Fakultas Hukum, Rosmanita, Sufiana, Jamaluddin, Fajrina, Suhelmi, Helmi, SE., Heri, Yuni, Kasmimara, Ishak, Bang Buyung, Kak Jem, dan Anas.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Cut Sukma, dan Dr. Nazaruddin yang telah berkenan memberikan catatan awal sebelum hasil penelitian ini dipublikasikan.

Penelitian ini juga hampir tidak mungkin dapat dilakukan tanpa dukungan dari CPCRS Unsyiah. Untuk itu, kepada teman-teman dari CPCRS Banda Aceh, khususnya Kak Darni, Kak Yuni Erika, dan Kak Yelizar untuk semua kemudahan dan bantuannya pada saat Pelatihan. Lebih khusus lagi, terimakasih saya sampaikan kepada Bpk. Saifuddin Bantasyam, SH., MA untuk semua dukungan yang telah diberikan sampai dengan selesainya kegiatan penelitian ini. Sesungguhnya, program pelatihan serta hibah dana penelitian yang difasilitasi oleh CPCRS Unsyiah – lah yang memberanikan saya untuk menuliskan

kegelisahan saya selama ini atas kondisi yang terjadi di lingkungan kampus Unimal.

Kepada Ibu Lies Marcoes, Tim Mann, Pak Arie Sujito, Pak Aris Mudhayat, dan Pak Anas Saidi – fasilitator pada kedua Pelatihan yang diselenggarakan oleh CPCRS – doa saya semoga ilmu yang diberikan kepada saya khususnya, menjadi bekal syafaat di hari akhir kelak.

Terima kasih juga kepada kolega dan teman sejawat di LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe: Bpk. Saharuddin (mantan Ketua LPPM), Bpk. Yulius Dharma (Ketua LPPM), teman-teman peneliti dan staf: Bpk. Damanhur, Bpk. Nirzalin, Bpk. M. Ali, Bpk. Hasanuddin, Bpk. Jakfar, Bpk. Asrianda, Masura Rugayah, Fitriati, M. Zubir, Zainuddin, Bang Catur Atmadjo, Bang Ibrahim, dan Bang Hermandar yang sudah memberikan banyak kemudahan dan sangat memahami setiap “ketidakhadiran” saya di kantor.

Untuk adik-adik di APCM (Aceh Peace Consultative Management) Unimal di Kampus Bukit Indah: Muhammadan dan Safwatur Rizal yang telah banyak memberikan bantuan untuk memfasilitasi setiap diskusi tim peneliti.

Pada lembar ini, terima kasih khusus saya sampaikan kepada Dr. Arskal Salim. Menjadi suatu kebanggaan buat saya untuk bisa mengenal dan belajar dari beliau. Beliau salah seorang yang akan tetap saya anggap guru untuk saya.

Kepada Ibunda Nurhayati, bukan hanya terimakasih yang harusnya Nanda sampaikan tapi juga maaf karena sudah menomortigakan Ibu – ketika Ibu juga sangat membutuhkan Nanda saat ini. Terima kasih karena selalu mengerti “kesibukan” Nanda. Terimakasih untuk doa yang tidak pernah putus untuk kami, anak-anakmu. Untuk Ayahanda (alm) Chairuddin Ali, ayah selalu menjadi yang terbaik. Rasa rindu ini - untuk ngobrol dengan ayah – seringkali membuat hati nanda perih. Untuk Bang Harry, Kak Mimi, Dedek, Ida Rahmi, Wahyu, Muharrir, Dewi, Sayuti, Afina, Bila, Tuah, Idenk dan krucil-krucil tercinta Kiky, Daffa, Najla, Aulia, dan Fathan Biboy – semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan berkah-Nya bagi kalian semua.

Untuk Haidar-ku, banyak hal Nanda pelajari dalam kebersamaan kita. Rasa terima kasih di lembaran ini – pastinya tidak akan memadai untuk mengekspresikan rasa itu. Terima kasih sudah mengajari Nanda cara menulis apa adanya tapi tulisan itu

mengungkapkan semua fakta lapangan. Terima kasih untuk kesediaannya mengomentari, mengkritisi dan mengedit tulisan ini. Terima kasih khususnya sudah menemani Nanda, malam-malam mengetik menyelesaikan buku ini.

Kepada Sarah Finnuala Najma, Mama berutang banyak kepada kamu. Mama berutang "*mama & sarah's time*". Mama mengucapkan banyak terima kasih untuk pengertian sarah kepada mama selama ini. Terima kasih karena Sarah mau belajar memahami kondisi Mama. *You are my sun shine, always*. Doa mama, semoga Allah selalu memberikan rahmat dan syafaatnya selalu untuk Sarah – putri mama yang lembut dan baik hatinya.

Hanya Allah-lah yang bisa membalas semua kebaikan dari semua pihak yang disebut namanya di sini, maupun yang tidak disebut namanya. Saya memohon maaf atas kealfaan saya, jika masih ada teman-teman, para pihak yang telah memberikan kontribusi tenaga, pikiran maupun waktunya untuk buku ini yang tidak disebutkan namanya di dalam lembar terima kasih ini.

PENGANTAR EDITOR

Konteks tulisan buku ini berkisar dan bersumber dari hasil penelitian mengenai masalah interaksi sosial, akulturasi dan konflik antara komunitas Kampus Unimal dengan masyarakat kampung di Reuleut, Aceh Utara dan Blang Pulo, Kota Lhokseumawe. Keberadaan penulis, *Nanda Amalia, S.H., M.Hum* yang merupakan seorang akademisi hukum, namun menulis dalam konteks sosial hingga pada masalah konflik Unimal versus Masyarakat Reuleut dan Blang Pulo memberikan suatu nuansa tersendiri yang tercermin dari analisis-analisisnya yang tajam dalam masalah sosial secara empiris dan yuridis filosofis.

Signifikansi tulisan buku ini adalah pada sebab-sebab terhambatnya interaksi sosial dan upaya penyelesaian konflik yang menguntungkan bagi kedua belah pihak (simbiosis mutualisme). Sehingga *impact*-nya bila masalah-masalah di atas tidak ditulis, maka ada kemungkinan akan semakin tajam dan meluasnya konflik yang terjadi karena tiadanya pemetaan konflik dan macetnya saluran komunikasi yang persuasif.

Buku ini penting karena berkenaan dengan penelitian tentang hubungan sosial, akulturasi dan konflik antara warga masyarakat sekitar kampus Unimal dengan komunitas kampus yang bertujuan untuk: (1) menyelesaikan masalah konflik antara warga masyarakat dengan komunitas kampus yang sudah berlangsung selama dua dekade; (2) mencapai target agar konflik bisa diubah menjadi kerjasama antara warga gampong dan komunitas kampus dalam penelitian ini; (3) menemukan metode atau menyempurnakan metode penelitian yang sudah ada sebagai upaya yang akan ditempuh peneliti untuk memecahkan masalah penelitian. Penelitian ini diharapkan akan bisa menghasilkan dua hal: (1) menemukan konsep-konsep dan teori baru tentang jenis hubungan sosial, akulturasi dan konflik antara masyarakat gampong dengan komunitas dengan latar-belakang yang tidak jauh berbeda. Peneliti berharap bisa memberikan kontribusi ilmiah melalui penelitian ini dalam bentuk laporan penelitian, referensi atau tulisan jurnal berkala ilmiah kepada pengembangan konsep dan teori dalam rumpun ilmu-ilmu sosial. (2) Peneliti berharap bisa menemukan solusi atas konflik yang terjadi antara masyarakat *gampong* dengan komunitas akademisi sehingga bisa memberikan

saran atau rekomendasi kepada pihak manajemen Universitas Malikussaleh untuk mengatasi dan mencegah masalah yang sering muncul berulang kali.

Kesimpulan penelitian tentang interaksi sosial, akulturasi dan konflik antara komunitas Kampus Unimal dengan masyarakat Reuleut dan Blang Pulo ini, diantaranya, memperlihatkan hasil bahwa konflik sudah dimulai sejak tahun 2001 dan mengalami eskalasi hingga tahun 2011. Upaya resolusi konflik sudah dilakukan oleh banyak pihak; Pemda Aceh Utara, Unimal, mahasiswa dan juga aparat hukum (polisi, kejaksaan dan pengadilan). Namun tidak ada sama sekali penyelesaian yang tuntas atas konflik ini bahkan akhir-akhir ini terlihat tidak adanya antusiasme untuk mengubah konflik menjadi konsensus atau kerjasama yang produktif. Akhirnya konflik bukannya berkurang, malah semakin menguat, mengalami eskalasi yang semakin mengkristal. Namun, bukan hanya konflik yang terlihat dari hubungan sosial komunitas kampus dengan masyarakat kampung di sekitarnya. Ada juga akulturasi yaitu hubungan yang saling mempengaruhi, saling membutuhkan, saling bekerja-sama, saling asih-asah-asuh yang membentuk kesadaran dan cara berpikir yang baru di kedua-belah pihak. Hubungan sosial ini akan mengalami penurunan dalam kualitas, dan proses akulturasi akan mengalami kegagalan jika konflik antara masyarakat kampung dengan komunitas kampus Unimal dibiarkan berlarut-larut.

Masyarakat memandang kampus Unimal sebagai sumber mata air ilmu pengetahuan, tempat bersemayamnya para cerdas cendikia, tempat lahirnya ide-ide baru dan tempat menghasilkan para sarjana yang terdidik, memiliki moralitas yang luhur. Meskipun sebagian masyarakat ada yang memandang kampus Unimal sebagai sumber uang atau sumber mata-pencaharian, kampus masih dipandang dengan kacamata yang jernih yang dianggap membawa dampak perubahan ke arah yang lebih baik. Kehadiran kampus Unimal di tengah-tengah masyarakat kampung yang masih guyub dipandang membawa kemajuan dan manfaat tidak hanya bagi kampung, melainkan untuk keseluruhan Aceh. Meskipun dulu, ketika konflik dimulai tahun 2002, kampus Unimal dianggap sebagai "wakil pemerintah pusat" yang tidak sinkron dengan ide-ide populis masyarakat untuk membangun

'kemandirian' Aceh. Unimal ketika tahun-tahun 2002 hingga 2009 dianggap sebagai aset pemerintah pusat sehingga komunitas kampus Unimal mengalami banyak gangguan keamanan dalam bentuk pencurian, penculikan staf (pada masa 2002-2005), dan intrusi ternak ke dalam wilayah kampus serta demo-demo yang membarikade lalu-lintas karyawan dan dosen serta mahasiswa untuk mengakses kampus.

Akulturas yang terjadi dalam interaksi antara warga kampung dengan komunitas kampus Unimal sangat sedikit atau kecil karena kedua pihak sulit terhubungkan satu sama lainnya; warga kampung mengalami kesulitan dan distorsi dalam memanfaatkan kampus dan pihak kampus juga cenderung *reluctant* (enggan) dalam memanfaatkan kampus sebagai peluang dan tantangan akademis. Kedua pihak hampir tidak memiliki kreativitas dalam menghasilkan konsensus-konsensus dan kerja-sama yang produktif. Kampung juga menyimpan banyak konflik internal mereka sendiri. Bahkan ketika konflik internal tidak bisa mereka selesaikan, mereka akan menghadapkan wajah kepada kampus untuk meminta kompensasi dan *peng ie saka* (uang bantuan sekedarnya) kepada kampus yang dianggap sebagai sumber kemapanan.

Konflik tidak akan mereda dengan pembiaran. Menyerahkan urusan konflik kepada rezim waktu bukanlah cara yang bijak dalam menyelesaikan konflik. Kepemimpinan terlihat dari sikap responsivitasnya dalam menanggapi masalah. Pemimpin yang sukses akan melihat kesempatan di setiap masalah, bukan malah melihat masalah dalam setiap kesempatan, meskipun masalah akan tetap terus ada dimana pun kita berada. Karena konflik Unimal dibiarkan terus berlarut-larut tanpa adanya upaya definitif untuk menyelesaikan, maka yang terjadi adalah eskalasi konflik. Eskalasi konflik Unimal berasal dari ketidakmampuan pemimpin —dalam hal ini pihak Bupati Aceh Utara dan para pejabat Unimal— dalam memahami kebutuhan, kepentingan sehingga buta terhadap lingkungan kawulanya.

Penyelesaian konflik dengan masyarakat sekitar Kampus Unimal Reuleut dan Blang Pulo pernah sangat antusias diupayakan pada masa Rektor Profesor A. Hadi Arifin (1996-2010). A. Hadi Arifin sangat responsif dalam menangani problem sosial dengan warga sekitar

kampus, meskipun banyak juga terjadi persoalan dari upaya yang eksekutif tersebut. Komunikasi yang sudah dilakukan oleh A. Hadi Arifin seharusnya dilanjutkan oleh kepemimpinan sekarang. Kepemimpinan Unimal sekarang terlihat enggan (*reluctant*) dalam menghadapi masyarakat sekitarnya. Keengganan berkomunikasi dari pihak Unimal terutama disebabkan adanya anggapan bahwa lingkungan sekitar atau masyarakat *gampong* atau *kawula* atau warga memiliki kepentingan ekonomi personalnya dalam berkonflik dengan pihak kampus Unimal. Padahal kepentingan ekonomi personal dari orang-orang *gampong* tidaklah menjadi hal yang fundamental. Persoalan fundamental dari konflik ini adalah minimnya frekuensi musyawarah, atau *duk pakat* (mufakat) antara pihak Unimal, Pemda Kabupaten Aceh Utara dan masyarakat sekitar kampus. Komunikasi adalah akar dari semua masalah.

Berdasarkan hasil analisis hubungan sosial, akulturasi dan konflik antara komunitas kampus Unimal dengan masyarakat kampung Reuleut dan Blang Pulo, penulis merekomendasikan beberapa hal: *Pertama*, hubungan sosial yang sudah ada antara komunitas kampus dengan warga kampung sekitar haruslah dipererat lagi dengan mengunjungi kampung-kampung sekitar kampus Unimal, mencoba mendalami dan memahami masalah yang mungkin ada dan jelas dihadapi oleh masyarakat kampung seperti kesulitan mereka dalam mengadakan dan mengelola musrenbang (musyawarah rencana pembangunan kampung). Pihak Unimal dengan sumberdaya manusia yang handal tentu bisa membantu masyarakat untuk lebih merasakan keberadaan kampus dengan segala potensinya. Pihak Unimal seharusnya mengadministrasikan program pengabdian dosen secara fungsional dan dimasukkan kedalam perencanaan kampung. Beasiswa untuk masyarakat sekitar juga perlu dihidupkan kembali, selain program Beasiswa Bidik Misi yang bersifat nasional. Hubungan sosial yang dilandasi pemberian *rewards* atas prestasi atau pencapaian keilmuan (siswa dan mahasiswa) dari kalangan masyarakat adalah hubungan yang kuat.

Kedua, proses akulturasi yang sudah terjadi semenjak kampus dipindahkan ke lokasi kampung, harusnya lebih diperdalam dan ditingkatkan kualitasnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

harusnya dirasakan oleh warga kampung dari pintu-pintu kampus yang senantiasa terbuka untuk memberikan mata-air ilmu pengetahuan, untuk memberikan kesejukan kultural, siraman ilmu dan cahaya kandil pengetahuan. Pihak Unimal seharusnya membuat dan merancang program-program yang lebih berdaya guna bagi masyarakat. Setiap tahunnya Unimal memiliki anggaran pengabdian yang bisa digunakan untuk mengurangi intensitas konflik dan menaikkan penerimaan masyarakat terhadap kampus. Misalnya penghijauan kampus dan sekitar kampus, akan sangat menurunkan intensitas konflik. Program pengabdian dosen —semisal menyumbangkan buku-buku untuk perpustakaan *gampong*, pesantren atau *dayah* atau *meunasah-meunasah* dan masjid-masjid—akan sangat berdampak positif bagi penciptaan iklim ilmiah yang kondusif sehingga kampus tidak menjadi menara gading yang —dalam bahasa Pramodya Ananta Toer— hanya "terlalu banyak mengurus diri sendiri dan buta terhadap yang lain-lain." Program beasiswa juga perlu diperkenalkan kepada masyarakat Aceh umumnya dan masyarakat sekitar lokasi-lokasi kampus pada khususnya supaya masyarakat sekitar merasakan peningkatan kualitas hidup secara signifikan dengan kehadiran kampus Universitas Malikussaleh di tengah-tengah kampung mereka.

Ketiga, Unimal perlu menyelesaikan masalah internalnya sendiri (kasus-kasus korupsi dan masalah manajemen perencanaan yang amburadul) agar bisa berkonsentrasi untuk menyelesaikan konflik dengan warga *gampong* dan mengubah konflik menjadi konsensus dan kerja-sama produktif. Misalnya potensi zakat Unimal yang cukup besar seharusnya bisa dipakai untuk memberikan sumbangan untuk perayaan hari-hari besar agama Islam, meskipun kegiatan ini tidak produktif. Konsep zakat produktif pun harus memahami bahwa ada kebutuhan-kebutuhan spiritual dan sosial yang sangat konsumtif yang tidak bisa dipaksakan untuk harus bersifat produktif selamanya. Perencanaan Unimal selama ini tidak jelas menempatkan fakultas-fakultas dan unit-unit pendukung akademis, fasilitas dan lain-lain secara konsisten. Jika Kampus Bukit Indah diperuntukkan untuk ilmu-ilmu sosial dan humaniora, maka seyogyanya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Hukum (FH) dan Fakultas Ekonomi (FE) dikonsentrasikan di lokasi tersebut. Selama ini ada beberapa gedung laboratorium Fakultas Teknik yang dibangun di Kampus Bukit Indah,

padahal lahan di Kampus Reuleut masih sangat lapang dan lega. Pembangunan beberapa gedung laboratorium Fakultas Teknik yang menimbulkan keresahan warga Reuleut. Juga di Kampus Reuleut yang selama ini diperuntukkan untuk ilmu-ilmu alam dan teknik —Fakultas teknik dan fakultas Pertanian— masih belum konsisten dalam perencanaan; ada rencana untuk membuka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di lokasi Kampus Reuleut yang membuat masyarakat bingung dan kecewa.

Keempat, pihak Pemda Kabupaten Aceh Utara (dalam hal ini juga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten [DPRK] Aceh Utara) perlu memikirkan anggaran yang bisa memberikan dampak kepada kedua-belah pihak (*dual-impact*) seperti pembangunan jalan, penghijauan, pembuatan *food-court* atau *food-center* atau warung-warung (*kiosk*) kebutuhan selain makanan di sekitar atau di dalam kampus. *Ketujuh*, Unimal perlu membuka jurusan-jurusan ilmu budaya atau humaniora. Jurusan-jurusan ini akan memberikan pengaruh kultural kepada Aceh dan lingkungan *gampong-gampong* sekitarnya secara mendalam. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang dihormati masyarakat Aceh, Unimal selayaknya membuat terobosan (*breakthrough*) yang membanggakan secara ilmiah.

Buku ini merupakan hasil dari proses *editing* (penyuntingan) yang dilakukan oleh para *editor* setelah laporan penelitian ini disusun dan diseminarkan pada beberapa kesempatan. Disadari bahwa proses *editing* (penyuntingan) buku ini memiliki kelemahan-kelemahan, karena terbatasnya waktu dan kesempatan tim editor untuk mensinkronisasikan hasil editing, namun demikian antusiasme yang tinggi dari tim editor untuk menyelesaikan editing buku ini agar segera dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Perkenankan kami pada kesempatan ini menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih dari tim editor untuk pihak-pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses editing buku ini.

Akhirnya, hasil penelitian yang telah disajikan dalam buku ini telah menghadirkan suatu harapan baru dan semangat bagi meningkatnya keharmonisan, kelancaran interaksi dan penanganan penyelesaian konflik Unimal versus Reuleut dan Blang Pulo. Tentunya, sebagai Kritik positif dan membangun bagi Unimal pada khususnya untuk mengembalikan posisi dan peran universitas (Unimal) sebagai menara api yang memberi penerangan, pencerahan dan arah bagi perkembangan masyarakat dan daerah, semoga!

Lhokseumawe, 23 September 2013.

Tim Editor

Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum

Al Chaidar, S.IP

T. Nazaruddin, S.H., M. Hum

Malahayati, S.H., L.L.M.

Laila M. Rasyid, S.H., M.Hum

Daftar Istilah, Akronim Dan Singkatan

- Elite; eli-te* : orang-orang terbaik atau pilihan dalam suatu kelompok;
kelompok kecil orang-orang terpandang atau berderajat tinggi (kaum bangsawan, cendekiawan).
- Akad* (Bhs Arab): ikatan, sambungan. Dalam konteks hukum bermakna perikatan, yaitu hubungan hukum antara para pihak di bidang harta kekayaan, termasuk jual-beli, sewa menyewa, hibah.
- Gampong* : komunitas rural (pedesaan) yang umumnya masih sarat dengan nilai-nilai tradisi; istilah ini berlawanan dengan kota atau masyarakat urban
- kampung* (Bhs. Aceh) suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
- Harlan* (Bhs. Aceh) : pekerjaan jasa bongkar-muat dan angkut-mengangkut sejenis *porter*.
- Keuchik* : orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat atau diangkat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memimpin Pemerintahan
- Geuchik* (Bhs. Aceh) Gampong; kepala desa atau lurah.
- Peng ie saka* (Bhs. Aceh) : 'uang air gula', uang bantuan tali asih, bantuan sekedarnya.
- Tuha Peut* (Bhs. Aceh) : suatu badan kelengkapan Gampong dan Mukim yang terdiri dari unsur Pemerintah, unsur Agama, unsur Pimpinan Adat, unsur Cerdik Pandai yang berada di Gampong dan Mukim yang berfungsi memberi nasehat kepada Keuchik dan Imum Mukim dalam bidang Pemerintahan, Hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa di Gampong dan Mukim.

Tuha Lapan (Bhs. Aceh) : suatu Badan Kelengkapan Gampong dan Mukim yang terdiri dari unsur Pemerintah, unsur Agama, unsur Pimpinan Adat, Pemuka Masyarakat, unsur cerdik pandai, unsur pemuda/wanita dan unsur Kolompok Organisasi Masyarakat.

AIA	: Akademi Ilmu Agama
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APCM	: Aceh Peace Consultative Management
APBK	: Anggaran Pendapatan Belanja dan Kabupaten/Kota
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BEM	: Badan Eksekutif Mahasiswa
BI	: Bukit Indah
BRR	: Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
CPCRS	: Centre for Peace and Conflict Resolution Studies
DI/TII	: Daerah Istimewa/ Tentara Islam Indonesia
Dirjen	: Direktorat Jenderal
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRK	: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
FE	: Fakultas Ekonomi
FGD	: Focus Group of Discussion
FH	: Fakultas Hukum
FISIP	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
FKIP	: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
GAM	: Gerakan Aceh Merdeka
GOR	: Gedung Olah Raga
HGB	: Hak Guna Bangunan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
KIAP	: Kawasan Industri Aceh Pasai

Km	: Kilometer
KKN PPM	: Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat
KPA	: Kantor Pusat Administrasi
KPTCTNR	: Koperasi Pertanian Terpadu Tjot Tgk. Nie Reuleut
LNG	: Liquefied Natural Gas
MoU	: Memorandum of Understanding
MTQ	: Musabaqah Tilawatil Qur'an
NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam
OTK	: Orang Tidak Dikenal
PDPK	: Pendidikan Diploma Kesekretariatan
PERTIM	: Perguruan Tinggi Islam Malikussaleh
PSPD	: Program Studi Pendidikan Dokter
PLPIIS	: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial
PMD	: Pembangunan Masyarakat Desa (dikenal juga dengan istilah Dana Bangdes (pembangunan desa)
PN	: Pengadilan Negeri
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PT	: Perguruan Tinggi
PTN	: Perguruan Tinggi Negeri
PTS	: Perguruan Tinggi Swasta
RI	: Republik Indonesia
RKU	: Ruang Kuliah Umum
RUTRK/D	: Rencana Umum Tata Ruang Kota/Daerah
RT	: Rumah Tangga
RTH	: Ruang Terbuka Hijau
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
STAN	: Sekolah Tinggi Administrasi Negara
TA	: Tahun Akademik

TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
TPA	:	Taman Pendidikan Agama
TTPKR	:	Tim Teknis Pembangunan Kampus Reuleut
UII	:	Universitas Islam Indonesia
Unimal	:	Universitas Malikussaleh
Unsyiah	:	Universitas Syah Kuala
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis
YPTI	:	Yayasan Perguruan Tinggi Islam

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Ucapan Terima Kasih	viii
Pengantar Editor	xiii
Daftar Istilah, Akronim Dan Singkatan	xx
Daftar Isi.....	xxiv
Daftar Tabel.....	xxvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Pertanyaan Penelitian	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB 2. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL	10
2.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2. Teori Hubungan Sosial.....	17
2.3. Teori Konflik.....	21
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1. Metode dan Pendekatan.....	28
3.2. Data dan Sumber Data	29
3.3. Prosedur Pengumpulan Data.....	31
3.4. Pengecekan Keabsahan Data.....	33
BAB 4. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN SEJARAH UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.....	35
4.1. Gambaran Umum	35
4.2. Kampus Utama Reuleut.....	36
4.2.1. Lokasi	36
4.2.2. Lahan.....	37
4.2.3. Prasarana yang tersedia.....	39
4.3. Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe	43
4.3.1. Lokasi	43
4.3.2. Lahan	44
4.3.3. Prasarana yang tersedia	45
4.4. Sejarah Perkembangan Universitas Malikussaleh (1969-2000)	49
4.5. Pengerian Universitas Malikussaleh (2000- 2001)	55

BAB 5. INTERAKSI, KONFLIK DAN AKULTURASI ANTARA ORANG KAMPUS DENGAN ORANG KAMPUNG.....	62
5.1. Interaksi Sosial.....	62
5.2. Mengamati Interaksi Sosial antara Orang Kampus Unimal dengan Orang Kampung Reuleut.....	64
5.2.1. (dari) Kerjasama mengarah pada Konflik diakhiri dengan Kompromi.....	64
5.2.2. Toleransi dengan potensi terjadinya Konflik: Interaksi Sosial yang terjalin antara Orang Kampus dengan Orang Kampung sekitar Kampung Bukit Indah.....	101
5.3. Akulturasi antara Orang Kampus dengan Orang Kampung	107
BAB 6. RESOLUSI DAN ESKALASI KONFLIK.....	114
6.1. Pemberian <i>Peng le Saka</i> dan Peluang Studi serta Bekerja di Lingkungan Kampus	115
6.2. Penyelesaian Konflik Melalui Jalur Litigasi (Proses Peradilan).....	135
6.3. Menempuh Jalur Politik	137
6.4. Musyawarah (Membuka Forum Dialog).....	140
BAB 7. PENUTUP.....	152
7.1. Kesimpulan	152
7.2. Rekomendasi	155
KEPUSTAKAAN	160
A. Buku dan Jurnal.	160
B. Kamus dan Kepustakaan Lainnya.....	162
C. Surat Kabar, Majalah, Internet	163

Daftar Tabel

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1.	Perbandingan Antara Teori Konsensus dengan Teori Konflik	23
Tabel 2.2.	Potensi Konflik dan Alternatif Resolusi Konflik (Kedamaian).....	24
Tabel 4.1.	Jumlah Mahasiswa Unimal Menurut Fakultas dan Program Studi.....	60
Tabel 6.1.	Jumlah Dosen dan Pegawai Universitas Malikussaleh yang berasal dari Kampung Sekitar Kampus	128
Tabel 6.2.	Jumlah Pegawai Honorer Universitas Malikussaleh yang berasal dari Kampung Sekitar Kampus	131

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Interaksi sosial merupakan bentuk umum dari suatu proses sosial. Interaksi sosial sendiri dipahami sebagai hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.¹ Secara teoritis, terdapat 2 (dua) syarat utama untuk dapat terjadinya interaksi sosial yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Terjadinya suatu kontak sosial tidaklah semata-mata tergantung dari tindakan, tetapi juga tergantung dari kepada adanya tanggapan terhadap tindakan tersebut. Sedangkan aspek terpenting dari komunikasi adalah bila seseorang memberikan tafsiran pada sesuatu atau perikelakuan orang lain.²

Membicarakan interaksi sosial dalam konteks kehadiran sebuah institusi pendidikan, semisal sebuah kampus dari sebuah universitas, biasanya memberikan pengaruh dan makna positif bagi masyarakat sekitarnya. Ada banyak ekspresi suka-cita atas kehadiran lembaga pendidikan yang senantiasa dilihat dari sudut positif. Namun, kehadiran sebuah kampus di tengah-tengah masyarakat pedesaan yang masih guyub dengan tradisi dan budaya mereka sendiri, terkadang dipandang sebagai sebuah ancaman terhadap nilai-nilai keguyuban tersebut.

Penelitian ini akan mencoba memahami persoalan hubungan sosial di dua lokasi kampus Universitas Malikussaleh yang

¹ John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, *Cultural Sociology, a revision of an Introduction to Sociology*, New York: The Macmillan Company, 1954, hlm 489 sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1982, hlm. 61.

² J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, (eds), *Sosiologi: Teks Pengantar dan Penerapan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 20.

berdampingan dengan masyarakat: kampus Reuleut dan kampus Bukit Indah. Pada lokasi pertama peneliti akan mencoba memahami persoalan yang timbul antara masyarakat Reuleut Timu, Reuleut Barat, Paya Gaboh dan Cot Keumuneng di Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara yang bergesekan dengan komunitas kampus Universitas Malikussaleh (selanjutnya disebut Unimal). Pada lokasi kedua, peneliti akan mencoba melihat situasi dan memahami respon masyarakat Blang Pulo, Paloh Barat, Cot Trieng dan Padang Sakti atas kehadiran kampus Unimal.

Sebuah universitas memiliki banyak agen perubahan, ada dosen sebagai tenaga pendidik atau peneliti, ada mahasiswa yang senantiasa membuat perubahan-perubahan pemikiran dan mencoba metode-metode dan gaya hidup baru, ada tenaga administrasi dan teknis yang memiliki kemampuan manajerial dan teknikal yang khusus dalam mendukung proses belajar-mengajar dan mengelola keseluruhan wilayah kampus. Ketiga komponen ini merupakan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang bisa membawa perubahan suasana dan kemajuan-kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, harus juga disadari bahwa kemajuan yang dipersepsikan oleh kalangan kampus belum tentu akan sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat sekitarnya. Kampus, di samping memiliki agen untuk perubahan —dan di lain sisi juga bisa dipersepsikan sebagai sebuah 'kemunduran' atau 'kehancuran nilai-nilai luhur' oleh kalangan dengan perspektif yang berbeda— tentunya juga memiliki kekuatan-kekuatan yang bisa mempengaruhi banyak hal, bahkan hingga ke pengaruh yang buruk.

Mahasiswa adalah pihak yang paling banyak bersentuhan atau berhubungan dengan masyarakat atau warga sekitar kampus karena mereka umumnya tinggal di rumah kontrakan atau kos (*indekost*). Kos mahasiswa ini merupakan pertemuan fisik paling umum dalam hubungan sosial warga sekitar kampus dengan pihak universitas. Sementara dosen memiliki intensitas yang lebih rendah dalam hubungannya dengan warga masyarakat sekitar kampus. Kegiatan-kegiatan pengabdian dosen kepada masyarakat yang merupakan salah

satu dharma dari tridharma perguruan tinggi,³ mengharuskan dosen berhubungan secara sosial dengan masyarakat. Karyawan administrasi, teknisi, pustakawan, petugas jaringan komputer dan lain-lain adalah kalangan yang paling sedikit memiliki intensitas pertemuan fisik dengan warga *gampong*⁴ sekitar kampus.

Selama berdirinya Universitas Malikussaleh, telah diidentifikasi bahwa pada periode terakhir inilah (2001-2012) terdapat konflik⁵ dengan masyarakat atau warga *gampong* sekitar kampus⁶. Namun demikian, konflik-konflik kecil tetap terus terjadi sepanjang sejarah perkembangan kampus ini.⁷ Nuansa konflik antara komunitas kampus Unimal dengan masyarakat *gampong* sekitar sebenarnya merupakan ekstensi dari konflik vertikal dan horizontal yang sudah ada di Aceh sejak lama, antara pemerintah (pusat dan daerah) dengan Gerakan

³ Tridharma Perguruan Tinggi adalah tiga fungsi utama perguruan tinggi yang terdiri dari (1) pendidikan dan pengajaran; (2) penelitian; dan (3) pengabdian kepada masyarakat.

⁴ *Gampong* atau *kampung* (Bhs. Aceh) adalah komunitas rural (pedesaan) yang umumnya masih sarat dengan nilai-nilai tradisi; istilah ini berlawanan dengan kota atau masyarakat urban.

⁵ Konflik disini dimaknai sebagai hubungan yang bertentangan antara dua orang/kelompok atau lebih yang masing-masingnya berupaya untuk mencapai tujuannya sendiri. Para pihak yang terlibat memandang bahwa ada ancaman terhadap kepentingan mereka maupun kebutuhan mereka. Lebih lanjut, penulis juga memahami konflik dalam konteks ini sebagai *a disagreement through wich the parties involved perceive a threat to their needs, interest or concerns*. Disini kita menemukan 4 (empat) kata kunci yang merujuk pada konflik, yaitu *disagreement, parties involved, perceived threat dan needs, interest or concerns* – (lihat lebih lanjut pada <http://www.ohrd.wisc.edu.html>).

⁶ *Harian Aceh*, 15 November 2011; *Serambi Indonesia*, 15 November 2011; *Rakyat Aceh*, 17 November 2011. Lihat juga, <http://www.fkmaceh.blogspot.com/2011/10/1001-kisah-di-unimal.html>, dan juga *Aceh Traffict*, 3 November 2011.

⁷ Lihat lebih lanjut *Rakyat Aceh*, 7 Oktober 2008; *Bisnis Indonesia*, 08 Juni 2009; *Harian Aceh*, 14 Juli 2011; *Serambi Indonesia*, 2 November 2011; *Waspada*, 2 November 2011; *Serambi Indonesia*, 3 November 2011; *Harian Aceh*, 3 November 2011; *Serambi Indonesia*, 15 November 2011; *Harian Aceh*, 15 November 2011; *Rakyat Aceh*, 17 November 2011. Lihat juga *Aceh Traffict*, <http://acehtraffict.com>, 3 November 2011.

Aceh Merdeka. Untuk memahami latar-belakang sosial dan budaya dari konflik ini, kita mestilah melihat ke sejarah konflik Aceh yang sudah terjadi sejak 1946 hingga 2005.⁸

Konflik antara warga gampong sekitar kampus dengan pihak Unimal telah berlangsung dan berkelindan dengan konflik yang lebih luas, konflik Aceh yang sudah berlangsung cukup lama sejak tahun 1953 yang telah menempatkan Aceh ke dalam wilayah yang memberontak terhadap Pemerintah Pusat. Konflik ini kemudian menghasilkan kesepakatan damai hingga lahirnya Kampus Darussalam di Banda Aceh dimana Universitas Syiah Kuala dan IAIN Ar-Raniry berdiri. Selanjutnya, konflik Aceh muncul lagi pada tahun 1976 dimana Gerakan Aceh Merdeka menyatakan kemerdekaannya dan keinginan untuk memisahkan diri dengan Republik Indonesia. Konflik tahun 1976 ini menghangat hingga tahun 1979. Tak lama setelah itu, pada tahun 2008, setelah Indonesia mengalami perubahan politik dimana jatuhnya kekuasaan Orde Baru, maka Gerakan Aceh Merdeka muncul kembali dan menantang hegemoni Indonesia hingga tahun 2005.

Pada 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berhasil menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepakatan Damai, setelah hampir 30 tahun terjebak dalam konflik bersenjata yang berkepanjangan. Kesepakatan damai ini menjadi modal awal bagi terciptanya kondisi sosial politik baru di Aceh pasca konflik dan sebagai prasyarat untuk melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah setelah dihantam bencana tsunami pada 26 Desember 2004.⁹ Beberapa tahapan dalam proses damai berhasil dilalui dengan hasil yang secara umum cukup positif, bahkan di luar dugaan; demobilisasi GAM dan *decommissioning* senjatanya; *redeployment* TNI/POLRI non-organik; amnesti terhadap tahanan

⁸ Diskusi peneliti dengan Al Chaidar —salah seorang dosen di FISIP Unimal dan saat ini juga sedang menyusun buku Sejarah Universitas Malikussaleh bersama Prof. A. Hadi Arifin— didalam *draft* buku ini juga mencantumkan kondisi-kondisi perkembangan Unimal dari sejak pendiriannya di musim panas tahun 1969.

⁹ Tentang bencana tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004, lihat, Apridar, *Tsunami Aceh: Azab atau Bencana?*, Jakarta: Penerbit Al-Kautsar, 2005.

politik GAM; reintegrasi mantan anggota GAM; disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan Pemilihan Kepala Pemerintahan Aceh dan pilkada di tingkat kabupaten dan kota di seluruh Aceh. Kesemuanya merupakan turunan dari kesepakatan damai yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, yang pada akhirnya memunculkan masalah-masalah baru atau menimbulkan pergeseran konflik.

Terpilihnya Kepala Pemerintahan Aceh yang baru hasil dari Pemilihan Kepala Daerah tanggal 11 Desember 2006, diharapkan dapat membawa perubahan yang strategis, taktis dan berorientasi pada penyelesaian problema kehidupan yang melilit masyarakat Aceh sekarang dan di masa depan. Beberapa potensi konflik masih menjadi ancaman, terutama berkenaan dengan beberapa masalah yang berhubungan dengan warisan konflik di masa lalu. Sementara itu, masalah kemiskinan, tingginya angka pengangguran, terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan, ketrampilan yang tidak memadai, serta buruknya kualitas sarana dan prasarana publik sebagai dampak dari konflik dan tsunami, merupakan tantangan terberat bagi kepala pemerintahan yang baru. Di sisi lain, harapan yang disandangkan pada pemerintahan baru dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias sebagai lembaga yang mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pembangunan pasca tsunami di Aceh, sangatlah besar. Masyarakat korban konflik dan korban tsunami mengharapkan kedua institusi ini mampu membuat perencanaan dan menemukan formula yang tepat dalam upaya pemanfaatan potensi-potensi yang ada untuk menunjang percepatan perbaikan kehidupan sosial ekonomi di Nanggroe Aceh Darussalam.

Banyaknya masalah yang membayangi dan besarnya harapan yang digantungkan masyarakat, jelas memerlukan dukungan energi dan pikiran ekstra dari segenap lapisan masyarakat, terutama untuk memacu pembangunan daerah untuk menghindari dari ketertinggalan Aceh dalam berbagai aspek pembangunan dengan daerah lain, baik pada tingkat nasional, regional bahkan internasional. Aceh memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk membangun kembali berbagai infrastruktur yang rusak dan hancur akibat tsunami pada 26 Desember 2004. Keberhasilan perundingan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada 15 Agustus 2005 yang telah mengakhiri konflik bersenjata di wilayah

tersebut juga menjadi faktor pendorong ke arah peningkatan usaha pembangunan kembali Aceh dengan lebih meyakinkan.

Setelah terjadinya perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, konflik antara Unimal dengan warga masyarakat di sekitar kampus justru semakin parah. Dalam artian, banyak terjadi kasus-kasus yang melibatkan masyarakat sekitar kampus Unimal yang menimbulkan gangguan dalam penyelenggaraan pendidikan, diantaranya adalah penyerobotan tanah, konflik agraria, masyarakat menggembalakan sapi dan kambingnya ke dalam kampus, pencurian-pencurian peralatan Unimal, penerabasan pagar pembatas, konflik masalah warung dan lapak jualan dan masalah-masalah lainnya. Bahkan terakhir, warga menuntut pembangunan gedung-gedung supaya dibangun di wilayah tertentu.¹⁰

Studi ini akan memberikan gambaran tentang latar belakang interaksi sosial yang ada diantara warga kampus Unimal dengan warga *gampong*, kemudian akan mengidentifikasi ekspresi perilaku serta potensi konflik yang ada. Lebih lanjut, tulisan ini juga akan menghadirkan resolusi konflik. Jalan keluar dari konflik, berdasarkan data awal dalam penelitian ini, menjadi banyak cara. Respon yang diberikan pihak Unimal, misalnya, akan bersifat akomodatif. Konflik atau pertentangan antar individu atau kelompok baik yang terlihat dengan jelas dan terbuka maupun yang tidak akan bermuara pada beberapa kemungkinan akomodatif yang akan diambil sebagai solusi keluar dari lingkaran konflik. Akomodasi adalah usaha untuk mencegah, mengurangi, menghindari, dan menghentikan pertentangan. Akomodasi dapat dilakukan dengan cara-cara: (1) Mediasi (*mediation*) yaitu penyelesaian pertikaian dengan menggunakan pihak ketiga sebagai wasit yang netral; (2) Arbitrasi (*arbitration*) yaitu penyelesaian pertikaian dengan menggunakan pihak ketiga yang statusnya lebih tinggi; (3) Rekonsiliasi atau Konsiliasi (*consiliation/reconsilitation*) yaitu mempertemukan pihak yang berselisih untuk mencapai suatu persetujuan bersama; (4) Toleransi (*tolerance*) yaitu saling menyadari untuk menghindari pertikaian; (5) *Stalemate*: menyadari akan adanya kekuatan yang seimbang sehingga

¹⁰ *Waspada*, 2 November 2011; *Harian Aceh*, 3 November 2011; *Waspada*, 2 November 2011; *Serambi Indonesia*, 2 November 2011. Lihat juga acehtraffict.com, 3 November 2011.

kalau diteruskan tidak akan ada yang menang dan yang kalah, dan terakhir (6) adjudikasi (*adjudication*) yaitu upaya penyelesaian perkara melalui pengadilan. Pihak Unimal umumnya lebih memilih cara terakhir dalam menyelesaikan konflik dengan masyarakat sekitar kampus; baik di Reuleut maupun di Blang Pulo.

Pemaparan dalam tulisan ini setelah menampilkan latar belakang permasalahan yang muncul sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, kemudian akan menghadirkan kerangka teoritis dan konseptual yang mendasari studi ini, dilanjutkan dengan memberikan gambaran atas metodologi dan lokasi penelitian. Hasil studi ini yang menunjukkan hubungan sosial Unimal dan akulturasi dengan masyarakat sekitar akan dihadirkan kemudian yang dilanjutkan dengan pembahasan tentang konflik, resolusi konflik serta eskalasi konflik.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini akan melihat bagaimana persepsi masyarakat atau warga *gampong-gampong* sekitar kampus Universitas Malikussaleh (khususnya Kampus Reuleut dan Kampus Bukit Indah) terhadap kehidupan mahasiswa, dosen dan karyawan. Penelitian ini juga akan mengumpulkan data-data dari pihak kampus sendiri khususnya untuk tema-tema atau topik yang menjadi masalah dalam hubungan sosial antara warga masyarakat dengan komunitas kampus.

Hubungan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu proses yang asosiatif dan disosiatif. Hubungan sosial asosiatif merupakan hubungan yang bersifat positif, artinya hubungan ini dapat mempererat atau memperkuat jalinan atau solidaritas kelompok. Adapun hubungan sosial disosiatif merupakan hubungan yang bersifat negatif, artinya hubungan ini dapat merenggangkan atau menggoyahkan jalinan atau solidaritas kelompok yang telah terbangun. Pertanyaan penting bagi peneliti adalah hubungan sosial seperti apakah yang terdapat antara komunitas Unimal ketika bersentuhan dengan warga gampong di sekitar kampus?

Beberapa pertanyaan yang dicoba untuk dibahas dalam studi ini adalah: (1) bagaimana bentuk hubungan sosial antara dosen,

mahasiswa —dan juga karyawan— di berbagai kampus Unimal dengan warga *gampong-gampong* sekitarnya; (2) apakah terjadi akulturasi¹¹ dalam hubungan tersebut. (3) Bagaimanakah benturan antara aktor-aktor dan kepentingan apakah yang menjadi pemicu dan inti masalah sebenarnya? (4) Apakah akar persoalan yang menyebabkan terjadinya konflik dan (5) bagaimana persepsi civitas akademika Unimal terhadap warga *gampong* sekitar Unimal dan begitu juga sebaliknya. Penelitian ini juga akan melihat tentang (6) peranan Pemerintah Daerah terhadap konflik yang muncul serta (7) mencari model resolusi konflik dalam berbagai kasus yang muncul di berbagai kampus Unimal dalam hubungannya dengan warga sekitar.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Seiring dengan fokus penelitian sebagaimana disampaikan di atas, maka penelitian tentang hubungan sosial, akulturasi dan konflik antara warga masyarakat sekitar kampus Unimal dengan komunitas kampus bertujuan untuk: (1) menyelesaikan masalah konflik antara warga masyarakat dengan komunitas kampus yang sudah berlangsung selama dua dekade; (2) mencapai target agar konflik bisa diubah menjadi kerja-sama antara warga *gampong* dan komunitas kampus dalam penelitian ini; (3) menemukan metode atau menyempurnakan metode penelitian yang sudah ada sebagai upaya yang akan ditempuh peneliti untuk memecahkan masalah penelitian.

Penelitian ini diharapkan akan bisa menghasilkan dua hal: (1) menemukan konsep-konsep dan teori baru tentang jenis hubungan sosial, akulturasi dan konflik antara masyarakat *gampong* dengan komunitas dengan latar-belakang yang tidak jauh berbeda. Peneliti berharap bisa memberikan kontribusi ilmiah melalui penelitian ini dalam bentuk laporan penelitian, referensi atau tulisan jurnal berkala ilmiah kepada pengembangan konsep dan teori dalam rumpun ilmu-ilmu sosial. (2) Peneliti berharap bisa menemukan solusi atas konflik yang terjadi antara masyarakat *gampong* dengan komunitas akademisi sehingga bisa memberikan saran atau rekomendasi kepada pihak

¹¹ Akulturasi adalah adanya dua kelompok yang berbeda budaya saling bertemu dan melakukan kontak sosial yang intensif sehingga terjadi pembaharuan tanpa menghilangkan budaya aslinya.

manajemen Universitas Malikussaleh untuk mengatasi dan mencegah masalah yang sering muncul berulang kali.

BAB 2

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini diinspirasi oleh hasil penelitian M. Bambang Pranowo (1988) yang berjudul "*Orang Kampus dan Orang Kampung*".¹² Penelitian M. Bambang Pranowo ini mengungkapkan adanya konflik dalam interaksi antara komunitas Universitas Syiah Kuala dengan masyarakat di sekitar kampus tersebut. Hubungan sosial menjadi sangat krusial antara komunitas yang berbeda tradisi dan pola pikir. Selo Soemardjan¹³ dalam pengantar buku ini menyampaikan bahwa "Di dalam kebutuhan manusia sebagai anggota suatu masyarakat maka hubungan dengan anggota lain dalam masyarakat merupakan suatu keperluan yang tidak dapat diabaikan". Lebih lanjut disampaikan bahwa,

"Dengan kehidupan bermasyarakat manusia dapat saling belajar, saling tiru-meniru, saling isi-mengisi dan saling kembang mengembangkan pengertian dan kemampuannya di bidang intelektual dan spiritual. Proses sosial yang terjadi karena hubungan antarmanusia itu menimbulkan sesuatu kekuatan baru, kekuatan sosial itu dapat bersifat mempererat dan memperkuat hubungan antarmanusia seperti misalnya kekuatan kasih sayang, cinta, saling membutuhkan, dan saling menghargai dan saling menguntungkan-kan.

Biasanya kekuatan yang bersifat asosiatif itu berpangkal pada suatu hal yang bersama-sama dimiliki oleh mereka yang berhubungan seperti persamaan keturunan, persamaan bahasa, persamaan

¹² M. Bambang Pranowo, "*Orang Kampus dan Orang Kampung*", dalam M. Bambang Pranowo, (et al.), *Steriotip Etnik, Asimilasi dan Integrasi Sosial*, Jakarta: Pustaka Grafika Kita, 1988, hlm. 11-76.

¹³ Selo Soemardjan dalam M. Bambang Pranowo, (et al.), *Steriotip Etnik, Asimilasi dan Integrasi Sosial*, Jakarta: Pustaka Grafika Kita, 1988, hlm. 2.

kebudayaan, persamaan profesi atau persamaan ras yang tampak pada ciri tubuh alamiah.

Sebaiknya proses dapat juga menimbulkan kekuatan yang saling memisahkan, menjauhkan dan saling tolak-menolak, misalnya saja kekuatan yang timbul dari rasa benci, rasa curiga, rasa unggul diri. Kekuatan yang diassosiatif itu dapat juga timbul karena orang yang saling berhubungan itu saling berebutan barang atau hal lain yang sama-sama dibutuhkan, sedang tersedianya terbatas. Kekuatan yang demikian itu dapat berwujud pacuan atau saingan yang mungkin dapat disalurkan dan diatur sehingga dapat menjadi kekuatan yang konstruktif. Tetapi kekuatan dissosiatif dapat berakibat destruktif apabila misalnya saja digunakan untuk saling merusak atau malahan saling membunuh.”

Studi yang dilakukan oleh M. Bambang Pranowo ini dirangkum dalam sebuah buku bersama 4 (empat) orang penulis lainnya yang menjadi bagian dari hasil penelitian Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (PLPIIS) Banda Aceh. 5 (lima) tulisan lepas ini berupaya untuk memotret kerumitan yang ada di masyarakat Indonesia yang pluralistik, kerumitan ini masih ditambah pergeseran nilai-nilai tradisional ke modern, campur aduknya corak kehidupan kota dengan desa. Tiga tulisan pertama membeberkan interaksi sosial orang kampus, orang asing, dan masyarakat kompleks perumahan industri, ketiganya dengan masyarakat kampung di sekitarnya. Ini semua terjadi di Aceh. Benang merah dalam penelitian PLPIIS ini adalah persoalan sulitnya menciptakan akomodasi. Misalnya, pembangunan kampus Darussalam. Ini sebenarnya cita-cita pimpinan DI/TII Daud Beureuh. Tapi, begitu kampus Darussalam Banda Aceh diresmikan pada 1959, persoalan muncul. Dosen dan mahasiswa —tentunya, hampir semua pendatang— dituduh mau mengubah tatanan lama di situ, termasuk tradisi keagamaan. Tembok prasangka juga terbangun oleh pandangan stereotip, baik orang Aceh maupun orang asing. Tenaga asing ini adalah pengajar di Darussalam, dan pekerja di kawasan industri.¹⁴

Studi yang dilakukan oleh M. Bambang Pranowo pada tahun 1988 ini beranjak pada pemetaan bahwa pada saat itu —studi tentang

¹⁴ Lihat rehal atas buku ini yang ditulis oleh Hedy Susanto, dalam *Tempo*, 9 Desember 1989.

interaksi sosial antara suatu kelompok masyarakat “elite” dengan kelompok masyarakat biasa di sekitarnya belum begitu mengundang perhatian para sarjana ilmu sosial di Indonesia— jika dibandingkan dengan studi tentang interaksi sosial antar kelompok masyarakat yang berlainan dari segi suku bangsa atau aliran agama.

Studi yang dilakukan oleh M. Bambang Pranowo ini bertujuan untuk (1) memperoleh pengetahuan tentang interaksi sosial yang berlangsung antara masyarakat Kampus Darussalam dengan masyarakat gampong di sekitarnya, serta (2) mengetahui persepsi timbal-balik yang timbul dari interaksi sosial tersebut. Studi ini merupakan analisa historis dan sosiologis mengenai hubungan sosial yang berlangsung antara dua kelompok masyarakat yang dalam banyak hal sangat berbeda terutama dari segi latar belakang pendidikan, mata pencaharian, pola tingkah laku dan status sosial.

Dalam konteks konflik di Aceh, telah banyak studi yang dilakukan – bukan hanya oleh orang Aceh tetapi juga penulis luar Aceh maupun luar negeri. Hal ini menunjukkan tingginya kepedulian terhadap Aceh di satu sisi, dan di sisi lain Aceh adalah merupakan wilayah yang sangat luas untuk dilakukannya berbagai studi dalam berbagai konteks. Untuk kepentingan studi ini dan melalui berbagai sumber yang dapat diakses penulis menemukan, di antaranya: tulisan Amrizal J. Prang¹⁵ yang membahas tentang fenomena politik dan hukum di Aceh pada era konflik dan damai. Wiratmadinata¹⁶ menganalisis tentang proses perdamaian Aceh dalam perspektif orang Aceh. Fachry Ali menulis tentang peran Jusuf Kalla —Wakil Presiden RI ketika itu— dalam menyelesaikan konflik Aceh yang berakhir dengan ditanda-tanganinya perjanjian damai 2005.¹⁷

Studi tentang perempuan dan konflik Aceh ditulis oleh Zubaidah, berjudul "Peran Organisasi Perempuan Aceh dalam Proses

¹⁵ Lihat, Amrizal J. Prang, *Aceh dari Konflik ke Damai*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008.

¹⁶ Lihat, Wiratmadinata, *An Evolving Model for Conflict Transformation and Peace Building in Aceh (Analysis of The Aceh Peace Process from an Achehnese Perspective)*, Banda Aceh: AJRC, 2008.

¹⁷ Lihat, Fachry Ali dan Bachtiar Effendi, *Kalla dan Perdamaian Aceh*, Jakarta: LSPEU Indonesia, 2009.

Penyelesaian Konflik Bersenjata di Aceh"¹⁸ mengungkapkan tentang konflik Aceh dari perspektif yang berbeda, dari kacamata perempuan Aceh. Selain itu, tulisan Karim D. Crow (2000), yang berjudul *Aceh — The 'Special Territory' in North Sumatra: A Self-Fulfilling Promise?*¹⁹ mencatat banyak peristiwa konflik di Aceh dan bagaimana kalangan mahasiswa dari kampus merespon konflik tersebut karena konflik vertikal juga terkadang menyeruak masuk ke kampus dan mengakibatkan kebencian kalangan masyarakat sekitar terhadap kampus. Gerakan-gerakan masyarakat sipil dan juga gerakan-gerakan mahasiswa berusaha mencari solusi atas konflik tersebut yang bahkan mengenai dunia kampus dimana sering terjadinya pembunuhan terhadap dosen dan bahkan rektor di Aceh.

Studi tentang konflik kekerasan di Aceh juga dituliskan oleh Elizabeth F. Drexler ²⁰ dalam studinya dia menyampaikan tentang sejarah bayangan dan para pelaku kekerasan yang muncul secara antagonis. Elizabeth menyebutkan bahwa:

"...through an analysis of violent conflict in Aceh, Indonesia, this article develops a series of principles for analyzing conflicts that appear to interactable, noting how certain conflict narratives and interventions based on the participate in extending conflict. The claims that separatist called "GAM" exist is treated not as hixtorical fact but as an inscrutable assertion that retrojects and projects the group's continuous existence, allowing political violence to be repeatedly reconstructed through convoluted collusions between antagonist whose own power is each predicated on the existence of the other".²¹

¹⁸ Lihat, Zubaidah, *Peran Organisasi Perempuan Aceh dalam Proses Penyelesaian Konflik Bersenjata*, Jakarta: Program Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003.

¹⁹ Karim D. Crow "Aceh—The 'Special Territory' in North Sumatra: A Self-Fulfilling Promise?", dalam *Journal of Muslim Minority Affairs*, vol. 20, No. 1, 2000, hlm. 91-99.

²⁰ Elizabeth F. Drexler, "The Social Life of Conflict Narratives: Violent Antagonists, Imagined Histories, and Foreclosed Future in Aceh, Indonesia", dalam *Anthropological Quarterly*, Volume 80, Number 4, Fall 2007, Michigan: Michigan State University, hlm. 961 – 995.

²¹ Ibid, hlm. 961.

Dalam konteks situasi yang lebih luas, John R Bowen (2000)²² dalam penelitiannya yang berjudul *Consensus and Suspicion: Judicial Reasoning and Social Change in an Indonesian Society 1960-1994* menulis tentang hakim yang dipengaruhi oleh norma-norma hukum yang saling berbenturan. Bowen mencatat sikap yang diperlihatkan masyarakat dan hakim sangat berbeda dalam menghadapi kasus pertikaian yang melibatkan institusi negara. Universitas Malikussaleh sebagai institusi negara dalam banyak hal memang lebih memilih jalur hukum untuk menyelesaikan konflik dengan warga sekitar. Namun, memang selalu ada beberapa solusi untuk keluar dari konflik di Aceh, termasuk juga yang dialami oleh lembaga-lembaga negara seperti universitas negeri.

Lukman Thaib (2000) dalam hasil penelitiannya yang berjudul *Aceh's Case: Possible Solution to a Festering Conflict*, mengungkapkan akar sejarah konflik dan ekstensi konflik ke berbagai segi kehidupan di Aceh, termasuk juga ke dunia kampus.²³ Lebih khusus, studi tentang konflik dan Perguruan Tinggi (PT) – yang menjadi fokus dalam tulisan ini, diantaranya dilakukan oleh Sumardjo dan Aman Wirakartakusumah (2009)²⁴ – studi ini membahas tentang peran Perguruan Tinggi dalam mewujudkan dinamika kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Studi ini menunjukkan bahwa secara sosiologis versi Gillin dan Gillin²⁵, perdamaian (*processes of association*) dan *konflik sosial (processes of dissociation)* dapat diibaratkan dua sisi dari sebuah mata uang. Manakala potensi konflik tidak terkelola maka berbagai ancaman dan kekhawatiran muncul sebagai fenomena sosial yang mengemuka

²² John R Bowen, "Consensus and Suspicion: Judicial Reasoning and Social Change in an Indonesian Society 1960-1994", dalam *Law and Society Review*, vol 34, No. 1, 2000, hlm. 97-127.

²³ Lukman Thaib, "Aceh's Case: Possible Solution to a Festering Conflict", dalam *Journal of Muslim Minority Affairs*, vol. 20, No. 1, 2000, hlm. 105-110.

²⁴ Sumardjo dan Aman Wirakartakusumah, "Peran Perguruan Tinggi Mewujudkan Dinamika Kedamaian dalam Kehidupan Masyarakat", dalam *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*, Vol. 03, No. 03, Desember 2009, hlm. 299-314.

²⁵ John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, *Cultural Sociology, a Revision of an Introduction to Sociology*, New York: The Macmillan Company, 1954, hlm 489.

dalam suatu kehidupan manusia. Di sisi lain, belum banyak pihak dalam kehidupan masyarakat yang peduli terhadap upaya pengelolaan konflik secara sadar dan terencana, bahkan di dunia pendidikan implementasinya masih merupakan kelangkaan. Tulisan ini lebih lanjut menangkap kesan bahwa pengelolaan potensi konflik merupakan sebuah ancaman namun tabu untuk dibicarakan. Pada hal realitasnya menunjukkan bahwa kemampuan mengelola konflik sosial dan terwujudnya kedamaian menjadi kebutuhan riil bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Akibatnya terjadi keterlambatan dalam upaya preventif atau pencegahan terjadinya permusuhan yang berdampak pada situasi yang sangat merugikan bagi kehidupan manusia.

Studi Sumardjo ini menyampaikan bahwa dalam upaya mewujudkan kehidupan damai, peran PT yang utama adalah menggali dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang unggul dalam kehidupan masyarakat melalui pendidikan bagi mahasiswanya maupun kiprah tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dalam kehidupan akademis maupun dalam praktek magang atau kuliah kerja nyata di masyarakat. Studi lain tentang konflik antara kampus perguruan tinggi atau universitas dengan masyarakat, dilakukan oleh Sumardjo (*et al.*) (2005)²⁶ hasilnya menemukan adanya kelompok-kelompok keagamaan yang berpotensi menjadi sumber konflik dalam kehidupan kampus.

Studi tentang hubungan sosial dan akulturasi lainnya dihasilkan oleh Rajab Ali (2010)²⁷ menunjukkan bahwa kampus sebagai tempat peradaban yang multietnik berpotensi melahirkan konflik antaretnik. Penelitian ini sendiri didorong oleh maraknya konflik yang ditengarai bernuansa etnik yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Haluoleo (Unhalu). Studi ini melihat secara khusus pada identitas etnik dan prasangka etnik salah satu etnik asli Sulawesi Tenggara dan sebagai etnik Pendatang di Kota Kendari, yaitu etnik Muna, terhadap

²⁶ Lihat, Sumardjo (*et al.*), "Kajian Kelompok Keagamaan di Sebelas Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta", Bogor: Kerjasama LP IPB dengan Departemen Agama RI, 2005.

²⁷ Rajab Ali (*et al.*). "Hubungan Antara Identitas Etnik Dengan Prasangka Terhadap Etnik Tolaki Pada Mahasiswa Muna Di Universitas Haluoleo Kendari-Sulawesi Tenggara", dalam *Jurnal Psikologi Undip*, Semarang, Vol. 7, No. 1, April 2010.

etnik asli Kota Kendari yaitu etnik Tolaki. Hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara identitas etnik dengan prasangka terhadap etnik Tolaki. Semakin kuat identitas etnik maka akan semakin tinggi prasangka terhadap etnik Tolaki, dan sebaliknya, semakin lemah identitas etnik maka semakin rendah pula prasangka terhadap etnik Tolaki.

Studi tentang dampak pembangunan kampus juga telah dihasilkan oleh M. Syamsuddin, (*et al.*) (2005)²⁸ dengan memfokuskan pada pembangunan Kampus UII (Universitas Islam Indonesia), yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) pembangunan kampus terpadu Universitas Islam Indonesia di daerah Kaliurang, Yogyakarta, berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, baik penduduk asli, pendatang maupun remaja. Peningkatan kualitas ekonomi masyarakat tersebut ditandai dengan perubahan sistem perekonomian masyarakat dari pertanian, buruh dan karyawan menjadi perdagangan dan jasa. (2) Dalam aspek kesehatan, pengaruh positif dan negatif dari dampak pembangunan UII, nampak lebih dominan negatifnya. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya polusi kendaraan bermotor, panasnya lingkungan Kaliurang yang dulunya sejuk, serta banyaknya sumur-sumur penduduk yang kering terutama pemukiman penduduk di bagian selatan UII. Selain itu, kondisi lingkungan juga diperparah oleh banyaknya sampah anorganik yang tidak bisa terurai, seperti plastik bekas pembungkus makan mahasiswa. (3) Sementara itu dampak pembangunan UII dari aspek pendidikan bagi masyarakat di sekitar kampus terpadu adalah positif. Sebab, keberadaan kampus terpadu UII di jalan Kaliurang telah menambah wawasan pengetahuan masyarakat melalui para mahasiswa yang tinggal di perkampungan penduduk. (4) Dalam aspek dakwah, UII juga berpengaruh positif terhadap masyarakat. Sebab, dengan adanya UII kehidupan keberagaman di sekitar Kaliurang tampak lebih semarak. Hal itu ditandai dengan munculnya TPA sebagai sarana pendidikan agama sejak dini bagi anak-anak, yang notabene nya para ustazd dan ustazdah nya adalah mahasiswa UII. Kemudian pengajian bagi orang tua juga bertambah marak. Serta kehadiran

²⁸ M. Syamsuddin (*et al.*), "Dampak Pembangunan Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia terhadap Kehidupan Masyarakat Sekitar", dalam *Jurnal Fenomena*, Vol. 3 No. 1, Maret 2005.

masjid Ulil Albab dengan berbagai kegiatan keagamaan yang digelar sangat bermanfaat bagi masyarakat. Lebih lanjut, (5) responden dalam penelitian ini —yaitu masyarakat— menaruh harapan kepada UII agar lebih peduli dengan kesejahteraan masyarakat sekitar, baik dengan memberikan bantuan penyediaan sarana dan prasana umum masyarakat seperti jalan raya, dan perpustakaan. Kemudian para responden berharap UII lebih bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, dan juga mengakomodasi beberapa orang dari penduduk untuk dijadikan karyawan UII. Sebab, selain hal itu menjadi representasi masyarakat sekitar di UII, juga berguna untuk mendukung eksistensi UII itu sendiri.

Mengantarkan pada bagian berikutnya dalam bab ini tentang landasan teori yang dipakai sebagai alat analisis dalam tulisan ini, sebagaimana yang ditangkap oleh M. Bambang Pranowo²⁹ dalam studinya, penulis juga menemukan bahwa studi tentang konflik di Aceh dalam konteks interaksi sosial antar kelompok masyarakat, konflik dan resolusinya —yang terpublikasi secara luas tampaknya masih minim.

2.2. Teori Hubungan Sosial

Berangkat dari konsep Pranowo bahwa kehidupan bermasyarakat selalu menimbulkan hubungan antar manusia dalam suatu lingkungan kehidupan tertentu,³⁰ penelitian ini berupaya melihat bentuk hubungan antara komunitas kampus dengan masyarakat di sekitarnya. Menurut Ian Craib³¹, masyarakat memiliki dua unsur. *Pertama* ialah bahwa ia bersifat relasional: terdiri dari serangkaian hubungan yang bersifat langgeng satu sama lain, antara agen-agen dan juga antara agen-agen dengan objek-objek material yang juga membentuk lingkungan sosial. Unsur *kedua*, ialah bahwa masyarakat juga memiliki pertingkatan kedalaman di balik apa yang tampak di permukaan dan pertingkatan keberadaan yang mendasar ini memiliki arti khusus. Penjelasan ini menunjukkan bahwa dunia sosial terbentuk

²⁹ M. Bambang Pranowo, *Op.cit.*, hlm. 12.

³⁰ Lihat, Anthony Giddens, *Sociology* (5th edition), Cambridge: Polity, 2006.

³¹ Ian Craib, *Teori-teori Sosial Modern: dari Parsons sampai Habermas*, (alih bahasa: Paul S. Baut dan T. Effendi), Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994, hlm. 32 – 33.

dari dua tipe ke-ada-an yang berbeda dan jelas, yaitu masyarakat dan agen-agen (individu-individu).

Lebih lanjut, sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan manusia lain untuk berinteraksi dan saling memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri. Hubungan sosial ini sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu proses yang asosiatif dan disosiatif. Hubungan sosial asosiatif merupakan hubungan yang bersifat positif, artinya hubungan ini dapat mempererat atau memperkuat jalinan atau solidaritas kelompok. Adapun hubungan sosial disosiatif merupakan hubungan yang bersifat negatif, artinya hubungan ini dapat merenggangkan atau menggoyahkan jalinan atau solidaritas kelompok yang telah terbangun. Hubungan sosial asosiatif adalah proses interaksi yang cenderung menjalin kesatuan dan meningkatkan solidaritas anggota kelompok. Hubungan sosial asosiatif memiliki bentuk-bentuk berikut ini: kerja-sama, akomodasi, asimilasi, akulturasi.

Kerja sama (*cooperation*); kerja sama dapat dilakukan paling sedikit oleh dua individu untuk mencapai suatu tujuan bersama. Di dalam mencapai tujuan bersama tersebut, pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama saling memahami kemampuan masing-masing dan saling membantu sehingga terjalin sinergi. Kerja sama dapat terjalin semakin kuat jika dalam melakukan kerja sama tersebut terdapat kekuatan dari luar yang mengancam. Ancaman dari pihak luar ini akan menumbuhkan semangat yang lebih besar karena selain para pelaku kerja sama akan berusaha mempertahankan eksistensinya, mereka juga sekaligus berupaya mencapai tujuan bersama. Kerja sama dapat dibedakan atas beberapa bentuk, berikut ini; (1) Kerukunan (*consensus*); merupakan bentuk kerja sama yang paling sederhana dan mudah diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk kerukunan, misalnya kegiatan gotong royong, musyawarah, dan tolong menolong. Contohnya gotong royong membangun rumah, menolong korban bencana, musyawarah dalam memilih kepanitiaan suatu acara di lingkungan RT; (2) Hubungan tawar-menawar (*bargaining*); merupakan bentuk kerja sama yang dihasilkan melalui proses tawar menawar atau kompromi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan. Bentuk kerja sama ini pada umumnya dilakukan di bidang perdagangan atau jasa. Contohnya kegiatan tawar menawar antara penjual dan pembeli dalam kegiatan perdagangan. (3) Kooptasi

(*cooptation*); proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik suatu organisasi agar tidak terjadi keguncangan atau perpecahan di tubuh organisasi tersebut. Contohnya Pemerintah RI akhirnya menyetujui penerapan hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam yang semula masih pro kontra, untuk mencegah disintegrasi bangsa. (4) Koalisi (*coalition*); yaitu kombinasi antara dua pihak atau lebih yang bertujuan sama. Contohnya koalisi antara dua partai politik dalam mengusung tokoh yang dicalonkan dalam pilkada. (6) Usaha Patungan (*joint venture*); yaitu kerja sama antara pihak asing dengan pihak setempat dalam perusahaan proyek-proyek tertentu. Contohnya kerjasama antara PT ExxonMobil Co.LTD dengan PT Pertamina dalam mengelola proyek penambangan gas alam di Aceh.

Bentuk kedua dalam hubungan asosiatif adalah akomodasi. Akomodasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau sebagai suatu proses.³² Sebagai keadaan, akomodasi adalah suatu bentuk keseimbangan dalam interaksi antarindividu atau kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma sosial dan nilai sosial yang berlaku. Sebagai proses, akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Sebagai suatu proses, akomodasi mempunyai beberapa bentuk.³³

Berikut ini bentuk-bentuk akomodasi: (1) Koersi (*coercion*); suatu bentuk akomodasi yang dilaksanakan karena adanya paksaan, baik secara fisik (langsung) ataupun secara psikologis (tidak langsung). Di dalam hal ini, salah satu pihak berada pada kondisi yang lebih lemah. Contoh koersi secara fisik adalah perbudakan dan penjajahan, sedangkan koersi secara psikologis contohnya tekanan negara-negara donor (pemberi pinjaman) kepada negara-negara kreditor dalam pelaksanaan syarat-syarat pinjaman. (2) Kompromi (*compromise*); suatu bentuk akomodasi di antara pihak-pihak yang terlibat untuk dapat saling mengurangi tuntutan agar penyelesaian masalah yang terjadi dapat dilakukan. Contohnya perjanjian antara pemerintah

³² Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure: Toward the Codification of Theory and Research*, Illinois: Glencoe, 1959, hlm. 112.

³³ Lihat, George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, edisi keenam, (alihbahasa oleh Alimandan), Jakarta: Kencana, 2007.

Indonesia dengan gerakan separatis Aceh Merdeka dalam hal menjaga stabilitas keamanan di Aceh. (3) Arbitrasi (*arbitration*); suatu cara mencapai kesepakatan yang dilakukan antara dua pihak yang bertikai dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut memiliki wewenang dalam penyelesaian sengketa dan biasanya merupakan suatu badan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak-pihak yang bertikai. Contohnya penyelesaian pertikaian antara buruh dengan pemilik perusahaan oleh Dinas Tenaga Kerja. (4) Mediasi (*mediation*); mediasi hampir sama dengan arbitrase. Akan tetapi, dalam hal ini fungsi pihak ketiga hanya sebagai penengah dan tidak memiliki wewenang dalam penyelesaian sengketa. Contohnya mediasi yang dilakukan oleh pemerintah Finlandia dalam penyelesaian konflik antara pemerintah Indonesia dengan GAM. (5) Konsiliasi (*conciliation*); yaitu usaha mempertemukan keinginan dari beberapa pihak yang sedang berselisih demi tercapainya tujuan bersama. (6) Toleransi (*tolerance*); suatu bentuk akomodasi yang dilandasi sikap saling menghormati kepentingan sesama sehingga perselisihan dapat dicegah atau tidak terjadi. Dalam hal ini, toleransi timbul karena adanya kesadaran masing-masing individu yang tidak direncanakan. (7) *Stalemate (detente)*; suatu keadaan perselisihan yang berhenti pada tingkatan tertentu. Keadaan ini terjadi karena masing-masing pihak tidak dapat lagi maju ataupun mundur (seimbang). Hal ini menyebabkan masalah yang terjadi akan berlarut-larut tanpa ada penyelesaiannya. (8) Pengadilan (*adjudication*); merupakan bentuk penyelesaian perkara atau perselisihan di pengadilan oleh lembaga negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya penyelesaian kasus sengketa tanah di pengadilan.

Bentuk hubungan sosial asosiatif yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial yang timbul apabila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling bergaul secara interaktif dalam jangka waktu lama. Dengan demikian, lambat laun kebudayaan asli akan berubah sifat dan wujudnya menjadi kebudayaan baru yang merupakan perpaduan kebudayaan dan masyarakat dengan tidak lagi membedakan antara unsur budaya lama dengan kebudayaan baru. Proses ini ditandai dengan adanya usaha mengurangi perbedaan yang ada. Proses asimilasi bisa timbul jika ada: (1) kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya; (2) orang perorangan sebagai anggota kelompok

saling bergaul secara intensif, langsung, dan dalam jangka waktu yang lama; (3) kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan. Contohnya perkawinan antar suku sehingga terjadi pembauran dari kebudayaan masing-masing individu sehingga muncul kebudayaan baru.

Bentuk hubungan asosiatif yang keempat adalah akulturasi. Akulturasi adalah suatu keadaan diterimanya unsur-unsur budaya asing ke dalam kebudayaan sendiri. Diterimanya unsur-unsur budaya asing tersebut berjalan secara lambat dan disesuaikan dengan kebudayaan sendiri, sehingga kepribadian budaya sendiri tidak hilang. Contohnya akulturasi antara budaya Hindu dan Islam yang tampak pada seni arsitektur masjid Kudus.

2.3. Teori Konflik

Teori konflik yang menjadi landasan teoritis penelitian adalah hubungan sosial yang disosiatif. Teori ini mengungkapkan bahwa masyarakat memiliki dua wajah, yaitu (1) konflik, dan (2) konsensus. Teori ini juga melihat bahwa masyarakat terbentuk dari konsensus dan konflik. Adanya pertikaian dan konflik sistem sosial dan berbagai elemen kemasyarakatan dapat menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan. Terkait hal ini, Ralf Dahrendorf³⁴ melihat relasi antara kelompok, konflik dan perubahan. Kelompok sendiri —dibedakan atas tiga tipe utama kelompok: (1) kelompok quasi (semu); (2) kelompok kepentingan; dan (3) kelompok aktual. Perubahan —sebagai bagian dari proses konflik adalah bagian dari realitas sosial— sebagaimana juga adanya kepentingan dari aktor-aktor yang terlibat untuk mempertahankan *status-quo*.

Bentuk-bentuk hubungan sosial disosiatif adalah: (1) persaingan, (2) kontravensi, dan (3) perselisihan.³⁵ Persaingan adalah suatu proses sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam usahanya mencapai keuntungan tertentu tanpa adanya ancaman atau kekerasan dari para pelaku. Contohnya persaingan antar-perusahaan telekomunikasi atau *provider* dalam menyediakan pelayanan tarif murah. Kontravensi merupakan suatu bentuk proses sosial yang

³⁴ Lihat George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Op. Cit.*, hlm. 156.

³⁵ Judson R. Landis, *Sociology: Concepts and Characteristics*, Belmont, California: Wadsworth, 1989, hlm. 45.

berada di antara persaingan dengan pertentangan atau pertikaian. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang atau unsur-unsur budaya kelompok lain. Sikap tersembunyi tersebut dapat berubah menjadi kebencian, namun tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. Bentuk kontravensi, misalnya berupa perbuatan menghalangi, menghasut, memfitnah, berkhianat, memprovokasi, dan melakukan intimidasi. Contohnya demonstrasi yang dilakukan elemen masyarakat untuk menghalangi atau menolak kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak). Pertentangan/perselisihan (*dispute*) adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok menantang pihak lawan dengan ancaman dan atau kekerasan untuk mencapai suatu tujuan.³⁶ Contohnya pertentangan antara golongan muda dengan golongan tua dalam menentukan waktu pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan RI pada tahun 1945.

Ian Craib³⁷ menyajikan sebuah perbandingan antara teori konsensus dengan teori konflik terkait dengan dua kata kunci dalam studi konflik yaitu “kepentingan” dan “kekuasaan”, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

³⁶ Evan Willis, *The Sociological Quest: An introduction to The Study of Social Life*, New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 1996, hlm. 40-44.

³⁷ Ian Craib, *Op.cit.*, hlm 91.

Tabel 2.1.
Perbandingan Antara Teori Konsensus dengan Teori Konflik

Teori Konsensus	Teori Konflik
1. Norma-norma dan nilai-nilai adalah unsur-unsur dasar dari kehidupan sosial	Kepentingan adalah unsur dari kehidupan sosial
2. Kehidupan sosial melibatkan komitmen	Kehidupan sosial melibatkan dorongan
3. Masyarakat perlu kohesif	Kehidupan sosial perlu terbagi
4. Kehidupan sosial tergantung pada solidaritas	Kehidupan sosial melahirkan oposisi
5. Kehidupan sosial didasarkan pada resiprositas dan kerja sama	Kehidupan sosial melahirkan konflik struktural
6. Sistem-sistem sosial bertahan pada konsensus	Kehidupan sosial melahirkan kepentingan bagian-bagian
7. Masyarakat mengenal otoritas legitimasi	Diferensiasi sosial melibatkan kekuasaan
8. Sistem-sistem sosial diintegrasikan	Sistem sosial tidak terintegrasi dan ditimpa oleh kontradiksi-kontradiksi
9. Sistem sosial cenderung untuk bertahan lama	Sistem sosial cenderung berubah

Sumber: Ian Craib, *Teori-teori Sosial Modern: dari Parsons sampai Habermas*, (Alih bahasa oleh Paul S. Baut dan T. Effendi), Edisi 1, Cetakan ke-3, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, halaman 91.

Teori konsensus memandang norma dan nilai sebagai landasan masyarakat, memusatkan perhatian pada keteraturan sosial berdasarkan atas kesepakatan diam-diam dan memandang perubahan sosial terjadi secara lambat dan teratur. Sebaliknya, teori konflik menekankan pada dominasi kelompok sosial tertentu oleh kelompok lain, melihat keteraturan sosial didasarkan atas manipulasi dan kontrol oleh kelompok dominan dan memandang perubahan sosial terjadi secara cepat dan menurut cara yang tak teratur ketika kelompok-kelompok subordinat menggulingkan kelompok yang semula dominan.³⁸

Merujuk pada studi yang dilakukan oleh Sumardjo

³⁸ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Op.cit.*, hlm. 116.

(2009)³⁹ bahwa keragaman suku bangsa, etnis, agama, strata sosial, profesi dan golongan merupakan basis munculnya ekspresi perilaku yang mengarah pada potensi konflik, kompetisi, dan konflik terbuka. Hal ini diangkat dari pengalaman penulis sendiri yang dalam melakukan kajian tentang resolusi konflik dan praktek-praktek pemberdayaan masyarakat, khususnya di pedesaan, pertanian dan masyarakat pesisir, maupun masyarakat semi urban dan urban. Gambaran secara rinci tentang hal ini digambarkan oleh Sumardjo sebagaimana dapat dilihat pada pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Potensi Konflik dan Alternatif Resolusi Konflik (Kedamaian)

Latar Belakang Interaksi Sosial	Ekspresi Perilaku	Potensi Konflik	Resolusi Konflik (Kedamaian)
Multi Agama/ Kepercayaan	Keragaman Pengamalan	Keyakinan dan Nilai	Toleransi/akulturasi/asimilasi
Keragaman Bangsa	Sikap <i>Super/inferiority</i>	Dominasi, arogansi	<i>Intercultural Communication</i>
Multi Etnis	Keragaman Budaya (<i>Stereotype</i>)	Nilai, Bahasa dan Perilaku (Etnosentrisme)	<i>Cross cultural communication</i> – akulturasi/asimilasi
Multi strata	Keragaman kemampuan	Dominasi/ Subordinasi	Kemitraan/kolaborasi
Multi profesi	Keragaman kompetensi	Kompetisi profesi/ sumberdaya	Kemitraan koordinasi
Multi golongan	Keragaman kebutuhan	Konflik kepentingan	Kemitraan/kolaborasi/Integrasi Struktur

Sumber: Sumardjo (*et al.*), “Kajian Kelompok Keagamaan di Sebelas Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta”, Bogor: Kerjasama LP IPB dengan Departemen Agama RI, 2005.

³⁹ Sumardjo, *Op.cit.*, hlm. 301-302.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa di dalam masyarakat terdapat dua sisi yaitu interaksi positif berupa kerjasama dan interaksi negatif yang dapat berwujud konflik. Konflik adalah fenomena yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan manusia. Konflik muncul ketika terjadi ketidak seimbangan dalam status sosial, kekayaan, akses terhadap sumber daya, maupun kekuasaan. Bagaimana konflik yang terjadi dapat diatasi? Bagaimana konflik dapat diselesaikan? Adalah pertanyaan mendasar untuk mengantarkan pembahasan pada analisis konflik yang dapat dipakai – khususnya dalam menganalisis konflik yang terjadi diantara warga kampus Universitas Malikussaleh dengan warga *gampong* sekitar.

Analisis konflik adalah proses praktis untuk menguji dan memahami realitas konflik dari perspektif yang beragam kemudian menjadi dasar pijakan dalam pengembangan strategi dan perencanaan aksi.⁴⁰ Analisis konflik dalam studi ini dibutuhkan dengan beberapa pertimbangan, yaitu: 1) analisis konflik akan memberikan pemahaman latar belakang dan sejarah situasi konflik dan peristiwa (konflik) terkini, 2) analisis konflik berguna untuk mengidentifikasi semua kelompok atau pihak relevan yang terlibat dalam konflik, tidak hanya pihak yang utama atau yang jelas terlibat dalam konflik, 3) bahwa setelah adanya identifikasi terhadap kelompok yang relevan, analisis konflik juga penting untuk memberikan pemahaman perspektif dari semua kelompok atau pihak tersebut dan untuk mengetahui lebih luas tentang bagaimana relasi mereka satu sama lain. 4) analisis konflik akan berfungsi untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan tren-trend yang menopang konflik, sehingga akan dapat ditentukan faktor-faktor yang memicu konflik, akar konflik serta isu-isu apa saja yang menggerakkan aktor-aktor yang terlibat di dalam konflik untuk melakukan tindakan (termasuk tindakan kekerasan). 5) analisis konflik akan menjadi media belajar – khususnya bagi pengambil kebijakan di Unimal di dalam mengatasi konflik di antara kampus dengan warga *gampong*. Hal ini akan melahirkan sikap kehati-hatian dalam proses penanganan konflik dan mencegah adanya kecenderungan dari pengambil kebijakan —khususnya untuk bersikap menyederhanakan masalah.⁴¹

⁴⁰ Lihat, <http://www.wmc-iainws.com>

⁴¹ Lihat, <http://sawingbahar.wordpress.com>

Dalam praktek, tersedia berbagai macam model analisis konflik.⁴² Diantaranya pemetaan konflik (*conflict mapping*) — merupakan teknik yang dipakai untuk merepresentasikan konflik dalam bentuk gambar (grafis) dengan menempatkan para pihak yang terlibat dalam konflik, baik dalam hubungannya dengan masalah maupun antar para pihak. Model *Conflict Triangle* — yang memberi penekanan pada aktor, isu dan proses dari konflik tersebut. Model analogi pohon konflik (*conflict tree*) juga lazim dipergunakan.⁴³ Model ini menganalogikan konflik dalam bagian-bagian sebatang pohon, yaitu akar, batang, ranting dan daun. Selain itu juga terdapat analisis konflik berdasarkan tahapan-tahapannya, titik awal konflik adalah akar konflik yang akan memunculkan berbagai peristiwa yang mempengaruhi atau menimbulkan eskalasi konflik, sampai dengan terjadinya tahapan krisis. Pada saat ini, konflik berada pada tahapan puncak yang akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor dan upaya penanganannya, apakah dapat mengalami de-eskalasi dan kemudian kembali ke tahapan awal atau akan memecah dan menjadi konflik terbuka —yang besar kemungkinan berupa kekerasan. Model berikutnya adalah *Onion Model* disebut juga model kulit bawang yang menganalisis konflik dengan melihat keterlibatan aktor dari tiga lapis kulit bawang yang dianalogikan. Lapis pertama adalah sikap aktor —yaitu ekspresi aktor dalam merespon konflik tersebut; lapis kedua adalah posisi dan perspektif aktor tersebut di dalam konflik, dan lapis ketiga adalah kepentingan aktor. Kepentingan disini berarti hal-hal yang diharapkan oleh aktor yang mungkin berbenturan sehingga menimbulkan konflik.⁴⁴

*Onion model*⁴⁵ akan dipergunakan sebagai *analysis tool* dalam studi konflik antara orang kampung dan orang kampus Unimal ini. Lebih lanjut studi ini akan menunjukkan adanya berbagai pihak/aktor yang terlibat di dalam konflik ini. Studi ini akan mengeksplorasi sikap

⁴² Nikolaus Schall dan Michael Becker, *Methodfinders Practitioner's Guide*, GTZ – FRCS Project Team, 2004, lihat juga <http://www.Methodfinder.net>.

⁴³ Lihat, Simon Mason & Sandra Richard, *Conflict Analysis Tool*, Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC); lihat juga http://www.iisd.org/cscconservation/conflict_tree.aspx ;

⁴⁴ Lihat, <http://www.sawingbahar.wordpress.com>.

⁴⁵ Lihat, <http://www.wmc-ianws.com>; <http://www.beyondintractability.org>; <http://www.olorado.edu/conflict/pace/glossary.htm>.

para pihak/aktor yang terlibat di dalam interaksi dan konflik ini dan selanjutnya akan mengeksplorasi posisi dan kepentingan para pihak/aktor tersebut dalam konflik yang ada. Penggunaan model analisis konflik ini diharapkan secara komprehensif dapat memberikan pemahaman atas konflik yang terjadi serta solusi yang dapat diambil oleh para pihak dalam mengatasi konflik tersebut.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif⁴⁶ yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan pemahaman yang interpretatif dan kritis terhadap konflik antara warga masyarakat sekitar kampus Universitas Malikussaleh dengan komunitas kampus, serta akan mengungkapkan pengalaman manusia-manusia yang terlibat dalam konflik ini. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengambil kebijakan, khususnya di lingkungan Universitas Malikussaleh untuk menyelesaikan konflik yang ada. Harapan sebagaimana dimaksudkan tidak terlepas dari keberadaan penelitian kualitatif yang dapat memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan kebijakan.⁴⁷

⁴⁶ Penelitian kualitatif —sebagaimana dijelaskan dalam *Handbook of Qualitative Research*— adalah bidang penyelidikan yang berdiri sendiri. Penelitian ini menyinggung aneka disiplin ilmu, bidang dan tema. Penelitian kualitatif dalam sejarah perkembangannya dianggap penting untuk mengkaji kehidupan kelompok manusia. Lihat lebih lanjut dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, (eds.), *Handbook of Qualitative Research*, Edisi Bahasa Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

⁴⁷ Ray C. Rist dalam tulisannya *Mempengaruhi Proses Kebijakan dengan Penelitian Kualitatif*, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (ed), *Handbook of Qualitative Research*, Edisi Bahasa Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 715 – 731 dengan mengutip pendapat James Coleman menyampaikan bahwa “tidak ada kumpulan metode baku; tidak ada lagi metodologi komprehensif untuk meneliti dan mengkaji dampak kebijakan publik sebagai penyempurna bagi kebijakan masa datang”. Ungkapan yang kini sangat terkenal ini masih tetap berlaku.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan interpretif⁴⁸ yang berangkat dari sebuah upaya untuk mencari penjelasan terhadap peristiwa-peristiwa sosial dan budaya, dalam hal ini konflik yang terjadi antara warga masyarakat sekitar kampus Universitas Malikussaleh dengan pihak Universitas Malikussaleh. Pendekatan ini digunakan dengan didasarkan pada perspektif dan pengalaman dari orang-orang yang diteliti. Dalam pendekatan ini, peneliti melihat dan mengkaji fakta – fakta terkait dengan konflik yang terjadi dalam kurun waktu yang ada dan kemudian akan berusaha memahami makna dari konflik tersebut.

Pendekatan interpretif dalam penelitian tentang konflik antara warga *gampong* dan komunitas kampus Unimal ini juga menggunakan metode *personal reflections* (refleksi personal).⁴⁹ Metode *personal reflections* ini hanya dipakai pada situasi kritis dimana peneliti akan menggunakan cara *reflective thinking* dalam melihat kerumitan masalah. Untuk mendudukkan persoalan konflik pada tataran yang ilmiah, maka data primer dan hasil observasi dianalisis menggunakan metode refleksi personal ini untuk membuat penilaian umum dan bukan pada penyimpulan penghakiman (*judgement*).

3.2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer (*primary sources*) seperti wawancara dan observasi lapangan, dan data sekunder (*secondary sources*) seperti surat kabar, majalah, buku, hasil penelitian, laporan dan dokumen lainnya. Pengumpulan data primer (*primary sources*) dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan masyarakat sekitar kampus Universitas Malikussaleh—warga Gampong Reuleut Barat, Reuleut Timur, Paya Gaboh dan Cot Kemuneng serta warga Paloh, Blang Pulo, Cot Trieng dan Padang Sakti— yang dianggap memahami dan

⁴⁸ Thomas A. Schwandt, *Pendekatan Konstruktivis-Interpretivis dalam Penelitian Manusia*, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (ed), *Handbook of Qualitative Research*, Edisi Bahasa Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm 146 – 170

⁴⁹ Tentang metode *personal reflections*, lihat, S. Brookfield, *Developing Critical Thinkers: Challenging Adults to Explore Alternative Ways of Thinking and Acting*, Milton Keynes: Open University Press, 1987.

merasakan langsung konflik yang terjadi. Wawancara kepada subyek penelitian seputar persoalan hubungan sosial, pengaruh (akulturasi) dan juga konflik yang akhir-akhir ini muncul di sekitar kampus Universitas Malikussaleh dan bagaimana mereka menyikapinya. Keuchik, Perwakilan Tuha Peut, masyarakat gampong serta aktor-aktor yang terlibat langsung dalam konflik ini adalah bagian dari subyek penelitian. Tiga orang yang menerima kuasa dan mewakili masyarakat dalam mengajukan tuntutan ganti rugi atas tanah di wilayah kampus Reuleut serta pedagang kantin dan harlan di lingkungan kampus Bukit Indah juga merupakan bagian penting dalam wawancara ini.

Wawancara kepada berbagai pihak Civitas Akademika Unimal juga dilakukan. Wawancara ini melibatkan unsur mahasiswa di kedua kampus dan mahasiswa yang *indekost* di lingkungan kampus, unsur perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), unsur dosen dan pegawai khususnya yang berasal dari gampong sekitar kampus. Wawancara kepada berbagai pihak pimpinan Unimal juga dilakukan yaitu dengan rektor dan mantan rektor, pembantu rektor, Kepala Humas Unimal, unsur pimpinan lain seperti dekan serta anggota Tim Teknis Pembangunan Kampus Reuleut (TTPKR) serta Sekretaris Senat Unimal.

Pihak-pihak lain seperti unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara diwakili oleh Asisten III Bidang Pemerintahan adalah bagian penting dalam proses pengumpulan data primer ini. Penulis juga mewawancarai salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang secara aktif pernah melakukan advokasi bagi masyarakat Reuleut dalam mengajukan mosi-mosi dan tuntutan kepada Unimal. Wawancara kepada unsur pemerintahan daerah setingkat kecamatan juga dilakukan yaitu kepada Camat Muara Batu dan Camat Muara Satu. Observasi terhadap kondisi sekitar wilayah penelitian serta kondisi konflik yang dirasakan oleh para pihak juga akan dipergunakan sebagai bagian dari teknik pengumpulan data.

Lebih lanjut, pengumpulan data sekunder (*secondary sources*) dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, majalah, buletin, koran/surat-kabar dan bahan tertulis lainnya yang tidak diterbitkan. Dokumen-dokumen dimaksud diantaranya didapatkan melalui arsip yang dimiliki pihak Unimal dan juga arsip yang ada di masyarakat. Beberapa hal menarik yang penulis dapatkan pada saat proses dokumentasi ini adalah adanya dokumen yang disusun

oleh *Keuchik*⁵⁰ Gampong Reuleut Timu yang memberikan penjelasan kronologis tentang tapal batas kampus Reuleut dan sejarah singkat pemberian hibah tanah oleh masyarakat Gampong Reuleut Timu. Selain itu, dari pihak penerima kuasa masyarakat untuk melakukan advokasi atas tuntutan ganti rugi lahan yang dianggap belum selesai, penulis juga menemukan berbagai dokumentasi penting, diantaranya kliping koran yang memuat pemberitahuan konflik lahan dan ganti rugi beserta dokumen jawaban masyarakat terhadap pemberitaan ini, juga terdapat arsip salinan putusan Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe atas dakwaan pengrusakan yang dilakukan oleh warga, serta beberapa dokumen lainnya yang akan dianalisis pada bagian keterlibatan aktor dan peranannya dalam konflik ini.

3.3. Prosedur Pengumpulan Data

Data primer yang didapat di lapangan dalam bentuk wawancara mendalam ditranskripsikan ke dalam bentuk tulisan. Data ini akan dikombinasikan dengan data-data sekunder yang bersumber dari berita-berita yang ditulis media massa cetak (koran, majalah, buletin atau jurnal) serta ulasan dan opini kalangan akademisi yang tersebar di berbagai media massa, termasuk internet. Data akan dikategorisasikan dalam suatu proses taksonomi sederhana yang menyangkut beberapa isu dan topik penting. Selanjutnya, data-data yang sejenis akan direduksi untuk mengurangi jumlah data yang terlalu banyak untuk kemudian dianalisis berdasarkan tema-tema tertentu yang dianggap bisa menjawab penelitian ini. Hasil analisis ini akan dituliskan ke dalam laporan penelitian untuk kemudian akan dipresentasikan dalam suatu seminar hasil penelitian.

Rangkaian kegiatan penelitian ini adalah sebuah siklus yang berlangsung melalui tujuh tahap: Tahap *pertama*, persiapan operasional di mana diadakan sejumlah rapat kecil konsultasi antara penulis dan rekan sejawat peneliti dan pengumpul data awal lapangan. Tahap *kedua*, pengumpulan data sekunder (*secondary sources*) dengan menelusuri sumber-sumber yang berkaitan dengan Aceh secara umum, pada periode-periode penting yang menjadi fokus perhatian studi ini melalui buku-buku, majalah-majalah, surat-kabar, buletin atau

⁵⁰ *Keuchik* atau *Geuchik* (Bhs. Aceh) adalah kepala desa atau lurah.

pamflet, dan lain-lain dan secara khusus yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian ini yaitu interaksi sosial dan konflik antar masyarakat. Tahap *ketiga*, pengumpulan data primer, yakni pelaksanaan wawancara mendalam dengan informan dari berbagai pihak. Selanjutnya, secara simultan dilakukan proses pembuatan transkripsi wawancara dalam bentuk *hard-copy* sebagai dokumen referensi disertai dengan FGD (*Focus Group Discussion*) antara peneliti dengan rekan dan tenaga lapangan. Tahap *keempat*, kategorisasi data atau taksonomi data yang berkorelasi dengan masing-masing bab dalam hasil penelitian. Pada tahap ini, kategorisasi data dilaksanakan dan terdapat beberapa data yang perlu direduksi sehingga yang akan dikutip dan dicatat dalam bagian hanya yang esensial saja. Tahap *kelima*, diadakan koloquium, merupakan suatu diskusi internal terbatas yang mendiskusikan kerangka penulisan laporan hasil penelitian yang utuh sebagai satu kesatuan (integral) untuk menentukan judul laporan penelitian yang lebih sesuai maupun penguatan analisis pada masing-masing bagian tulisan ini. Tahap *keenam*, penulisan laporan yang dilakukan oleh penulis dengan pembabakan yang sudah disepakati berdasarkan *colloquium* dan temuan data di lapangan dan data sekunder lainnya. Tahap *ketujuh*, pencetakan laporan dan persiapan teknis lainnya seperti pembuatan indeks dan perbaikan-perbaikan teknis penulisan lainnya yang ada.

Pada proses pengumpulan data ini, peneliti mengalami beberapa kendala, diantaranya adalah kesulitan yang penulis hadapi untuk dapat melakukan penggalian informasi kepada beberapa pihak —yang penulis anggap dapat memberikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Pihak dimaksud adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Utara dan Ketua Tim Teknis Pembangunan Kampus ke Reuleut. Keberadaan salah seorang informan pada BPN Kabupaten Aceh Utara sepanjang pengumpulan data ini telah disebutkan oleh beberapa pihak, penulis sendiri juga menetapkan yang bersangkutan sebagai salah seorang informan kunci untuk dapat memberikan jawaban atas permasalahan konflik agraria yang muncul dalam studi awal penelitian ini. Namun dikarenakan yang bersangkutan telah menempati posisi baru pada Kanwil Aceh dan tidak adanya informan lain yang dianggap oleh BPN Aceh Utara sendiri dapat memberikan klarifikasi maupun jawaban atas permasalahan dimaksud. Terkait dengan penggalian informasi kepada Ketua Tim

Pemulangan Kampus Reuleut juga mengalami kendala dikarenakan yang bersangkutan dalam masa penelitian ini dilakukan dalam keadaan kurang sehat dan sedang menempuh pendidikan S-3 di luar kota. Terhadap hal ini, penulis melakukan penggalian informasi kepada berbagai pihak lain —yang dalam pandangan penulis serta diskusi dengan tim peneliti lapangan— dapat memberikan informasi terkait. Absennya informasi dari kedua pihak ini, dalam pandangan penulis sedikit banyaknya mempengaruhi analisis utama akar permasalahan munculnya konflik agraria.

3.4. Pengecekan Keabsahan Data

Terlepas dari kendala-kendala yang disampaikan sebelumnya, penelitian ini menentukan kriteria data yang dianggap valid, yaitu apabila: (1) benar sesuatu terjadi dan bisa dibuktikan secara tertulis, (2) bisa diverifikasi kebenaran tentang sesuatu itu oleh pihak kedua atau pihak ketiga (*cover both-sides*) secara verbal, (3) bersifat obyektif, tidak semata-mata berdasarkan pendapat atau penilaian subyektif peneliti atau subyek penelitian, (4) diperoleh melalui cara-cara yang sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Kajian-kajian ilmiah yang membahas persoalan konflik sosial yang bersifat horizontal di Aceh telah banyak dituliskan, baik bersifat artikel ataupun karangan ilmiah yang telah dibukukan juga cukup banyak. Bahan-bahan ini akan digunakan untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh di lapangan (data primer).

Data yang sudah terkumpul dan sudah melalui tahap verifikasi, kategorisasi, reduksi, akan dilakukan pengecekan validitas.⁵¹ Validasi data ini akan dilakukan dengan dua tahap. Pertama menggunakan bahan-bahan bandingan dari dokumen, buku, majalah, surat kabar atau selebaran atau bahan-bahan tertulis lainnya dengan tulisan-tulisan jurnal yang sudah dituliskan oleh para peneliti sebelumnya tentang tema yang mirip. Kedua, pada data primer, hasil observasi akan didokumentasikan secara visual (foto). Pada data primer hasil wawancara, semua ungkapan dan penilaian akan dibandingkan dengan wawancara dengan orang lain yang bertempat tinggal berdekatan dengan subyek penelitian dan juga dibandingkan dengan data

⁵¹ Tentang validitas lihat juga Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm 117–133.

sekunder tentang hal atau topik yang dibicarakan. Bila ditemukan data yang tidak valid, maka data tersebut akan direduksi dan tidak akan melalui proses analisis dan interpretasi pada tahap berikutnya.



BAB 4

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN SEJARAH UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

4.1. Gambaran Umum

Studi tentang hubungan sosial, akulturasi dan konflik antara masyarakat dengan warga kampus Unimal ini mengambil lokasi pada dua wilayah kampus dari empat wilayah kampus Unimal, yaitu wilayah kampus utama Reuleut di Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara dan wilayah kampus Bukit Indah di Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Penentuan lokasi ini dilakukan secara sengaja dengan mendasarkan pada pemetaan awal adanya konflik yang terekam di dua lokasi kampus ini. Walaupun, penulis sendiri juga sangat menyadari bahwa studi tentang hubungan sosial dan akulturasi antara warga kampus Unimal dengan warga gampong di lokasi lain wilayah kampus Unimal juga penting, yaitu wilayah kampus Lancang Garam⁵² dan wilayah kampus Uteun Kot, Cunda adalah menarik dan penting, dikarenakan masing-masingnya memiliki bentuk serta ciri interaksi yang khusus pula. Apalagi jika studi ini nantinya dapat dilanjutkan dalam konteks —selain mengeksplorasi hubungan dan interaksi sosial yang ada juga— mengkaji dampak pembangunan kampus Unimal di berbagai wilayah kampusnya terhadap masyarakat sekitar dalam

⁵² Jika melihat pada sejarah awalnya Kampus Unimal terletak di kawasan Lancang Garam, di pusat kota Lhokseumawe. Lahan yang ada menempati luas hanya sekitar 3.249 m². Di areal kampus ini Unimal memiliki gedung, ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, Pusat Komputer dan studio untuk menunjang aktivitas tenaga pengajar dan mahasiswa dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

berbagai aspek, diantaranya aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat maupun berbagai aspek lainnya.

Pada bagian berikut dalam bab ini akan diberikan deskripsi tentang kampus utama Reuleut yang terletak di Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dan kampus Bukit Indah di Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, selanjutnya deskripsi tentang sejarah keberadaan kampus Unimal juga akan disampaikan pada bagian akhir bab ini.

4.2. Kampus Utama Reuleut

4.2.1. Lokasi

Kampus Reuleut adalah merupakan kampus utama Unimal yang terletak di Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara.⁵³ Sampai dengan tahun 2010 Kabupaten Aceh Utara⁵⁴ terdiri dari 27 kecamatan yang terdiri dari 70 kemukiman dan 852 desa atau *gampong*.⁵⁵

Lahan lokasi kampus terletak diantara Gampong Reuleut Timu, Gampong Reuleut Barat, Gampong Paya Gaboh dan Gampong Cot Kemuneng. Lokasi kampus ini dari Kota Lhokseumawe berjarak lebih kurang 22 km (dari arah timur) atau dapat ditempuh dengan kendaraan darat lebih kurang dalam jangka waktu 30 menit dan dari kota Bireuen (dari arah barat) lebih kurang 38 km atau selama lebih kurang 50 menit.

Berdasarkan informasi yang dapat penulis rangkum dari profil

⁵³ Kendatipun tidak begitu penting untuk penelitian, penulis merasa perlu memberikan gambaran letak geografis Kabupaten Aceh Utara secara teknis: Kabupaten ini merupakan bagian dari wilayah Provinsi Aceh yang terletak antara 96.52.00° – 97.31.00° Bujur Timur dan 04.46.00° – 05.00.40° Lintang Utara.

⁵⁴ Kabupaten Aceh Utara dengan luas wilayah sebesar 3.296,86 km² dengan ibukota Lhoksukon memiliki batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kota Lhokseumae dan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bireuen. Sebagian besar wilayah dalam Kabupaten Aceh Utara terdapat pada daerah dataran, sehingga kisaran suhu rata-rata sepanjang tahun 2010 sebesar 20,0° C – 31,0° C.

⁵⁵ Lihat, *Aceh Utara dalam Angka*, Lhokseumawe: BPS Aceh Utara, 2011.

gampong⁵⁶ – keempat gampong yang ada di sekitar kampus Unimal – diketahui bahwa masing-masing masyarakat pada gampong tersebut mayoritas memiliki mata pencaharian dari sektor pertanian, selain beberapa diantaranya juga memiliki mata pencaharian dari sektor perkebunan, peternakan, industri kecil dan rumah tangga, perdagangan dan jasa – seperti PNS, Dosen, dan tenaga kesehatan.

Melihat pada aspek ketersediaan lembaga kemasyarakatan yang ada di lingkungan keempat gampong ini – penulis mendapati bahwa hanya di Gampong Reuleut Timu yang telah lengkap memiliki lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai berikut: 1) Lembaga Adat, 2) BPD/Tuha Peut, 3) LKMD/Tuha Lapan, 4) Karang Taruna, 5) Kelompok tani, 6) Koperasi, 7) Organisasi Pemuda, 8) Organisasi Perempuan, 9) Kelompok Gotong Royong, dan 10) Organisasi Keagamaan – sedangkan di tiga gampong lainnya belum memiliki secara lengkap lembaga kemasyarakatan ini, yang tersedia diantarnya adalah Tuha Peut, Tuha Lapan, Organisasi Pemuda dan Kelompok Tani.

4.2.2. Lahan

Lokasi kampus Unimal di Reuleut telah ada sejak tahun 1986⁵⁷

⁵⁶ Profil Gampong didapat melalui Keuchik masing-masing *gampong*, namun dari keempat *gampong* di sekitar wilayah ini hanya *gampong* Reuleut Barat dan *gampong* Reuleut Timu yang memiliki Profil Gampong. Informasi tentang gampong Cot Kemuneng dan Paya Gaboh penulis dapatkan melalui wawancara dengan *Keuchik* dan masyarakat *gampong* bersangkutan.

⁵⁷ Pada tahun 1986 Universitas Malikussaleh pertama kali didirikan di bawah naungan Yayasan Perguruan Tinggi Islam Malikussaleh. Lahan kampus di wilayah Reuleut adalah merupakan wujud dukungan bukan hanya Pemerintah Daerah Aceh Utara namun juga seluruh masyarakat Aceh Utara pada waktu itu (dari Pantan Labu sampai dengan Samalanga) yang telah memberikan sumbangan dana yang dikutip selama 3 (tiga) tahun berturut-turut melalui alokasi dana Pembangunan Masyarakat Desa (PMD). Masyarakat Reuleut Timu khususnya juga memberikan hibah lahan seluas 5 (lima) ha. Informasi atas hal ini didapat melalui berbagai sumber di antaranya dokumen Memorandum Akhir Jabatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode 2001 – 2005 & 2006 – 2010, dari masyarakat - Keuchik Reuleut Timu (Wawancara, Tanggal 19 April 2012), dan Asisten III Bidang Pemerintahan Aceh Utara (Wawancara, Tanggal 25 Mei 2012).

dengan luas 84 Ha dan telah bersertifikat.⁵⁸ Dalam arah timur – barat (sejajar dengan jalan raya Medan – Banda Aceh), memiliki panjang lebih kurang 1.880 m dan dalam arah utara – selatan memiliki panjang lebih kurang 756 m, bentuk lahan yang ada berlekuk-lekuk tidak beraturan.

Kondisi permukaan tanah berbukit dan terdapat beberapa lembah yang curam. Kondisi saat ini lahan telah dibersihkan dari semak belukar – namun untuk beberapa ruas wilayah yang belum dibangun sarana perkuliahan masih terdapat semak belukar – khususnya pada bagian belakang kampus. Secara umum, tekstur tanah keras berkapur dan tidak ditemui sumber air pada permukaan tanah. Beberapa kali program penghijauan⁵⁹ di lokasi kampus ini gagal dikarenakan kondisi lahannya⁶⁰ serta ketidakcocokan tanaman terhadap lahan selain juga dikarenakan faktor sosial seperti adanya pembiaran hewan ternak, lembu dan kambing oleh masyarakat sekitar. Kondisi ini menyebabkan kurang kondusifnya lingkungan akademis di kampus Reuleut.

⁵⁸ Penulis mendapatkan informasi dari pihak manajemen Unimal yang menyampaikan bahwasannya di awal kepemilikan Unimal memiliki lahan seluas 100 ha, namun seiring dengan waktu dan konflik yang terjadi maka luas lahan ini setelah dilakukan penghitungan ulang oleh BPN menjadi 84 ha. Deskripsi tentang hal ini lebih lanjut disampaikan pada bab 7 tentang Konflik antara Kampus Unimal dengan Masyarakat sekitar. (Informasi didapatkan melalui hasil wawancara dengan Prof. A. Hadi Arifin, Tanggal 5 Mei 2012, di Lhokseumawe; wawancara dengan Pembantu Rektor IV – Iskandar Zulkarnain, tanggal 23 April 2012 di Blang Pulo.

⁵⁹ Pusat Penelitian Kependudukan, Lingkungan Hidup dan Gender serta *Aceh Peace Consultative Management (APCM)* Unimal pada tahun 2011 dengan dukungan dari Kabupaten Aceh Utara telah melaksanakan program *UnimalGoes Green*, dengan bantuan lebih kurang 1.800 bibit tanaman (bervariasi), dan sampai saat ini program dimaksud telah dievaluasi dengan hasil yang sangat tidak memuaskan. Mayoritas tanaman tidak tumbuh subur dan mati dikarenakan hal-hal yang telah disampaikan di atas.

⁶⁰ Diskusi Penulis dengan Ibu Yusra, salah seorang dosen dengan spesialisasi Ilmu Tanah dari Fakultas Pertanian Unimal pada tanggal 15 Juni 2012 di Reuleut. "...bahwa terhadap lahan di Unimal perlu dilakukan konservasi lahan sebelumnya sampai dapat secara baik dilakukan penanaman. Kegiatan konservasi ini meliputi pemupukan dan penyiraman secara kontinyu".

Hal lainnya yang juga penting disampaikan di sini adalah bahwa pada lokasi lahan ini terdapat makam ulama pada masa Kerajaan Samudera Pase, yaitu makam Teungku Nie Reuleut. Makam ini terlihat dari posisi belakang Gedung Fakultas Teknik. Sangat disayangkan tidak ada upaya untuk melakukan preservasi atau pembuatan cagar budaya atas situs tinggalan sejarah masa lalu yang cukup penting ini. Banyak kalangan menilai Unimal kurang memiliki apresiasi sejarah dan visi kebudayaan lokal.

4.2.3. Prasarana yang tersedia

Sebagaimana halnya dengan lahan yang menjadi salah satu syarat penting pada saat upaya penegrian Unimal – keberadaan dan ketersediaan prasarana juga menjadi bagian penting yang secara terus menerus ditingkatkan oleh manajemen Unimal. Pada awal keberadaan Unimal di Reuleut tahun 1986 yang ada hanyalah bangunan Gedung Ruang Kuliah Umum (RKU). Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari pihak UPT Perencanaan Unimal⁶¹ dan dokumen laporan Akhir Master Plan Unimal tahun 2003 diketahui bahwa gedung tersebut berlantai 2 (dua) dan pada tahun 2003 kondisi gedung telah mengalami penjarahan terhadap struktur atap, kosen jendela dan pintu (akibat dan terjadi pada masa konflik Aceh). Sedangkan gedung-gedung lainnya telah mengalami kerusakan berat dan tidak dapat direhab kembali. Hasil penelusuran peneliti terhadap ketersediaan dokumentasi gedung-gedung dan prasarana pada masa lalu tidak dapat ditemukan banyak photo yang bisa menggambarkan kondisi pada masa itu namun beberapa diantaranya yang masih dapat dilacak terlampir pada laporan penelitian ini.

Terkait dengan prasarana jalan penghubung (jalan masuk) dari jalan raya Medan – Banda Aceh menuju Kampus Cot Tgk Nie Reuleut juga mengalami kerusakan berat, berbolong – bolong dan becek pada saat hujan serta ditumbuhi rumput dan semak belukar. Jarak antara jalan raya menuju kampus lebih kurang 1 (satu) km. Begitu juga halnya dengan ketersediaan sarana sumber air bersih berupa sumur bor yang tidak dapat difungsikan kembali dikarenakan rusak dan sumbatan pada pipa. Fasilitas listrik tersedia dan didistribusikan dengan baik pada

⁶¹ Wawancara dengan Yulius Rief Alkhaly, Kepala UPT. Perencanaan Unimal, tanggal 31 Mei 2012 di Reuleut.

setiap gedung dan unit kerja namun fasilitas telekomunikasi jaringan telpon melalui Telkom sangat minim. Satu-satunya line telepon yang ada di KPA dan juga difungsikan untuk fasilitas faksimili. Kondisi ini tentunya jauh dari bukan hanya pengharapan – namun juga kelayakan bagi jalannya administrasi perkantoran. Jalur komunikasi melalui fasilitas telepon genggam melalui provider GSM sampai saat ini relatif baik, walaupun ada beberapa jaringan provider yang tidak dapat diakses di wilayah kampus Reuleut yang kemungkinan disebabkan oleh jarak pemancar yang tidak menjangkau wilayah sekitar.

Pembangunan kampus utama dilakukan sejak tahun 2003 dengan melaksanakan pembangunan gedung ruang kuliah dan jalan masuk kampus. Pembangunan gedung ini mendapatkan bantuan dana dari APBD Aceh Utara APBD Provinsi NAD serta APBN. Pada masa pembangunan ini terjadi sengketa kepemilikan atas tanah Unimal dengan beberapa masyarakat yang menyebabkan terhambatnya pembangunan di Unimal. Sengketa dimaksud menjadi salah satu bagian penting dalam laporan penelitian ini yang akan dieksplorasi secara lebih mendalam pada bagian berikut tulisan ini.

Kondisi saat penelitian ini dilaksanakan, pada tahun 2012 – kampus utama Reuleut telah memiliki – bukan hanya pembangunan kembali RKU yang saat ini telah menjadi Kantor Pusat Administrasi (KPA) – dimana Rektor, Pembantu Rektor serta Biro Akademik dan Biro Umum dan Keuangan berkantor – gedung ini juga telah mengalami renovasi dan pengembangan berupa tambahan Aula Cot Tgk. Nie serta Perpustakaan Induk pada bagian belakang gedung KPA. Selain itu juga terdapat 3 (tiga)⁶² bangunan Gedung Fakultas Teknik dengan

⁶² Sampai dengan tahun ajaran 2010/2011 – 2 (dua) gedung Fakultas Teknik dipinjam-pakaikan untuk Fakultas Hukum dan FISIP. Setelah Rapat Kerja Unimal pada Tahun 2010 dan dapat difungsikannya fasilitas eks Komplek Bukit Indah – yang dihibahkan oleh perusahaan ExxonMobil di Paloh, Muara Satu— diputuskan untuk memindahkan aktivitas perkuliahan pada Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (ketiganya merupakan bidang Ilmu Sosial) ke Kampus Bukit Indah. Selain alasan pemanfaatan hibah yang telah diberikan kepada Unimal atas komplek ini juga dilatar belakangi kebutuhan masing-masing fakultas ini terhadap akses kepada wilayah Pemerintahan terdekat – yaitu misalnya Pemko Lhokseumawe. Misalnya saja, Fakultas Hukum didalam pengembangan kurikulum dan perkuliahan mensyaratkan adanya Pelatihan

tambahan 1 (satu) gedung eks PDPK – Fakultas Ekonomi, 1 (satu) gedung utama Fakultas Pertanian sumbangan BRR Aceh - Nias dan 1 (satu) gedung tambahan Fakultas Pertanian – Eks Fakultas Ekonomi. Selain itu juga, Unimal telah memiliki asrama mahasiswa atas bantuan Kementerian Pemuda dan olah raga yang sayangnya sampai dengan saat laporan ini disusun belum dimanfaatkan. Gedung baru yang saat ini sedang dalam proses pembangunan di wilayah kampus utama Reuleut adalah fasilitas Laboratorium untuk salah satu Prodi di lingkungan Fakultas Teknik.

Masing-masing gedung kuliah ini telah dilengkapi dengan ruangan-ruangan perkuliahan serta fasilitas pendukung seperti kursi perkuliahan mahasiswa, meja dan kursi dosen, papan tulis, beberapa ruangan memiliki pendingin ruangan, namun fasilitas alat pembelajaran seperti OHP maupun LCD Projector dan Komputer/Notebook/Laptop belum tersedia untuk masing-masing ruangan. Fasilitas pendukung laboratorium seperti alat peraga juga masih sangat minim.

Fasilitas jalan masuk dari jalan raya menuju kampus sudah di aspal dengan baik – walaupun dalam kurun waktu lebih kurang 3 (tiga) tahun – 2009 sampai dengan 2011 – di beberapa ruas jalan utama ini mengalami kerusakan dan becek pada saat hujan. Jalan-jalan utama di lingkaran kampus dalam beberapa tahun ini sudah sangat baik, walaupun

Kemahiran Hukum berupa observasi dan praktek yang hanya memungkinkan jika dilakukan pada tempat-tempat dan instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Mahkamah Syar'iyah maupun Lembaga Pemasarakatan. Ketika Fakultas Hukum masih berada di Reuleut – ketercapaian atas tujuan instruksional khusus yang telah ditetapkan pada matakuliah kemahiran hukum sangat minim, dengan demikian pemindahan kampus ke Komplek Kampus Bukit Indah dianggap lebih baik. Namun demikian, proses pemindahan ini juga mengalami tantangan –dari internal civitas akademika Unimal sendiri maupun dari eksternal yaitu masyarakat yang tidak menginginkan Unimal terpisah-pisah, namun memperhatikan kondisi ketidaktersediaan gedung tentunya hal ini tidak dapat ditunda. Fakultas Hukum sendiri –sampai dengan saat ini belum memiliki gedung sendiri dan dengan semakin meningkatnya jumlah mahasiswa pada Fakultas Teknik maka kebutuhan tinggi bagi Fakultas Teknik untuk menggunakan semua gedung yang dimilikinya. Wawancara dengan Prof. A. Hadi Arifin, tanggal 5 Mei 2012, di Reuleut.

sekitar tahun 2009, pada ruas jalan antara jalan kembar utama di lingkungan kampus menuju Fakultas Pertanian kondisi jalannya sangat buruk pada masa hujan dan belum di aspal. Bahkan beberapa kali, penulis sempat mencatat berlangsungnya demonstrasi mahasiswa dari Fakultas Pertanian khususnya yang menuntut pembangunan jalan.

Fasilitas ketersediaan air bersih untuk sarana sanitasi masih minim dikarenakan tidak adanya sumber air permukaan – sehingga masing-masing gedung mengandalkan pada mesin pompa untuk mencukupi kebutuhan air. Terhadap kondisi ini, pada Dokumen Laporan Akhir Master Plan Unimal pada bagian catatan kesimpulannya disampaikan bahwa dibutuhkan pembuatan reservoir alam (berupa danau buatan) untuk memenuhi kebutuhan air, mengingat tidak adanya satu sumber airpun yang terdapat pada permukaan tanah serta mengupayakan pula sumber air dari PDAM atau provita terdekat dengan lokasi kampus utama Reuleut.

Fasilitas kantin atau pusat jajanan yang dikelola oleh Unimal belum tersedia – namun terdapat beberapa kantin kecil di lingkungan gedung perkuliahan. Kantin atau warung-warung yang ada dikelola oleh masyarakat sekitar yang mengambil lokasi di wilayah lahan Unimal dan berbatasan langsung dengan jalan utama yang menuju salah satu gedung Fakultas Teknik.

Di kampus utama ini juga terdapat Tower Listrik Tegangan Tinggi milik PT. PLN (Persero) yang melintas dalam lokasi tanah kampus Unimal dan posisinya tepat di atas lahan dan pancang-pancang rencana pembangunan gedung Fakultas Hukum. Keberadaan tower ini tidak diketahui secara pasti kapan mulai dibangunnya dan diakui oleh pihak UPT. Perencanaan Unimal sama sekali tidak mendapatkan persetujuan pembangunannya, bahkan pihak Unimal tidak mendapatkan informasi apalagi koordinasi pada masa pembangunan tower dimaksud.

Terkait dengan jaringan internet sebagai salah satu prasyarat utama bagi terpenuhinya akses informasi di wilayah kampus juga menjadi cobaan besar bagi civitas akademika. Seringkali akses dan jaringan yang tersedia menyebabkan hambatan bagi kelancaran aktivitas akademik khususnya. Terhadap kondisi ini pihak manajemen terus melakukan upaya perbaikan dan peningkatan fasilitas-fasilitas pendukungnya.

Kebersihan dan keamanan atas lingkungan gedung kampus

khususnya serta prasarana perkuliahan yang tersedia sampai dengan saat ini dilakukan oleh tenaga kebersihan dan tenaga satpam kampus yang merupakan pegawai honorer. Data terakhir yang dapat diakses, terdapat 41 (empat puluh satu) orang tenaga kebersihan dan 65 (enam puluh lima) personil pengamanan satpam untuk seluruh wilayah kampus. Sebagian besar tenaga honorer dimaksud direkrut dari masyarakat sekitar empat kampus, khususnya Reuleut dan Bukit Indah.

4.3. Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe

4.3.1. Lokasi

Kampus Bukit Indah merupakan kampus salah satu kampus yang dimiliki Unimal – merupakan hibah dari Exxon Mobil setelah berakhirnya masa eksplorasi dan produksi gas alam cair. Selain kompleks kampus Bukit Indah yang sebelumnya adalah diperuntukkan bagi kompleks perumahan pegawai Mobil Oil atau juga lazim dikenal dengan Exxon Mobil – Unimal juga mendapatkan hibah gedung olah raga (GOR) di wilayah Uteun Kot, Cunda yang saat ini dipergunakan sebagai ruang serba guna maupun untuk aktifitas olah raga bulu tangkis dan tennis meja. Pada lokasi sekitar GOR ini juga terdapat gedung kecil yang dipergunakan sebagai sarana perkuliahan bagi Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) sejak tahun 2008. Lokasi ini memiliki luas lahan lebih kurang 111 ha dengan jumlah gedung (eks perumahan) sebanyak lebih kurang 80 rumah.

Terkait dengan kampus Bukit Indah sendiri – lokasinya terletak di Paloh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe.⁶³ Secara administratif, Kecamatan Muara Satu adalah kecamatan termuda di Pemko Lhokseumawe – merupakan pemekaran dari Kecamatan Muara Dua dan mengambil lokasi pemerintahan kecamatan di Batuphat Timur. Lokasi kampus terletak diantara dua kemukiman yaitu Paloh Timur dan Paloh Barat serta berbatasan langsung dengan gampong

⁶³ Wilayah Pemerintahan Kota Lhokseumawe juga merupakan pemekaran Kabupaten Aceh Utara sejak tahun 2001 yang terletak pada posisi 04° 54' – 05° 18' Lintang Utara dan 96° 20' – 97° 21' Bujur Timur, yang diapit oleh Selat Malaka. Kota Lhokseumawe memiliki luas wilayah 181,10 Km² dan Kecamatan Muara Satu memiliki luas wilayah 55,90 Km².

Padang Sakti, Blang Pulo, Paloh dan Cot Trieng. Jumlah penduduk pada wilayah gampong sekitar jauh lebih banyak atau padat dibandingkan dengan penduduk di sekitar wilayah kampus Reuleut dengan mata pencaharian yang beragam. Khusus pada wilayah gampong Cot Trieng – mayoritas penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani dan pada sektor peternakan, namun untuk 3 (tiga) wilayah gampong lainnya rata-rata masyarakat memiliki mata pencaharian di sektor perkebunan dan jasa seperti PNS, POLRI, TNI, Swasta dan kontraktor. Pada masing-masing dokumen Profil Gampong tercatat adanya masyarakat yang belum memiliki pencaharian tetap ataupun pengangguran

4.3.2. Lahan

Lokasi kampus Bukit Indah terletak dekat dengan pabrik pengolahan LNG Arun. Luas lahan keseluruhan adalah 104 ha. Kondisi saat ini, Unimal belum memegang sertifikat lahan atas hibah ini. Hak pakai yang dimiliki oleh Unimal masih hanya berdasarkan Surat Perjanjian Hibah⁶⁴. Kondisi ini dalam pandangan penulis mengakibatkan lemahnya posisi Unimal atas asset-asset yang dimiliki – khususnya lahan yang dalam setahun terakhir tampaknya mulai dirambah oleh masyarakat sekitar untuk mendirikan bangunan-bangunan semi permanen yang kebanyakannya diperuntukkan warung. Pada beberapa bagian ruas jalan antara jalan masuk dari jalan raya Medan – Banda Aceh menuju kampus terdapat tanggul-tanggul beton yang sejak dulu dibangun untuk mencegah longsoran bukit khususnya pada musim hujan, sayangnya saat ini tanggul beton dimaksud telah dijebol oleh pihak-pihak untuk diambil tanahnya.

Kondisi lahan memiliki kontur perbukitan dan telah ditata sangat baik sejak masa awal pembangunannya. Secara umum, pada lokasi kampus ini terdapat beberapa ruas wilayah yang ditutupi oleh semak belukar dan belum mendapatkan perhatian lebih dari manajemen Unimal untuk dilakukannya pembersihan secara berkala. Beberapa upaya pembersihan khususnya di awal penggunaan kompleks ini telah dilakukan – namun dikarenakan tidak tersedianya alokasi dana pemeliharaan pada anggaran Unimal maka upaya pembersihan

⁶⁴ Wawancara dengan Yulius Rief Al Kahaly – Kepala UPT. Perencanaan Unimal, tanggal 31 Mei 2012, di Reuleut.

terhadap masing-masing wilayah diserahkan kepada unit kerja masing-masing. Sedangkan untuk ruas wilayah yang masuk pada wilayah Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak terdapat unit khusus yang bertugas untuk membersihkan. Hasil amatan penulis, hampir setiap sore di antara pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 – beberapa masyarakat sekitar ada yang memanfaatkan rumput-rumput ini untuk pakan ternaknya, sehingga secara rutin pada beberapa ruas wilayah semak tidak bertambah tinggi dan bersih. Selain itu, pada dua periode KKN PPM ini (semester ganjil dan genap TA 2011/2012) Unimal melalui Panitia Pelaksana KKN memprogramkan Unimal *Goes Green* – sebagai program kerja mahasiswa peserta KKN PPM yang hasilnya menunjukkan perubahan sangat berarti bagi penciptaan atmosfer akademik yang kondusif.

Jika pada lokasi kampus utama Reuleut —terdapat gangguan hewan ternak penduduk berupa lembu dan kambing— di lokasi ini juga tidak jauh berbeda, hanya saja kondisinya dari segi jumlah tidak terlalu banyak. Namun dikarenakan di sekitar lingkungan kampus terdapat semak-semak dan hutan kecil maka di lokasi ini juga sering terlihat monyet-monyet dan babi, khususnya sore hari setelah aktifitas perkuliahan berkurang. Di awal masa difungsikannya kampus, beberapa orang civitas akademika juga menjumpai ular. Namun secara umum, keberadaan binatang-binatang liar ini belum pernah dilaporkan menjadi gangguan atau ancaman bagi civitas kampus.

4.3.3. Prasarana yang tersedia

Prasarana gedung dan fasilitas di wilayah kampus Bukit Indah berbeda dengan kampus Reuleut. Gedung-gedung yang tersedia adalah bekas rumah tinggal penghuni kompleks perumahan yang dimanfaatkan sebagai ruangan kelas untuk perkuliahan. Di satu sisi, kondisi ini pada awal kepindahan ketiga fakultas dirasakan kurang nyaman, khususnya terkait dengan struktur bangunan, namun berbagai upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif terus dilakukan, diantaranya adalah dengan meruntuhkan sekat-sekat antar ruangan yang ada sebelumnya – sehingga luas kelas menjadi bertambah.

Pertambahan jumlah mahasiswa seiring dengan tahun ajaran baru pada masing-masing fakultas menjadi bagian penting dan perhatian penuh pada tingkat pimpinan fakultas, dikarenakan

ketersediaan ruang dan fasilitas lainnya akan sangat berpengaruh. Terhadap ruangan-ruangan yang telah tersedia juga dilengkapi dengan sarana kursi belajar mahasiswa, papan tulis namun sementara di lingkungan Fakultas Hukum belum tersedia meja dan kursi dosen sebagaimana halnya juga minimnya fasilitas pendukung pembelajaran OHP, LCD Projector, Komputer/Notebook/Laptop yang dapat dipergunakan oleh mahasiswa. Khusus di lingkungan Fakultas Ekonomi telah tersedia laboratorium komputer dan sedang dipersiapkan fasilitas Laboratorium Bahasa.

Sebagaimana halnya di Reuleut, jaringan internet di kampus BI juga masih belum memadai namun telah terlihat upaya perbaikan dan perluasan aksesnya. Fasilitas perpustakaan atau unit dokumentasi telah ada di masing-masing fakultas, begitu juga halnya dengan beberapa laboratorium pendukung perkuliahan. Namun pada beberapa prodi di lingkungan FISIP, ketersediaan fasilitas pendukung laboratorium masih minim.⁶⁵

Namun demikian, saat ini Unimal sedang membangun fasilitas laboratorium bagi beberapa jurusan di Fakultas Teknik di lingkungan kampus BI. Terhadap pembangunan gedung-gedung laboratorium ini pernah mendapatkan protes dan demonstrasi dari masyarakat sekitar kampus utama Reuleut dan telah mendapatkan pemberitaan yang luas – khususnya di wilayah Aceh melalui berbagai media cetak.⁶⁶ Pembangunan gedung laboratorium ini merupakan salah satu

⁶⁵ Terkait dengan ketersediaan prasarana laboratorium serta fasilitas-fasilitas pendukungnya telah berulang kali mendapatkan pembahasan pada tingkat Jurusan/Bagian/Prodi serta pimpinan dan senat universitas. Salah satu rapat senat yang penulis hadir dalam kapasitas sebagai anggota senat adalah pada hari Jum'at 16 Juni 2012, salah satu agendanya adalah penetapan SPP Tunggal yang kemudian mendapatkan pembahasan secara mendalam – khususnya atas kendala-kendala yang mungkin muncul atas implementasinya serta harapan – harapan terkait dengan penyediaan sarana pendukung perkuliahan yang juga harus menjadi prioritas pimpinan Unimal. Dekan FISIP dan salah seorang anggota senat perwakilan dosen di Fakultas Pertanian dan dikuatkan oleh Dekan Fakultas Pertanian mengungkapkan tentang kendala yang dihadapi oleh masing-masing fakultas karena minimnya fasilitas laboratorium yang tersedia.

⁶⁶ Salah satunya dimuat dalam harian berita Serambi Indonesia, 2 November 2011. Berikut cuplikan berita dalam harian dimaksud: "Seratusan warga dari

bentuk ketidakpuasan dan ketidakpercayaan orang kampung terhadap Unimal. Demonstrasi yang dilakukan oleh orang kampus merupakan bentuk eskalasi konflik yang terjadi.

Dikarenakan kampus ini sebelumnya adalah perumahan penduduk yang sangat elite – maka selain ruangan-ruangan yang telah disampaikan sebelumnya, pada kampus ini juga didapati beberapa gedung yang difungsikan oleh Unimal sebagai ruang perkantoran ataupun dekanat pada Fakultas Ekonomi, FISIP dan Fakultas Hukum⁶⁷. Khusus tentang hubungan kontrak antara Unimal dengan Zaratex – penulis tidak mengeksplorasi lebih mendalam pada tulisan ini. Namun terkait dengan interaksi sosial antara warga kampus dengan pihak Zarratex tidak terlihat adanya interaksi sosial yang intens. Keberadaan

Kecamatan Muara Batu, Dewantara, Bandar Baro, dan Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Rabu (2/11/2011) sekitar pukul 08.30 WIB, mendemo kampus Universitas Malikussaleh, Reuleut Kecamatan Muara Batu. Warga menuntut supaya pihak Unimal memindahkan pembangunan Laboratorium Fakultas Teknik di lokasi Bukit Indah Kota Lhokseumawe ke Kampus Utama Reuleut, Aceh Utara. Pengamatan Serambinews.com, setelah berkumpul di bawah tenda yang didirikan persis di Simpang Reuleut, lalu dengan membawa sejumlah poster, warga langsung bergerak menuju kampus Unimal yang berjarak sekitar 300 meter. Di depan gerbang Unimal warga melakukan orasi. Sekitar 90 menit kemudian seratusan warga kembali ke bawah tenda di simpang empat Reuleut, untuk melakukan dialog dengan pihak DPRK Aceh Utara. Dalam orasi tersebut warga juga membawa sejumlah poster diantaranya bertuliskan, "Kami seluruh masyarakat Aceh Utara ikhlas menyumbang biaya Reuleut pada tahun 1983. Sekarang kami merasa wajib mempertahankan agar kampus Reuleut ini tidak dijadikan kampus cadangan oleh Rektor Unimal cs,".

⁶⁷ Ketiga fakultas ini menempati beberapa ruas jalan yang tersedia, Fakultas Ekonomi mengambil lokasi perkuliahan di Jalan Kalimantan, jalan Bali dan eks gedung ISOL – serta dekanatnya pada eks gedung Hospital dan Mini Market serta Kantor Administrasi Jurusan pada Ruang Serba Guna yang bersebelahan dengan kolam renang; FISIP menempati seluruh ruas jalan Sumatera dan Batam, namun dikarenakan adanya pembangunan gedung Laboratorium Teknik pada ruas jalan Batam, maka keseluruhan perkuliahan dan Dekanat FISIP hanya menempati ruas jalan Sumatera. Fakultas Hukum sendiri untuk Dekanat dan perkuliahannya menempati ruas jalan Jawa. Lebih setahun ini, salah satu ruas jalan di kompleks kampus BI yaitu jalan Irian disewakan untuk aktivitas perkantoran Zarratex.

mereka sampai sejauh ini tidak membawa dampak negatif dalam hubungan sosial yang ada, namun terkait dengan kontrak sewa yang dikabarkan ada diantara kedua belah pihak juga menjadi bahan pembicaraan di kalangan civitas akademika.

Prasarana lain yang tersedia adalah lapangan tenis yang masih sangat baik dan dapat dipergunakan oleh civitas akademika, lapangan soft ball, kolam renang, jogging track serta eks gedung ISOL (sekolah internasional bagi anak-anak expatriat Mol), dan mushalla.

Fasilitas listrik yang tersedia sampai dengan saat ini relatif baik, namun untuk ketersediaan air serta fasilitas sanitasi masih sangat minim. Di setiap hari kerja, lebih kurang 2 (dua) jam – salah seorang petugas bagian umum di kampus BI akan menghidupkan pompa air dan menyalurkannya pada masing-masing fasilitas sanitasi yang masih dapat difungsikan⁶⁸. Salah satu hal yang sangat disayangkan terkait dengan ketidak tersediaannya air pada masing-masing ruang kuliah ini – sebagaimana halnya di Reuleut - perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari pimpinan Unimal.

Sebagaimana yang telah disampaikan di awal bab ini bahwa gambaran umum lokasi penelitian juga akan mendeskripsikan keberadaan Universitas Malikussaleh, untuk itu pada bagian berikut dalam tulisan ini akan memberikan gambaran umum tentang sejarah

⁶⁸ Informasi yang penulis dapatkan, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum dimana penulis menjadi salah seorang staf pengajar, kondisi WC dan Kamar mandi pada beberapa ruangan sudah tidak dapat difungsikan lagi sebelum dilakukannya rehab. Beberapa kerusakan yang dialami adalah, patahnya pipa, atau pipa yang tersumbat maupun bocor. Begitu juga halnya dengan fasilitas wc. Hal ini terjadi dikarenakan fasilitas-fasilitas dimaksud setelah ditinggalkan oleh penghuni kompleks – masa berakhirnya Mol sampai dengan dimanfaatkan kembali oleh Unimal adalah jangka waktu yang reatif panjang (lebih kurang 6 tahun), dengan demikian hal-hal yang terjadi seperti pipa yang sumbat dan bocor sangat mungkin terjadi. Menurut informasi pengelola kampus BI yang juga merupakan Humas Unimal – Heikal – pembangunan instalasi jaringan air yang baru masih sangat tidak mungkin dilakukan dalam jangka waktu dekat dikarenakan tingginya biaya dan belum dialokasikannya pada DIPA Unimal. Distribusi air yang ada saat ini didapatkan tidak melalui PDAM Tirta Mon Pase namun pembelian kepada pihak PT. Arun LNG. Co.

perkembangan Universitas Malikussaleh dan masa penergian Universitas Malikussaleh.

4.4. Sejarah Perkembangan Universitas Malikussaleh (1969-2000)⁶⁹

Mengkaji secara historis, sejak awal berdirinya Unimal - meskipun kecil - namun memiliki spirit kemajuan yang besar⁷⁰. Unimal mengambil nama besar Sultan Kerajaan Samudera-Pasai pertama yang keberadaannya menjadi landasan semangat estafet kepemimpinan dan pembangunan. Sifat kepeloporan, kedinamisan, serta patriotismenya Sultan Malikussaleh menjadi bagian yang terus diimplementasikan dalam keseluruhan aktivitas segenap civitas akademika Unimal. Kerajaan Islam Samudera Pasai dalam sejarah tercatat sebagai Kerajaan Islam pertama di Nusantara yang menjadi cikal bakal pusat pengembangan dan penyebaran agama Islam di kawasan Nusantara dan Asia Tenggara serta merupakan pusat peradaban Islam, pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni ternama sehingga pada masa itu, kerajaan Samudera Pasai telah memberikan sumbangan kemajuan dan kemakmuran bagi segenap lingkungannya. Universitas ini juga mewarisi semangat juang Sultan Malikussaleh yang ketika berkuasa telah menghasilkan *syech* (guru besar) dan ilmuwan lainnya yang tersebar ke Jawa dan kawasan Asia Tenggara. Sehingga kecemerlangan pemikiran mereka pada saat itu telah memberi dampak besar pada Era Kemakmuran dan Kejayaan (*Welfare State*) atau "*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*", suatu Negeri Indah, Adil, dan Makmur yang Diridhai Allah SWT.

Sultan Malikussaleh bukan saja telah mampu meletakkan dasar yang kokoh pada masanya, bahkan fondasi yang pernah ia tegakkan

⁶⁹ Informasi atas sejarah perkembangan Unimal didapat melalui berbagai arsip dan dokumentasi diantaranya Memorandum Akhir Jabatan Rektor Unimal masa Rektor Prof. A. Hadi Arifin, SE., M.Si, Profil Unimal yang dimuat dalam website <http://unimal.ac.id>., dokumen draft buku Sejarah Berdirinya Universitas Malikussaleh, transkripsi rekaman wawancara Tim Perumus RANPERDA UNIMA dan STAIM bersama H.A. Hamid Hasan (mantan Ketua DPRK Aceh Utara) serta wawancara dengan berbagai pihak.

⁷⁰ Lihat, Dokumen draft buku Sejarah Berdirinya Universitas Malikussaleh; lihat juga Memorandum Akhir Jabatan Rektor Unimal masa Rektor Prof. A. Hadi Arifin, SE., M.Si.

telah mewarnai watak dan *spirit* bangsa ini hingga sekarang. Meskipun di daerah Aceh Kerajaan Samudera Pasai telah lenyap dan Malikussaleh juga telah wafat, namun semangat kepeloporan, kedinamisan, serta patriotismenya masih tetap terukir di sanubari dan menjadi pendorong perjuangan bangsa ini.

Dari segi organisasi atau kelembagaan, cikal bakal pendirian Universitas Malikussaleh pada tahun 1969 digagas oleh Abdul Wahab Dahlawy⁷¹, ketika itu menjabat sebagai Bupati Aceh Utara yang juga merupakan tokoh pembaharuan di Aceh Utara. Di awal pendiriannya, melalui Surat Keputusan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor: 01/TH/1969 tanggal 12 Juni 1969 didirikan akademi yang bernama Akademi Ilmu Agama (AIA) bertempat di Lhokseumawe - ibukota Daerah Tingkat II Aceh Utara waktu itu. Dalam perkembangannya, pada tahun 1971 melalui akta notaris nomor 15 tertanggal 17 Juli 1971 telah didaftarkan Yayasan Perguruan Tinggi Islam (YPTI) sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap pengembangan AIA.

AIA sendiri selanjutnya dirubah namanya menjadi Perguruan Tinggi Islam dengan jurusan Akademi Syariah, Akademi Ilmu Politik, Akademi Tarbiyah serta Dayah Tinggi/Pesantren Luhur. Perguruan Tinggi Islam ini mengalami perubahan nama lagi menjadi Perguruan Tinggi Islam Malikussaleh (disingkat dengan sebutan PERTIM) yang dicantumkan dalam Surat Keputusan tertanggal 24 Mei 1972.

Pada kurun waktu tahun 1972 sampai dengan 1980 PERTIM mengalami keadaan yang dianggap kurang menentu sehingga pada tahun 1980 (tidak diketahui dengan pasti tanggal serta bulannya) diadakan rapat pengurus yayasan dengan hasilnya melahirkan beberapa keputusan yaitu membentuk pengurus baru dan mengubah nama Yayasan Perguruan Tinggi Islam Malikussaleh (PERTIM) menjadi Yayasan Universitas Malikussaleh (UNIMA). Keberadaan yayasan ini diperkuat dengan Akte Notaris No. 9 dan didalamnya terdapat 3 Fakultas yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Sosial dan Politik serta Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.

Dalam perjalanannya UNIMA pada masa itu belum dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut atas keberadaan suatu universitas sehingga melalui Akte Notaris No. No. 054 tertanggal

⁷¹Ibid.

16 Februari 1981, UNIMA dirubah lagi menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Malikussaleh yang didalamnya terdapat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara dan Administrasi Niaga dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Pemerintahan, D III Kesekretariatan – dan Sekolah Tinggi Teknik dengan jurusan Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik dan Manajemen Industri serta Fakultas Syariah.

Dalam sejarahnya yang panjang dan melalui proses yang rumit pula, akhirnya tanggal 18 Juli 1984 dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0607/0/1984 Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN) memperoleh *Status Terdaftar*. Sedangkan Sekolah Tinggi Teknik (STT) mendapat giliran status terdaftar pada tanggal 24 Agustus 1984, dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0392/0/1984. Selanjutnya pada tahun 1986, telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 029/SK/PPS/Kop.l/1986 tertanggal 27 Februari 1986 dan pada saat itu, Unimal telah memiliki 7 (tujuh) fakultas, yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Administrasi, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Fakultas Syariah.

Penentuan lokasi kampus Unimal sebelumnya dilakukan melalui studi evaluasi⁷² pada lima lokasi yaitu, Kampus Reuleut, Cot Kareung, Cot Girek, Bukit Rata dan Lancang Garam. Penilaian terhadap masing-masing calon lokasi dilakukan dengan menentukan kriteria-kriteria sebagai berikut: 1) Kesesuaian RUTRK dan Kendala Geofisik masing-masing lokasi; 2) Keunggulan relatif masing-masing lokasi; 3)

⁷² Wawancara dengan Prof. A. Hadi Arifin, tanggal 5 Mei 2012, di Lhokseumawe. Lihat juga, dokumen Laporan Akhir Studi Evaluasi Calon Lokasi Kampus Universitas Malikussaleh, tahun 1992 dilakukan oleh Prof. DR. H. Abdullah Ali, M.Sc (dkk). Tim ini dibentuk oleh Bupati melalui SK No. 425.12/11/SK/1991 tanggal 15 Februari 1991. Laporan ini merupakan bagian dari kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tk II dengan Univ. Malikussaleh. Tujuan dilakukannya studi ini adalah untuk mendapatkan sebuah lokasi kampus Universitas Malikussaleh yang sesuai untuk pembangunan jangka panjang. Studi ini dilakukan dengan memperhatikan faktor ketersediaan lahan, jarak tempuh dengan ibu kota pemerintahan, faktor-faktor fisik lokasi juga faktor sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat bersangkutan.

Ketersediaan prasarana masing-masing lokasi; 4) Ketersediaan sarana dan lain-lain masing-masing lokasi; 5) Perhitungan indeks nilai evaluasi masing-masing lokasi; 6) Aspek sosial ekonomi calon lokasi; 7) aspek sosial budaya. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa urutan kesesuaian calon lokasi Unima adalah berturut-turut Lancang Garam, Cot Kareung, Bukit Rata, Cot Girek dan Reuleut. Penilaian dengan bobot nilai dan skor. Namun demikian, dalam laporan ini disampaikan bahwa lokasi Lancang Garam sekalipun memiliki skor tertinggi namun tidak mungkin dapat dikembangkan sebagai lokasi karena luas lahan yang sangat terbatas. Lokasi Bukit Rata dengan skor terendah juga kurang sesuai dengan pengembangan Unima (terkait dengan rencana kampus di Bukit Rata, informasi yang penulis dapatkan melalui Amrizal J. Prang⁷³ – salah seorang dosen di FH Unimal dan pada saat itu menjabat sebagai Presiden BEM Unimal – diajak oleh Bupati Aceh Utara (Tarmizi A. Karim) untuk survey ke lokasi. Beliau menyampaikan bahwa dalam dialog dengan Bupati – dari perwakilan mahasiswa menyampaikan “... *bak kamoe, pah hino pak. buat kami mahasiswa yang penting ada kampus, Pak. Dimanapun lokasinya – sepanjang dilakukan pembangunan untuk kampus maka mahasiswa pasti ikut*”. Lebih lanjut, dalam diskusi ini Bupati menyampaikan bahwa “*kon hino menarik lokasi hino. Tapi, menyoe bak lon lokasi hino susah, hana kampung, sepi, dan hana cocok, lebih got ta mita lokasi laen.*” Lebih lanjut dalam penjelasannya Amrizal menyampaikan bahwa “pada saat itu, kami mahasiswa tidak faham politik praktis, dan ternyata kondisinya sampai sekarang politik ini masih ada, dan tampaknya pada saat itu Bupati berusaha menggiring agar lokasi-lokasi yang disurvey pada saat itu tidak disetujui. Ada kecenderungan - yang akhirnya diketahui kemudian oleh Amrizal - bahwa Bupati menginginkan lokasi di Lhoksukon. Apridar (yang saat itu menjabat Pembantu Rektor II juga ikut serta dalam survey ini) menyatakan hal senada bahwa “...walaupun pada saat itu Keuchik gampong menyampaikan bahwa lokasi ini jauh lebih tepat dengan beberapa pertimbangan seperti ketersediaan air, lokasi yang tidak melanggar rencana tata ruang, namun Bupati masih menganggap lokasi di jalan elak ini tidak sesuai. Pada saat survey bahkan terlihat dua unit reo TNI – yang akhirnya menjadi penguat bahwa kondisi di

⁷³ Wawancara dengan Amrizal J. Prang, tanggal 12 Juni 2012, di Blang Pulo

jalan elak ini tidak representatif – apalagi jika disandingkan dengan masa konflik pada saat itu”.

Hasil dari studi evaluasi ini dalam bagian penutupnya menyampaikan bahwa calon lokasi Cot Kareung merupakan calon lokasi yang paling ideal setelah Lancang Garam. Calon lokasi ini memiliki skor tertinggi untuk kesesuaian dengan RUTRK/D dan ini bermakna bahwa untuk jangka panjang tidak akan ada masalah yang berkaitan dengan tata ruang. Skor fisik yang tertinggi menunjukkan bahwa calon lokasi Cot Kareung relatif lebih mudah untuk dijadikan lokasi kampus. Kemungkinan adanya kendala sosial budaya untuk pengembangannya sebagai lokasi kampus lebih kecil dibandingkan dengan lokasi lainnya, kecuali Lancang Garam. Dari aspek sosial ekonomi, calon lokasi ini memiliki skor terendah. Hal ini bermakna bahwa untuk pengembangan Cot Kareung dengan wilayah kota adm Lhokseumawe lainnya yang telah berkembang. Prioritas utama untuk adanya integrasi pengembangan tersebut adalah pembangunan jalan arteri yang menghubungkan Cot Kareung dengan Cunda. Mengingat adanya dampak positif pembangunan jalan tersebut terhadap harga tanah maka sebelum jalan dibangun, lahan yang direncanakan untuk lokasi UNIMA harus sudah dibebaskan dan dipagar. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya masalah yang berkaitan dengan pertanahan.

Pada masa sekitar tahun 1984, Unimal berkampus di Reuleut, Cot Tgk. Nie Kec. Muara Batu dengan luas tanah kampus lebih kurang 100 ha. Lokasi ini telah memiliki gedung induk permanen dan 20 ruang kuliah semi permanen.⁷⁴ Dua tahun setelah ini yaitu pada tahun 1986, STAN dan STT mengalami kondisi yang tidak begitu baik khususnya dari segi proses pembelajaran sehingga pengurus yayasan mengambil keputusan untuk menyelenggarakan rapat yang hasilnya memutuskan untuk membentuk panitia pendirian Universitas Malikussaleh. Panitia ini diketuai oleh Drs. Hasan Basry A. Thaleb dan sekretaris Drs. A. Hadi Arifin.⁷⁵

⁷⁴ Informasi tercantum dalam dokumen Laporan Akhir Studi Evaluasi Calon Lokasi Kampus Universitas Malikussaleh, tahun 1992.

⁷⁵ Prof. A. Hadi Arifin merupakan dosen tetap pada Fakultas Ekonomi Unimal sejak tahun 1986. Pengabdian selama lebih dari 20 tahun membuat namanya menjadi tokoh pengajar yang paling senior di lingkungan kampus.

Melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0584/0/1989 tanggal 11 September 1989 Universitas Malikussaleh disahkan, dan terdiri dari Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Hanya saja Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) tidak memiliki status terdaftar, sehingga pada tahun 1990 FKIP ditutup. Kini Universitas Malikussaleh berencana untuk membuka kembali Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini dalam beberapa tahun kedepan demi menyambut permintaan masyarakat atas tersedianya tenaga guru khususnya pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Aceh.

Kurun waktu tahun 2000 dimulailah upaya penegrian Universitas Malikussaleh⁷⁶ yang dilatarbelakangi oleh faktor-faktor sosial dan politik Indonesia – khususnya Aceh pada masa itu yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Gambaran tentang proses penegrian Unimal akan disampaikan pada bagian tersendiri pada bab ini dengan pertimbangan khusus – bahwa momentum penegrian Unimal sebagaimana halnya dengan konflik yang melanda Aceh ternyata turut membawa dampak atas Unimal.

Prestasi demi prestasi telah ia raih, atas dasar hal tersebut ia terpilih sebagai Rektor Universitas Malikussaleh pada tahun 1999, dan selanjutnya berupaya secara optimal untuk menegerikan Unimal pada tahun 2001. Dan pada 16 Januari 2009, A. Hadi Arifin diinaugurasikan sebagai profesor pertama Unimal bidang Ekonomi dalam Sidang Senat Universitas Malikussaleh yang juga dihadiri oleh Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA dari Universitas Indonesia dan Prof. Dr. dr. Fadil Oenzil, Sp. OG dari Universitas Andalas dengan pidato pengukuhan guru besar yang berjudul "*Ekonomi Islam: Sumber Etika Dalam Transformasi Sistem Ekonomi.*"

⁷⁶ Lihat, Memorandum Akhir Jabatan Rektor Unimal masa Rektor Prof. A. Hadi Arifin, SE., M.Si.

4.5. Penegerian Universitas Malikussaleh (2000-2001)

Universitas Malikussaleh dinegerikan pada tahun 2001 oleh Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Upaya penegerian ini dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Senat Universitas Malikussaleh tentang Persetujuan Penegerian tertanggal 21 Desember 2000 ditandatangani oleh Ketua Senat dan Anggota Senat Universitas Malikussaleh. Saat itu kondisi politik di Aceh ditandai oleh konflik berkepanjangan telah menimbulkan dampak yang serius dan mendalam terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat Aceh, berupa kehilangan harkat dan martabat, degradasi nilai-nilai sosial yang semakin memprihatinkan dan semakin menjauhkan dari suasana masyarakat madani (*civil society*). Apabila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut tanpa upaya penyelesaian yang kongkrit dan komprehensif, maka dapat menimbulkan ancaman terjadinya *disintegrasi bangsa*.

Untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat Aceh kepada Pemerintah Pusat yang berkesinambungan dalam suasana masyarakat Madani, diperlukan adanya usaha untuk melahirkan sebuah Universitas Negeri Kedua setelah Universitas Syiah Kuala yang merupakan dambaan masyarakat Samudera Pasai khususnya dan masyarakat Aceh umumnya. Upaya ini merupakan bagian dari proses penyelesaian konflik Aceh yang menyeluruh sebagai suatu kebijakan strategis politik, mengingat wilayah Samudera Pasai yang terdiri dari Kabupaten Aceh Utara, Bireuen, Pidie, Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Aceh Tenggara yang sebahagian wilayahnya merupakan daerah pusat konflik paling bergolak. serta paling intensif menentang pemerintah pusat sebagai akibat dari ketidakadilan dan kekeliruan kebijakan Pemerintah Pusat di masa lalu. Disamping itu, di wilayah tersebut juga memiliki *deposit* sumber daya alam yang maha kaya yang dapat diolah bagi kemakmuran masyarakat.

Menteri Pendidikan Nasional dengan keputusannya Nomor: 216/P/2000 tanggal 16 November 2000 membentuk Tim Persiapan Perubahan Status Universitas Malikussaleh Lhokseumawe dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), selanjutnya disingkat Tim Persiapan. Tim Persiapan bertugas mempersiapkan pelaksanaan pendirian Universitas Negeri Malikussaleh Lhokseumawe secara bertahap sampai terpenuhinya

seluruh persyaratan pendirian menjadi universitas negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 004/D/T/2001 Tanggal 2 Januari 2001 kepada Rektor Universitas Malikussaleh mengenai surat Dirjen Pendidikan Tinggi kepada Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 3458/D/T/2000 Tanggal 2 Oktober 2000 tentang kesiapan Universitas Malikussaleh menjadi Perguruan Tinggi Negeri yang telah mendapat disposisi Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 6015/TUM/2000 Tanggal 21 Desember 2000.

Dirjen Pendidikan Tinggi dengan surat Nomor: 1252/D/T/2001 Tanggal 24 April 2001 mempertanyakan kepastian status Universitas Malikussaleh apakah milik masyarakat Aceh Utara dan dibiayai dengan APBD atau milik pemerintah dan dibiayai dengan APBN. Sekiranya tetap diproses penegeriannya maka Peraturan Daerah Nomor: 26 Tahun 1999 otomatis akan gugur setelah terbitnya Keputusan Presiden tentang Penetapan Universitas Malikussaleh sebagai Perguruan Tinggi Negeri.

Menjawab surat Dirjen Pendidikan Tinggi mengenai status pemrosesan Penegerian Universitas Malikussaleh, maka Rektor Universitas Malikussaleh dengan surat Nomor: 540/UNIMA/H/2001 Tanggal 28 April 2001, menjelaskan bahwa program penegerian Universitas Malikussaleh adalah suatu aspirasi dan permintaan masyarakat Aceh Utara khususnya dan masyarakat Aceh pada umumnya, yang menjadi bagian dari upaya penyelesaian konflik Aceh dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Aceh untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini bermaksud bahwa dengan *modal dasar* dari milik masyarakat Aceh Utara dapat diupayakan pengembangannya oleh pemerintah pusat untuk penegeriannya, serta menyerahkan sepenuhnya menjadi *milik pemerintah pusat* setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden R.I.

Berkenaan dengan penetapan status Universitas Malikussaleh sebagai Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Pendidikan Tinggi mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan Nomor : 1620/D/T/2001 Tanggal 8 Mei 2001. Dengan pertimbangan antara lain, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 216/P/2000 tentang Pembentukan Tim Persiapan Penegerian Universitas Malikussaleh tertanggal 16 Nopember 2001 merupakan dasar yang kuat untuk proses penetapan status tersebut di atas. Dalam

Keputusan Menteri tersebut di atas, terkandung maksud bahwa persiapan penegerian dilaksanakan secara bertahap sampai terpenuhinya seluruh persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dirjen Pendidikan Tinggi telah melakukan pembinaan untuk persiapan tersebut antara lain mengalokasikan anggaran pembangunan.

Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Nomor : 264/MPN/2001 Tanggal 14 Mei 2001 yang ditujukan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara menyampaikan usulan penetapan status Universitas Malikussaleh sebagai Perguruan Tinggi Negeri melalui surat Keputusan Presiden. Dasar pertimbangannya antara lain adalah sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 216/P/2000 tanggal 16 Nopember 2000 tentang Pembentukan Tim Persiapan Penegerian Universitas Malikussaleh. Departemen Pendidikan Nasional telah mulai melakukan pembinaan untuk persiapan tersebut melalui pengalokasian anggaran pembangunan untuk peningkatan kualitas pembelajaran mulai tahun anggaran 2001. Secara menyeluruh persyaratan akademik yang dimiliki Universitas Malikussaleh telah mendekati persyaratan sebuah perguruan tinggi negeri, sedangkan kekurangan yang ada (seperti peningkatan status program studi) dapat diatasi secara bertahap mulai tahun anggaran 2002. Secara administratif, masih diperlukan beberapa proses untuk penetapan status negeri yaitu:(1) pengalihan asset dari Yayasan Pendidikan Malikussaleh kepada Pemerintah Pusat dan (2) pengalihan status pegawai swasta menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor: 170/M.PAN/7/2001 Tanggal 4 Juli 2001 kepada Menteri Pendidikan Nasional menyarankan, penetapan Universitas Malikussaleh menjadi Perguruan Tinggi Negeri seyogyanya dilakukan persiapan pendirian terlebih dahulu yang penetapannya diatur dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Selanjutnya pendirian Universitas Malikussaleh akan diproses penetapannya melalui Keputusan Presiden setelah langkah/tahapan persiapan dimantapkan dengan memperhatikan skala prioritas dan kondisi keuangan negara serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Rektor Universitas Malikussaleh melalui surat Nomor: 367/UNIMA.H/2001 Tanggal 6 Juli 2001 mengharapkan kepada Menteri Pendidikan Nasional agar pendirian Universitas Malikussaleh sebagai Perguruan Tinggi Negeri dapat diusulkan oleh Menteri Pendidikan Nasional kepada Presiden untuk penetapan Keputusan Presiden sebagai dasar hukum pendiriannya. Demikian pula diikuti dengan surat Nomor: 368/UNIMA.H/2001 Tanggal 7 Juli 2001 yang ditujukan langsung kepada Presiden R.I untuk penetapannya.

Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Nomor: 71100/MPN/2001 Tanggal 18 Juli 2001 mengajukan permohonan kepada Presiden R.I untuk penetapan Universitas Malikussaleh sebagai Perguruan Tinggi Negeri. Dengan memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut di atas dan berpendapat bahwa Universitas Malikussaleh telah memenuhi persyaratan untuk menjadi perguruan tinggi negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. Berkenaan dengan hal di atas dan khususnya memperhatikan aspirasi masyarakat Aceh, dimohon kepada Presiden untuk dapat menerbitkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Universitas Malikussaleh sebagai Perguruan Tinggi Negeri.

Rektor Universitas Malikussaleh menyampaikan surat dengan Nomor: 371/UNIMA.H/2001 Tanggal 30 Juli 2001 kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan menyampaikan Aspirasi Rakyat Aceh untuk menetapkan Universitas Malikussaleh yang berkedudukan di Lhokseumawe dan Aceh Utara sebagai Perguruan Tinggi Negeri dengan Keputusan Presiden sebagai dasar hukum pendiriannya.

Puncak dari upaya yang maksimal untuk meningkatkan status Universitas Malikussaleh yakni ketika Presiden Megawati Soekarno Putri mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 95 Tahun 2001, tanggal 1 Agustus 2001 mengenai Penegerian Universitas Malikussaleh. Dengan dinegerikannya Universitas Malikussaleh berarti di Nanggroe Aceh Darussalam atau sekarang disebut Provinsi Aceh - yang berpenduduk sekitar 4,3 juta jiwa tersebut sudah memiliki dua universitas negeri, yakni Universitas Syiah Kuala (*Unsyiah*) Darussalam Banda Aceh dan Universitas Malikussaleh (*Unima*) di

Lhokseumawe, Aceh Utara, serta satu Perguruan Tinggi Agama Islam (IAIN) Ar-Raniry di Darussalam, Banda Aceh.

Akhirnya, pada hari Sabtu Tanggal 8 September 2001 di Lhokseumawe, Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri meresmikan Pendirian Universitas Malikussaleh sebagai Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagi Masyarakat Aceh, semoga Allah SWT meridhai upaya kita bersama dalam mencerdaskan bangsa. Saat ini Universitas Malikussaleh memiliki singkatan nama Unimal. Sejak Unimal menjadi negeri, maka kampus ini yang dulunya dianggap sebagai kampus milik rakyat berubah menjadi milik pemerintah. Dalam konteks konflik Aceh pada tahun 1989-1998, maka Unimal dipandang sebagai simbol kehadiran pemerintah di tengah masyarakat Aceh yang sudah enggan mengakui hegemoni pemerintah.

Kondisi saat ini, Unimal telah memiliki 5 (lima) Fakultas dengan 22 (dua puluh dua) Program Studi, dengan total jumlah mahasiswa adalah 8.757 orang. Informasi dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Jumlah Mahasiswa Unimal Menurut Fakultas dan Program Studi

No.	Fakultas	Program Studi	Jumlah Mhs Laki-Laki	Jumlah Mhs Perempuan	Jumlah Mahasiswa
1.	TEKNIK	1. T. Sipil	507	113	620
		2. T. Mesin	333	2	335
		3. T. Industri	181	90	271
		4. T. Kimia	69	146	271
		5. T. Elektro	282	24	306
		6. T. Arsitektur	140	76	216
		7. Informatika	318	219	537
		JUMLAH	1.742	670	2.412
2.	EKONOMI	1. Ilmu Manajemen	729	619	1.348
		2. PDPK	0	178	178
		3. Akutansi	262	391	653
		4. Ilmu Ekonomi Pembangunan	199	142	341
		5. PP Ilmu Manajemen (S2)	81	33	114
			JUMLAH	1.271	1.363
3.	PERTANIAN	1. Agronomi	227	189	416
		2. Agribisnis	206	185	391
		3. Budi Daya Pertanian	251	133	384
			JUMLAH	684	507
4.	ISIP	1. Ilmu Administrasi Negara	295	287	582
		2. Sosiologi	128	169	297
		3. Politik	186	44	230
		4. Antropologi	89	85	174
		5. Komunikasi	168	177	345
			JUMLAH	866	762
5.	HUKUM	Ilmu Hukum	463	205	668
6.	PSPD	PSPD	69	155	224
JUMLAH			5.095	3.362	8.757

Sumber: Data Rekapitulasi Jumlah Mahasiswa Semester Ganjil 2011/2012, Biro Akademik Unimal.

Deskripsi terkait dengan kondisi Unimal, khususnya relasi yang ada antara Unimal dengan orang kampung sekitar kampus Unimal masa setelah penegrian Unimal akan disampaikan pada bab berikut tulisan ini. Hal ini dilakukan secara sengaja untuk

dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif kepada pembaca terkait dengan interaksi sosial dan perkembangan kampus Universitas Malikussaleh.



BAB 5

INTERAKSI, KONFLIK DAN AKULTURASI ANTARA ORANG KAMPUS DENGAN ORANG KAMPUNG

5.1. Interaksi Sosial

Interaksi sosial atau yang juga lazim disebut dengan proses sosial adalah merupakan syarat utama terjadinya aktifitas-aktifitas sosial. Gillin dan Gillin (1954)⁷⁷ menyampaikan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi antara kelompok tersebut sebagai kesatuan dan biasanya tidak menyangkut pribadi anggota-anggotanya.

Interaksi sosial sendiri hanya mungkin dapat terjadi jika terpenuhi dua syarat utamanya, yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Kedua syarat ini sifatnya adalah kumulatif, karena tidak mungkin dapat tercipta interaksi sosial jika salah satu dari kontak sosial ataupun komunikasi ini tidak terjadi, walaupun dalam sifatnya nanti — interaksi sosial bisa saja terjadi secara positif maupun negatif.

Interaksi sosial yang terjadi antara orang kampus dengan orang kampung sekitar kampus utama Reuleut dan Bukit Indah lebih didominasi oleh mahasiswa, dibandingkan keberadaan dosen maupun

⁷⁷ Gillin & Gillin, *Cultural Sociology*, a revision of an Introduction to Sociology, The Macmillan Company, New York, 1954, hlm 489, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1982, hlm. 61.

pegawai. Hal ini dikarenakan dalam kenyataannya interaksi yang cukup tinggi intensitasnya dilakukan oleh mahasiswa dengan orang kampung. Interaksi-interaksi yang terjalin diantaranya dimulai dari perjanjian persewaan kamar atau rumah indekost, interaksi dalam transaksi jual beli di kantin atau warung dan juga interaksi umum dalam keterlibatan mahasiswa yang bersangkutan pada aktivitas – aktivitas kampung, seperti khanduri, perayaan hari-hari keagamaan maupun aktivitas di kampung lainnya.

Interaksi antara orang kampung dengan dosen maupun pegawai Unimal sendiri tampaknya tidak cukup intens. Hal ini dikarenakan domisili yang bersangkutan tidak di wilayah kampung sekitar. Informasi yang penulis dapatkan, bahwa tidak cukup banyak dosen ataupun pegawai Unimal yang tinggal menetap di wilayah kampung kecuali beberapa orang saja yang memang warga asli kampung sekitar. Namun demikian, interaksi yang terjalin diantara dosen maupun pegawai dengan orang kampung cukup harmonis⁷⁸, hal ini ditandai dengan tidak adanya konflik personal yang pernah dilaporkan dan tingginya keterlibatan dosen maupun pegawai dalam aktivitas kampung.⁷⁹

⁷⁸ Wawancara dengan kelompok dosen dan pegawai, di antaranya wawancara dengan Prof. Jamaluddin, Sulaiman, T. Nazaruddin, Sumiadi, dan Syamsul Bahri tanggal 31 Mei 2012 di Reuleut.

⁷⁹ Secara langsung maupun tidak langsung, penulis melakukan observasi terhadap kondisi ini dan terlihat adanya berbagai aktivitas di kampung. Pihak kampus melalui Pimpinan Fakultas maupun Universitas kerap menerima undangan atas acara-acara yang dilaksanakan oleh kampung, bahkan orang kampung juga dalam beberapa kali kesempatan mengirimkan undangan untuk hajatan pribadinya.

5.2. Mengamati Interaksi Sosial antara Orang Kampus Unimal dengan Orang Kampung Reuleut

5.2.1. (dari) Kerjasama mengarah pada Konflik diakhiri dengan Kompromi

Mengamati interaksi sosial yang terjadi diantara orang kampus dengan orang kampung⁸⁰ sekitar kampus utama Reuleut – penulis mencoba merefleksikan pada pengalaman penulis sendiri ketika pertama sekali aktivitas perkuliahan kembali ke Kampus Utama Reuleut pada tahun 2008 setelah sebelumnya kampus berada di Kampus Lancang Garam dan Kampus Uteunkot Cunda.⁸¹ Pada masa itu

⁸⁰ Penulis akan menggunakan istilah orang kampus untuk menggambarkan civitas akademika Unimal, yaitu dosen, mahasiswa dan staf/pegawai sedangkan orang kampung adalah anggota masyarakat yang berasal dari dan bertempat tinggal di gampong sekitar kampus Unimal – khususnya kampus utama Reuleut dan kampus Bukit Indah. Istilah orang kampus dan orang kampung, penulis kutip dari tulisan Bambang Pranowo (*et al.*), *Op.cit.*, hlm 14.

⁸¹ Penulis adalah salah seorang dosen pada Fakultas Hukum Unimal. Pertama sekali menjadi dosen pada akhir tahun 2004 dan diangkat sebagai PNS pada tahun 2005. Di awal masa kerja penulis, FH Unimal berada di kampus Lancang Garam kemudian sekitar tahun 2006 – kampus FH dan kampus FE Unimal pindah ke kampus Uteunkot. Secara pribadi, penulis memandang bahwa interaksi yang terjadi dengan warga gampong sekitar (Lancang Garam dan Uteunkot) adalah tipikal interaksi sosial yang berlaku di masyarakat perkotaan. Hubungan-hubungan yang terjadi sebatas sapaan ketika bertemu atau kebetulan berpapasan di wilayah kampus. Namun, beberapa kolega dosen —khususnya dosen senior di lingkungan kampus memiliki interaksi sosial yang dapat dikatakan lebih erat dengan warga sekitar, hal ini dibuktikan dengan seringnya yang bersangkutan diundang oleh warga gampong untuk acara —acara *gampong* maupun acara-acara pribadi (seperti kenduri sunatan anak, perkawinan, dll). Begitupula sebaliknya, pihak Unimal dalam setiap acara yang diselenggarakan juga kerap mengundang pihak *gampong* —yang biasanya diwakili oleh Keuchik maupun Unsur Tuha Peut. Kondisi di Kampus Uteunkot— relatif sama, namun dikarenakan pada saat perkuliahan berlangsung di Uteunkot yang relatif lebih singkat, maka interaksi yang terjadi juga tidak terlalu kerap. Terhadap kondisi ini —penulis mencatat, interaksi sosial dalam bentuk yang negatif belum pernah terjadi diantara civitas akademika dengan warga gampong.

pro kontra kepulangan kembali⁸² ke Reuleut juga dirasakan oleh orang kampus, sebahagiannya menganggap bahwa kondisi kampus Reuleut⁸³ masih kurang layak untuk dilakukannya aktifitas perkuliahan serta jarak yang relatif jauh dari pusat kota Lhokseumawe turut mempengaruhi rencana ini. Namun di sisi lain kondisi kampus di Lancang Garam sudah sangat tidak mungkin lagi untuk bisa dimanfaatkan oleh masing-masing fakultas yang ada, ditambah lagi dengan semakin tingginya minat dan peluang penerimaan mahasiswa baru di Unimal.⁸⁴ Penulis beserta beberapa kolega di Fakultas Hukum Unimal pada saat persiapan pemindahan barang dan kelengkapan aktivitas perkuliahan (tahun 2008) pernah mengunjungi lokasi kampus Reuleut dan calon gedung Fakultas Hukum – yang saat itu statusnya adalah pinjam pakai gedung Fakultas Teknik. Beberapa hal yang terlihat mencolok adalah banyaknya binatang ternak, lembu dan kambing yang berkeliaran di dalam areal kampus termasuk di wilayah

⁸² Istilah “pulang kembali ke Reuleut” ini dikutip dari wawancara-wawancara dengan orang kampus, di antaranya; Prof Abdul Hadi Arifin - mantan Rektor Unimal periode 2001–2005 dan 2006–2010, tanggal 5 Mei 2012 di Lhokseumawe; Sumiadi - Dekan FH Unimal, tanggal 19 April 2012 di Blang Pulo, Zulfikar – Mantan Ketua BEM Unimal, tanggal 19 April 2012 di Reuleut, dan T. Nazaruddin - Sekretaris Senat Unimal, tanggal 19 April 2012 di Blang Pulo. Hal ini menunjukkan satu kondisi bahwa kampus utama adalah di Reuleut, sehingga pindah kembali ke reuleut adalah “pulang” —walaupun selama ini segala aktifitas Unimal berada di kampus Lancang Garam dan kampus Uteunkot.

⁸³ Dokumen Studi Evaluasi Calon Lokasi Kampus Universitas Malikussaleh tahun 1992 menyimpulkan bahwa lokasi Kampus Reuleut berada pada posisi kelima (terakhir) dari hasil survey lima calon lokasi kampus (Cot Kareung, Cot Girek, Lancang Garam, Bukit Rata dan Reuleut).

⁸⁴ Tentang kondisi pengembangan kampus di Lancang Garam juga terdapat pada Dokumen Studi Evaluasi Calon Lokasi Kampus Universitas Malikussaleh tahun 1991 yang kesimpulannya menunjukkan bahwa “...mengingat terbatasnya luas lahan untuk lokasi Lancang Garam, maka lokasi tersebut dianggap tidak layak untuk pengembangan Unima”, walaupun demikian dalam laporan ini juga disampaikan bahwa dari aspek ketersediaan prasarana masing-masing calon lokasi (diantaranya melihat pada tingkat pelayanan angkutan kota, kondisi jalan, prasarana air bersih, jaringan listrik PLN, drainase, jaringan telekomunikasi, jarak ke RS, dll) lokasi Kampus Lancang Garam memiliki skor tertinggi.

gedung fakultas -termasuk juga kotoran-kotoran binatang ternak ini.⁸⁵ Selain itu, terlihat juga bahwa beberapa kelengkapan fisik bangunan yang sudah rusak dan bahkan hilang – diantaranya jejak jendela, *handle* dan engsel pintu dan jendela. Beberapa bagian dari pintu dan jendela kayu telah dimakan rayap. Memperhatikan kondisi ini terbetik kesan dan sikap kurang antusias dari orang kampus – dalam hal ini dosen, namun demikian pimpinan fakultas menyampaikan bahwa kondisi-kondisi kekurangan ini akan sesegera mungkin diperbaiki oleh kampus, sebagaimana yang disampaikan dalam rapat pimpinan Unimal.

Membicarakan kembali tentang interaksi sosial antara orang kampus dengan orang kampung ini, artinya kita membicarakan tentang dua kelompok masyarakat yang berbeda. Orang kampus sering direpresentasikan sebagai orang elite⁸⁶ dan orang kampung – sebaliknya yaitu masyarakat yang masih rendah tingkat pendidikannya. Perbedaan diantara kedua kelompok masyarakat terkait dengan pola tingkah laku, kebiasaan maupun nilai sosial budaya ini bukan tidak mungkin menyebabkan terjadinya pertentangan.

Bentuk-bentuk interaksi sosial secara umum dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*) dan bahkan juga dapat berbentuk pertentangan atau pertikaian (*conflict*). Bentuk lain yang juga muncul disebut dengan akomodasi (*accomodation*) yaitu suatu tahap dalam hal mana pertikaian yang terjadi sebelumnya mungkin dapat diselesaikan dan diterima oleh para pihak sementara waktu. Hal ini dapat dimaknai bahwa masing-masing pihak belum

⁸⁵ Sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian awal bahwa tulisan ini diinspirasi oleh studi yang dilakukan oleh Bambang Pranowo pada tahun 1988, Op. Cit., yang salah satunya menunjukkan kondisi serupa tentang pembiaran hewan ternak. Untuk konteks tahun 2012 – saat penelitian ini dilakukan, penulis mencoba merefleksikan apakah pergantian waktu tidak mempengaruhi atas kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya dalam hal pembiaran hewan ternak pada lapangan-lapangan rumput.

⁸⁶ *elite* atau sebagaimana tertulis *eli-te* adalah 1) orang-orang terbaik atau pilihan dalam suatu kelompok; 2) kelompok kecil orang-orang terpadang atau berderajat tinggi (kaum bangsawan, cendekiawan, dsb). Lihat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan RI, 2002.

merasa puas dengan penyelesaian yang ada. Masing-masing bentuk interaksi sosial ini bukanlah merupakan kontinuitas antara satu sama lainnya, misal bahwa suatu hubungan itu pasti dimulai dari kerjasama – namun mungkin pula terjadi interaksi tersebut bermula dari persaingan ataupun konflik diantara para pihak.

Studi tentang interaksi sosial menurut Soerjono Soekanto⁸⁷ berguna untuk menelaah dan mempelajari banyak masalah di dalam masyarakat dan interaksi sosial pada dasarnya adalah kunci dari semua kehidupan sosial oleh karena tanpanya tidak mungkin ada kehidupan bersama.

Interaksi sosial yang terjadi diantara orang kampus dengan orang kampung Reuleut – dalam pandangan penulis adalah unik. Membicarakan hal ini, kita akan membicarakan kembali berbagai peristiwa dan hubungan yang ada diantara kedua kelompok masyarakat ini sejak tahun 1982.⁸⁸ Pada masa ini diketahui sejarah awal keberadaan Unimal di Reuleut, bahwa Pengurus Yayasan pada masa itu dengan dukungan⁸⁹ dari pihak Bupati maupun DPRD Aceh Utara merencanakan tersedianya satu lokasi tanah yang sangat memadai untuk pembangunan kampus Unima. Terhadap hal ini, Prof. A. Hadi Arifin menyampaikan bahwa,

“..... cerita awal kehadiran Unimal di Reuleut pertama sekali pada tahun 1982, pada waktu itu ada beberapa tokoh Aceh Utara - yang memiliki atensi tinggi kepada Unimal - menjajaki kemungkinan keberadaan kampus yang lebih representatif dari segi ketersediaan lahan tentunya. Untuk itu kemudian tokoh-tokoh tersebut mendatangi Keuchik Reuleut Timu pada masa itu yaitu Keuchik H.A. Gani yang hasilnya setelah dimusyawarahkan dengan masyarakat di desa

⁸⁷ Soerjono Soekanto., *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1982, hlm. 105.

⁸⁸ Wawancara dengan A. Hadi Arifin, tanggal 12 Mei 2012, di Lhokseumawe.

⁸⁹ Penting untuk dicatat disini bahwa dukungan pemerintah daerah Aceh Utara atas keberadaan lembaga pendidikan tinggi di Aceh Utara dan Unimal khususnya sangatlah tinggi. Berbagai bentuk dukungan mulai dari inisiatif awal kelahiran Unimal pada masa Bupati Ahmad Dahlawi sampai dengan diberikannya alokasi pembangunan kampus, serta dukungan atas penyelesaian konflik yang terjadi diantara masyarakat Reuleut dengan kampus Unimal.

tersebut disetujui bahwa Pemerintah Daerah dapat menggunakan tanah tersebut tapi dengan syarat memberikan ganti rugi.”

Lebih lanjut terkait dengan ganti rugi yang dimintakan oleh masyarakat pada masa itu adalah sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per meter persegi, namun terhadap harga ini, pihak Bupati pada masa itu yaitu Ali Basyah – menyampaikan ketidaksanggupan⁹⁰. Dalam proses selanjutnya para pihak menyepakati bahwa terkait dengan harga ganti rugi ini akan dibahas kembali dengan diadakannya musyawarah antara pihak pemerintah daerah dengan masyarakat. Pada saat itu, musyawarah diselenggarakan oleh Bupati dengan mengundang para tokoh⁹¹ dan masyarakat ke Pendopo Bupati Aceh Utara. Bupati menyampaikan bahwa dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang berasal dari dana Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) yang dikutip selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dari seluruh desa yang ada di Aceh Utara, mulai dari Panton Labu sampai dengan Samalanga. Dana ini diharapkan oleh Bupati dapat mencukupi untuk mendapatkan tanah seluas 100 ha, sehingga masing-masing masyarakat pemilik tanah akan mendapatkan Rp. 40,- (empat puluh rupiah) per meter perseginya.

Pada masa itu, masyarakat menyetujui tawaran Bupati ini dengan pertimbangan bahwa masyarakat sekitar sangat mendambakan didirikannya lembaga pendidikan di wilayah mereka, apalagi keberadaan lembaga pendidikan tinggi. Hal ini lebih lanjut dibuktikan oleh masyarakat dengan diberikannya hibah⁹² tanah

⁹⁰ Informasi didapat melalui Dokumen Pendapat Pemilik Tanah tentang Pertapakan Kampus Universitas Malikussaleh di Reuleut, disusun untuk menjawab Komentari M. Akmal – “Kasus Tanah Kampus Unimal di Reuleut (Gugatan Setelah Tertidur Pulas) pada harian Serambi Indonesia, Sabtu 17 Juni 2006.

⁹¹ Tokoh masyarakat yang hadir pada saat itu di antaranya: Muda Cut Ben, Yunus Puteh, Taleb Syamaun, Tgk. Ali Basyah, Tgk. H. Yusuf, Nubat Ali, M. Sufi B, M. Piah Ben, Tgk. Imum Noh (Yunus Abdullah), Geuchik Hasansyah, Jamil Ibrahim (informasi didapat melalui dokumen *draft* Buku Sejarah Unimal).

⁹² Terhadap hibah yang sudah diberikan ini, pihak Bupati Aceh Utara juga menerbitkan sertifikat penghargaan yang disampaikan sebagai ucapan terima kasih dan penghargaan kepada masyarakat dan kepala desa Reuleut

gampong Reuleut Timur seluas 5 ha.⁹³ Senada dengan hal ini, Keuchik Gampong Reuleut Timur⁹⁴ juga menyampaikan bahwa “...dengan adanya perguruan tinggi di Reuleut, maka masyarakat Reuleut mendapatkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi, daerah tersebut akan maju, tingkat kebodohan masyarakat akan berkurang dan peluang pekerjaan bagi masyarakat akan lebih besar”.

Hibah dan pemberian tanah kampus Unimal dengan harga yang relatif sangat murah ini disertai harapan yang besar dari masyarakat, bukan hanya terkait dengan harapan-harapan yang disampaikan pada bagian sebelumnya namun juga hal-hal yang lebih kongkrit yang kesemuanya ini dituangkan dalam bentuk perjanjian diantara masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Harapan dimaksud adalah terhadap 1) lahan yang telah dihibahkan kepada pemerintah Aceh Utara agar dimanfaatkan dengan baik, 2) Bagi masyarakat Reuleut yang telah dihibahkan tanahnya agar diberikan kesempatan kuliah di

Timu atas partisipasi dan keikutsertaannya yang tulus dan ikhlas. Surat ini tercatat diterbitkan pada tanggal 12 Desember 1989. Unimal sendiri juga menerbitkan tanda penghargaan serupa, tertanggal 9 Februari 2003, namun tidak diketahui persis maksud dari penerbitan sertifikat ini. Apakah dikarenakan adanya tuntutan pengakuan dari masyarakat atau sebagai bentuk komitmen Unimal atas hibah yang telah diberikan.

⁹³ Informasi didapat dari beberapa sumber diantaranya wawancara dengan Keuchik Reuleut Timur – Jakfar Hanafiah, tanggal 19 April 2012 di Reuleut Timur, Wawancara dengan A. Hadi Arifin, Tanggal 5 Mei 2012 di Lhokseumawe, Wawancara dengan Salahuddin, Abdoel Bahri dan Matsyah Raban (Penerima Kuasa dari Masyarakat Pemilik Tanah), tanggal 18 Mei 2012 di Simpang KKA, Wawancara dengan Azis - Asisten III Bidang Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara, (sebelumnya menjabat sebagai asisten ahli pemerintahan dan Kabag. Hukum dan Organisasi. Beliau mengikuti perkembangan sengketa tanah yang terjadi di Reuleut serta bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.), tanggal 12 Mei 2012 di Lhokseumawe. Lihat juga, dokumen Historis dan Cikal Bakal Pendirian Universitas Malikussaleh (didapat dari Keuchik Reuleut Timur – Jakfar Hanafiah) diajukan pada saat Unjuk Rasa Warga Gampong atas Pembangunan Gedung Laboratorium Teknik, 2 November 2011.

⁹⁴ Wawancara, tanggal 19 April 2012 di Reuleut Timur.

Unimal, 3) bagi masyarakat ini dibebaskan dari uang kuliah, 4) hendaknya diberikan Beasiswa.⁹⁵

Interaksi yang terjadi pada masa ini dapat dikategorikan sebagai kerjasama antara para pihak yaitu orang kampus dan orang kampung. Keberadaan Pemerintah Daerah diakui memiliki peranan yang sangat besar pada masa itu. Merujuk pada pendapat Charles H. Cooley sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto⁹⁶ bahwa kerjasama timbul apabila orang menyadari mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan – kepentingan tersebut; kesadaran akan adanya kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta – fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna.

Dalam prosesnya lebih lanjut, pihak Pemerintah Daerah melakukan pembayaran ganti rugi tanah setelah sebelumnya dilakukan proses pengukuran dan pendataan tanah/ tanaman masyarakat. Proses ini dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah beserta tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada saat pertemuan di Pendopo Bupati Aceh Utara. Proses pemberian ganti rugi tanah ini dilakukan sejak tahun 1983 – dan diambil oleh masyarakat bertempat di kantor Kecamatan Muara Batu serta sebahagiannya mengambil ke kantor Bupati Aceh Utara. Luas keseluruhan tanah pada saat proses pengukuran ini adalah 841,572 M2 (lebih kurang 84 Ha).⁹⁷

⁹⁵ Wawancara dengan *Keuchik* Jakfar Hanafiah, *Gampong* Reuleut Timur, tanggal 19 April 2012.

⁹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 73.

⁹⁷ Luas tanah awal yang disepakati untuk dialokasikan bagi pembangunan kampus adalah seluas 100 Ha, namun dalam perjalanannya beberapa Informan (diantaranya Yulius Rief Al Khaly – Kepala UPT Perencanaan dan Sekretaris II Tim Pembangunan Kampus Reuleut, Wawancara tanggal 31 Mei 2012, di Reuleut; Abdul Bahri – Masyarakat Reuleut, wawancara tanggal 18 Mei 2012, di Simpang KKA, Aceh Utara, ia menyampaikan hal senada bahwa tanah unimal ini kalau malam patoknya pindah sendiri, artinya pada masa pengukuran ini sebahagian pihak telah memindahkan patok-patok awal yang ditetapkan. Informasi lainnya yang penulis dapati terkait hal ini adalah adanya upaya dari beberapa orang pihak masyarakat yang tidak setuju atas ganti rugi tanah ini kemudian menukarkan tanahnya kepada pihak yang lain –hal ini selain mengakibatkan berkurangnya luas tanah sebagaimana yang

Pada saat pembayaran ganti rugi ini tidak terdapat informasi terkait dengan keberatan ataupun ketidaksetujuan masyarakat atas jumlah ganti rugi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, namun demikian diakui bahwa dikarenakan banyaknya jumlah masyarakat yang diberikan ganti rugi tanah ini ada kemungkinan satu atau duanya masih memegang sertifikat asli atau belum ditarik oleh pihak Panitia Pembebasan Tanah.⁹⁸

Sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian pendahuluan bahwa observasi awal penelitian ini menemukan bahwa adanya konflik antara warga kampus Unimal dengan orang kampung Reuleut bermula pada tahun 2001 ditandai dengan status penegrian Unimal oleh Presiden RI, walaupun juga diakui dan dirasakan bahwa riak-riak konflik telah berlangsung jauh hari sebelumnya. Konflik-konflik yang terjadi adalah merupakan konflik kecil yang bahkan di satu sisi terkesan untuk diabaikan atau dianggap tidak ada oleh sebahagian orang kampus⁹⁹ sendiri maupun juga orang kampung.¹⁰⁰

Walaupun ada kesan untuk tidak menganggap adanya konflik antara orang kampus dengan orang kampung, namun peneliti dengan mendasarkan pada konsepsi awal dalam penelitian ini bahwa konflik adalah “..... a disagreement through which the parties involved

telah diukur di awal juga dari aspek bentuk tanah unima tidak lagi lurus persegi namun terlihat berbelok-belok. Terkait hal ini dapat dilihat pada gambar *layout site plan* Unimal terlampir.

⁹⁸ Wawancara dengan Azis, Asisten III Bidang Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara, tanggal 12 Mei 2012 di Lhokseumawe.

⁹⁹ Di antaranya hasil wawancara dengan Maryati (Pegawai Unimal pada Bagian Kemahasiswaan) – Maryati adalah juga masyarakat asli Reuleut Timu, wawancara tanggal 23 April 2012 di Reuleut; Wawancara dengan Heikal - Kepala Humas Unimal, tanggal 31 Mei 2012; Apridar - Rektor Unimal periode saat ini (2011 – 2015), tanggal 18 Mei 2012 di Krueng Geukeuh.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Salahuddin, Abdul Bahri dan Matsyah Rabban – ketiganya merupakan penerima kuasa dari pemilik tanah di gampong Reuleut dan sekitarnya untuk melakukan pengurusan atas tuntutan ganti rugi tanah Unimal. Di awal pertemuan dengan ketiganya, mereka mencoba menegaskan bahwa sebenarnya kondisi ini “semu” kelihatannya ada konflik, tapi gak jelas konfliknya juga apa dan dengan siapa ini konfliknya?”, wawancara tanggal 18 Mei 2012, di Simpang KKA, Aceh Utara.

*perceive a threat to their needs, interests or concerns*¹⁰¹ maka berbagai bentuk ketidaksepahaman yang terjadi diantara para pihak disini dan menjadi ancaman bagi satu sama lainnya – sebagaimana yang terjadi diantara Unimal dengan orang kampung Reuleut adalah merupakan pertikaian (konflik). Pada saat ini, konflik yang terjadi telah menjurus pada terjadinya akomodasi (*accomodation*) diantara dua kelompok masyarakat ini. Pertikaian atau yang untuk selanjutnya disebut konflik adalah merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang disasosiatif – selain juga dikenal dua bentuk lainnya dari bentuk disasosiatif - yaitu persaingan (*competition*)¹⁰² dan kontravensi (*contravention*)¹⁰³.

Hasil observasi, dokumentasi dan wawancara yang telah dilakukan dalam penelitian ini mendapatkan informasi bahwa konflik yang terjadi diantara orang kampus dengan orang kampung Reuleut adalah berakar dari konflik agraria dan konflik ekonomi. Terkait dengan konflik agraria yang terjadi, informasi yang tercantum pada dokumen Laporan Masyarakat Pemilik Tanah Lokasi Kampus Unimal di Reuleut Kabupaten Aceh Utara¹⁰⁴ pada poin 3 nya menyatakan bahwa

¹⁰¹ <http://www.ohrd.wisc.edu/onlinetraining/resolution/aboutwhatsit.htm>

¹⁰² Persaingan merupakan proses sosial dimana individu atau kelompok sosial yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang ada pada suatu masa tertentu dan menjadi pusat perhatian umum dengan cara mencari perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Lihat lebih lanjut dalam Gillin and Gillin, *Cultural Sociology, a revision of an Introduction to Sociology*, New York: The Macmillan Company, 1954, hlm 590; sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 91.

¹⁰³ Kontravensi adalah bentuk interaksi sosial disasosiatif yang berada diantara persaingan dengan pertikaian. Menurut Soerjono Soekanto, dalam bentuknya yang murni, kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang-orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Sikap tersembunyi ini dapat berubah menjadi kebencian tetapi tidak sampai terjadi pertikaian.

¹⁰⁴ Dokumen ini penulis dapatkan dari Salahuddin (salah seorang penerima kuasa untuk pengurusan tanah masyarakat). Tidak diketahui dengan pasti kepada siapa dokumen ini diajukan dan pada tanggal berapa disusun dan diajukannya, namun demikian pada bagian akhir dokumen ini dicantumkan tembusan kepada 1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPRA Prop. NAD); 2) Badan Pengawasan Daerah (Bawasda Prop. NAD); 3) Badan Pertanahan Nasional

“Pada tahun 1983 ada sebagian masyarakat yang menerima uang imbalan dan ada juga yang tidak menerimanya.” Kondisi ini, adalah salah satu akar dari konflik yang timbul kemudian berkembang. Artinya, timbulnya perbedaan penerimaan antara para pihak – Pemda Aceh Utara di satu sisi yang menganggap semua urusan ganti rugi tanah telah selesai dan adanya anggapan di sebagian masyarakat pemilik tanah yang belum menerima ganti rugi – menjadi faktor pemicu konflik.¹⁰⁵

Studi dokumentasi dan hasil wawancara lebih lanjut di lapangan, menemukan adanya perbedaan persepsi diantara beberapa pihak terkait dengan ganti rugi tanah ini. Di satu sisi, masyarakat diwakili oleh beberapa orang Penerima Kuasa pengurusan tanah ini menyampaikan bahwa belum pernah ada ganti rugi, yang pernah diberikan hanyalah imbalan saja dan dilakukan secara sepihak (tidak ada musyawarah),¹⁰⁶ lebih lanjut ketiga penerima kuasa ini menyampaikan bahwa “... pada tahun 1983 tersebut ada ungkapan dari pihak Pemda Aceh Utara bahwa pihak Yayasan Pendidikan Malikussaleh tidak sanggup memberikan ganti rugi namun imbalan akan diberikan sebesar Rp. 40,- per meternya, dan harga segitu di tahun 83 tidak sampai harga sepotong kue.”¹⁰⁷

Beberapa orang masyarakat gampong Reuleut Barat yang diwawancarai juga menyampaikan hal senada “.... sebenarnya masalah ganti rugi ini belum selesai, dan saat ini kami hanya mengikuti bagaimana proses yang ditempuh”.¹⁰⁸ Namun demikian, beberapa pihak lain yang juga dikonfirmasi masalah ini menyampaikan hal

(BPN) Prop. NAD; 4) Kepala Kepolisian Daerah Prop. NAD; 5) Panglima Daerah Militer (PANGDAM) Iskandar Muda dan diajukan oleh Masyarakat Tertindas.

¹⁰⁵Tentang kondisi ini diakui oleh Azis, Asisten III Bidang Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara, wawancara tanggal 12 Mei 2012 di Lhokseumawe.

¹⁰⁶Dicantumkan dalam Surat Pengaduan kepada Bupati Aceh Utara tertanggal 6 Juni 2003.

¹⁰⁷Wawancara dengan Salahuddin, Abdul Bahri dan Matsyah Raban, tanggal 18 Mei 2012, di Simpang KKA, Aceh Utara.

¹⁰⁸Wawancara dengan Ibu Rukiah (umur 62 tahun, warga Reuleut Barat, dalam amatan penulis kondisi rumah tinggal yang bersangkutan tidak layak huni lagi); Cut Hanifah (Warga Reuleut Barat); Marzuki Ali (Warga Reuleut Barat).

berbeda, bahwa pemberian ganti rugi telah selesai pada saat itu.¹⁰⁹ Hal ini antara lain ditunjukkan juga dengan tidak adanya dokumen yang secara langsung menyebutkan adanya keberatan masyarakat – walaupun sangat disadari bahwa ketiadaan dokumen yang menunjukkan hal ini juga tidak dapat dijadikan pegangan dasar bahwa tidak terjadi sengketa pada saat itu. Keberadaan masyarakat pada masa itu dalam konteks tingkat pemahaman hukum maupun pendidikan yang masih lemah juga mempengaruhi mereka untuk memiliki posisi tawar di hadapan pemerintah. Namun demikian, pada saat konfirmasi ulang yang penulis lakukan kepada pihak pemerintah daerah Aceh Utara, Asisten III bidang Pemerintahan menyampaikan “...awal munculnya tuntutan dari masyarakat adalah sekitar tahun 2008, mereka mengatakan kalau (mereka) tidak pernah menerima uang (ganti rugi), ya betullah mereka tidak menerima uang karena yang terima orang tua mereka, pada waktu itu bisa jadi mereka masih kecil”. Hal ini jika disandingkan dengan hasil wawancara dengan salah seorang warga Gampong Reuleut Barat tampaknya senada, “... tanah di Reuleut yang ditempati Unimal sekarang merupakan tanah warisan dari nenek-nenek kami. Terakhir tanah itu dikuasai abang kandung saya yang sekarang sudah meninggal, baru tanah tersebut menjadi pusaka bagi saya”¹¹⁰. Penelusuran lebih lanjut kepada salah seorang warga lain yaitu Ibu Cut Hanifah - juga mengungkapkan hal serupa “saya cuma menuntut hak saya, itupun kalau masih ada cara untuk melakukan penuntutan ganti rugi. Tanah saya di Reuleut merupakan peninggalan Bapak saya dan pada saat pembagian warisan tanah itu menjadi milik saya”.¹¹¹

Bagaimana interaksi selanjutnya yang terjadi diantara orang kampus dengan orang kampung dapat dilihat pada beberapa peristiwa, diantaranya pada sekitar tahun 1983 diselenggarakan upacara peletakan batu pertama pembangunan Biro Rektor dan ruang

¹⁰⁹Di antaranya diungkapkan oleh Jakfar Hanafiah - Keuchik Reuleut Timur, wawancara tanggal 19 April 2012; Tgk Fajri - mantan Tuha Peut Reuleut, wawancara tanggal 19 April 2012; Ibu Yusniar - salah seorang dosen di Unimal dan warga gampong Reuleut Timur, wawancara tanggal 25 April 2012;

¹¹⁰ Wawancara dengan Marzuki Ali, tanggal 2 Juni 2012 di Reuleut Barat.

¹¹¹ Wawancara Cut Hanifah, tanggal 2 Juni 2012 di Reuleut Barat.

perkuliahan serta 4 (empat) unit rumah dosen. Acara ini dilakukan dengan kenduri potong lembu sebanyak 5 (lima) ekor – dihadiri oleh seluruh masyarakat sekitar beserta kepala desa. Pada masa ini menurut informan-informan yang diwawancarai tidak ada keberatan dari masyarakat sama sekali, sampai akhirnya pembangunan tahap pertama selesai pada tahun 1987. Untuk menjaga hubungan baik ini dan dengan didasarkan pada itikad baik masyarakat yang telah bersedia memberikan tanah untuk pendidikan maka Bupati Ali Basyah pada saat itu memberikan bantuan berupa mesin listrik bagi masing-masing desa sekitar kampus yaitu Desa Reuleut Timu, Desa Reuleut Barat, Desa Cot Keumuneng dan Desa Paya Gaboh.

Aktifitas perkuliahan di Reuleut awalnya berjalan dengan baik namun seiring dengan waktu, kondisi kampus dan akses menuju ke kampus sangat tidak mendukung, hal ini ditunjukkan diantaranya dengan kondisi jalan yang rusak, becek ketika hujan deras, jarak yang dianggap jauh oleh mahasiswa dari pusat kota Lhokseumawe serta minimnya transportasi bus angkutan mahasiswa yang tersedia pada saat itu. Kondisi ini menyebabkan mulai berkurangnya jumlah mahasiswa yang dapat mengikuti perkuliahan di kampus serta berkurang juga jumlah mahasiswa baru yang mendaftar di Unima. Terhadap hal ini kemudian pada masa pergantian pimpinan Unima dari Rusli Yusuf kepada Jakfar G. Hatta – sekitar tahun 1993¹¹² – beliau mengambil keputusan untuk mengembalikan aktifitas perkuliahan ke kampus Lancang Garam.¹¹³

¹¹² Pada tahun berapa tepatnya perpindahan dari Kampus Reuleut ke Lancang Garam belum didapatkan informasi yang akurat, namun demikian opini M. Akmal (salah seorang dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) pada kolom Serambi Indonesia pada tanggal 17 Juni 2006, menunjukkan bahwa pemindehan proses belajar mengajar adalah pada tahun 1994 dilatarbelakangi oleh desakan mahasiswa (semacam protes) atas berbagai hambatan dan kendala yang dialami oleh mahasiswa selama perkuliahan di kampus Reuleut.

¹¹³ Wawancara dengan Sumiadi —Dekan Fakultas Hukum Unimal, yang juga merupakan alumni Unima— sempat menjalani aktifitas perkuliahan di kampus Reuleut pada masa itu dan menjadi Panitia Wisuda pada Tahun 1990 yan juga mengambil lokasi di kampus Reuleut, wawancara tanggal 19 April 2012 di Blang Pulo.

Setelah kepindahan Unima ke kampus Lancang Garam maka otomatis tidak ada lagi aktifitas perkuliahan maupun perkantoran di lingkungan gampong Reuleut dan kemudian beredar isu¹¹⁴ bahwa keberadaan lahan Unima tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan Kawasan Industri Aceh Pasai (KIAP),¹¹⁵ hal ini merupakan ide pemikiran Rektor Jakfar G. Hatta – dengan latar belakang beliau sebelumnya adalah Kepala Bappeda Aceh Utara – pada masa kepemimpinan Aceh Utara di bawah Bupati Tarmizi A. Karim. Identifikasi bahwa lahan di wilayah Reuleut merupakan lahan “kuning” – yaitu tidak subur dan tidak cocok untuk dilakukannya pertanian ataupun perkebunan, maka untuk dapat menghidupkan areal lokasi ini akan lebih tepat jika dijadikan kawasan industri, yang pada saat itu direncanakan untuk menjemput investor asing yaitu Thailand dan Malaysia.¹¹⁶ Masyarakat sekitar Reuleut khususnya yang telah memberikan tanahnya untuk Unima melalui Keuchik menyatakan ketidaksetujuan mereka atas rencana ini. Pemikiran-pemikiran yang terungkap pada saat itu adalah bahwa ketika masyarakat mau diberikan ganti rugi yang murah dengan pertimbangan bahwa di lokasi

¹¹⁴ Informasi awal penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Sumiadi, wawancara tanggal 19 April 2012. Penelusuran kembali atas informasi ini penulis lakukan kepada mantan Rektor Unimal A. Hadi Arifin, Wawancara tanggal 5 Mei 2012 di Lhokseumawe dan Rektor Unimal (periode ini) Apridar, wawancara tanggal 18 Mei 2012 di Krueng Geukeuh. Dari pihak masyarakat sendiri, khususnya Salahuddin, Matsyah Raban dan Abdul Bahri - 3 (tiga) orang yang mewakili masyarakat Reuleut untuk melakukan penuntutan ganti rugi ini juga mendengarkan isu terkait, namun tampaknya isu ini tidak berkembang atau dalam istilah mereka “kasus ini mengambang”, wawancara tanggal 18 Mei 2012, di Simpang KKA, Aceh Utara.

¹¹⁵ Terkait dengan nama rencana pembangunan wilayah industri ini terdapat beberapa versi dari informan, ada yang menyebutkan sebagai Kawasan Industri Aceh Pasai (KIAP), selainnya menyebutkan Kawasan Industri Pasai (KIP). Penulis tidak dapat menelusuri informasi lebih lanjut terkait dengan rencana pembangunan kawasan ini.

¹¹⁶ Wawancara dengan Wawancara dengan Sumiadi – Dekan FH Unimal, tanggal 19 April 2012; Wawancara dengan Prof. A. Hadi Arifin – mantan Rektor Unimal, tanggal 5 Mei 2012 di Lhokseumawe; wawancara dengan Apridar – Rektor Unimal Periode 2012 – 2015, tanggal 18 Mei 2012.

tanah tersebut akan dijadikan lokasi pendidikan yang nantinya memberikan keuntungan buat masyarakat sekitar, akses dan kesempatan anak cucu mereka untuk bisa menempuh pendidikan tinggi akan semakin meningkat - namun jika akan dialihkan menjadi kawasan industri maka masyarakat menuntut diberikannya ganti rugi ulang yang lebih sepadan. Maknanya disini, masyarakat Reuleut secara ekonomis telah melakukan penghitungan ulang atas nilai tanah yang dimilikinya jika dibandingkan antara peruntukan lahan industri – yang jelas memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan dengan peruntukan pendidikan yang bersifat sosial kemasyarakatan.

Eksplorasi terhadap isu ini telah coba penulis lakukan, dan kesimpulan sementara terhadap hal ini adalah konflik vertikal yang terjadi antara Pemerintah RI dengan gerakan separatis GAM pada masa itu – menjadi faktor pengaruh yang sangat besar. Di satu sisi, pihak investor tidak dapat melakukan banyak hal terkait dengan pelaksanaan pembangunan industri ini dikarenakan adanya potensi gangguan keamanan yang tinggi. Di sisi lain kondisi konflik yang membayangi kehidupan masyarakat pada masa itu juga telah mengakibatkan minimnya berbagai aktifitas masyarakat. Maknanya, isu yang sempat beredar saat itu bukanlah menjadi prioritas masyarakat untuk dibahas atau ditelusuri kebenarannya lebih lanjut - dibandingkan dengan kondisi konflik yang mencekam.

Jika pihak pemerintah daerah Aceh Utara menyatakan bahwa lokasi lahan Reuleut adalah lokasi “kuning” – dikarenakan kondisi tanah berkapur dan tidak memiliki air permukaan maka dalam konteks masa konflik - salah seorang Dekan¹¹⁷ di lingkungan Unimal menyatakan bahwa pada masa itu lokasi Reuleut adalah wilayah “merah”, karena daerah ini adalah daerah yang menjadi target dalam Operasi Militer pada masa konflik Aceh antara RI dan GAM, artinya rawan akan terjadi kontak senjata. Perbandingan ini di satu sisi akan menjadi hal yang sangat menarik untuk dapat ditelusuri lebih lanjut dan akan menjadi landasan untuk menjawab asumsi awal dari studi ini – bahwa konflik antara orang kampus dengan orang kampung Reuleut adalah dipengaruhi oleh konflik yang berkelindan di Aceh.

¹¹⁷ Wawancara dengan Fauzi, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unimal, tanggal 29 April 2012 di Blang Pulo.

Perkembangan konflik Aceh pada masa itu menunjukkan adanya eskalasi dan perluasan sehingga menyulitkan penanganan dan penyelesaiannya. Pihak yang terlibat semakin banyak, demikian pula isu yang terkait dengan konflik. Selain itu, taktik berkonflik yang digunakan oleh para pihak juga semakin beraneka ragam. Akibatnya, dampak yang timbul semakin banyak, luas, dan berpotensi destruktif. Pihak-pihak yang bertikai di Aceh, baik pemerintah pusat maupun pihak masyarakat Aceh yang menuntut referendum, masih menggunakan cara-cara sepihak dalam menyelesaikan masalah Aceh, termasuk dengan menggunakan kekerasan bersenjata yang semakin mendorong penggunaan senjata yang lebih keras lagi. Penggunaan cara-cara sepihak yang ditopang dengan kekerasan bersenjata terbukti hanya melanggengkan konflik, memperparah luka, dan menambah trauma yang sudah terlalu lama berlangsung.

Menelusuri lebih lanjut terkait dengan konflik Aceh pada kurun waktu ini dan dampaknya pada lokasi ini, penulis juga mendapatkan informasi tentang bangunan Ruang Kuliah Umum (RKU) Unimal yang pernah dijadikan markas oleh Satuan TNI dan di lokasi ini juga pernah ditemukan mayat yang dibuang¹¹⁸. Pihak masyarakat juga memberikan informasi serupa bahwa Keuchik Hasan pada waktu itu meninggal karena ditembak oleh pihak yang tidak diketahui (OTK) dan Abdoel Bahri¹¹⁹ pernah dijemput paksa dengan orang yang tidak dikenal dengan ancaman pembunuhan juga, namun setelah dilakukan banyak upaya komunikasi dengan berbagai pihak termasuk TNI dan GAM maka yang bersangkutan kemudian dipulangkan kembali.

Membicarakan kembali tentang kondisi interaksi sosial diantara orang kampus dengan orang kampung Reuleut – tercatat pada tahun 1996 dilakukan sertifikasi atas tanah Unima dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1 tertanggal 13 Februari 1996 atas nama Yayasan Pendidikan Malikussaleh. Masa diantara tahun 1996 sampai dengan tahun 2001 tidak tercatat adanya hal-hal yang spesifik menandai interaksi sosial yang ada. Pada saat ini, kampus Unima mengambil

¹¹⁸ Wawancara dengan Yulius Rief Alkahali – Kepala UPT. Perencanaan Unimal, tanggal 31 Mei 2012 di Reuleut.

¹¹⁹ Wawancara dengan Abdoel Bahri – salah seorang penerima kuasa masyarakat untuk pengurusan tanah Reuleut, tanggal 18 Mei 2012 di Simpang KKA Aceh Utara.

lokasi Lancang Garam sebagai pusat aktifitasnya dan masyarakat gampong Reuleut juga terlihat mengambil inisiatif untuk memanfaatkan kembali lahannya yang telah ditinggal oleh Unima dengan melakukan aktifitas harian mereka, diantaranya berkebun dan menjadikan lokasi lahan Unima sebagai wilayah penggembalaan hewan ternak mereka. Zulfikar¹²⁰ menyampaikan bahwa yang bersangkutan pernah berkomunikasi dengan salah seorang penduduk setempat dan mendiskusikan tentang perkembangan kampung sekitar paska keberadaan aktivitas kampus Reuleut. Jawaban dari penduduk bersangkutan di luar ekspektasi Zulfikar, bahwa selama Unimal aktif di Reuleut – masyarakat menjadi susah karena tidak ada lagi tempat untuk penggembalaan lembu, sedangkan yang bersangkutan tidak sanggup untuk mencari rumput.

Terhadap hal ini, apa yang disampaikan oleh salah seorang Tuha Peut Gampong Reuleut Barat yang juga Imeum Mesjid Syuhada¹²¹ kiranya dapat mencerminkan suara hati masyarakat pada masa itu, “...awal konflik yang terjadi antara Unimal dan masyarakat karena dasarnya swasta setelah itu menjadi negeri - itulah awal dasar konflik”. Lebih lanjut beliau menyampaikan

“...kalau untuk konflik antara masyarakat dan Unimal pada saat kembali kemari, karena ingat perkataan yang sudah diungkapkan seperti pepatah Aceh mengatakan “Watee gasin ta budidayakan, watee kaya Oh woe hana di kereuleng pih” (waktu miskin kita perhatikan/kita manfaatkan, sesudah kaya waktu kembali tidak lihat/dilirik pun). Beginilah kalau bisa kita istilahkan, maka pada waktu itu diambil suatu kesimpulan oleh masyarakat, karena tanah itu diberikan kepada yayasan dan tidak dipakai, maka masyarakat mengambil kembali tanah kepunyaannya.”¹²²

Pada momentum ini kita dapat menemukan bahwa harmonisasi yang telah dibangun dalam bentuk kerjasama yang ada di awal antara

¹²⁰ Wawancara dengan Zulfikar, mahasiswa Unimal dan pernah menjabat sebagai Ketua BEM Tahun 2009 – 2011, tanggal 19 April 2012, di Lhokseumawe.

¹²¹ Wawancara dengan Tgk. Muhammad, Tuha Peut Gampong Reuleut Barat dan Imeum Mesjid Syuhada, tanggal 29 April 2012, di Reuleut Barat.

¹²² Ibid.

orang kampus dengan orang kampung Reuleut kemudian mengalami perubahan yang mengarah pada konflik – selain dilatar belakangi oleh konflik Aceh secara umum sebagaimana yang telah digambarkan di atas, juga diakibatkan oleh konflik lokal antara kelompok masyarakat ini sendiri.

Berdasarkan berbagai dokumen yang dapat dilacak dan informasi yang diterima konflik antara orang kampung dengan Unimal muncul setelah proses penegrian Unimal. Seiring dengan konflik GAM dengan Pemerintah RI ada klaim masyarakat yang menyatakan “bahwa ketika Unimal menjadi Universitas Negeri berarti Unimal adalah representasi Pemerintah, dan semua milik pemerintah boleh diambil oleh rakyat”.¹²³ Kondisi ini tercermin ketika Unimal ingin memanfaatkan kembali lahan kampus Reuleut untuk aktifitas perkuliahan sebagaimana juga persyaratan penegrian Unimal pada saat itu yaitu tersedianya lahan yang representatif.

Pada saat Tim Pembangunan Kampus Reuleut yang mewakili Rektor datang ke Reuleut pada tahun 2001 dan menyampaikan bahwa Unimal akan kembali ke Reuleut dan melakukan pembangunan kampus yang permanen serta representatif oleh pihak masyarakat pada waktu itu tidak ditolak, hanya saja masyarakat mengibaratkan hubungan ini seperti pasangan yang bercerai – Unimal sebagai laki-laki yang meninggalkan dan Reuleut sebagai perempuannya, untuk itu harus rujuk dulu dan salah satu syarat rujuk itu membawa buah tangan atau oleh-oleh¹²⁴.

Terkait hal ini, Keuchik Reuleut Timur¹²⁵ menyampaikan bahwa setelah sekian lama ditinggalkan atau tidak dimanfaatkan lahan di Reuleut, maka masyarakat Reuleut terkejut dengan hal tersebut, maka pada saat itu kebiasaan masyarakat Aceh dalam bahasa Acehnya harus

¹²³ Klaim ini diakui oleh Azhari – Ketua Komisi C, DPRK Aceh Utara. Ia juga warga asli kampung Reuleut Timur, wawancara tanggal 18 Mei 2012.

¹²⁴ Wawancara dengan Keuchik Reuleut Timur, Jakfar Hanafiah, tanggal 19 April 2012 di Reuleut Timur dan wawancara dengan Tgk. Fajri, mantan Tuha Peut Reuleut Timur, tanggal 19 April 2012 di Reuleut Timur.

¹²⁵ Wawancara dengan Keuchik Reuleut Timur, Jakfar Hanafiah, tanggal 19 April 2012 di Reuleut Timur.

adanya *Peng ie saka*¹²⁶ sebagai hantaran —yang sebenarnya merupakan sindiran agar Pemerintah Aceh Utara dan pihak Unimal mengerti dan berbasa-basi kepada masyarakat Reulut. Masyarakat Reuleut berencana mengambil kembali tanah tersebut yang telah dihibahkan kepada Unimal jika lahan tersebut tidak dimanfaatkan, masyarakat Reuleut cemburu kalau Unimal di Lhokseumawe, kalau bahasa sindirannya sudah ada istri sendiri, tapi masih mau istri kedua, sindiran yang lainnya yaitu sudah ada rumah sendiri, tapi tidur dan tinggal di rumah orang lain.¹²⁷

Walaupun adanya tuntutan-tuntutan terhadap *ie saka* ini dari masyarakat gampong, namun pada masa ini belum terlihat adanya gejala yang menjurus pada terjadinya konflik yang tinggi antara kedua belah pihak. Tuntutan terhadap *ie saka* ini dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Aceh Utara dalam bentuk pembangunan sarana umum, yaitu pembangunan MCK di Meunasah Gampong Reuleut Timu, Tempat Penampungan Air dan Saluran Air di Gampong paya Gaboh, Jalan Desa di Gampong Cot Keumuneng dan Puskesmas Pembantu di Gampong Reuleut Barat. Pada masa ini, sekitar tahun 2002 juga diselenggarakan kembali *khauri gampong* yang melibatkan seluruh masyarakat sekitar. Acara ini selain digunakan sebagai momentum awal pembangunan kembali kampus Reuleut —pada masa itu dipimpin oleh Bupati Tarmizi A. Karim juga diselenggarakan syukuran dengan memotong lembu dan dibagikan kepada masyarakat.¹²⁸

Walaupun tuntutan *ie saka* telah dipenuhi oleh Pemerintah Darah Kabupaten Aceh Utara namun gejala di masyarakat terkait dengan pemberian kembali ganti rugi atas tanah mulai muncul kembali sekitar tahun 2003 dan tingkat konflik yang terjadi semakin hari menjadi relatif tinggi. Beberapa dokumen dan arsip surat menyurat yang penulis temui menunjukkan intensitas tuntutan yang diajukan

¹²⁶ *Peng ie saka* (Bhs. Aceh) harfiahnya adalah 'uang air gula', uang bantuan tali asih, bantuan sekedarnya. Besarnya biasanya ratusan ribu hingga satu juta Rupiah. *Peng ie saka* bisa bersifat perorangan atau kelompok.

¹²⁷ Wawancara dengan Keuchik Reuleut Timur, Jakfar Hanafiah, tanggal 19 April 2012 di Reuleut Timur.

¹²⁸ Wawancara dengan Prof. A. Hadi Arifin, tanggal 5 Mei 2012, di Lhokseumawe.

oleh sebahagian masyarakat atas pemberian ganti rugi ini.¹²⁹ Berbagai aksi yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu adalah mengirimkan surat kepada Pemerintah Daerah —Bupati maupun DPRD Aceh Utara, Gubernur NAD sampai dengan Permohonan Perlindungan kepada Presiden RI. Pihak Pemda Aceh Utara telah melakukan berbagai upaya penjelasan maupun memfasilitasi pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, namun berdasarkan catatan yang ada belum pernah ada titik temu terhadap hal ini, sampai akhirnya masyarakat melakukan pemblokiran jalan masuk kampus dengan pagar-pagar kayu serta menghalangi pihak kontraktor pembangunan kampus untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan di lingkungan kampus. Terhadap hal ini timbul inisiatif —yang didasarkan pada pembicaraan Rektor dengan pihak kontraktor untuk memberikan bantuan kepada pemilik tanah dengan dana yang bersumberkan dari pihak kontraktor pembangunan kampus Reuleut.¹³⁰ Tidak tercatat secara pasti, berapa jumlah dana yang dikeluarkan namun informasi dari dokumen Laporan Masyarakat kepada pihak Pemerintah —kepada masing-masing pemilik tanah diberikan bantuan Rp. 200, per M2. Atas bantuan yang dialokasikan ini informasinya tidak diberikan kepada keseluruhan pemilik tanah namun hanya bagi pemilik tanah yang berdomisili di

¹²⁹ Dokumen-dokumen ini sebahagiannya penulis dapatkan dari pihak Penerima Kuasa masyarakat, bahkan ketika arsip ini coba ditelusuri di Kantor Kecamatan Muara Batu tidak ditemukan selengkap yang dimiliki oleh tim ini. Penulis juga tidak mendapati kendala dalam mendapatkan salinan atas dokumen ini – bahkan ketiga orang penerima kuasa ini (Salahuddin, Abdul Bahri dan Matsyah Raban) menawarkan untuk meminjamkan berkas-berkas ini. Beberapa dokumen yang menjadi bagian penting dalam analisis tulisan ini adalah arsip surat menyurat antara masyarakat dengan Bupati Aceh Utara juga dengan pihak Unimal dan Menteri Pendidikan Nasional. Terdapat juga arsip catatan rapat kerja Komisi A DPRD Aceh Utara dengan Pemda Aceh Utara tentang sengketa tanah reuleut (lokasi kampus Reuleut), Kliping koran Serambi Indonesia tentang kasus sengketa tanah serta dokumen jawaban pihak masyarakat atas pemberitaan dimaksud, satu bundel berkas laporan sampai dengan putusan PN Lhokseumawe atas dakwaan perkara pengrusakan aset Unimal.

¹³⁰ Wawancara dengan Prof. A. Hadi Arifin, tanggal 5 Mei 2012 di Lhokseumawe; wawancara dengan Yulius Rief Al Kahaly, Kepala UPT. Perencanaan Unimal, tanggal 31 Mei 2012 di Reuleut.

empat gampong sekitar. Terdapat juga pemilik tanah yang tidak mengambil dana dimaksud.¹³¹

Sampai akhirnya pada tanggal 24 September 2005 adalah puncak dari konflik yang ada, yaitu pada saat sebagian warga masyarakat Reuleut melakukan aksi pengrusakan jalan aspal *hot mix*, pemagaran jalan menuju areal tanah kampus Unimal dan mengajukan klaim pembayaran ganti rugi yang wajar atas tanah Unimal yang sudah dibebaskan pada tahun 1983 lalu.¹³² Aksi ini mengalami titik puncaknya pada saat 12 (dua belas) orang pelaku aksi ini diajukan ke persidangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.¹³³ Dari 12 orang pelaku ini 7 diantaranya adalah perempuan dan 5 orang laki-laki, masing-masingnya adalah warga dari Gampong Reuleut Barat dan

¹³¹Wawancara dengan Salahuddin, Abdul Bahri dan Matsyah Raban, tanggal 18 Mei 2012, di Simpang KKA, Aceh Utara.

¹³² Wawancara dengan Sumiadi – Dekan Fakultas Hukum Unimal dan merupakan Tim LKBH Unimal pada saat konflik ini terjadi. Beliau menyampaikan bahwa sebelum diajukannya pihak-pihak masyarakat yang melakukan aksi pengrusakan ini, pihak Unimal atas saran dari LKBH telah memasang pamflet yang bertuliskan “Tanah ini milik Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Universitas Malikussaleh) dengan sertifikat Hak Pakai No, 01.07.1.1.2.1.0.00001 dilarang masuk tanpa izin ke Komplek Kampus Unimal (Pasal 551 KUHP)” di areal depan dan belakang kampus. Hal ini dilakukan setelah Unimal mengalami gangguan-gangguan dari pihak masyarakat yang mengajukan ganti rugi. Namun, ketika masyarakat terus melakukan aksi sampai dengan mencabut pamflet tanda larangan Pasal 551 KUHP ini maka bagi Unimal telah cukup syarat untuk dilaporkannya para pihak ini ke aparaturnya penegak hukum. Proses awal di kepolisian telah memeriksa lebih kurang 52 orang peserta demonstrasi dengan 6 orang aktor utamanya, namun dalam proses berikutnya hanya tinggal 12 orang yang diajukan ke persidangan.

¹³³ Putusan PN Lhokseumawe Nomor 76/Pid.B/2006/PN-LSM menyatakan bahwa kedua belas terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam kedua dakwaan yang diajukan JPU. Terhadap Putusan ini – informasi yang penulis dapati diajukan banding oleh pihak JPU serta Kasasi, namun tidak diketahui dengan pasti hasil Putusan Banding maupun Kasasi dimaksud.

Reuleut Timur, kecuali Salahuddin¹³⁴ yang bertempat tinggal di Kreung Geukeuh, Kecamatan Dewantara.¹³⁵

Untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait dengan konflik tanah yang terjadi, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak orang kampung Paya Gaboh, diantaranya wawancara dengan Bpk. Syaukani,¹³⁶ ia menyampaikan bahwa,

“.....Konflik Unimal pertama muncul ke permukaan yaitu pada masa Pak Karimuddin menjabat sebagai bupati Aceh Utara, saat itu keadaan Aceh masih dalam suasana konflik GAM dengan RI. Pihak yang berkonflik pernah dimediasi oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan tokoh masyarakat bertempat di Alue Dua Nisam. Pada saat itu GAM memanggil semua pihak yang bertikai diminta untuk mengikuti aturan agraria yang diatur dalam agama islam. GAM meminta kesediaan Tgk. Nurdin Wahab membaca kitab kuning yang berkenaan dengan konflik agraria Unimal. Beliau memutuskan bahwa setiap tanah atau lahan yang sudah dijual tidak boleh diminta kembali dan dikemudian hari tidak boleh diminta untuk dinaikkan harga, karena berdasarkan kitab, tanah yang sudah dijual walaupun dengan harga di bawah standar tidak boleh diganggu gugat karena sudah sah milik orang lain. Pada masa itu dapat dikatakan semua pihak sudah menerima hasil dari mediasi yang dibuat oleh GAM dan tidak ada tuntutan kembali.”

Informasi lebih lanjut terkait dengan keberadaan ulama dalam menyelesaikan sengketa gugatan ganti rugi tanah ini juga disampaikan oleh Prof. A. Hadi Arifin¹³⁷, beliau mengakui adanya keterlibatan ulama yang pada waktu itu, hanya saja pihak orang kampung pada waktu itu sempat mengeluarkan pernyataan yang menganggap bahwa ulama pun sudah ikut serta menipu mereka.

Sebelumnya penulis telah menyampaikan bahwa interaksi yang terjalin antara orang kampus Unimal dengan orang kampung Reuleut adalah unik – dikarenakan interaksi yang terjadi dengan didukung oleh berbagai faktor mengalami perkembangan, mulai dari adanya

¹³⁴ Salahuddin termasuk salah seorang terdakwa dalam perkara ini, wawancara tanggal 18 Mei 2012 dan 21 Mei 2012, di Simpang KKA, Aceh Utara.

¹³⁵ Lihat, Putusan PN Lhokseumawe Nomor 76/Pid.B/2006/PN-LSM;

¹³⁶ Wawancara dengan Bpk. Syaukani, Keuchik Paya Gaboh, tanggal 19 April 2012, di Paya Gaboh.

¹³⁷ Wawancara dengan Prof. A. Hadi Arifin, tanggal 5 Mei 2012 di Lhokseumawe.

kesepahaman dan toleransi yang tinggi sampai dengan terjadinya konflik. Konflik yang timbul juga mengalami perkembangan, dimulai dari konflik agraria sampai dengan konflik ekonomi. Kondisi konflik walaupun belum dapat diselesaikan secara baik namun saat ini, sudah mengarah pada terciptanya kompromi antara para pihak. Keberadaan GAM pada masa-masa konflik ini juga merupakan bagian yang sangat menarik. Yulius Rief Alkahaly menyampaikan bahwa “dalam kondisi konflik masa lalu, Unimal mau tidak mau bermain zig zag”.¹³⁸ Artinya, di satu sisi Unimal membina relasi yang baik dengan pihak TNI dan di sisi lain, Unimal juga tidak bisa meniadakan eksistensi GAM pada saat itu. Dalam salah satu kronologis tuntutan gugatan ganti rugi ini, Abdul Bahri menyampaikan bahwa “... dulu waktu GAM masih bergerilya – kami orang kampung yang mengajukan tuntutan ganti rugi dianggap oleh mereka sebagai provokator tapi pada masa Darurat Militer kami dituduh sebagai GAM.”¹³⁹

Aksi masyarakat dalam menolak Unimal – tampaknya juga tidak berhenti dengan proses persidangan, hal ini terlihat dari informasi yang penulis dapatkan melalui Salahuddin bahwa beberapa orang masyarakat Reuleut termasuk beliau melakukan pengerukan tanah di areal kampus Unimal dengan menggunakan alat berat Beko dan *Dump Truck* – tanah tersebut dibawa untuk digunakan sebagai bahan dasar pembuatan batu bata. Tindakan masyarakat ini telah ditegur oleh pihak Unimal dan dilaporkan kepada Polres Aceh Utara, namun tidak terjadi proses hukum lebih lanjut terhadap hal ini. Salahuddin menyampaikan bahwa pada saat keberatan diajukan oleh Unimal, pihak masyarakat juga menantang Unimal untuk mengganti biaya sewa alat berat Beko yang sudah mereka keluarkan, jika Unimal tidak mau maka masyarakat tetap akan melakukan pengerukan tanah.¹⁴⁰

¹³⁸ Wawancara dengan Yulius Rief Alkahaly – Ka. UPT Perencanaan dan merupakan Sekretaris II Tim Pembangunan Kampus Reuleut, tanggal 31 Mei 2012, di Reuleut.

¹³⁹ Wawancara dengan Abdoel Bahry, tanggal 18 Mei 2012, di Simpang KKA, Aceh Utara.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Salahuddin, tanggal 18 Mei 2012, di Simpang KKA, Aceh Utara; Konfirmasi ulang terkait hal ini juga penulis lakukan kepada pihak Unimal, disampaikan oleh Yulius Rief Alkahaly - Kepala UPT Perencanaan, wawancara tanggal 31 Mei 2012, di Reuleut. “...bahwa pada waktu itu

Keberadaan Salahuddin sendiri, maupun posisinya sebagai penerima kuasa dari masyarakat beserta rekan-rekannya yang lain – dalam amatan penulis sangatlah menarik. Di satu sisi, bagaimana upaya-upaya mereka untuk memperjuangkan ganti rugi yang lebih layak bagi tanah yang sudah dijual pada tahun 1983 disandingkan dengan pendekatan pribadi yang bersangkutan kepada Pimpinan Unimal untuk mendapatkan perhatian¹⁴¹. Dalam konteks studi ini, penulis menilai yang bersangkutan serta beberapa orang penerima kuasa dimaksud adalah aktor yang memiliki peran dalam konflik ini. Eksplorasi lebih lanjut terhadap hal ini akan digambarkan pada bab berikut dalam tulisan ini.

Selain tidak pernah tercapainya titik temu dimaksud, konflik yang terjadi juga mengalami peningkatan dan dalam bentuk serta tuntutan yang juga berbeda. Pada masa ini, konflik yang mengusung tuntutan ganti rugi tanah atau konflik agraria tidak lagi mencuat, namun timbul tuntutan-tuntutan kepada pihak Unimal dengan alasan masa lalu – bahwa orang kampung telah memberikan jasa kepada pihak Unimal. Tuntutan yang mencuat kemudian jika ditelaah lebih lanjut mengarah pada kepentingan-kepentingan pada sektor ekonomi.

secara lisan kita sudah menyampaikan keberatan kepada pihak-pihak yang melakukan pengerukan di lahan Unimal namun tidak diacuhkan, sampai akhirnya pihak Unimal melaporkan kepada pihak Kepolisian. Namun tidak ada proses atau upaya hukum lebih lanjut terhadap hal ini”

¹⁴¹ Sebelum penelitian ini diselenggarakan, penulis pernah bertemu dengan beberapa orang dari penerima kuasa masyarakat – termasuk Salahuddin di ruang tunggu Rektor Unimal (pada saat itu dijabat oleh A. Hadi Arifin). Tidak ada kontak langsung yang penulis lakukan pada saat itu, namun informasi dari Sekretaris Rektor adalah “...mereka pihak orang kampung yang sampai sekarang masih menuntut ganti rugi, namun biasanya setelah bertemu dengan pak Rektor dan cerita-cerita, oleh bapak biasanya diberikan dana. Nanti beberapa waktu kemudian mereka akan datang lagi, dan hal ini berulang”. Konfirmasi terhadap hal ini penulis lakukan kepada Bpk. A. Hadi Arifin dan diakui oleh beliau “... memang biasanya mereka rutin datang, kadang-kadang hanya untuk ngobrol-ngobrol dan menyampaikan tuntutan agar Unimal mau memenuhi tuntutan mereka untuk ganti rugi, namun biasanya setelah kita jelaskan bahwa tidak mungkin lagi ada ganti rugi di atas ganti rugi yang sudah kita bayarkan biasanya mereka ‘ujung-ujungnya’ minta bantuan secara pribadi”.

Membedakan dengan konflik agraria yang muncul di awal penegriaan Unimal, maka konflik yang ada selanjutnya disebut konflik ekonomi.

Konflik ekonomi ini mulai muncul pada tahun 2008, ketika Unimal memutuskan untuk menempatkan Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi serta Fakultas Ilmu Sosial dan Politik – ketiganya merupakan fakultas dengan bidang/disiplin ilmu sosial – pindah menempati dan memanfaatkan kampus Bukit Indah – eks kompleks perumahan Exxon Mobil. Pada saat ini, masyarakat Reuleut kembali melakukan aksi protes. Masyarakat menganggap bahwa Unimal tidak sungguh-sungguh melakukan pengembangan di Reuleut.

Bentuk konflik lainnya yang relatif kecil skalanya adalah terjadinya adu mulut antara BEM Unimal dengan Pemuda Gampong pada saat penyelenggaraan MTQ Nasional Mahasiswa pada tahun 2009. Mantan ketua BEM Unimal, Zulfikar¹⁴² menyampaikan

“Pada saat saya sebagai ketua BEM Unimal hubungan masyarakat dengan mahasiswa agak kurang kondusif, dimana kami pernah adu mulut saat Unimal sebagai tuan rumah MTQ nasional. Pada saat itu sudah ada kesepakatan bahwa anak muda setempat dikasih wewenang untuk mengelola parkir MTQ, namun pada suatu malam acara MTQ berlangsung tiba-tiba pedagang becak masuk ke depan are MTQ, pihak panitia dari mahasiswa menegur kenapa jualan di dalam area MTQ? Beliau menjawab kami sudah membayar pajak untuk anak muda supaya kami bisa jualan di area MTQ. Untuk menjaga keamanan pihak mahasiswa memanggil ketua pengelola parkir rupanya mereka marah-marah ketika ditegur oleh sekjen BEM pada saat itu hampir terjadi adu fisik, akhirnya kami pun berdamai dimediasi si Pon Cina.”

Selain kondisi ini, konflik kecil lainnya yang juga muncul adalah keberadaan *harlan*¹⁴³ di wilayah kampus. Seluruh informan yang penulis wawancara terkait dengan *harlan* ini menyampaikan bahwa

¹⁴² Wawancara dengan Zulfikar, mantan ketua BEM Unimal, tanggal 19 April 2012, di Lhokseumawe.

¹⁴³ *Harlan* (Bhs. Aceh): pekerjaan jasa bongkar-muat dan angkut-mengangkut sejenis porter. *Harlan* biasanya terdapat di terminal-terminal bis di Medan dan di kota-kota tertentu di Aceh. Namun, dalam penelitian ini ditemukan *harlan* di kampus.

keberadaan harlan ini adalah fenomena biasa, ada di hampir setiap kampung. Namun demikian, praktek *harlan* yang cenderung memaksa dan menerapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan konflik tersendiri. Salah satu informasi terkait hal ini yang penulis dapatkan dari Humas PT. Arun¹⁴⁴ adalah pada saat penyerahan bantuan buku dari PT. Arun. Harga yang diminta oleh *harlan* kampung tidak mungkin dipenuhi oleh pihak pemberi bantuan maupun kampus yang juga tidak memiliki alokasi khusus untuk itu, oleh karenanya kemudian bantuan tidak jadi diserahkan oleh pihak PT. Arun, untuk selanjutnya buku-buku sumbangan ini ditiptkan di rumah Rektor yang untuk selanjutnya akan dibawa oleh petugas secara mencil sehingga tidak terlihat banyaknya barang yang masuk ke kampus. Hal ini terpaksa dilakukan untuk mengantisipasi permintaan *harlan*.

Terkait dengan aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat untuk selanjutnya mengalami puncaknya di penghujung tahun 2011, yaitu pada saat Unimal melaksanakan pembangunan laboratorium di lingkungan kampus Bukit Indah. Sekali lagi kecurigaan orang kampung Reuleut bahwa Unimal tidak berniat melakukan pengembangan di kampus utama Reuleut mencuat. Salah seorang koordinator aksi ini — M. Fajri¹⁴⁵ — dalam liputan pada *Aceh Traffict.com* menyampaikan bahwa:

“...pembangunan gedung tersebut di dalam master plan terletak di area kampus Reuleut. Masyarakat menaruh harapan dengan dibangunnya pembangunan tersebut masyarakat yang umumnya ber-ekonomi lemah dapat bekerja, begitu juga pedagang kecil disekitar kampus dapat bertambah omset jualan, tetapi dengan bangunannya

¹⁴⁴ Wawancara dengan Irwandar, Humas PT. Arun, tanggal 12 April 2012, di Batuphat.

¹⁴⁵ Lihat, <http://harian-aceh.com/2011/07/14/dprk-tolak-laboratorium-unimal-dibangun-di-kampus-bi;lihat> juga, <http://www.acehtraffic.com/2011/11/soal-pembangunan - masyarakat - protes. html>; <http://aceh.tribunnews.com/2011/11/03/seratusan-warga-demo-unimal>.

dipindah kesana, (beliau juga mempertanyakan) janji dulu mau dibangun kampus yang lengkap didesa kami mana? Dia menambahkan, rasa kecewa juga disebabkan lokasi pembangunan Gedung Rekyasa Teknik sekarang sudah masuk dalam wilayah administrasi Pemko Lhokseumawe, sementara Kampus Utama Reuleut berada di Aceh Utara.”

Terkait dengan kecurigaan dan kesimpulan orang kampung yang menyatakan pihak Unimal tidak berniat melakukan pengembangan di Reuleut didasarkan pada informasi yang beragam diterima oleh orang kampung dari pihak Unimal. Diantaranya menyampaikan bahwa pembangunan gedung laboratorium tersebut ditempatkan di kampus Bukit Indah dikarenakan permintaan dari pemberi dana (orang kampung tidak mengetahui dengan pasti siapa pemberi dana dimaksud) namun, pada saat audiensi pihak orang kampung dengan Dikti –orang kampung mendapatkan informasi berbeda, bahwa dimanapun pembangunan dilakukan oleh Unimal itu adalah bagian dari otoritas Unimal. Kondisi ini dalam pandangan orang kampung adalah pembohongan yang dilakukan oleh Unimal terhadap mereka.¹⁴⁶

Senada dengan yang disampaikan oleh Tgk. Fajri, Tgk. Imuem Mesjid Syuhada sekaligus ketua *Tuha Peut*¹⁴⁷ Reuleut Barat menyampaikan,

“...namun dalam hal tersebut masyarakat yang pemilik tanah di Unimal tidak semua berpendapat yang sama. Sebagian saja, dan masyarakat pada umumnya tidak mengharapkan yang begitu, pembangunan untuk pendidikan harus berjalan, agar dapat diharapkan suatu saat nanti anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka menjadi orang yang pintar. Apalagi Unimal dan masyarakat ada membuat suatu perjanjian ketika Unima pada saat itu masih yayasan belum negeri, putra daerah bebas dari beasiswa, tapi kenapa sekarang tidak ada beasiswa, oleh pihak Unimal dibuat program pada saat itu untuk meredam konflik, maka dibuatlah Koperasi, koprasi pada waktu

¹⁴⁶ Wawancara dengan Tgk. Fajri, Koordinator Demonstrasi dan Mantan Tuha Peut Reuleut Timur, tanggal 19 April 2012, di Reuleut.

¹⁴⁷ *Tuha Peut*, (Bhs. Aceh), pengetua yang empat, merupakan para penasehat kampung yang terdiri para tetua kampung. Ada juga struktur penasehat gampung yang terdiri dari 8 orang yang disebut *tuha lapan*.

itu diminta surat, namun tidak diberikan oleh pemuda gampong daerah, tidak diberikan beasiswa dari pihak Unimal karena pihak Unimal meminta surat koperasi kepada masyarakat gampong putra daerah, hal ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan koperasi, mereka adalah putra daerah yang berhak mendapatkan pendidikan di Unimal, kenapa dikatakan demikian? karena ada perjanjian dahulunya, maka oleh karena itu tujuan diberikannya tanah ini adalah untuk kemajuan pendidikan”¹⁴⁸

Terkait dengan kondisi konflik yang terjadi di antara para pihak disini dan bagaimana pandangan civitas akademika Unimal — khususnya dari mahasiswa, “Konflik Unimal pada dasarnya adalah konflik agraria namun masalah ini tidak begitu muncul lagi, yang jadi permasalahan sekarang karena Unimal tidak membangun gedung di Reuleut.”¹⁴⁹ Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa:

“.....Saya melihat masyarakat demo Unimal karena hilang proyek yang bisa dikerjakan, ketika pembangunan gedung tidak dilakukan di Reuleut masyarakat Reuleut tidak bisa mengambil fee atas proyek tersebut dan tidak punya kesempatan untuk menurunkan material. Kedua ketika fokus pembangunan unimal tidak di Reuleut secara tidang langsung masyakat kampus Unimal direuleut berkurang sehingga imbasnya adalah ekonomi kapita masyakat reuleut menurun. Dengan menurunnya masyarakat kampus di Reuleut (maka) ikut menurun (pula) konsumsi di daerah tersebut sehingga banyak kios-kios toko, dan kedai kopi yang harus ditutup karena tidak ada pelanggan lagi.”¹⁵⁰

Aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat ini mendapatkan perhatian dari anggota DPRK Aceh Utara —Azhari Cage dan anggota DPR RI— Rayhan Iskandar. Bentuk perhatian yang diberikan oleh keduanya adalah dengan memberikan dukungan moril kepada orang kampung serta memfasilitasi orang kampung untuk melakukan audiensi kepada pihak kementerian pendidikan nasional. Salah satu

¹⁴⁸ Wawancara dengan Tgk. Muhammad – Imuem Masjid Reuleut Barat, tanggal 29 April 2012, di Reuleut Barat.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Agustiar, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dia menjabat sebagai Ketua BEM Fakultas saat ini, 19 April 2012, di Lhokseumawe.

¹⁵⁰ Ibid.

dokumen surat yang dapat penulis telusuri, diajukan oleh Tokoh Masyarakat Peduli Kampus Utama Universitas Malikussaleh tertanggal 05 September 2011 kepada Menteri Pendidikan Nasional menyampaikan 7 (tujuh) hal yang diantaranya adalah:

1. Pernyataan sangat keberatan atas tindakan Rektor Unimal yang telah memindahkan lokasi bangunan gedung laboratorium Fakultas Teknik dari kampus Unimal Reuleut ke kampus Bukit Indah;
2. Kondisi sekarang di kampus Unimal Reuleut dengan lingkungannya sangat mendukung dibangun kampus utama, tidak ada hambatan baik dari segi keamanan maupun dukungan dari masyarakat lingkungan kampus, sehingga tidak ada alasan untuk memindahkan (pembangunan) gedung dimaksud apalagi kondisi pembangunan di kampus utama Reuleut masih sangat sedikit pembangunannya.
3. Masyarakat mengharapkan bantuan dari Menteri Pendidikan nasional untuk dapat memanggil dan menegur Rektor Unimal agar tidak bertindak sepihak dan sewenang-wenang untuk memindahkan bangunan apapun yang seharusnya dibangun di kampus utama.¹⁵¹

Dalam petisi yang diajukan oleh orang kampung ini berulang kali disebutkan sikap keberatan mereka terhadap Unimal, termasuk keberatan atas sikap Rektor Unimal saat ini - yang dalam pandangan sebagian orang kampung - diantaranya wawancara yang penulis lakukan kepada Tgk. Fajri¹⁵² - menganggap bahwa "... pergantian rektor Unimal mengakibatkan munculnya jarak kembali antara masyarakat dengan pihak Unimal". Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa masyarakat kampung menaruh harapan yang besar agar pembangunan di BI ditunda dan (Unimal) memanfaatkan tanah di Reuleut. Agar terjalin hubungan yang baik antara orang kampung dengan orang kampus, beliau juga mengharapkan pihak kampus untuk "...banyak-banyaklah duduk (dengan orang kampung)". Maknanya disini, Unimal harusnya dapat menjalin hubungan komunikasi yang

¹⁵¹ Petisi Masyarakat Peduli Kampus Utama Universitas Malikussaleh tertanggal 05 September 2011 kepada Menteri Pendidikan Nasional RI.

¹⁵² Wawancara dengan Tgk. Fajri, Mantan Tuha Peut Reuleut Timur, 19 April 2012, di Reuleut Timur.

lebih baik serta melibatkan masyarakat jika akan mengambil kebijakan yang memiliki dampak bagi masyarakat. Harapan beliau selanjutnya adalah agar pihak Unimal memfungsikan Humas secara maksimal dan lebih respek kepada masyarakat.

Senada dengan yang disampaikan oleh Tgk. Fajri, *Keuchik* Reuleut Timu, Jakfar Hanafiah, menyampaikan bahwa:

*“....setelah bergantinya pimpinan Unimal yang baru yang dipimpin oleh bapak Rektor Apridar hal yang dimiliki oleh rektor lama tidak ada sama sekali, hal ini seperti mengulang luka lama. Pada awal beliau menjabat, tidak satupun masyarakat Reuleut diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Unimal, dengan alasan itu adalah sistem dari Dikti bukan Unimal. Bukan itu saja, beasiswa pun tidak diberikan lagi oleh pihak Unimal. Padahal sebelumnya Unimal telah berjanji kepada masyarakat jikalau masyarakat yang anaknya ingin melanjutkan pendidikan di Unimal harus diberikan, dan diberikan Beasiswa. Permasalahan yang lain adalah, yaitu dipindahkannya sebagian fakultas ke Bukit Indah yang seharusnya tidak, dengan alasan bahwasannya bukit indah adalah hibah dari Exxon Mobil, buat masyarakat kampung hal ini seperti sebuah ungkapan umum: “sudah ada istri baru, istri lama dilupakan”.*¹⁵³

Petisi yang diajukan oleh pihak orang kampung yang menamakan diri sebagai “Masyarakat Peduli Kampus Utama Unimal Reuleut” ini dalam perjalanannya juga mengajukan petisi kepada pihak Unimal tertanggal 2 November 2011 ditandatangani di atas materai. Dari pihak orang kampung ditandatangani oleh M. Jakfar Hanafiah – Keuchik Reuleut Timu dan dari pihak Unimal petisi ini diterima untuk disampaikan kepada pihak Pimpinan Unimal oleh Iskandar Zulkarnaen, Pembantu Rektor IV Bidang Kerja-sama. Tercatat 2 (dua) orang anggota DPRK Aceh Utara yang turut menandatangani petisi ini yaitu Azhari Cage dan Anwar Sanusi.

Petisi ini mencantumkan 6 (enam) poin tuntutan sebagai berikut:

¹⁵³ Wawancara dengan Bpk. Jakfar Hanafiah, tanggal 19 April 2012, di Reuleut Timur.

1. Mendesak pimpinan Unimal segera memindahkan pembangunan gedung laboratorium Fakultas Teknik di lokasi Bukit Indah Kota Lhokseumawe ke kampus Utama Reuleut Kabupaten Aceh Utara;
2. Mendesak dengan segera Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini Bupati dan DPRK mencabut aset hibahnya 84 hektar, bila pihak Rektorat tidak mengindahkan permintaan masyarakat Kabupaten Aceh Utara, serta menghentikan semua bantuannya ke Unimal;
3. Mendesak Pemerintah Aceh turut menyelesaikan masalah ini, sehingga tidak merugikan masyarakat kabupaten Aceh Utara;
4. Mendesak pihak yang berwajib, kepolisian dan KPK menyelidiki tentang adanya indikasi kecurangan dalam proyek tersebut, karena dalam setiap pertemuan kami dengan pihak Rektorat selalu disebut-sebut proyek tersebut merupakan proyek jempunan, ada apa dibalik semua ini;
5. Meminta pihak kepolisian menindak tegas kepada setiap pelaku kriminal, yang dianggap oleh pihak Rektorat Unimal mengganggu berbagai aktifitas, padahal selama ini sangat kondusif, dibuktikan dengan pelaksanaan MTQ Mahasiswa tingkat nasional tanpa satu kendala apapun;
6. Mendesak Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional dan Direktorat Pendidikan Tinggi mengambil langkah cepat dan tepat demi menyelamatkan Universitas Malikussaleh yang merupakan kebanggaan masyarakat Aceh pada umumnya dan Aceh Utara pada khususnya dari cengkraman gaya konvensional pemimpinnya. Karena dalam sejarah perjalanannya hal ini yang selalu menyebabkan Unimal sulit berkembang sebagaimana Perguruan Tinggi lainnya.¹⁵⁴

Terkait dengan pengajuan petisi dan demonstrasi pembangunan gedung di Kampus BI, Ketua Komisi C DPRK Aceh Utara – Azhari Cage – menyampaikan bahwa

“... dalam pandangan saya secara pribadi maupun atas nama rakyat Aceh Utara yang saya wakili, hubungan emosional yang ada diantara orang kampus dengan orang kampung telah terganggu dengan

¹⁵⁴ Petisi dari masyarakat kampung Reuleut yang mengatasnamakan kelompok Masyarakat Peduli Pembangunan Kampus, tahun 2011.

*adanya pembangunan Laboratorium Teknik di Kampus BI. Sebelumnya orang kampung sangat mendukung Unimal baik di bidang pendidikan maupun keamanan untuk Unimal sendiri. Namun kondisi ini dalam pandangan beliau terjadi ketika Unimal pecah antara Reuleut dengan BI”.*¹⁵⁵

Pernyataan yang disampaikan oleh Azhari ini tampaknya senada dengan pernyataan-pernyataan masyarakat pada saat demonstrasi dilakukan. Di satu sisi, masyarakat memiliki *sense of belonging* yang tinggi terhadap keberadaan Unimal. Masyarakat juga memandang bahwa Unimal jangan sampai lupa dengan jasa orang kampung, namun di sisi lain dari pihak orang kampung¹⁵⁶ menyampaikan bahwa banyak hal yang dimintakan oleh orang kampung sudah terlalu jauh intervensinya. Masyarakat meminta untuk setiap rencana kegiatan yang dilakukan oleh kampus harus disampaikan ke orang kampung, juga harus melibatkan keberadaan orang kampung.

T. Nazaruddin¹⁵⁷ menyampaikan bahwa:

“Di masyarakat terlihat ada sebuah kesan, bahwa karena Unimal terletak di wilayah Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara, maka tidak boleh ada pembangunan di wilayah lain – seperti misalnya di Pemerintahan Kota Lhokseumawe. Padahal, Unimal adalah Universitas Negeri. Unimal ini punya Pemerintah Indonesia dan bukan hanya milik pemerintah wilayah tertentu.”

Hal ini kembali menunjukkan kondisi bahwa masyarakat menganggap semua yang dimiliki oleh Pemerintah RI maka menjadi hak mereka pula untuk turut serta dalam pengaturannya. Pihak Humas Unimal juga mencermati persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan kampus. Heikal¹⁵⁸ menyampaikan bahwa:

¹⁵⁵ Wawancara dengan Azhari Cage, tanggal 18 Mei 2012, di Reuleut.

¹⁵⁶ Wawancara dengan T. Nazaruddin – Sekretaris Senat Unimal, 19 April 2012, di Blang Pulo; Wawancara dengan Apridar – Rektor Unimal, 18 Mei 2012 di Krueng Geukeuh; Wawancara dengan Yulius Rief Al Kahaly – Kepala UPT. Perencanaan Unimal, tanggal 31 Mei 2012 di Reuleut.

¹⁵⁷ Wawancara dengan T. Nazaruddin – Sekretaris Senat Unimal, 19 April 2012, di Blang Pulo.

¹⁵⁸ Komunikasi pribadi dengan Muhammad Heikal, Kepala Humas Unimal, tanggal 31 Mei 2012.

“... Persoalan Reuleut adalah konflik yang muncul dari persoalan tanah yang sampai saat ini masih potensial. Saat saya menjadi Humas pada tahun 2002, saya adalah salah seorang anggota TIM yang dibentuk oleh Rektor saat itu untuk menyelesaikan persoalan ini. Sekarang ada potensi lain yaitu masalah pembangunan sarana dan prasarana di Kampus utama Reuleut yang sempat menjadi ramai sehingga masyarakat melakukan aksi dengan menutup jalan utama menuju kampus. Persoalan ini memang agak sedikit rumit, karena sepertinya ada keterlibatan “pemilik modal” yang ingin memanfaatkan masyarakat untuk mendapat kepentingan ekonomi. Karena saat aksi akan dilaksanakan saya dan Pak Rektor (Bpk. Apridar, SE.,M.Si) melakukan pertemuan dengan para tokoh masyarakat dari empat Gampong di sekitar Kampus Reuleut, namun sebagian besar para tokoh tersebut tidak sepatutnya dengan rencana aksi unjuk rasa untuk menyelesaikan masalah diatas. Alasan yang disampaikan adalah mereka tidak ingin pembangunan di Bukit Indah lebih massif dibandingkan dengan di Reuleut sebagai kampus utama. Padahal kebijakan dalam pembangunan sarana dan prasarana tersebut adalah berdasarkan berbagai pertimbangan yang sebenarnya tidak menjadi domain dari masyarakat.”¹⁵⁹

Refleksi kekecewaan masyarakat terhadap Unimal khususnya - maupun Pemerintah membawa dampak yang berkelanjutan terhadap konflik diantara orang kampus dengan orang kampung. Bahwa konflik yang terjadi sebenarnya bukan diantara orang kampung dengan orang kampus yang dalam hal ini adalah civitas akademika Unimal – yaitu dosen, pegawai dan mahasiswa Unimal, namun kekecewaan umum terhadap Unimal sebagai institusi yang merepresentasikan keberadaan pemerintah. Masyarakat merasa telah dibatasi aksesnya oleh pemerintah untuk dapat berpartisipasi secara langsung dalam pembangunan Unimal. Tidak dapat dipungkiri bahwa peluang masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan dimaksud diantaranya dengan menjadi tenaga kerja dalam pembangunan gedung-gedung maupun pemasok barang-barang kebutuhan pembangunan seperti batu bata, pasir maupun lain-lainnya menjadi hilang dengan tidak diselenggarakannya pembangunan di kampus Utama Reuleut

¹⁵⁹ Ibid.

Merujuk pada pendapat Bpk. Azis - Asisten III Bidang Pemerintahan¹⁶⁰, masalah yang ada pada dasarnya terkait dengan kepentingan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat memiliki aspirasi-aspirasi tertentu yang ternyata tidak mendapat respon dari pemerintah sebagaimana yang diinginkan oleh pihak masyarakat. Terkait dengan penerapan hukum juga menjadi bagian yang menyumbang timbulnya eskalasi konflik. Di satu sisi, pemerintah menggunakan landasan aturan formil – misal dalam hal pemberian ganti rugi lahan untuk pembangunan kampus dengan merujuk pada aturan-aturan hukum, namun di sisi lain, masyarakat mengharapkan pemerintah melandaskan pada kepentingan-kepentingan sosiologis kemasyarakatan. Artinya, masyarakat menaruh harapan besar kepada Pemerintah untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan khususnya himpitan beban pemenuhan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat.

Terkait dengan bagaimana dan apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Unimal maupun pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam merespon tuntutan-tuntutan yang ada akan dibahas lebih lanjut pada bab Upaya Resolusi Konflik dan Eskalasi Konflik yang terjadi.

Sampai dengan saat laporan penelitian ini disusun, atau tepatnya pertengahan bulan 2012, lebih kurang 7 (tujuh) bulan dari demonstrasi terakhir yang dilakukan oleh warga, penulis mengamati bahwa interaksi sosial yang terjadi diantara orang kampus dengan orang kampung kiranya telah berada pada kondisi kompromi. Kompromi dimaknai sebagai suatu bentuk akomodasi di antara pihak-pihak yang terlibat untuk dapat saling mengurangi tuntutannya agar penyelesaian masalah yang terjadi dapat dilakukan. Hal ini dapat ditunjukkan diantaranya dengan berbagai kondisi diantaranya tidak lagi terdengar maupun diselenggarakannya demonstrasi orang kampung baik dalam hal pembangunan gedung maupun tuntutan ganti rugi tanah.

Bagaimana kondisi interaksi sosial yang terjadi antara orang kampus dengan orang kampung Cot Kemuneng dan Paya Gaboh? Adalah juga bagian yang akan dieksplorasi dalam tulisan ini, walaupun

¹⁶⁰ Wawancara dengan Azis – Asisten III Bidang Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara, tanggal 22 Mei 2012, di Lhokseumawe.

kedua kampung tersebut bukan menjadi fokus utama penelitian ini, namun dikarenakan keberadaan kedua kampung tersebut juga berbatasan langsung dengan kampus Unimal maka analisis atas interaksi sosial yang timbul juga tidak kalah menarik.

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan aparaturnya kampung maupun masyarakat sekitar Cot Kemuneng dan Paya Gaboh menyampaikan hal senada, bahwa orang-orang pada kedua kampung tersebut tidak merasa memiliki konflik dengan kampus Unimal, walaupun seringkali keberadaan mereka diabaikan oleh Unimal sendiri maupun kampung Reuleut Barat dan Reuleut Timur. Beberapa kali aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga Reuleut – khususnya pada November 2011 diakui oleh orang kampung namun mereka tidak terlibat secara langsung.

Wawancara dengan pihak aparaturnya gampong maupun masyarakat Cot Kemuneng terkait dengan kondisi ini telah penulis lakukan, salah satunya dengan Jailani yang menyampaikan bahwa, “masyarakat Cot Keumeneng sebenarnya tidak terlibat langsung dalam konflik unimal, namun dari konflik tersebut ada efeknya juga ke kampung kami Cot Keumeneng yaitu tidak tersentuh pembangunan kampus di area yang termasuk *Gampong* Cot Keumeneng, karena tanpa ada pembangunan di area kami lahan kami tidak ada manfaatnya (lahan tidur).”¹⁶¹ Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa:

*“...dalam konflik agraria lahan Unimal dari pihak Cot Keumeneng sebenarnya tidak ikut menggugat ke pengadilan dan tidak terlibat bergabung dalam Aliansi Demo Unimal, hanya orang luar yang lahannya masuk dalam Gampong Cot Keumeneng ikut menggugat permasalahan tersebut. Sehingga pihak Gampong Reuleut Barat menganggap Gampong Cot Keumeneng tidak ada dalam area lahan Unimal padahal gampong cot Keumeneng jelas-jelas ada dalam area lahan kampus Unimal”.*¹⁶²

Walaupun pihak orang kampung Cot Kemuneng menyampaikan tidak adanya konflik yang terjadi secara langsung dengan pihak orang kampus Unimal, namun mereka juga mengakui bahwa interaksi yang

¹⁶¹ Wawancara dengan Jailani, Sekdes Kampung Cot Kemuneng, 18 April 2012, di Cot Kemuneng.

¹⁶² Ibid.

terjadi sudah mulai renggang, hal ini ditandai dengan minimnya berbagai kegiatan maupun donasi yang diberikan oleh pihak Rektor Unimal saat ini kepada kampung. Hal senada diungkapkan oleh orang kampung Paya Gaboh yang menyampaikan bahwa, “dulu hubungan masyarakat Paya Gaboh dengan Unimal dapat dikatakan baik, semasa Pak Hadi Arifin setiap tahun ada semacam santunan anak yatim dan fakir miskin. Tapi kalau sekarang bukan tidak ada mungkin belum ada. Tapi saya sudah pernah menyarankan kepada pak Apridar setidaknya adalah perhatian Unimal untuk anak yatim dan anak putus sekolah di desa binaan Unimal sendiri.”¹⁶³ Ketua Pemuda Paya Gaboh menambahkan bahwa “sekarang hubungan Paya Gaboh dengan Unimal kalau kita bandingkan sudah (lebih) bagus pihak Rudal yang militer dibandingkan Unimal yang mengelola pendidikan. Rudal setiap tahun ada acara sosial yang dilaksanakan di Gampong Paya Iboh”.¹⁶⁴

Selain bentuk perhatian sebagaimana yang telah disampaikan di atas, orang kampung juga mengungkapkan tentang janji Unimal yang tidak ditepati lagi pada masa Rektor saat ini. Janji-janji dimaksud adalah terkait dengan hibah dan pembebasan lahan Unimal. Ada 3 (tiga) janji yang ditagih oleh orang kampung, yaitu: 1) penerimaan mahasiswa di Unimal yang berasal dari kampung sekitar kampus; 2) rekrutmen tenaga kerja/pegawai dari orang kampung dan 3) pemberian beasiswa bagi mahasiswa sekitar kampung. Keuchik Reuleut Timur¹⁶⁵ menyampaikan bahwa pada masa Rektor Pak Hadi Arifin, janji-janji ini masih selalu dipenuhi tapi pada saat ini sudah tidak pernah lagi dipenuhi. Beliau mengungkapkan “....pada pemerintahan Rektor lama pasti ada putra daerah dari empat desa ini yang mudah untuk masuk ke Unimal, sementara pada kepemimpinan baru (Apridar), satu orang pun tidak ada yang lewat, dengan alasan tesnya langsung dari Jakarta sehingga pihak kampung tidak dapat mengintervensi hal tersebut”.¹⁶⁶ Lebih lanjut beliau menyampaikan

¹⁶³ Ibid.

¹⁶⁴ Wawancara dengan Mukhlis, Ketua Pemuda Paya Gaboh, 19 April 2012, di Paya Gaboh.

¹⁶⁵ Wawancara dengan Keuchik Jakfar Hanafiah, 19 April 2012, di Reuleut Timur.

¹⁶⁶ Wawancara dengan Mukhlis, Ketua Pemuda Paya Gaboh, 19 April 2012, di Paya Gaboh.

bahwa “Pak Hadi, bisa kenapa Pak Apridar tidak bisa? Begitupula halnya dengan masalah beasiswa, saat ini mahasiswa yang berasal dari Reuleut sudah tidak lagi mendapatkan beasiswa – sehingga muncullah gejala dari masyarakat.”¹⁶⁷

Jadi, walaupun tidak ada konflik yang secara langsung dialami oleh orang kampung Cot Kemuneng dan Paya Gaboh dengan Unimal, namun konflik dirasakan oleh orang kampung Paya Gaboh dengan warga kampung sekitarnya – khususnya kampung Reuleut Barat. Salah satu hal yang menjadi penyebab konflik adalah juga dalam bidang agraria – yaitu terjadinya pencaplokan wilayah lahan Paya Gaboh oleh pihak kampung Reuleut Barat:

“.....Sekarang perbatasan Gampong Paya Gaboh yang dalam area Unimal sudah diklim oleh pihak Reuleut Barat punya mereka, Semasa geuchik Hasan Syah menjabat sebagai geuchik Reuleut Barat membuat data-data palsu sehingga seakan-akan tanah yang dasarnya patokan alam milik Paya Gaboh serang sudah ada dalam surat sebagai milik Reuleut Barat. Namun kami tidak menerima hal tersebut, suatu saat apabila terjadi sesuatu atas lahan tersebut kami akan meminta perhitungan dengan Reuleut Barat.”¹⁶⁸

Konflik lain yang muncul adalah terkait dengan pencurian yang terjadi di lingkungan kampus Unimal. Tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali ketika pencurian terjadi – orang kampus akan melontarkan tuduhan kepada pihak orang kampung – namun tanpa dapat membuktikan secara pasti sebelumnya pihak warga kampung yang mana yang mencuri diantara keempat kampung sekitar. Oleh karenanya dari pihak Reuleut Timur¹⁶⁹ maupun Paya Gaboh pernah

¹⁶⁷ Ibid.

¹⁶⁸ Wawancara dengan Syaukani, Keuchik Paya Gaboh, 19 April 2012, di Paya Gaboh.

¹⁶⁹ Diskusi penulis sebelumnya dengan Keuchik Reuleut Timur, beliau mengungkapkan bahwa orang kampung Reuleut Barat masih sangat tradisional dan rata-rata penduduknya berpendidikan rendah, sehingga banyak kriminalitas yang terjadi melibatkan orang kampung Reuleut Barat. Sebaliknya, Keuchik Kampung Reuleut Barat juga mengungkapkan bahwa orang kampung Reuleut Timur sudah terlalu modern dan seringkali tidak

menyampaikan bahwa Unimal terlalu sering menuduh orang kampung tanpa dicari tau lebih dahulu warga kampung mana yang berbuat. Terhadap hal ini, salah satu contoh peristiwa yang terjadi disampaikan oleh Jailani, bahwa:

“Seorang warga Reulet Barat pernah mencuri besi pagar Unimal yang termasuk dalam gampong Paya Gaboh tertangkap oleh pemuda paya Gaboh dan diserahkan ke pihak kepolisian. Akhirnya pihak Reulet Barat meminta damai agar berkas pelaporan di kepolisian dicabut. Kami tidak mau mencabut, jangan seakan-akan yang selalu melakukan pencurian warga Paya Gaboh, kenapa tidak melakukan pencurian di Unimal yang masih dalam gampong Reulet Barat.”¹⁷⁰

Kondisi sebagaimana yang disampaikan Jailani di atas, menurut penulis adalah refleksi adanya konflik yang juga terjadi diantara kampung. Walaupun tidak melibatkan langsung masing-masing anggota atau warga kampung, namun dalam hal ini pihak warga kampung Paya Gaboh tidak menginginkan kampungnya “dituduh” melakukan pencurian di Unimal. Di dalam lampiran penelitian ini ditampilkan beberapa foto kondisi kampung sekitar kampus utama Reuleut untuk memberikan gambaran atas kondisi kampung sekitar.

Uraian lebih lanjut tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh para pihak dalam mengatasi konflik yang terjadi akan diuraikan lebih lanjut pada bab berikut dalam tulisan ini. Pada bagian berikut, penulis akan memberikan eksplorasi terkait dengan interaksi sosial yang ada diantara orang kampus Unimal dengan orang kampung sekitar kampus Bukit Indah. Telah disampaikan sebelumnya bahwa kampus Bukit Indah merupakan kampus pengembangan yang berada di wilayah pemerintahan kota Lhokseumawe. Kampus ini merupakan hibah dari ExxonMobil kepada Unimal untuk dipergunakan sebagai sarana pendukung perkuliahan. Kampus Bukit Indah mulai dimanfaatkan oleh Unimal sekitar tahun 2010 guna menampung 3

mempertimbangkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di kampung (diskusi ini penulis lakukan pada saat akan mengajukan penawaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat di awal tahun 2011).

¹⁷⁰ Wawancara dengan Jailani – Sekretaris Desa Cot Kemuneng, tanggal 18 April 2012, di Cot Kemuneng.

(tiga) Fakultas Ilmu Sosial yaitu, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

5.2.2. Toleransi dengan potensi terjadinya Konflik: Interaksi Sosial yang terjalin antara Orang Kampus dengan Orang Kampung sekitar Kampus Bukit Indah.

Pandangan salah seorang Tuha Peut¹⁷¹ di gampong Blang Pulo yang menyatakan, "...bahwasannya keberadaan Unimal di Bukit Indah merupakan rahmat bagi warga desa itu sendiri", akan mengawali eksplorasi terkait dengan interaksi yang timbul antara orang kampus dengan orang kampung sekitar kampus Bukit Indah. Pernyataan beliau ini disandingkan dengan fakta pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar dengan keberadaan kampus Bukit Indah. Ada lebih kurang 42 (empat puluh dua) kantin¹⁷² masyarakat dalam ukuran kecil serta berbagai kios foto-copy, warnet dan kamar *kost* yang telah dibuka oleh orang kampung untuk memenuhi kebutuhan orang kampus.

Kepala Humas Unimal, Heikal, juga mengungkapkan hal yang senada, bahwa

"hubungan sosial antara warga kampus Unimal dengan masyarakat sekitar dalam hal ini Reuleut dan Blang Pulo dalam kategori sangat baik, karena sampai saat ini seluruh warga kampus menjalin komunikasi yang sangat intensif dengan pimpinan dan masyarakat baik di Reuleut maupun Blang Pulo, karena kita menganggap bahwa masyarakat dari kedua Gampong tersebut adalah bagian dari para pemangku

¹⁷¹ Wawancara dengan Bpk. Syarifuddin – Tuha Peut Gampong Blang Pulo, ia juga merupakan salah seorang dosen di Fakultas Teknik Unimal, tanggal 19 Mei 2012, di Lhokseumawe.

¹⁷² Informasi dari Bpk. Amir, salah seorang pengurus perkumpulan kantin Bukit Indah. Beliau juga merupakan pedagang pertama yang berjualan di kampus BI. Sebelumnya, dengan mengendarai becak motor beliau menjajakan dagangan di areal kampus, tepatnya di depan gerbang dalam kampus, namun dengan adanya larangan berjualan di areal kampus yang bersangkutan bersama dengan warga lainnya mulai mendirikan bangunan-bangunan kantin yang menggunakan bambu, papan dan kayu, wawancara tanggal 11 Mei 2012, di Blang Pulo.

kepentingan bagi Universitas Malikussaleh. Disamping itu setiap ada kegiatan yang dilaksanakan di kedua Gampong tersebut selalu saja kita diundang untuk menghadiri seperti peringatan Maulid dan kegiatan lainnya.”¹⁷³

Terkait dengan interaksi sosial yang terjadi diantara kedua belah pihak, Syarifuddin menyampaikan bahwa “...banyak masyarakat disini sudah memahami manfaat keberadaan kampus Unimal, jadi secara garis besar hampir tidak ada permasalahan yang terjadi”.¹⁷⁴ Berdasarkan informasi di atas yang penulis dapatkan dari dua pihak yaitu orang kampung dan orang kampus, ditambah lagi dengan informasi dari mahasiswa-mahasiswa yang indekost di daerah sekitar – dapat disimpulkan sementara bahwa interaksi yang terjadi diantara kedua belah pihak adalah dalam kondisi baik, atau menurut penulis kondisi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk interaksi sosial yang asosiatif yang berbentuk akomodasi. Akomodasi sendiri terdiri dari beragam bentuknya, namun yang tepat untuk menggambarkan hubungan ini dalam pandangan penulis adalah suatu toleransi.

Toleransi merupakan suatu bentuk akomodasi yang dilandasi sikap saling menghormati kepentingan sesama sehingga perselisihan dapat dicegah atau tidak terjadi. Dalam hal ini, toleransi timbul karena adanya kesadaran masing-masing individu yang tidak direncanakan. Namun demikian, hasil observasi dan penggalian informasi yang penulis lakukan juga menemukan adanya potensi konflik yang mungkin muncul diantara kedua belah pihak. Hal ini terjadi lebih dikarenakan sikap dari para pihak yang tidak berkenan bagi pihak lainnya. Jika orang kampus – melalui Humas Unimal – menyampaikan bahwa hubungan yang ada dalam kategori sangat baik dikarenakan adanya komunikasi yang dibangun, pihak orang kampung sebahagiannya tidak memandang demikian. Walaupun dapat dilihat bahwa banyak pihak – khususnya orang kampung yang membuka usaha di lingkungan Unimal telah mendapatkan keuntungan dengan adanya kampus Unimal, tapi pihak aparat pemerintah daerah sendiri – khususnya pada gampong

¹⁷³ Komunikasi pribadi dengan Muhammad Heikal, Kepala Humas Unimal, tanggal 31 Mei 2012.

¹⁷⁴ Wawancara dengan Syarifuddin – Tuha Peut Blang Pulo, tanggal 19 Mei 2012, di Lhokseumawe.

Blang Pulo mengungkapkan hal yang berbeda. Pejabat Keuchik¹⁷⁵ di kampung Blang Pulo menyampaikan bahwa selama beliau menjabat sebagai Keuchik – lebih kurang 1 (satu) bulan ini, belum ada pihak Unimal yang menemui beliau. Beliau tidak memungkiri bahwa kemungkinan, orang kampus telah menemui keuchik sebelumnya namun beliau menyampaikan bahwa dari unsur masyarakat sendiri belum pernah diajak duduk bersama. Informasi lebih lanjut disampaikan oleh salah seorang Tuha Peut¹⁷⁶ kampung Blang Pulo, bahwa yang bersangkutan sampai dengan saat ini belum mengenal Rektor Unimal.

Pada saat wawancara dengan unsur aparatur kampung Blang Pulo ini, turut hadir salah seorang Kepala RT, Bendahara Desa selain pejabat Keuchik dan Tuha Peut. Dari keempatnya, penulis mendapati suatu kondisi ideal yang diinginkan oleh orang kampung sekitar, yaitu adanya pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak dengan tujuan dapat terjalinnya kerjasama yang baik.¹⁷⁷ Selain itu, mereka juga mengharapkan agar Unimal memberikan prioritas perhatian kepada masyarakat Blang Pulo dibandingkan masyarakat lain dari kampung sekitar, dikarenakan Unimal berada di *gampong* Blang Pulo. Terungkap pada saat pertemuan ini sikap cemburu orang kampung Blang pulo dengan orang kampung Padang Sakti yang sepengetahuan mereka mendapatkan bantuan lebih banyak seperti zakat dan ternak.

Lebih lanjut, wawancara yang dilakukan juga sudah mengarah pada diskusi kecil diantara anggota tim peneliti dengan keempat unsur aparatur kampung Blang Pulo. Selain mengungkapkan harapannya atas hubungan yang lebih baik antara orang kampus dengan orang kampung sekitar, mereka juga menyampaikan analisis mereka atas kemungkinan pihak Unimal yang masih mengambil jarak dengan orang kampung dikarenakan Rektor khawatir jika dimintai proyek oleh orang

¹⁷⁵ Wawancara dengan Tgk. Ahmad Adami H. Said - Pejabat Keuchik Blang Pulo, tanggal 8 Mei 2012, di Blang Pulo.

¹⁷⁶ Wawancara dengan Abdul Manan, Tuha Peut Kampung Blang Pulo tanggal 8 Mei 2012, di Blang Pulo.

¹⁷⁷ Wawancara dilaksanakan di kantor Keuchik Blang Pulo, tanggal 8 Mei 2012, di Blang Pulo.

kampung.¹⁷⁸ Kondisi ini dalam pandangan penulis ada benarnya, di satu sisi. Pada beberapa kesempatan, penulis juga mendapati permintaan-permintaan serupa yang diajukan oleh orang kampung, dan kondisi ini tidak hanya terjadi di lingkungan kampus Bukit Indah namun juga di lingkungan kampus Reuleut¹⁷⁹.

Kondisi lain yang juga memungkinkan munculnya konflik diantara orang kampus dengan orang kampung adalah keberadaan *harlan* – yang menawarkan jasa pengangkutan barang di lingkungan kampus dan dalam prakteknya keberadaan *harlan* ini sedikit meresahkan orang kampus. Pengalaman pribadi penulis dengan orang – orang kampung yang berprofesi sebagai *harlan* menjadi salah satu pertimbangan penulis terkait dengan kemungkinan munculnya konflik di kemudian hari. Sebagaimana halnya dengan keberadaan *harlan* di Reuleut, *harlan* di kampus Bukit Indah juga mempraktekkan pemaksaan dan menetapkan harga yang tinggi terhadap barang-barang yang dibawa oleh pihak kampus. Praktek ini dimulai pada saat perpindahan perkuliahan dari kampus Reuleut ke kampus Bukit Indah dan akhirnya terus berlangsung setiap ada pihak orang kampung yang terlihat membawa barang ke lingkungan kampus.

Terkait dengan keberadaan *harlan* ini, penulis juga mewawancarai Kepala Harlan Bukit Indah, Imran alias Feran, di antara mereka, menyampaikan bahwa keberadaan *harlan* –atau dalam istilahnya sendiri adalah buruh bongkar muat— ini awalnya berdiri sendiri.

“... Kondisi perpindahan kampus Unimal dimanfaatkan oleh pemuda pengangguran khususnya yang melihat bongkar muat barang yang masuk ke Unimal BI ada nilai ekonomisnya, sehingga setiap ada barang yang masuk ke Unimal mereka datang. Sempat terjadi keributan diantara mereka sendiri, artinya mereka saling menuding lebih berhak menjadi buruh bongkar muat. Akhirnya saya merasa iba

¹⁷⁸ Pandangan dari Sanusi Hamid - Bendahara Kampung Blang Pulo, tanggal 8 Mei 2012, di Blang Pulo.

¹⁷⁹ Sampai dengan saat laporan ini disusun, Penulis kerap mendapatkan panggilan telpon ataupun pesan singkat *sms* dari beberapa orang narasumber penelitian ini yang berasal dari kampung Reuleut maupun pedagang kanti di kampus Bukit Indah yang menanyakan kemungkinan dan peluang untuk mendapatkan bantuan usaha serta peluang pertemuan dengan pimpinan Unimal.

melihat hal yang demikian mencoba mengorganisir setiap buruh yang ingin bekeja bongkar muat di Unimal. Sehingga saya sendiri didukung tokoh adat untuk menjadi Ketua buruh bongkar muat. Jumlah anggota bongkar muat ini sebanyak 51 orang. Anggota ini akan bekerja secara bergiliran karena bongkar muat tidak setiap hari ada di BI.”¹⁸⁰

Selain keberadaan *harlan* sebagaimana yang disampaikan di atas, salah seorang pedagang¹⁸¹ di kantin kampus Bukit Indah mengungkapkan adanya perselisihan yang pernah timbul diantara mereka dengan pihak Unimal. Perselisihan ini terjadi di awal kepindahan sebahagian fakultas ke kampus Bukit Indah. Pada saat itu yang bersangkutan dengan beberapa rekan pedagang telah menyewa satu unit mobil *becko* untuk meratakan sebahagian areal tanah kampus BI yang sedianya akan dipergunakan oleh mereka untuk membuka kantin di dalam areal kampus. Oleh pihak kampus kondisi ini tidak dibiarkan. Razali menyampaikan bahwa:

“....mereka marah, sampai-sampai kami ribut, pak Haikal yang paling keras, dia mau memukul saya. Saya diam aja, dia bilang untuk orang kampung sini bodoh semua, tidak berpendidikan. Sedangkan pak tarmizi diam aja. Setelah itu datang beberapa orang kampung disitu yang punya kantin disitu juga. Pak Haikal langsung pergi naek mobil. Tidak berapa lama datang polisi, yaitu polisi muara satu. Saya dipanggil sama polisi tersebut. Datang Geuchik dan juga perangkat desa. Kami selesaikannya di kantin disebelah sana (sambil menunjukkan arah) dan kami musyawarahkan disitu. Kapolsek dan Geuchik menyuruh saya untuk menutup kembali tanah yang telah dikeruk tersebut. Saya pun mengiyakannya. Dan sekarang permasalahannya sudah selesai.”¹⁸²

¹⁸⁰ Wawancara dengan Feran - Ketua Harlan Bukit Indah, tanggal 30 Mei 2012, di Lhokseumawe.

¹⁸¹ Wawancara dengan Razali, Pedagang Kantin di sekitar kampus Bukit Indah, 3 Mei 2012 dan 15 Mei 2012, di Blang Pulo.

¹⁸² Sampai dengan saat ini, kantin orang kampung menempati kedua sisi badan jalan keluar dari gerbang kampus Bukit Indah. Pada saat jam istirahat siang, kondisi badan jalan seringkali tidak memungkinkan untuk dilewati oleh kendaraan dari dua arah, dikarenakan padatnya sepeda motor mahasiswa yang parkir di badan jalan.

Kekhawatiran Rektor Unimal – khususnya terkait dengan kemungkinan permintaan orang kampung atas proyek di Unimal - dalam pandangan orang kampung merupakan miskomunikasi belaka¹⁸³. Padahal orang kampung sekitar kampus Bukit Indah, begitupula di kampus Utama Reuleut memiliki harapan yang besar kepada Unimal untuk mau melibatkan orang-orang kampung. Sanusi Hamid - Bendahara kampung Blang Pulo¹⁸⁴ menyatakan,

“.....seharusnya, Unimal yang sudah memiliki ilmu begitu hebat, kenapa tidak melibatkan masyarakat gampong, misalnya diajak kami duduk barang 9 atau 10 orang yang mewakili masyarakat desa, Geuchik, Tuha Peut, Sekdes, tokoh pemuda, kalau memang perlu kita bawa perwakilan perempuan, memang selama ini tidak pernah kami membawa orang perempuan ikut-ikut rapat (ada ungkapan bahasa aceh “ureung inong hana payah ikot keudeh acara lage nyan”) penempatan anak KKN harus bermanfaat bagi gampong, kami punya BLK desa tetapi sampai sekarang sudah tidak berjalan lagi karena tidak ada Pembinaan dan bantuan dana, mungkin ke depan kami berharap ketika kami melakukan pemilukades, ada kontribusi dari Unimal, kami berencana akan mengadakan Musrenbang, akan ada pemaparan visi dan misi dari pak geuchik, kami membutuhkan tenaga ahli baik dari ekonomi, social, politik, yang bisa mengarahkan kami hasil dari musrenbang ini ada dalam program kerja pak geuchik, dan memang ini kami akui kesalahan kami selama ini dalam hal administrasi, kami tidak pernah mencatat, sehingga tidak ada notulensi yang kami simpan, makanya kalau rapat diulang ulang lagi hal-hal yang sama”.

Apa yang disampaikan oleh Bendahara Kampung Blang Pulo di atas, pada dasarnya cerminan pengharapan dari orang kampung namun juga merupakan kritikan tajam bagi Unimal dan segenap civitas akademiknya. Sebagai perguruan tinggi, Unimal menyanggah beban pengamalan Tridharma Perguruan Tinggi, dan khususnya untuk pengamalan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harusnya menempatkan masyarakat – khususnya orang kampung

¹⁸³ Wawancara dengan Tgk. Ahmad Adami H. Said - Pejabat Keuchik Blang Pulo, 8 Mei 2012, di Blang Pulo.

¹⁸⁴ Wawancara dengan Sanusi Hamid – Bendahara Kampung Blang Pulo, 8 Mei 2012, di Blang Pulo.

sekitar di lokasi keberadaan Unimal sebagai *target beneficiaries* atau penerima manfaat utama. Masyarakat telah memetakan kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, namun orang kampus belum mampu membaca peluang yang ada untuk kemudian melakukan aksi nyata dalam mewujudkan pengamalan Tridharma Perguruan Tinggi. Penulis ingat sebuah pameo yang seringkali mengungkapkan keberadaan kampus bak menara gading, tidak mengakar di tengah-tengah masyarakat, bahkan sulit untuk dijangkau oleh masyarakat sekitarnya.

Proses belajar mengajar di ruang kuliah harusnya dapat menjadi bekal awal bagi mahasiswa peserta didik maupun dosen untuk dapat menelaah kondisi-kondisi kemasyarakatan di sekitarnya. Bahwa tanggung jawab untuk memajukan masyarakat pada dasarnya bukan hanya menjadi beban pemerintah, namun juga menjadi bagian dari tanggung jawab perguruan tinggi dalam menciptakan berbagai inovasi – pembaharuan yang dapat diaplikasikan di masyarakat. Dengan demikian filosofi keberadaan Perguruan Tinggi bahwa “ilmu untuk ilmu” akan dapat terwujud.

5.3. Akulturasi antara Orang Kampus dengan Orang Kampung

Interaksi sosial antara mahasiswa dengan masyarakat kampung sekitar kampus memberikan beberapa pengaruh yang saling asah-asih dan asuh yang timbal balik. Jika pada bagian sebelumnya pembahasan difokuskan pada interaksi yang terjadi di antara orang kampus dengan orang kampung dan diketahui bahwa telah terjalin beragam interaksi dalam bentuknya yang asosiatif maupun disosiatif dikarenakan berbagai kondisi dan beragam faktor yang ada, maka pada bagian ini penulis akan melakukan eksplorasi terhadap interaksi khusus yang terjalin diantara orang kampus – yaitu civitas akademika Universitas Malikussaleh dengan orang kampung.

Penting untuk ditegaskan pada bagian ini bahwa konflik yang terjadi dengan beragam faktor penyebabnya adalah antara Unimal sebagai institusi - yang dianggap oleh orang kampung merupakan representasi keberadaan pemerintah. Konflik tidak terjadi diantara orang kampung dengan civitas akademika Unimal secara langsung, baik di kalangan dosen, staf pegawai maupun mahasiswa.

Pada bagian ini, penulis akan menyampaikan eksplorasi lebih lanjut terkait dengan akulturasi yang terjadi diantara orang kampus dengan orang kampung. Akulturasi sendiri dimaknai sebagai suatu

proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing tersebut lambat laun akan diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri. Akulturasi juga dapat dimaknai sebagai perpaduan kebudayaan yang berbeda yang berlangsung dengan damai dan serasi. Berbagai studi tentang akulturasi telah menunjukkan bahwa dalam proses akulturasi unsur budaya lain tidak pernah menjadi budaya yang dominan, karena budaya yang asli akan selalu bertindak selektif terhadap berbagai unsur yang masuk.

Terdapat beragam faktor – internal maupun eksternal – yang mempengaruhi proses akulturasi. Misalnya, secara internal – akulturasi akan banyak dipengaruhi oleh adanya *discovery*, *invention* dan *innovation*. Ketiganya merupakan faktor-faktor yang akan mempengaruhi proses akulturasi secara positif. Berbagai penemuan maupun penyempurnaan ide ini lahir karena adanya kesadaran masyarakat akan kekurangannya dalam kehidupan, seperti misalnya kualitas keahlian dari anggota masyarakat. Faktor internal lainnya yang mempengaruhi akulturasi adalah adanya konflik yang terjadi di masyarakat dan atau terjadinya pemberontakan. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses akulturasi adalah perubahan, peperangan maupun pengaruh kebudayaan lain.

Proses akulturasi yang telah terjadi ini, di satu sisi bukan suatu hal yang mustahil akan mengarah pada proses asimilasi. Koentjaraningrat¹⁸⁵ menyampaikan bahwa proses asimilasi itu timbul apabila terdapat tiga unsur, yaitu: (a) adanya kelompok manusia yang berasal dari lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda, (b) individu dan kelompok saling bergaul langsung secara intensif dalam waktu yang cukup lama, dan (c) kebudayaan dari kelompok itu berubah saling menyesuaikan diri.

Penulis melihat bahwa beragam faktor internal maupun eksternal sebagaimana yang telah disampaikan di atas juga mempengaruhi akulturasi yang terjadi diantara orang kampung dengan orang kampung. Penting untuk disampaikan disini bahwa interaksi sosial yang terjalin diantara orang kampung dengan civitas akademika

¹⁸⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 209

sendiri adalah bersifat kooperatif. Khususnya terhadap mahasiswa-mahasiswa yang indekost ataupun mondok di lingkungan kampung maupun di *Dayah* yang ada di Gampong Reuleut Barat. Keseluruhan mahasiswa yang berdomisili di lingkungan kampung menyampaikan bahwa mereka diterima dengan baik oleh orang kampung, selalu diajak dalam berbagai aktifitas di kampung bahkan ketika terjadi tuntutan dalam bentuk demo kepada Unimal pada bulan Nopember 2011 lalu – masyarakat melarang mahasiswa untuk ikut serta dalam demo ini dengan alasan hal ini akan dikhawatirkan mempengaruhi posisi mahasiswa bersangkutan di lingkungan fakultas maupun universitas.¹⁸⁶

Pendapat lainnya tentang kondisi ini disampaikan oleh Agustiar¹⁸⁷ - bahwa selama ini yang bersangkutan belum merasakan imbas negatif dari konflik yang terjadi diantara Unimal dengan orang kampung. Hal ini dalam pandangan yang bersangkutan dikarenakan adanya kemungkinan bahwa masyarakat masih menganggap mahasiswa sebagai *patner* dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Artinya masyarakat bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penyewaan tempat kos dan juga bertambah warung disekitar gampong. Namun beliau juga menegaskan bahwa berbagai aturan kampung yang diterapkan tetap berjalan seperti halnya di lingkungan kos mahasiswi – yang tidak membolehkan mahasiswi tersebut pulang larut di atas jam sepuluh malam.

Terkait dengan berbagai aturan yang telah ditetapkan oleh kampung bagi anak kost khususnya di lingkungan kampung sekitar kampus Reuleut maupun kampus Bukit Indah, dalam pandangan mahasiswa adalah sesuatu yang wajar. Begitu juga halnya dengan keterlibatan mahasiswa dalam beragam aktivitas kampung, seperti perayaan-perayaan hari keagamaan yang bahkan mahasiswa juga seringkali terlibat aktif sebagai panitianya. Ferry Afrinal¹⁸⁸ – salah

¹⁸⁶ Wawancara dengan Jamaluddin - mahasiswa Fakultas Pertanian Unimal mondok di Dayah Gampong Reuleut Barat, tanggal 29 April 2012, di Reuleut; Komunikasi Pribadi dengan Sri Mulyani - alumni Fakultas Hukum Unimal – pernah indekost di Gampong Reuleut Timu, 2 Mei 2012.

¹⁸⁷ Wawancara dengan Agustiar, 19 April 2012, di Lhokseumawe.

¹⁸⁸ Wawancara dengan Ferry Afrinal, ia berasal dari daerah Bireuen dan saat ini indekost di Kampung Padang Sakti, wilayah kampung sekitar Kampus Bukit Indah, 27 April 2012, di Blang Pulo.

seorang mahasiswa menyampaikan bahwa saat ini orang kampung sudah tidak segal lagi dengan keberadaan anak kost – khususnya dirinya sendiri. Dalam beberapa kesempatan, orang kampung juga meminta bantuan mahasiswa. Terkait dengan aktivitas-aktivitas di kampung yang diikuti - yang bersangkutan menyampaikan itu adalah sesuatu yang wajar saja, dengan alasan bahwa karena bersangkutan tinggal di lingkungan orang lain maka tidak mungkin jika kita tinggal sendiri seperti tidak kenal siapa-siapa, sehingga interaksi dengan masyarakat mutlak dilakukan.

Selain mewawancarai mahasiswa, penulis juga mewawancarai orang kampung untuk mengeksplorasi lebih lanjut hubungan sosial yang terjalin. Salah seorang warga¹⁸⁹ sekitar kampus utama Reuleut menyampaikan bahwa keberadaan mahasiswa yang indekost dan mondok di lingkungan Dayah – khususnya di Gampong Reuleut Barat tidak pernah mendapatkan perlakuan berbeda dari masyarakat, bahkan bagi beliau keberadaan mahasiswa tersebut tidak beda dengan anak sendiri. Kerap kali ketika musim panen padi tiba, mahasiswa yang indekost diminta oleh orang kampung untuk membantu memanen sawah dengan tujuan agar mahasiswa yang bersangkutan dapat mencari lebih uang jajan. Hal ini dikarenakan seringkali orang kampung ingin membantu mahasiswa namun tidak mengetahui apa yang patut diberikan.

Berbagai aktivitas kemasyarakatan lainnya juga kerap melibatkan mahasiswa seperti aktivitas-aktivitas *khanduri* kampung maupun aktivitas oleh raga. Hal ini juga diakui oleh mahasiswa-mahasiswa¹⁹⁰ yang tinggal indekost di kampung-kampung sekitar kampus Unimal baik di lingkungan kampus utama Reuleut maupun di

¹⁸⁹ Wawancara dengan Bpk. Muhammad, tanggal 29 April 2012, di Reuleut Barat. Pada saat proses wawancara ini dan khususnya ketika membahas tentang keberadaan mahasiswa yang ada di lingkungan gampong, yang bersangkutan terlihat sedih bahkan menitikkan air mata.

¹⁹⁰ Wawancara diantaranya dilakukan dengan mahasiswa indekost di Reuleut: Sri Mulyani, tanggal 2 Mei 2012 dan Jamaluddin, 29 April 2012 di Reuleut . Wawancara dengan mahasiswa yang berdomisili dan indekost di sekitar kampus Bukit Indah: Aisyah, tanggal 2 April 2012 di Blang Pulo; Martunis, tanggal 20 April 2012 di Blang Pulo; Nurlaila, tanggal 20 April 2012 di Blang Pulo; Haris Munandar, tanggal 24 April 2012 di Blang Pulo; dan Ferry Afrinal, tanggal 27 April 2012 di Blang Pulo.

kampus Bukit Indah. Dari sisi orang kampung, seorang warga senior, Bapak Muhammad, lebih lanjut menyampaikan bahwa:

“... sampai sekarang ini belum ada berselisih paham antara masyarakat dan mahasiswa yang kos disini. Masyarakatpun belum pernah melihat mahasiswa berperilaku jelek, bagitupun mahasiswa - pantang dibilang ada acara, ada orang meninggal atau hal lainnya - mereka langsung berbaur dengan masyarakat, tidak ada mereka beda-bedakan karena mereka mahasiswa. Malahan mahasiswa yang tinggal di sini seolah-olah seperti tinggal di kampung mereka sendiri, tidak ada kesenjangan antara mahasiswa dan masyarakat, walaupun ada kebijakan-kebijakan Unimal yang bertentangan dengan masyarakat disini, mahasiswa tetap berbaur dengan masyarakat. Padahal kalau kita kerja satu hari dapat Rp. 50.000, kalau di sini mereka turun kesawah setengah hari dapat Rp. 50.000.”¹⁹¹

Kondisi serupa yang menunjukkan adanya interaksi yang baik antara orang kampus, khususnya mahasiswa, di lokasi kampus Bukit Indah sebagaimana disampaikan oleh Syarifuddin:

“salah satu faktanya yaitu adalah pertumbuhan ekonomi rakyat, dengan adanya Unimal di situ banyak masyarakat disekitar situ telah menyediakan tempat kos-kosan bagi mahasiswa yang ingin mengkos, banyak masyarakat yang berjualan, kemudian tumbuhnya sektor usaha kecil menengah seperti warnet, foto-copy dan sekarang banyak masyarakat yang membangun tempat tersebut karena keberadaan Unimal di bukit Indah. Kalau masalah interaksi sosial itu begini, banyak masyarakat disini sudah memahami manfaat tentang keberadaan kampus Unimal disitu, jadi secara garis besar hampir tidak ada permasalahan yang terjadi. Ini karena pemahaman sudah sadar tentang keberadaan Unimal hingga saat ini. Ini karena pemahaman telah kita berikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat memahami tentang keberadaan Unimal.”¹⁹²

Terkait interaksi dan problema yang muncul diantara orang kampus dengan orang kampung sekitar Bukit Indah, khususnya Blang Pulo – Humas Unimal menyampaikan,

¹⁹¹ Wawancara dengan Muhammad, tanggal 29 April 2012, di Reuleut Barat.

¹⁹² Wawancara dengan Syarifuddin, Tuha Peut Blang Pulo, tanggal 19 Mei 2012, di Lhokseumawe

“Di wilayah ini (Blang Pulo) berbeda dengan dengan Reuleut, karena masyarakat Blang Pulo sudah puluhan tahun berdampingan dengan perumahan yang merupakan milik ExxonMobil Oil Indonesia Inc. Sehingga saat Bukit Indah masih merupakan milik perusahaan gas tersebut, masyarakat mendapatkan dampak signifikan secara ekonomi, karena sebagian besar masyarakat sekitar diterima menjadi tenaga kerja baik sebagai tenaga cleaning, security dan driver dan sebagai tenaga out-sourcing lainnya. Ketika kompleks tersebut dialih fungsikan sebagai kampus tentu terjadi kesenjangan, mind set masyarakat masih sulit berubah yaitu dengan pemikiran bahwa kehadiran Unimal harus sama dengan kehadiran ExxonMobil Oil Indonesia Inc.”¹⁹³

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Unimal telah melakukan sosialisasi kepada orang kampung sekitar —tidak hanya dari kampung Blang Pulo namun juga dari Padang Sakti, Meuria Paloh dan Cot Trieng. Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka untuk memperkecil potensi konflik antara warga kampus dan warga Gampong. Walau demikian ia juga menyadari bahwa “di Blang Pulo juga muncul persoalan tentang pembangunan sarana dan prasarana walau disini tidak lebih tajam dari di Reuleut.”¹⁹⁴

Sebagai penutup pada bagian ini, penulis melihat bahwa akulturasi yang terjadi diantara orang kampus dengan orang kampung Reuleut adalah dikarenakan beberapa faktor, yaitu: (1) adanya perubahan pola pikir dari masyarakat yang mau maju dan peduli atas pentingnya pendidikan, (2) mulai tingginya toleransi terhadap perubahan-perubahan yang ada, (3) sistem stratifikasi (pelapisan) sosial di masyarakat yang terbuka, (4) kelompok penduduk yang cukup heterogen dan (5) munculnya orientasi atas pentingnya persiapan masa depan. Kondisi serupa penulis perhatikan pada orang kampung sekitar kampus Bukit Indah, hanya saja kondisi interaksi sosial sebelumnya yang terjalin antara orang kampung sekitar dengan penduduk pada perumahan ExxonMobil (Mol) – harus diakui menjadi faktor pendorongnya pula. Artinya, orang kampung sekitar sudah faham dengan adanya interaksi timbal balik yang akan memberikan

¹⁹³ Komunikasi personal dengan Mohd. Heikal, Kepala Humas Unimal, tanggal 31 Mei 2012.

¹⁹⁴ Ibid.

keuntungan bagi mereka, sehingga jalinan interaksi yang ada berlangsung dengan relatif baik.

□

BAB 6

RESOLUSI DAN ESKALASI KONFLIK

Upaya penyelesaian konflik yang sudah berlangsung satu dekade antara masyarakat Reuleut dengan Unimal beberapa kali menghasilkan resolusi setelah Pemda Kabupaten Aceh Utara ikut memberikan perhatian dalam bentuk bantuan bagi pemilik lahan melalui koperasi. Namun, resolusi ini kemudian menimbulkan masalah baru secara internal dimana warga masyarakat merasa tidak puas sehingga membuat rencana mengembangkan konflik secara lebih luas. Maka, resolusi yang seharusnya bisa menghasilkan perdamaian dan konsensus atau kerja-sama, justru memberikan jalan bagi eskalasi konflik. Konflik dalam penelitian ini dilihat sebagai suatu bentuk dinamika interaksi sosial yang terjadi di antara orang kampus dengan orang kampung yang tidak bisa dihindari (*inevitable conflict*). Setiap hubungan atau interaksi akan menghasilkan konflik, atau setidaknya gesekan budaya, nilai-nilai, prinsip, tradisi, kepercayaan dan kepentingan. Setiap konflik akan menghasilkan resolusi atau konsensus atau perdamaian.

Proses ini semacam siklus, dan konflik akan kembali ada jika resolusi atau konsensus atau perdamaian dirasa tidak puas sehingga menimbulkan eskalasi konflik (baru). Konflik yang ada telah dipahami oleh masing-masing pihak dari segi positif dan negatifnya. Interaksi dalam bentuk konflik ini selanjutnya akan dapat membangun, mengintegrasikan dan meneruskan struktur-struktur dalam masyarakat yang telah ada.

Studi ini menemukan belum adanya upaya yang cukup komprehensif dilakukan oleh para pihak untuk menghadapi maupun mengelola konflik yang ada. Dalam beberapa kondisi terlihat bahwa orang kampus dan orang kampung serta pihak Pemerintah Daerah Aceh Utara telah mengusulkan dan melakukan hal-hal sebagai berikut sebagai cara penyelesaian konflik:

- a. Pemberian *peng ie saka* (tali asih) dan peluang studi serta kerja di lingkungan kampus;
- b. Penyelesaian melalui jalur litigasi (proses peradilan);
- c. Menempuh jalur politik;
- d. Musyawarah (membuka forum dialog).

Secara khusus, bagaimana Unimal mengatasi persoalan-persoalan tuntutan maupun eksekusi dari konflik yang timbul juga akan didalami lebih lanjut pada bagian berikut.

6.1. Pemberian *Peng Ie Saka* dan Peluang Studi serta Bekerja di Lingkungan Kampus

Pilihan terhadap pemberian *peng ie saka* atau dalam istilah Indonesia dimaknai sebagai pemberian tali asih —dalam beberapa kondisi— adalah merupakan tuntutan dari orang kampung dan diajukan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan informasi dari pihak masyarakat, diketahui bahwa tuntutan atas pemberian *peng ie saka* merupakan refleksi kekecewaan orang kampung kepada Unimal maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara. Selain itu, observasi penelitian ini juga menyimpulkan bahwa keberadaan kampus Unimal di lingkungan masyarakat Reuleut maupun Blang Pulo —yang dinilai masih sangat guyub dan disandingkan dengan himpitan beban ekonomi yang ada— tampaknya menjadi berkah tersendiri bagi warga sekitar. Tidak dapat dipungkiri bahwa, latar belakang interaksi sosial yang multi strata ini akan memunculkan ekspresi perilaku yang beragam kemampuan. Potensi konflik yang mungkin adalah dalam bentuk dominasi atau subordinasi. Namun demikian dalam hal ini dan dengan himpitan ekonomi yang melanda orang kampung maka mereka juga mengambil sikap untuk dapat memanfaatkan keberadaan Unimal sebagai sumber penghasilan juga.¹⁹⁵

¹⁹⁵ Hal-hal yang melatarbelakangi pemikiran ini diantaranya adalah tuntutan *peng ie saka*, permintaan kesempatan kerja, kuliah, beasiswa, pemanfaatan lahan Unimal untuk kepentingan pribadi (pembiaran hewan ternak merumput, pengerukan tanah untuk pembuatan batu bata), termasuk keberadaan harlan dan tuntutan dilibatkan dalam proyek-proyek pengadaan di Unimal.

Salah satu kondisi saat *peng ie saka* ini diajukan oleh orang kampung adalah pada saat Unimal akan kembali pulang ke Reuleut pada tahun 2008. Terkait hal ini Keuchik Reuleut Timur menyampaikan bahwa:

“... setelah sekian lama ditinggalkan atau tidak dimanfaatkan lahan di Reuleut, maka masyarakat Reuleut terkejut dengan hal tersebut, maka pada saat itu kebiasaan masyarakat Aceh dalam bahasa Acehnya harus ada ie saka (air gula/air manis) yang merupakan sindiran agar Pemerintah Aceh Utara dan Pihak Unimal mengerti dan berbasa-basi kepada masyarakat Reuleut. Masyarakat Reuleut berencana mengambil kembali tanah tersebut yang telah dihibahkan kepada Unimal jika lahan tersebut tidak dimanfaatkan, masyarakat Reuleut cemburu kalau Unimal di Lhokseumawe, kalau bahasa sindirannya sudah ada istri sendiri, tapi masih mau istri kedua, sindiran yang lainnya yaitu sudah ada rumah sendiri, tapi tidur dan tinggal di rumah orang lain.”¹⁹⁶

Tuntutan ini untuk selanjutnya ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, selain dengan melaksanakan khanduri kampung dan menyembelih lembu dan dibagikan kepada seluruh orang kampung di sekitar kampus Reuleut, Bupati Aceh Utara pada saat itu – Ilyas A. Hamid – pada saat memberikan kata sambutan pada acara khanduri ini menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk bekerjasama dan bersyukur atas keberadaan lembaga pendidikan tinggi di kampung tersebut. Bupati juga menunjukkan komitmen tinggi dengan memberikan dana bantuan kepada koperasi masyarakat sekitar yaitu Koperasi Pertanian Terpadu Tjot Tgk Nie. Nota kesepahaman atas pendirian koperasi ini ditandatangani pada tanggal 17 Juli tahun 2008 oleh Bupati Ilyas A. Hamid, Prof. A. Hadi Arifin – selaku Rektor Unimal dan Abdul Muthalib Ahmad selaku Ketua Koperasi Pertanian Terpadu Tjot Tgk Nie dan bertindak atas nama anggota koperasi serta mewakili masyarakat yang tanahnya masuk ke dalam kompleks pertapakan kampus Unimal Reuleut.

Nota kesepahaman ini dilahirkan dengan mempertimbangkan rasa tanggung jawab terutama untuk saling membantu serta dilandasi

¹⁹⁶ Wawancara dengan Keuchik Jakfar Hanafiah, Tanggal 19 April 2012, di Reuleut Timur.

kesadaran dan pentingnya kerjasama antar pemerintah daerah, perguruan tinggi dan lembaga ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam menunjang proses pembangunan nasional dan daerah.¹⁹⁷ Para pihak dalam nota kesepahaman ini menyatakan sepaham untuk melakukan peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat Reuleut.

Pada Pasal 1 dalam Nota Kesepahaman ini telah dicantumkan maksud dan tujuan kerjasama, yaitu (1) maksud dilakukan nota kesepahaman ini dalam rangka penyelesaian secara menyeluruh dan berimbang tentang permasalahan tanah pertapakan kampus Unimal yang menajdi sengketa selama ini dan dalam upaya meningkatkan taraf perekonomian masyarakat lingkungan kampus Reuleut khususnya dan masyarakat Kabupaten Aceh Utara pada umumnya, serta untuk pengembangan pendidikan, (2) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tanah di lokasi kampus Unimal di Reuleut dan untuk menciptakan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam proses penyelenggaraan pendidikan, perekonomian serta ikut berpartisipasi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, (3) untuk pengembangan Koperasi Pertanian Terpadu Cot Teungku Nie dalam rangka pemberdayaan dan kesejahteraan anggotanya.

Bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk koperasi ini sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dicairkan dalam 2 (dua) tahap, masing-masingnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Konsekwensi atau bentuk kesepahaman yang disepakati oleh para pihak setelah pemberian bantuan dana melalui koperasi ini telah dimaktubkan pada Pasal 2 Nota Kesepahaman tersebut, yaitu;

Ayat (1) Pihak Kedua (yaitu Unimal) dengan didukung oleh Pihak Pertama (Pemerintah Kabupaten Aceh Utara) dan Pihak Ketiga (Koperasi) menyatakan akan segera menyelenggarakan kegiatan perkantoran dan aktivitas belajar mengajar di kampus baru Reuleut sejak nota kesepahaman ini disepakati dan ditandatangani oleh para pihak;

¹⁹⁷ Dasar pertimbangan ini dimaktubkan pada bagian *recitals* Nota Kesepahaman.

- Ayat (2) Pihak Ketiga menyatakan segala bentuk permasalahan yang selama ini terjadi antara Pihak Kedua dengan Pihak Ketiga menyangkut tentang penyelesaian tanah pertapakan kampus Unimal Reuleut dengan difasilitasi oleh Pihak Pertama dinyatakan selesai, dan tidak ada lagi persoalan hukum setelah nota kesepahaman ini ditandatangani bersama.
- Ayat (3) Pihak Ketiga menyatakan akan membantu Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam mendukung dan melaksanakan program-program pemerintah dan program tridharma perguruan tinggi serta berjanji akan mendukung kegiatan perkantoran dan proses belajar mengajar, keamanan dan ketertiban lingkungan di kampus baru Unimal Reuleut dan menjaga segala bentuk fasilitas negara yang ada di kampus Unimal Reuleut demi tercapainya penyelenggaraan pembangunan ekonomi dan tridharma PT mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ayat (4) Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara maksimal akan membantu Pihak Ketiga dalam bidang-bidang yang diperlukan untuk terlaksananya pelaksanaan kerjasama ini.
- Ayat (5) Program-program kerjasama yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk:
1. Pihak Kedua memberi fasilitas kepada Pihak Ketiga untuk membuka usaha sesuai dengan bidang usaha yang dikembangkan oleh koperasi sesuai dengan SIUP yang meliputi:
 - a. Usaha kantin dan foto copy, cleaning service dan pembersihan area secara permanen kepada masyarakat yang tanahnya menjadi kompleks pertapakan kampus Unimal Reuleut melalui wadah Koperasi Pertanian Terpadu Tjot Tengku Nie.
 - b. Penyediaan tenaga kerja dan penyediaan maerial dalam proyek pembangunan kampus Reuleut.

2. Pihak Kedua memberi pembinaan kepada pihak Ketiga melalui pembinaan manajemen dan pelatihan keterampilan;
3. Pihak Kedua akan memprioritaskan anak-anak masyarakat yang tanahnya menjadi kompleks pertapakan kampus Unimal Reuleut dalam hal rekrutmen penyediaan tenaga satpam dan tenaga administrasi sesuai kebutuhan;
4. Pihak Kedua memberi prioritas beasiswa S1 bagi anak-anak masyarakat yang tanahnya menjadi kompleks pertapakan kampus Unimal Reuleut dan anak-anak masyarakat di lingkungan kampus Unimal Reuleut yang menjadi mahasiswa Unimal;
5. Pihak Kedua akan memprioritaskan pendistribusian dana zakat dosen dan pegawai kepada masyarakat lingkungan kampus Reuleut;
6. Pihak Pertama memberikan bantuan keuangan koperasi kepada Pihak Ketiga setiap tahun melalui Dinas Perindagkop sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya Pihak Unimal tidak mengetahui secara persis operasional koperasi dimaksud selain daripada memberikan bantuan berupa inventaris perlengkapan kantor yang dibutuhkan oleh koperasi.¹⁹⁸ Informasi yang didapatkan melalui orang kampung, diketahui bahwa pada saat ini Koperasi Pertanian Terpadu Tjot Tgk. Nie sedang mengalami permasalahan internal. Selain tidak adanya aktivitas yang dilakukan oleh koperasi, pertanggungjawaban Ketua Koperasi terhadap distribusi dana bantuan sebagaimana yang disampaikan di atas juga menjadi permasalahan tersendiri. Sebahagian orang kampung yang juga menjadi anggota koperasi menyampaikan bahwa ada indikasi penyalahgunaan penyaluran dana dimaksud, khususnya alokasi bantuan tahap kedua sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Saat ini, terhadap permasalahan dimaksud sedang diupayakan penyelesaiannya internal

¹⁹⁸ Wawancara dengan Prof. A. Hadi Arifin, tanggal 5 Mei 2012 di Lhokseumawe.

anggota koperasi dan dewan pengurus.¹⁹⁹ Dalam pandangan penulis, terjadinya permasalahan ini merupakan salah satu kekeliruan atau bahkan kesalahan orang kampung. Jika dikaitkan dengan kewajiban para pihak sebagaimana diatur di dalam Nota Kesepahaman ini, maka Unimal sebagai Pihak Kedua memiliki kewajiban untuk membantu Pihak Ketiga —yaitu Koperasi.²⁰⁰ Maknanya, secara hukum maupun sosial, orang kampung memiliki tanggungjawab atas pelatihan manajerial koperasi tersebut. Dengan demikian, hal-hal yang tidak atau belum diketahui oleh orang kampung dapat diberikan pemahamannya oleh orang kampung. Hal-hal yang menyebabkan permasalahan sebagaimana disampaikan di atas juga dapat dicegah.

Terkait dengan masih adanya tuntutan pemberian ganti rugi yang diajukan oleh sebahagian orang kampung ketika telah dicapainya kesepahaman dan kesepakatan melalui pemberian bantuan dana koperasi ini pun tidak tepat. Pasal 1 Nota Kesepahaman ini, sebagaimana telah diuraikan di atas telah mengatur bahwa keberadaan Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tanah di lokasi kampus Unimal di Reuleut. Lebih lanjut, pada Pasal 2 ayat (2) nya menyatakan bahwa Pihak Ketiga yaitu Koperasi dalam hal ini keseluruhan anggota koperasi yang merupakan warga kampung sekitar kampus Unimal Reuleut menyatakan segala bentuk permasalahan yang selama ini terjadi antara Pihak Kedua – Unimal - dengan Pihak Ketiga menyangkut perselisihan pertapakan kampung dinyatakan telah selesai. Sebahagian orang kampung — khususnya penerima kuasa masyarakat yang telah menghibahkan tanahnya— menyampaikan bahwa “kondisi sekarang ini sebenarnya masa jeda. Kami sedang menunggu *moment* saja, apa-apa yang bisa kami lakukan nantinya akan tergantung pada keadaan di antara orang kampung Unimal dengan orang kampung Reuleut.”²⁰¹ Mereka mengintip kesempatan untuk membuka konflik lama menjadi agenda konflik baru. Ketika penulis mengkonfirmasi ulang pernyataan yang

¹⁹⁹ Wawancara dengan Abdoel Bahri, tanggal 21 Mei 2012, di Simpang KKA, Aceh Utara; Wawancara dengan Marzuki Ali, dan Rukiah, warga kampung Reuleut Barat, tanggal 2 Juni 2012.

²⁰⁰ Lihat lebih lanjut pada Nota Kesepahaman.

²⁰¹ Wawancara dengan Salahuddin, tanggal 21 Mei 2012, di Simpang KKA, Aceh Utara.

disampaikan oleh Salahuddin, menyampaikan bahwa pada dasarnya yang bersangkutan menyadari bahwa tidak ada lagi permasalahan tentang ganti rugi tanah yang bisa diajukan oleh orang kampung kepada Unimal namun, seandainya ada peluang untuk itu maka mereka akan melakukan 'hal-hal yang dianggap penting.' Di sini, penulis melihat bahwa sebagian orang kampung —sebagaimana halnya penerima kuasa ini— adalah aktor-aktor yang berperan dalam konflik yang terjadi. Keberadaan mereka, di satu sisi adalah *agent of conflict* (agen konflik) atau *conflict broker*(perantara konflik) di antara orang kampung dengan orang kampus —namun di sisi lain mereka juga mampu menangkap peluang— untuk mengajukan *bargaining* (tawar-menawar) atas kemungkinan didapatkannya keuntungan-keuntungan dari Unimal atau dari Pemkab Aceh Utara. Namun sayangnya tidak ada yang muncul sebagai agen resolusi konflik.²⁰² Penelitian yang dilakukan oleh Sugito dan Surwandono Tujuan akhir dari penelitian ini adalah tersusunnya modul peningkatan kapasitas pengurus Rukun Tetangga sebagai agen resolusi konflik horisontal berbasis perkotaan melalui; mengidentifikasi pola-pola dan penyebab konflik horisontal di perkotaan, peran dan kapasitas pengurus Rukun Tetangga dalam penyelesaian konflik horisontal di perkotaan, mengidentifikasi penilaian pengurus Rukun Tetangga di perkotaan sebagai agen resolusi konflik di perkotaan, mengembangkan model penyelesaian konflik horisontal di perkotaan, dan mengembangkan modul dan buku peningkatan kapasitas pengurus Rukun Tetangga di perkotaan sebagai agen resolusi konflik horisontal berbasis perkotaan.²⁰³ Pengambilan lokasi penelitian di kota Yogyakarta, terkait dengan meningkatnya frekuensi kekerasan antar komunitas di kota Yogyakarta. Untuk mencapai obyektifikasi kasus konflik di Unimal yang hanya memunculkan agen konflik, penelitian ini melakukan juga belum melakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengeksplorasi pengalaman yang berstruktur pejabat Unimal dan para pengurus *gampong* dalam menyelesaikan konflik horisontal di pedesaan.

²⁰² Tentang agen resolusi konflik, lihat, Sugito dan Surwandono, "Pengurus RT dan Agen Resolusi Konflik di Perkotaan", Laporan Penelitian UMY, Yogyakarta: LPPM-UMY, 2006.

²⁰³ *Ibid.*

Untuk kasus di Reuleut, konflik yang berbasis agraria seharusnya bisa melibatkan para pengurus dari Unimal dan dari *gampong-gampong* Reuleut Timu, Reuleut Barat, Paya Gaboh dan Cot Keumuneng untuk duduk bersama dalam satu rapat yang membahas kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan menimbulkan konflik. Orang kampung sendiri —sebahagiannya juga memahami bahwa keberadaan bantuan dana kepada Koperasi adalah upaya penyelesaian konflik pertanahan ini. Ibu Rukiah yang penulis wawancarai menyampaikan bahwa “yang sangat diharapkan sekarang adalah bagaimana proses koperasi tersebut, karena semua hal yang berkaitan dengan tanah Reuleut sudah dituangkan dalam koperasi.”²⁰⁴ Selain itu Bapak Marzuki Ali, salah seorang masyarakat Reuleut Barat pemilik tanah, menyampaikan bahwa “....sebenarnya permasalahan ganti rugi tanah kami yang di Reuleut belum selesai, namun karena ada tumpang-tindih kepemilikan dan masalahnya belum selesai agar tidak ada yang dirugikan dibuatlah koperasi. Dari koperasi tersebut akan menampung semua aspirasi masyarakat yang mempunyai tanah di Reuleut, sehingga semua yang berurusan dengan ganti rugi tersebut diserahkan kepada koperasi.”²⁰⁵ Yang kemudian menjadi pertanyaan mendasar adalah: apakah Koperasi Pertanian Terpadu Cot Teungku Nie Reuleut (KPTCTNR) mampu menjadi agen resolusi konflik atau justru memicu eskalasi konflik? Kenyataan yang terlihat sesuai dengan observasi di lapangan, konflik internal Koperasi ini justru memunculkan masalah baru atau terjadinya eskalasi konflik. Bahkan beberapa pihak yang terlibat dalam konflik internal koperasi itu “menuduh” Unimal telah “berkonspirasi” dengan para pengurus dan ketua Koperasi untuk sengaja membuat kisruh dalam penyaluran *peng ie saka* dari Pemda Kabupaten Aceh Utara melalui koperasi ini.²⁰⁶ Ekspresi tuduhan ini bahkan mencuat dalam kalimat: “Unima seharusnya jangan memakai

²⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Rukiah, warga kampung Reuleut Barat, tanggal 2 Juni 2012.

²⁰⁵ Wawancara dengan Bpk. Marzuki Ali, warga kampung Reuleut Barat, tanggal 2 Juni 2012.

²⁰⁶ Wawancara dengan Salahuddin, Matsyah Raban dan Abdul Bahri, tanggal 21 Mei 2012, di Simpang KKA, Aceh Utara.

nama besar Sulthan Malikussaleh, sebaiknya memakai nama Raja Bakoy saja".²⁰⁷ Karena menurut mereka, Sulthan Malikussaleh itu adalah sulthan atau raja yang bijak dan adil. Sedangkan raja yang tidak bijak (*raja bangai*) dan tidak adil itu adalah Raja Bakoy, yang bahkan berani melanggar syariat agama dan membunuh para ulama agar bisa mengawini anak kandungnya sendiri.²⁰⁸ Kisah Raja Bakoy yang doyan makan *cicak bakoy*²⁰⁹ ini (dikutip juga dalam respon mereka terhadap tulisan M. Akmal²¹⁰) adalah ekspresi kebencian atau kemarahan warga yang sudah memuncak —yang dalam bahasa mereka sendiri disebut 'sudah sampai ke ubun-ubun'— menemukan simbolisasinya dalam ketokohan fiktif Raja Bakoy ini.

Simbolisasi tokoh durjana Raja Bakoy dalam kasus konflik Unimal dengan warga Reuleut ini adalah ekspresi sikap kultural mereka dalam membuat karakter antagonis untuk memudahkan kohesi internal warga *gamong* dalam melawan Universitas yang seharusnya, menurut mereka, bernama Universitas Raja Bakoy ini.²¹¹ Simbolisasi ini adalah wujud perlawanan non-fisik warga Reuleut, perlawanan kultural terhadap para cendekiawan yang bernaung di bawah panji-panji institusi pendidikan tinggi yang telah datang menyeruak ke tanah mereka dan membuat masalah yang dipandanginya sebagai "perbuatan melawan tradisi mereka" di *gamong*.

Konflik tanah yang muncul setelah mereka sumbangkan secara sukarela kepada kampus Unimal —jauh hari sebelum kampus ini

²⁰⁷ Wawancara dengan Abdoel Bahri, tanggal 21 Mei 2012, di Simpang KKA, Aceh Utara.

²⁰⁸ *Raja Bakoy* sebenarnya hanyalah sebuah legenda. Karakter Raja Bakoy itu hanyalah rekaan saja untuk memberikan contoh bahwa orang yang memiliki kekuasaan belum tentu memiliki kebijakan.

²⁰⁹ *Cicak Bakoy* (Bhs. Aceh): ikan yang bisa berjalan di tanah dengan siripnya, biasanya hidup di daerah pertambakan (*neuheun*) atau kolam-kolam ikan air payau.

²¹⁰ Lihat dokumen "Pendapat Pemilik Tanah Tentang Pertapana Kampus Universitas malikussaleh di Reuleut", tahun 2006, hlm 13. Lihat juga, M. Akmal, "Kasus Tanah kampus Unimal di Reuleut (Gugatan Setelah Tidur Pulas)", *Serambi Indonesia*, 17 Juni 2006.

²¹¹ Wawancara dengan Abdoel Bahri, Matsyah Raban dan Salahuddin, tanggal 21 Mei 2012 di Simpang KKA Aceh Utara.

dinegerikan— sebenarnya adalah kecemburuan mereka atas kehadiran "para cendekiawan" di tengah guyubnya *gampong* dan kesederhanaan orang-orang kampung. Kecemburuan ini, dalam pandangan mereka, selayaknya diturunkan atau di-egaliter-kan atau dibagi bersama mereka. Para cendekiawan berbaju necis ini diharapkan bisa memberikan sesuatu sebagai kompensasi kecemburuan ini. Maka warga *gampong* pun merumuskannya dalam bentuk "*peng ie saka*" sebagai kompensasi atas kehadiran orang-orang kampus berbaju necis ke tengah-tengah kampung mereka; sebagai imbal atas kecemburuan yang ditimbulkan oleh kehadiran Unimal.

Terlepas dari permasalahan internal dan kemelut yang dialami oleh Koperasi ini,²¹² pemberian *peng ie saka* pada dasarnya adalah upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Aceh Utara untuk tidak hanya menuntaskan konflik namun juga melakukan upaya transformasi konflik, yakni mengubah konflik yang terjadi sehingga dapat menjadi kondisi damai di antara para pihak. Damai saja pun masih dirasakan tidak cukup oleh warga *gampong*, kalau situasinya masih gersang. Perlu ada konsensus bersama, perlu ada kerja-sama, perlu ada program-program yang mereka harapkan dapat datang dari lembaga mata air ilmu pengetahuan semacam Unimal ini. Namun, yang terjadi kemudian dihasilkan adalah sebuah bantuan bernama bantuan *peng ie saka*, sebuah bantuan generik untuk menghadapi situasi yang dianggap normal-normal saja. Dana bantuan yang

²¹² Terkait dengan permasalahan internal Koperasi Pertanian Tjot Tgk Nie Reuleut, kiranya pandangan Amsidar (Imum Mukim Kecamatan Muara Batu) bahwa "ketika Unimal kembali ke Reuleut, masyarakat mulai 'porot..porot' unimal... Saya termasuk orang yang komit terhadap Unimal, termasuk Tgk. Fajri, termasuk Keuchiek Ja'far yang sekarang. Memberi nasehat agar koperasi yang dibuat benar-benar dengan sistem koperasi. Koperasi ini untuk mengakomodir masyarakat supaya ikut nimbrung dalam kegiatan tersebut. Diberikan aturan-aturan koperasi tapi mereka tidak nyambung. Malah ketua koperasinya yang udah bingung sekarang, si Taleb. Jadi sistem yang dijalankan tidak sesuai, lebih banyak dipinjamkan pada anggotanya. Jadi sebenarnya harus ada simpanan wajib dan sukarela, tapi ini tidak. Dianggap warisan, dipinjam dan tidak dibayarkan".

diberikan diharapkan dapat menjadi bantuan modal untuk orang kampung.

Hubungan konfliktual antara orang kampus Unimal dengan orang Kampung Reuleut sebenarnya lebih banyak menghasilkan perubahan pola pikir di kalangan masyarakat, ketimbang perubahan pola pikir dan kebudayaan di kalangan kampus. Orang-orang kampus masih tetap dengan kesombongan menara gadingnya. Bahkan ada mahasiswa yang memandang orang-orang kampung "masih primitif".²¹³

Ekspresi orang kampus ini menunjukkan kegagalan lembaga pendidikan tinggi ini untuk memahami *cultural relativism* dan mengikis etnosentrisme. Adaptasi kultural di kalangan orang kampung jauh lebih mendalam daripada akulturasi yang terjadi di kampus. Orang kampung bisa menawarkan sebuah simbol Raja Bakoy yang merupakan representasi kultural mereka dalam berhadapan dengan para cerdik-cendekia Unimal, namun orang kampus hanya mampu membalasnya dengan hinaan dalam bahasa yang rendah, yang memandang hina orang-orang kampung "masih primitif."²¹⁴ Bahkan secara ekonomi rumusan *peng ie saka* adalah sebuah *local-genius* dari masyarakat *gamong* Reuleut, sebetulnya permintaan untuk menurunkan harga menara gading yang tinggi dalam hukum *supply and demand*. Sementara orang kampus tidak memperlihatkan kejenialan dalam merumuskan "hubungan ekonomi" dengan orang *gamong*.

Pemberian *peng ie saka* adalah komitmen Pemerintah Daerah Aceh Utara untuk membantu menjembatani masalah yang ada di antara orang kampus Unimal dengan orang kampung Reuleut serta ditujukan untuk membantu perekonomian masyarakat, maka Unimal juga menyatakan komitmennya, khususnya kepada masyarakat di keempat kampung di sekitar Kampus Utama Reuleut, sebagai resiprositas untuk perdamaian. Komitmen yang diberikan adalah: (1) pemanfaatan lahan yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Daerah Aceh Utara dengan baik; (2) Memberikan kesempatan bagi masyarakat Reuleut yang telah menghibahkan tanahnya, maka anak atau cucu penghibah tanah tersebut bisa kuliah di Unimal dengan beasiswa; (3)

²¹³ Wawancara dengan ketua BEM FISIP-Unimal, tanggal 19 April 2012 di Lhokseumawe.

²¹⁴ *Ibid.*

Pembebasan uang kuliah bagi masyarakat sekitar; (4) pemberian beasiswa; (5) pemberian kesempatan bekerja sebagai tenaga honorer di Unimal bagi orang kampung.²¹⁵

Penelitian ini menemukan salah satu arsip korespondensi antara Unimal dengan orang kampung Reulet Timu tertanggal 22 Maret 2006 tentang bantuan pembangunan Meunasah dan beasiswa pendidikan Unimal. Surat ini disampaikan oleh Rektor Unimal sebagai rasa terima kasih kepada masyarakat gampong Reuleut Timur dengan memberikan bantuan: (1) Pembangunan Meunasah Gampong Reuleut Timur, dan (2) Menampung lulusan SLTA/ sederajat untuk memperoleh kesempatan kuliah di Unimal.

Bantuan pembangunan Meunasah dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan sarana ibadah dimaksud yang terdekat dengan lingkungan kampus sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang kampus dan orang kampung secara bersama-sama. Hal ini juga untuk menghemat dan untuk mengurangi beban anggaran pembangunan Mesjid kampus Unimal. Sedangkan komitmen Unimal untuk menampung lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Madrasah Aliyah Negeri atau swasta dari orang kampung untuk melanjutkan pendidikannya di Unimal pada jenjang sarjana. Namun demikian, terkait dengan masa transisi kepemimpinan, dari yang lama ke yang baru, dianggap oleh sebahagian orang kampus mempengaruhi dan menimbulkan permasalahan tersendiri. Informasi dari Pembantu Rektor IV bidang Informasi dan Kerjasama²¹⁶ terkait dengan hal ini adalah bahwa “.....Permasalahan selanjutnya adalah masa transisi kepemimpinan, dari yang lama ke yang baru. (hal ini) bisa dimaklumi sebagai bentuk gaya kepemimpinan yang berbeda. Kalau pemimpin yang dulu mungkin dianggap oleh masyarakat lebih bisa mengakomodir keinginan masyarakat. Contohnya dalam hal penerimaan mahasiswa baru, masalah bantuan terhadap masyarakat dan desa di Reuleut, bantuan terhadap meunasah, diberikan bantuan biaya air setiap bulannya. Namun kalau yang sekarang mungkin masih kurang, tapi masih terus-menerus dicoba perbaiki ke arah yang lebih

²¹⁵ Lihat dokumen/arsip Unimal dan dokumen Koperasi Pertanian Terpadu Cot Teungku Nie Reuleut,

²¹⁶ Wawancara dengan Iskandar Zulkarnaen, Pembantu Rektor IV bidang Informasi dan Kerjasama, tanggal 23 April 2012, di Blang Pulo.

baik.”²¹⁷ Upaya ini seharusnya bisa dibicarakan dengan Pemda Kabupaten Aceh Utara agar memberikan anggaran untuk pembangunan fisik yang memiliki manfaat ganda, baik bagi Unimal maupun bagi gampong-gampong di sekitarnya.

Komitmen pemberian bantuan dana pendidikan (beasiswa) mulai dari semester satu sampai dengan kelulusannya juga telah dicantumkan dalam berbagai dokumen. Pemberian bantuan ini dalam implementasinya disertai syarat-syarat administrasi dan akademik yang berlaku. Mahasiswa pengusul diminta melengkapi surat keterangan dari *keuchik* di *gampong* bersangkutan. Komitmen ini terus dilaksanakan oleh pihak Unimal sampai dengan saat ini, walaupun sebahagian kecil masyarakat menyampaikan bahwa alokasinya semakin lama semakin berkurang. Resolusi konflik dalam bentuk pembangunan pendidikan ini khususnya diupayakan oleh rektor Abdul Hadi Arifin pada masa kepemimpinannya. Upaya pembangunan non-fisik adalah resolusi konflik atau perdamaian. Bagi sebagian orang yang menerima manfaat ini menilai bahwa pembangunan non-fisik adalah perdamaian.

Pada tahun akademik 2011/2012 terdapat 17 orang mahasiswa yang mendapatkan bantuan beasiswa dari lingkungan kampus sekitar kampus utama Reuleut dengan prestasi ekstrakurikuler. Dari 17 orang mahasiswa tersebut, 4 orang mahasiswa berasal dari kampung Reuleut Barat, 7 orang dari kampung Paya Gaboh, 5 orang dari kampung Reuleut Timur dan 1 orang dari kampung Cot Kemuneng.²¹⁸ Jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan mahasiswa Unimal saat ini yaitu sebanyak 8.757 mahasiswa tampaknya jumlah penerima beasiswa ini masih sangat minim, namun demikian tidak dapat ditelusuri lebih lanjut jumlah keseluruhan mahasiswa yang berasal dari kampung sekitar kampus utama Reuleut dan kemungkinan masing-masingnya telah menerima beasiswa ataupun tidak.²¹⁹ Pihak Unimal melalui Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan menyampaikan bahwa “(Unimal) tetap berkomitmen dengan hal tersebut, namun juga melandaskan pada rekomendasi *Keuchik*. Jadi, masing-masing

²¹⁷ *Ibid.*

²¹⁸ Data diolah bersumber dari Kasubag Kemahasiswaan Unimal.

²¹⁹ Sumber, Data Mahasiswa Aktif per September 2011, Karo. Akademik Unimal.

mahasiswa tersebut dalam mengusulkan beasiswanya wajib melampirkan rekomendasi dimaksud. Kalau ada yang ditolak, kemungkinan karena namanya tidak tercantum dalam surat rekomendasi dimaksud."²²⁰

Bukan hanya beasiswa yang diberikan oleh Unimal kepada warga gampong sekitar kampus reuleut, namun juga lapangan pekerjaan. Terkait dengan pemberian kesempatan bekerja di Unimal juga telah diakomodasi oleh Unimal. Sampai dengan saat ini, berdasarkan data yang didapatkan diketahui terdapat 4 (empat) orang dosen dan 4 (empat) orang pegawai yang berasal dari orang kampung sekitar kampus. Jumlah ini menunjukkan betapa hebatnya daya akomodasi Unimal dalam bidang ketenagakerjaan ini. Meskipun jumlahnya masih sangat minim, namun optimasi rekrutmen dari orang kampung akan ditingkatkan sesuai harapan masyarakat. Tabel 6.1 di bawah ini memberikan gambaran yang jelas tentang betapa akomodatifnya Unimal dalam sektor pemberian lapangan kerja bagi warga gampong.

Tabel 6.1.
Jumlah Dosen dan Pegawai Universitas Malikussaleh yang berasal dari Kampung Sekitar Kampus

No.	Kampung	Jumlah Dosen (orang)	Jumlah Pegawai (orang)
1	Reuleut Timu	4	2
2	Reuleut Barat	-	-
3	Paya Gaboh	-	2
4	Cot Kemuneng	-	-
5	Paloh	-	-
6	Padang Sakti	-	-
7	Blang Pulo	-	-
8	Cot Trieng	-	-
Jumlah		4	4

Sumber: Data diolah dari Tabel Daftar Urut Kepangkatan – Januari s/d Desember 2012, Bagian Kepegawaian Universitas Malikussaleh, 2012

²²⁰ Wawancara dengan Dahlan A. Rahman – Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan, 27 April 2012 di Reuleut.

Jumlah dosen dan pegawai yang berasal dari orang kampung sekitar kampus diakui belum menunjukkan jumlah yang pasti, hal ini dikarenakan pada tabel 6.1 di atas tidak menunjukkan secara langsung asal daerah dari masing-masing dosen maupun pegawai. Pemetaan atas kedelapan orang di atas, penulis lakukan setelah melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan maupun rekan sejawat yang mengetahui secara pasti asal kampung atau kampung kelahiran yang bersangkutan serta identifikasi dari tempat kelahiran. Pegawai Unimal sampai dengan saat ini berjumlah 555 (lima ratus lima puluh lima) orang, jika dibandingkan dengan jumlah pegawai dari lingkungan kampung tampaknya memang masih sangat sedikit, hal ini dapat menunjukkan tidak diakomodasinya orang sekitar kampung untuk menjadi pegawai Unimal. Hal ini menurut hemat penulis haruslah dianalisis lebih mendalam. Ketika sebahagian orang kampung Reuleut menyampaikan bahwa “... pada saat ini kelihatannya Unimal sudah tidak lagi merekrut pegawai dari kampung Reuleut, *entah* karena alasan apa.”²²¹ Menyikapi pernyataan senada dengan hal ini, maka Unimal perlu melakukan evaluasi ulang terhadap komitmen yang sudah diikat sebelumnya. Informasi yang penulis dapatkan melalui pejabat Kasubag Keuangan dan Kepegawaian Unimal²²² terkait dengan hal ini adalah dalam proses rekrutmen pegawai terdapat berbagai faktor yang harus diperhatikan dan dipenuhi, bukan hanya atas alokasi, kebutuhan maupun permintaan yang tersedia namun juga berbagai persyaratan kualifikasi lainnya yang harus dipenuhi oleh pelamar. Syarat-syarat kualifikasi ini juga berlaku untuk seluruh orang kampung sekitar kampus yang akan menjadi pegawai Unimal. Syarat dimaksud diantaranya adalah kualifikasi jenjang pendidikan yang ditempuh. Kondisi ini di satu sisi merupakan dilema tersendiri bagi orang kampung sekitar, dikarenakan jumlah orang kampung dengan gelar Diploma ataupun Sarjana yang berasal dari kampung sekitar kampus sangat minim. Untuk itu Unimal telah menerapkan sebuah strategi yang memberikan kesempatan lebih kepada orang kampung untuk

²²¹ Wawancara Salahuddin, Matsyah Rabban dan Abdoel Bahri, tanggal 18 Mei 2012, di Simpang KKA, Aceh Utara

²²² Diskusi dan komunikasi personal dengan Zulfan, SH, M.Hum, Pejabat Kasubag Keuangan dan Kepegawaian Unimal, tanggal 29 Juni 2012, di Blang Pulo.

menjadi pegawai honorer di lingkungan Unimal. Banyak pihak menganggap bahwa akomodasi rekrutmen tenaga kerja honorer dari kampung-kampung sekitar kampus Reuleut adalah absorpsi Unimal. Sebenarnya ini dapat dilihat sebagai bentuk lain dari kerja-sama yang telah diubah dari yang tadinya berbentuk konflik, untuk sama-sama membangun Unimal. Namun karena ekspresi absorpsi dan akomodasi lebih mengemuka ketimbang wacana kerja-sama, maka orang-orang kampung yang bekerja di Unimal pun tidak (atau kurang) memiliki *sense of belonging* terhadap kampus. Penerima manfaat dari skema akomodasi ketenagakerjaan ini pun pada akhirnya tidak menganggap bahwa dirinya sudah melebur kedalam komunitas Unimal. Ada keterpisahan secara emosional dan sosial dalam hubungan sosial konfliktual ini.

Gengsi atau *prestise* pekerjaan rendah yang diberikan Unimal kepada warga gampong pun bersifat rendah. Jenis pekerjaan yang diberikan juga bersifat *contradictio in terminis*, misalnya tenaga honorer satpam dimana kondisi Unimal yang terus menerus mengalami kecurian. Juga jenis pekerjaan kebersihan di tengah-tengah situasi kampus yang tak terawat dan kotor. Sebenarnya rekrutmen satpam cukup hanya sebagai penjaga pintu gerbang depan atau di kantor-kantor unit atau fakultas. Tidak perlu terlalu banyak seperti dalam tabel 6.2 di bawah. Justru pekerjaan kebersihanlah yang seharusnya diberikan kepada orang kampung dalam jumlah yang lebih banyak. Tidak mungkin sebuah gedung bertingkat 4 dirawat kebersihannya hanya oleh satu orang saja. Setidaknya perlu 4 orang ditambah satu *garderner* di halaman sekitar gedung. Rekrutmen atas pegawai honorer ini dilakukan dengan mengutamakan orang kampung sekitar. Data jumlah pegawai honorer yang berasal dari kampung sekitar kampus dapat dilihat pada tabel 6.2 berikut:

Tabel 6.2.
**Jumlah Pegawai Honorer Universitas Malikussaleh yang berasal
 dari Kampung Sekitar Kampus**

No.	Unit Kerja	Asal Daerah							
		Sekitar Kampus Utama Reuleut				Sekitar Kampus Bukit Indah			
		Reuleut Barat	Reuleut Timu	Paya Gaboh	Cot Kemuneng	Paloh	Padang Sakti	Blang Pulo	Cot Trieng
1	Satpam	8	7	2	2	1	3	9	-
2	Kebersihan	4	3	1	-	-	-	3	-
3	Biro Keuangan	2	-	1	-	-	-	2	-
4	Biro Akademik	-	1	-	-	-	-	-	-
5	LPPM	-	-	-	-	-	-	-	-
6	UPT	-	2	-	-	-	-	-	-
7	PSPD	-	2	-	-	-	-	-	-
8	FISIP	-	-	-	-	-	-	-	-
9	FP	-	-	-	-	-	-	-	-
10	FH	-	-	-	-	-	-	-	-
11	FT	-	-	-	-	-	-	1	-
12	FE	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PPs MM	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		14	15	4	2	1	3	15	1

Sumber: Data diolah dari Bagian Kepegawaian Universitas Malikussaleh, 2012

Dari tabel 6.2 di atas terlihat bahwa tenaga satpam adalah jenis pekerjaan yang paling banyak disediakan oleh Unimal. Ini adalah sebetulnya kurangnya kreativitas dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Seharusnya yang perlu diperbanyak adalah tenaga kebersihan yang kerjanya bukanya hanya duduk menghitung mobil, motor dan orang lalu lalang yang keluar masuk kampus, melainkan membersihkan dan merawat taman, pohon, jalanan, fasilitas pedestrian agar mahasiswa bisa nyaman dan bahagia berjalan kaki di kampus yang teduh dan asri.

Tenaga kerja kasar (*blue-collar worker*) memang banyak direkrut oleh Unimal, bahkan dari *gampong-gampong* selain Blang Pulo, seperti Cot Trieng dan Paloh. Sebenarnya ketersediaan jenis pekerjaan kasar seperti banyak dan semestinya memang diperbanyak untuk dapat menjangkau partisipasi masyarakat dalam membangun kampus Unimal. Terkait dengan pegawai honorer di lingkungan kampus Unimal maupun pemberian kesempatan kerja bagi orang kampung sekitar, salah seorang informan dari kampung Cot Trieng —

salah satu kampung yang terletak di belakang wilayah kampus Bukit Indah— menyampaikan, bahwa "...kalau Unimal waktu yang baru-baru masuk itu yang ada rehab-rehab rumah itu, yang buat listrik itu ada juga minta tenaga kerja dengan kami. Diminta tenaga kerja kepada keempat desa seperti yang dulu,²²³ jadi konsepnya sama saja."²²⁴ Pemerataan kesempatan dan partisipasi kerja di kampus Bukit Indah Unimal sudah dilakukan secara baik, hanya saja jenis pekerjaan ini sebaiknya dipermanenkan. Jenis pekerjaan kasar untuk rehab ini sangat dibutuhkan oleh kampus Unimal yang memiliki banyak ruang kuliah dan ruang perkantoran yang tak terawat. Sebaiknya memang anggaran perawatan gedung/bangunan diubah menjadi anggaran tenaga honor rehab gedung/bangunan.

Cot Trieng adalah sebuah kampung yang sangat menarik. Kampung ini dalam masa konflik antara RI dan GAM, kampung sangat terkenal karena Pertempuran Cot Trieng tahun 2002.²²⁵ Dari kampung inilah Sofyan Daud dan Irwandi Yusuf menjadi terkenal oleh pemberitaan berbagai media.²²⁶ Kampung Cot Trieng adalah lambang kampung perlawanan Aceh melawan RI. Unimal dalam pandangan GAM masa konflik adalah institusi milik RI, namun warga Cot Trieng tidak menaruh dendam kepada Unimal. Bahkan mereka memiliki penerimaan yang baik terhadap Unimal. Agak kontras dengan situasi di Reuleut, Unimal dipandang mewakili RI, maka gangguan keamanan dan ekonomi seringkali terjadi di Reuleut. Untuk kasus Cot Trieng, salah seorang Keuchik di kampung yang berbatasan langsung dengan kampus Unimal, menyampaikan bahwa hubungan yang selama ini terjalin di antara orang kampus dengan orang kampung Cot Trieng dalam kondisi baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya peluang kerja yang ditawarkan kepada pihak orang kampung, walaupun untuk warga Cot Trieng sendiri jumlahnya tidak banyak namun hal itu tidak dianggap sebagai permasalahan yang besar, dikarenakan pada saat

²²³ Maksud dari pernyataan "seperti dulu" adalah praktek-praktek yang telah biasa dilakukan antara orang kampung dengan pihak-pihak sebelum Unimal masuk ke Kampus Bukit Indah, yaitu Mobil Oil Inc., dan Bechtel.

²²⁴ Wawancara dengan Badaruddin, Keuchik Kampung Cot Trieng, tanggal 31 Mei 2012, di Cot Trieng.

²²⁵ *Tempo*, 17 November 2002.

²²⁶ *Tempo*, 15 November 2002.

sebelumnya atau masa kompleks kampus Bukit Indah masih dimiliki Mobil Oil Indonesia. Inc., dan dipergunakan sebagai perumahan karyawan, pihak kampung juga dilibatkan dalam partisipasi ekonomi untuk bekerja dan diberikan bantuan. Situasi ini juga agak kontras dengan Blang Pulo yang agak urban dimana mereka memiliki sikap hostilitas yang tinggi dengan Unimal.

Biasanya alokasi atau jatah pekerjaan *blue-collar* untuk Blang Pulo selalu lebih besar, misalnya saja jumlah satpam. Dalam pandangan yang warga hal ini wajar dikarenakan lokasi kampus Bukit Indah adalah di wilayah Blang Pulo. Alokasi untuk kampung Blang Pulo ini agak kontras dengan situasi gampong ini yang terkenal dengan beberapa kasus kriminal, seperti teror pilkada²²⁷ dan pemboman rumah kontraktor.²²⁸ Gampong ini selain sangat urban, juga penuh dengan politik.²²⁹ Desa tempat terdapatnya kuburan bersejarah Putroe Neng yang terkenal itu juga terdapat di kampung ini.²³⁰

Senada dengan yang disampaikan oleh *Keuchik* Cot Trieng, informasi yang didapatkan melalui wawancara dengan *Keuchik* dan aparaturnya Kampung Blang Pulo²³¹ juga menyampaikan adanya rekrutmen pegawai Satpam yang berasal dari warga kampung Blang Pulo. Walaupun masing-masingnya mengakui bahwa hubungan antara orang kampus dengan orang kampung masih kurang harmonis,²³² namun sejauh ini pihak orang kampung menyadari peluang kerja maupun peluang untuk mendapatkan penghasilan bagi warganya dengan berjualan maupun menjadi harlan. Banyak warung makanan di

²²⁷ *Acehtraffic.com*, 13 April 2012.

²²⁸ *Atjeh Post*, 9 Maret 2012.

²²⁹ Misalnya, demo terhadap PT Arun NGL tanggal 19 September 2011 dilakukan oleh banyak warga gampong ini. Lihat *Harian Aceh*, 20 September 2011.

²³⁰ Legenda tentang Putroe Neng sangat terkenal ke seluruh Aceh dan banyak cerita-cerita mistik tentang Putroe Neng yang sebenarnya perlu diteliti lebih lanjut kebenarannya oleh para ahli arkeologi. Karena Unimal tidak memiliki jurusan Ilmu Arkeologi, maka misteri tentang Putroe Neng ini tidak bisa terjawabkan.

²³¹ Wawancara dengan *Keuchik*, Bendahara dan Unsur *Tuha Peut* Kampung Blang Pulo, tanggal 8 Mei 2012, di Blang Pulo.

²³² Lihat tentang hal ini sebagaimana yang telah diuraikan pada bab 4 sebelumnya.

sepanjang jalan menuju gerbang masuk kampus di Blang Pulo. Para pedagangnya tidak semuanya berasal dari Blang Pulo, melainkan ada juga yang berasal dari Padang Sakti dan lain-lain tempat. Masyarakat Blang Pulo hampir tidak pernah diajak untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan kasus warung sepanjang pintu masuk kampus yang rencananya akan dipindahkan. Warung-warung di sepanjang pintu masuk ini ada sekitar 25 warung dan banyak mahasiswa yang memakai jasa warung ini untuk makan dan minum waktu istirahat. Karena tidak terdapat area parkir, maka mahasiswa yang makan di warung-warung di mulut gerbang kampus Bukit Indah ini memarkir motornya hingga ke badan tengah jalan. Keadaan ini menimbulkan kemacetan yang parah hampir tiap hari kerja sepanjang tahun sejak 2009.²³³ Kesemrawutan parkir motor ini merupakan bukti nyata adanya konflik antara pihak kampus dengan warga Blang Pulo. Pihak manajemen Unimal setiap hari membicarakan tentang kesemrawutan yang terjadi di depan mata, hari demi hari, pembicaraan yang selalu berulang-ulang sejak tahun 2009, namun tidak ada penyelesaian atas kasus ini. Konflik tidak akan selesai jika salah satu pihak hanya membicarakannya saja, mengomel sendiri dan mengeluh tanpa henti. Harus ada konsep penyelesaian atas kasus kesemrawutan ini, khususnya dari pihak Unimal.

Yang menarik dari Gampong Blang Pulo ini adalah beberapa kenyataan dimana pihak Unimal sering menggunakan jalur hukum, jalur last resort, untuk berhadapan dengan warga Blang Pulo yang memang agak susah dihadapi. Unimal yang sarat dengan ilmu dan para intelektual telah gagal dalam mencari solusi atau memikirkan resolusi atas konflik dengan warga Blang Pulo ini. Beberapa kali APCM (Aceh Peace Consultative Meeting)²³⁴ dari Kampus Bukit Indah membuat *duk pakat* atau musyawarah dengan warga gampong Blang Pulo dan

²³³ Wawancara dengan Pak Abbas, warga Blang Pulo, tanggal 21 Mei 2012, di kampus Bukit Indah.

²³⁴ APCM (Aceh Peace Consultative Management) adalah unit pengabdian dalam bidang resolusi konflik dari Unimal. Didirikan tahun 2008, banyak pertemuan untuk mencari resolusi konflik antara berbagai pihak secara komunal telah dilakukan. APCM juga memiliki program informasi perdamaian melalui radio (*Peace on Air*) yang dipancar-luaskan melalui RRI Lhokseumawe. APCM juga menjadi seminar dan international conference organizer di Unimal.

sudah banyak kesepakatan atau rencana yang diambil, namun selalu berbenturan dengan manajemen dan pimpinan Unimal dalam menyelesaikan kasus warung yang semrawut di lahan milik Unimal di pintu gerbang masuk kampus. Pihak APCM telah menawarkan banyak hal untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat dan bagi Unimal, namun antusiasme pihak APCM ini kemudian terpatahkan oleh tidak antusiasnya para pejabat Unimal dalam menghadapi masalah yang berkenaan dengan warga Blang Pulo.²³⁵ Sejak itu, Unimal pun semakin berjarak dan hampir tanpa komunikasi dengan warga Blang Pulo, bahkan pihak Blang Pulo menyebutkan tidak adanya kontak dengan pihak Unimal.²³⁶

Bagi Kecamatan Muara Batu bahkan mereka merasa Unimal tidak berurusan dengan kampung, karena Unimal menyatakan bagian dari Kemendikbud RI, langsung dari pusat.²³⁷ Kampung dan kecamatan biasanya "dilangkahi" begitu saja oleh pihak Unimal.²³⁸ Sikap merasa diri sebagai wakil pusat di daerah ini membuat Unimal menjadi sasaran gangguan dari berbagai pihak. Dan, respon yang ditunjukkan Unimal dalam menghadapi gangguan keamanan kecil seperti pencurian dan pengrusakan aset kampus, dihadapi dengan hukum, melalui proses litigasi —yang hampir tidak mengenal negosiasi, mediasi, arbitrase dan konsiliasi.

6.2 Penyelesaian Konflik Melalui Jalur Litigasi (Proses Peradilan)

Penyelesaian konflik atau masalah yang muncul berkenaan dengan warga gampong melalui proses peradilan tampaknya merupakan salah satu mekanisme yang dipilih oleh orang kampung untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara orang kampus dengan orang kampung. Beberapa peristiwa yang dapat direkam dalam studi ini adalah pada saat demonstrasi yang dilakukan oleh orang kampung dan menghalangi jalan masuk ke kampus Unimal

²³⁵ Komunikasi personal dengan Al Chaidar, direktur eksekutif APCM-Unimal, Maret 2012.

²³⁶ Wawancara dengan Tgk. Ahmad Adami H. Said - Pejabat Keuchik Blang Pulo, tanggal 8 Mei 2012 di Blang Pulo.

²³⁷ Wawancara dengan Camat Muara Batu, Saiful Bahri, tanggal 23 Mei 2012, di Muara Batu.

²³⁸ *Ibid.*

di Reuleut pada tahun 2005.²³⁹ Pada saat peristiwa ini terjadi, Rektor Unimal melaporkan pengrusakan yang dilakukan oleh orang kampung kepada pihak Kepolisian Resort Lhokseumawe dan proses hukum atas pelaku dilanjutkan sampai dengan Putusan Pengadilan.²⁴⁰ Selain itu, pada saat sebagian orang kampung yang mengeruk lahan di wilayah kampus Unimal Reuleut untuk bahan baku pembuatan batu bata juga pernah dilaporkan ke Kepolisian, namun pada saat ini tidak dilakukan proses hukum lebih lanjut oleh pihak kepolisian maupun orang kampung sendiri. Namun banyak laporan kasus lainnya kepada pihak kepolisian—seperti pencurian dan kriminal kecil lainnya—tidak ditelusuri atau tidak disidik oleh kepolisian. Pencurian demi pencurian terjadi, dan laporan kepolisian demi laporan kepolisian pun dibuat, namun tidak pernah ada tindak lanjut dari pihak kepolisian.

Berbagai peristiwa pencurian yang terjadi di lingkungan kampus Unimal, baik di kampus utama Reuleut maupun di kampus Bukit Indah juga disampaikan laporannya kepada pihak Kepolisian Sektor Batuphat dan Kepolisian Sektor Muara Batu. Pada beberapa kondisi, diketahui bahwa proses hukum—pelaporan yang dilakukan oleh pihak kampus atas pelaku pencurian ini—kadang kala diakhiri dengan perdamaian namun demikian, Unimal mengambil sikap untuk memberhentikan staf/pegawai Unimal dimaksud.

Pada masa kepemimpinan Rektor Unimal saat ini, tampaknya ia juga mengambil sikap yang kurang lebih sama. Pada beberapa pertemuan, penulis mendapati pernyataan-pernyataan Rektor yang menyampaikan bahwa terhadap segala permasalahan yang terjadi di Unimal akan dipulangkan kepada aturan. Terlihat preferensipimpinan Unimal untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sesuai dengan hukum atau peraturan yang ada, lebih memilih jalur litigasi. Kondisi ini sendiri dapat dipahami sebagai bagian dari upaya penyelesaian permasalahan yang ada di Unimal, khususnya dalam 2 (dua) tahun terakhir, ketika berbagai kasus penyalahgunaan anggaran maupun tuntutan terhadap transparansi manajemen dan keuangan juga sedang

²³⁹ Lihat kembali Bab 5 Interaksi, Akulturasi dan Konflik antara Orang Kampus dengan Orang Kampung.

²⁴⁰ Wawancara dengan Sumiadi, SH, M.Hum, (Dekan Fakultas Hukum Unimal) mantan Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Unimal, tanggal 19 April 2012, di Blang Pulo.

mendapatkan perhatian —bukan hanya kalangan internal Unimal— tetapi juga dari masyarakat luas.²⁴¹ Terkait dengan tuntutan ganti rugi tanah yang diajukan oleh orang kampung, orang kampus juga mengambil sikap yang sama, bahwa pihak orang kampung yang masih merasa memiliki hak atas tanahnya dipersalahkan untuk mengajukan proses penuntutannya melalui jalur hukum.²⁴²

Penyelesaian konflik melalui jalur litigasi, dalam amatan penulis bukanlah sebuah strategi yang populer. Orang kampung menyampaikan keberatan mereka terhadap proses ini dengan mempertanyakan “apakah Unimal perlu menempuh proses di kepolisian untuk menghadapi masalah yang terjadi? Kenapa tidak didudukkan saja masyarakat terlebih dahulu?”²⁴³ Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya adalah refleksi dari kekecewaan orang kampung, bahwa proses hukum melalui jalur litigasi harusnya dapat ditempuh sebagai upaya terakhir. Orang kampus Unimal terdiri dari banyak ilmuwan sosial —seharusnya mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi. Fenomena konflik yang terjadi, harusnya dimanfaatkan oleh orang kampus untuk dijadikan “ladang” pengabdian kepada masyarakat, dengan demikian filosofi “ilmu untuk ilmu” dapat diimplementasikan oleh seluruh civitas akademika Unimal.

6.3 Menempuh Jalur Politik

Dengan meningkatnya kesadaran dan pendidikan politik masyarakat Aceh pasca MoU Helsinki 2005 ditandatangani di Finlandia, maka jalur legislatif adalah jalur populer dalam melaporkan berbagai keluhan. Tidak terkecuali dengan masyarakat Reuleut atau Blang Pulo,

²⁴¹ Lihat lebih lanjut <http://fkmaaceh.blogspot.com/2011/10/1001-kisah-di-unimal.html>

²⁴² Wawancara dengan Prof. A. Hadi Arifin, tanggal 5 Mei 2012 di Lhokseumawe; Wawancara dengan Sumiadi, tanggal 19 April 2012 di Blang Pulo; dan Wawancara dengan Asisten III Bidang Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara, tanggal 22 April 2012 di Lhokseumawe.

²⁴³ Wawancara dengan Salahuddin dan Matsyah Raban, tanggal 18 Mei 2012 di Simpang KKA Aceh Utara. Lebih lanjut, kedua mereka sebagai bagian dari penerima kuasa masyarakat juga menyampaikan bahwa “... kami faham dan sadar, kalau kami orang kampung mengajukan hal ini ke Kepolisian tentu prosesnya panjang dan memakan biaya. Belum tentu kami mampu untuk itu.”

maka mereka pun mulai melabuhkan keluhan demi keluhan ke lembaga super tersebut. Hasil reformasi politik Indonesia 1998 ternyata bisa menjadi jalur baru akomodasi politik masyarakat Aceh, bahkan untuk menyelesaikan kasus-kasus regional hingga yang lokal dan mikro seperti kasus konflik warga masyarakat dengan Unimal. Pilihan untuk menempuh jalur politik sebagai cara penyelesaian konflik dilakukan oleh orang kampung Reuleut.

Berkaitan dengan adanya tuntutan ganti rugi ini, penulis mendapati tanggapan yang mendalam disampaikan oleh Asisten III bidang Pemerintahan Pemkab Aceh Utara yang menyampaikan bahwa "... tuntutan yang diajukan oleh masyarakat selama ini pada dasarnya bentuk kekecewaan masyarakat terhadap Pemerintah."²⁴⁴ Artinya, konflik yang ada selama ini terjadi bukan antara orang kampung dengan orang kampus Unimal, namun dikarenakan objek yang dijadikan dasar untuk sengketa ini adalah tanah Unimal maka secara langsung maupun tidak, Unimal sendiri akan terus terikut dalam setiap gugatan yang ada ataupun menerima dampak atas peristiwa-peristiwa yang terjadi atau mungkin terjadi setelah ini.²⁴⁵ Dijadikannya Unimal sebagai sasaran dalam konflik ini menunjukkan bahwa Unimal telah menjadi *conflict-zone* atau *hostile-ground* bagi masyarakat dalam melawan Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut Azis menyampaikan bahwa pada masa diajukannya tuntutan pembayaran ganti rugi kembali (2003) ini, pihak Pemerintah Daerah telah menyampaikan bahwa tidak mungkin dapat dibayarkan ganti rugi dua kali, hal ini akan mempengaruhi kinerja pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah. Tuntutan masyarakat ini jika diluluskan akan berdampak pada adanya implikasi hukum. Pada saat ini masyarakat juga diberikan pemahaman bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum berbeda dengan pembelian tanah yang terjadi di antara sesama masyarakat saja maupun ganti rugi untuk peruntukan selain kepentingan umum.²⁴⁶

²⁴⁴ Wawancara dengan Asisten III bidang Pemerintahan Pemkab Aceh Utara, Azis, di Lhokseumawe, tanggal 22 April 2012.

²⁴⁵ *Ibid.*

²⁴⁶ Membandingkan dengan wawancara dengan yang penulis lakukan kepada Penerima Kuasa dari pihak masyarakat, mereka menyampaikan bahwa selain ganti rugi yang diberikan oleh pihak Pemda pada waktu itu tidak

Gagalnya tuntutan masyarakat kepada pihak eksekutif —yang meskipun ketika itu sudah berada di bawah tampuk penguasa dari kelangan GAM— menunjukkan bahwa pihak eksekutif atau Pemkab Aceh Utara memahami benar implikasi hukum dari aspirasi politik yang tidak pada tempatnya diajukan oleh masyarakat Reuleut ini. Sebagai akibatnya, kebuntuan politik dari konflik ini mengarah kepada terjadinya eskalasi konflik antara masyarakat dengan pihak Unimal. Tahap eskalasi biasanya merupakan tahap yang relatif lama. Pada tahap ini perlawanan menjadi nyata dan masing-masing berusaha untuk mencapai tujuannya, meningkatkan usaha-usaha mereka dengan memperkuat sarana-sarana yang mereka gunakan dan mengumpulkan dukungan-dukungan. Pada awalnya cara-cara yang digunakan bersifat persuasif dan bisa jadi menjanjikan hasil yang menguntungkan, namun demikian dapat saja terjadi bentuk kekerasan atau paksaan digunakan walaupun halus.

Melihat kebuntuan politik yang dilakukan oleh DPRK Aceh Utara atau pihak Eksekutif Pemda Kabupaten Aceh Utara, maka ada kemungkinan para konstituen partai lokal terkuat Aceh ini akan mengakibatkan benturan fisik. Pada tahap ini ada kecenderungan konflik menjadi destruktif, karena interaksi masing-masing pihak semakin kuat dan mereka cenderung melihat dalam posisi “*zero-sum conflict*” (konflik yang tidak saling menguntungkan).²⁴⁷ Yang harus dihindari oleh pihak Unimal adalah interaksi yang bertentangan secara kultural dalam bentuk sikap arogan atau pernyataan yang mengandung penghinaan. Dimensi hubungan yang menentukan sejauhmana suatu konflik bersifat destruktif adalah perlakuan yang tidak manusiawi, dan keinginan untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan dan bahkan membalas dendam, kekerasan, intimidasi dan penekanan pada pihak yang dianggap sebagai musuh atau lawan yang hanya menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Pemilihan jalur politik dilakukan

mencerminkan nilai-nilai Pancasila – khususnya Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, pihak pemerintah juga tidak adil ketika memberikan ganti rugi tanah ini berbeda dengan ganti rugi tanah di daerah lokasi pabrik PT. PIM dan PT. Asean maupun untuk ganti rugi lahan Bandara Malikussaleh.

²⁴⁷ Ichwan Muis, "Pengerian, Sifat dan Ruang Lingkup Konflik", dalam blog ichwanmuis.com, diakses tanggal 28 Juni 2012.

masyarakat karena selama ini pihak Unimal juga menggunakan jalur hukum, *straight-forward* ke pengadilan, penjara dan aparat kepolisian.

Jalur politik *vis-a-vis* jalur hukum pada akhirnya akan membuka ruang bagi munculnya jalur alternatif, yaitu di luar dua cara ini: bisa melalui jalur negosiasi atau musyawarah atau mediasi. Dalam proses mediasi dan musyawarah atau negosiasi, akan sangat dibutuhkan agen resolusi konflik. Peluang ini pun dipandang sangat kecil kemungkinannya untuk bisa menyelesaikan kasus konflik Unimal dengan warga sekitar kampus.

6.4. Musyawarah (Membuka Forum Dialog)

Menempuh jalur litigasi sebagaimana telah diuraikan di atas, tampaknya juga bukan hanya tidak membawa penyelesaian sebagaimana diinginkan oleh Unimal namun juga tidak memberikan dampak positif bagi penyelesaian konflik. Jalur litigasi adalah jalur yang tidak akrab sosial (*not a social-friendly approach*). Untuk itu, Unimal juga telah melakukan berbagai upaya non-litigasi dalam menyelesaikan konflik yang ada, di antaranya dengan melaksanakan berbagai forum dialog antar kedua belah pihak, maupun dialog yang difasilitasi oleh Pemda Aceh Utara. Upaya musyawarah adalah sejenis negosiasi dalam setting yang lebih damai (*non-hostile realm*). Selain itu, setelah 2003 Unimal juga menunjukkan kontribusi nyata kepada orang kampung dalam berbagai pembangunan gampong, dan sejak 2006 dengan cara membantu pembangunan Meunasah Reuleut Timu²⁴⁸ —hal ini merupakan komitmen Unimal— untuk meningkatkan kerjasama yang ada didasarkan pada analisis bahwa hibah 5 hektar tanah yang telah diberikan oleh orang kampung Reuleut Timu layak untuk diberikan kompensasinya. Dengan cara ini, para cendekiawan Unimal menilai sebagai cara yang efektif untuk mengatasi konflik yang belum selesai.

Musyawarah yang dilakukan oleh para pihak merupakan salah satu mekanisme yang dinilai efektif untuk menjadi bagian dari upaya resolusi konflik antar masyarakat. Studi tentang pemanfaatan musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian konflik telah dilakukan – di antaranya oleh Bahari di Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten

²⁴⁸ Surat Rektor Unimal, Prof Abdul Hadi Arifin, kepada Keuchik Reuleut Timu, Muara Batu, Aceh Utara, 22 Maret 2006.

Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang temuan penelitiannya menunjukkan bahwa:

"(1) Pranata adat Melayu dan Madura yang berfungsi sebagai media resolusi konflik adalah yang berbentuk adat musyawarah, (2) pranata adat musyawarah hanya berfungsi menyelesaikan konflik yang berskala kecil, sedangkan konflik yang menimbulkan korban jiwa diserahkan penyelesaiannya melalui aparat hukum negara (polisi), (3) proses dan mekanisme adat musyawarah dilakukan oleh kepala desa dibantu para pengurus adat (Pemangku adat) bersama-sama dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak-pihak yang berkonflik;-(4) Pranata adat musyawarah, dilandasi dan dijiwai oleh ajaran agama Islam; (5) pranata adat musyawarah berfungsi mencegah meluasnya konflik dan menyelesaikan konflik (menciptakan perdamaian); (6) masyarakat Kalimantan Barat (Melayu-Madura dan non Melayu-Madura) dapat menerima penggunaan pranata adat musyawarah sebagai media resolusi".²⁴⁹

Lebih lanjut, Bahari²⁵⁰ dalam penelitian ini menyandarkan pada pandangan yang diajukan oleh Dahrendorf menyatakan bahwa untuk menyelesaikan konflik perlu ada pemaksaan melalui kesepakatan (konsensus) terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Melalui konsensus nilai-nilai dan norma-norma yang dipaksakan itulah masyarakat dapat dipersatukan dan dikendalikan sehingga tidak terjadi konflik yang mengarah kepada kehancuran. Norma-norma inilah yang kemudian dicoba temukan oleh pihak Unimal dalam mengikat masyarakat dengan serangkaian konsensus.

²⁴⁹ Lihat lebih lanjut dalam Bahari (et al.), *Model Resolusi Konflik Berbasis Pranata Adat Pada Masyarakat Melayu Dan Madura Di Kalimantan Barat*, 2007, terdapat pada <http://elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/byId/50999>.

²⁵⁰ *ibid.*

Unimal sendiri —sebagaimana yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya— terus berupaya mencari titik temu terhadap permasalahan tuntutan ganti rugi lahan yang telah diajukan berulang kali oleh orang kampung, baik kepada pihak Unimal maupun pihak Pemerintah Daerah Aceh Utara. Kedua belah pihak diketahui telah berulang kali menyelenggarakan pertemuan-pertemuan formal maupun informal. Pertemuan ini juga kerap melibatkan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara khususnya dari pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional). Isu tanah adalah isu sensitif yang harus disikapi bersama dan memakai satu kepastian hukum yang seragam yang diakui nasional. Terhadap pertemuan ini terdapat beragam sikap dari masing-masing pihak. Terkadang, pertemuan yang diniatkan untuk mencapai mufakat akhirnya gagal. Informasi yang penulis dapatkan, salah satu pertemuan yang pernah diselenggarakan melibatkan Ulama di Aceh Utara yang pada saat pertemuan ini coba merekonstruksi kembali peristiwa —peristiwa serta proses sampai terjadinya pembayaran harga tanah. Hasil pertemuan ini, atas rekomendasi ulama, menyampaikan bahwa jika *akad*²⁵¹ yang sudah disetujui ini sudah dibayarkan lunas, maka tidak ada hak lagi bagi pihak penjual untuk menuntut kembali pembayaran harga tanah.²⁵²

Pertemuan lain yang dapat ditelusuri sebagai bagian dari upaya diselenggarakannya musyawarah untuk menyelesaikan konflik adalah undangan rapat yang diselenggarakan oleh Bupati Aceh Utara pada tanggal 10 Juli 2003 kepada tokoh masyarakat Reuleut. Pembahasan dalam rapat ini adalah terkait dengan tuntutan masyarakat dalam rangka ganti rugi tanah untuk lokasi kampus Unima di Reuleut.²⁵³

²⁵¹ *Akad* (Bhs Arab): ikatan, sambungan. Dalam konteks hukum bermakna perikatan, yaitu hubungan hukum antara para pihak di bidang harta kekayaan termasuk jual-beli properti dan lain sebagainya.

²⁵² Wawancara dengan A. Hadi Arifin dan Azis, tanggal 5 Mei 2012 di Lhokseumawe. Terkait hal ini, A. Hadi Arifin menyampaikan bahwa dari pihak perwakilan masyarakat pada saat pertemuan ini menyampaikan ungkapnya bahwa pihak Ulama sudah dipengaruhi oleh Unimal dan Pemda untuk membohongi mereka.

²⁵³ Informasi didapat melalui arsip undangan untuk Toke Matsyah (Tokoh Masyarakat), dengan nomor surat: Pem.005/6546/2003, ditandatangani oleh Sekda Aceh Utara atas nama Bupati Aceh Utara – Drs. T. Harmawan, M.Si

Pada tahun 2009, Komisi A DPRD Aceh Utara bersama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara secara khusus juga mengangkat konflik agraria antara orang kampus dengan orang kampung ini menjadi bagian dari rapat kerja Komisi A DPRD Aceh Utara. Rapat ini diselenggarakan setelah adanya laporan kepada DPRD Aceh Utara dari warga yang mengaku masih memiliki sertifikat lahan kampus Unimal dan meminta pemulihan haknya dikarenakan belum mendapatkan pembebasan tanah. Hasil rapat kerja ini setelah menguraikan kronologis permasalahan yang ada dan juga mendengarkan informasi dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara —yang pada saat itu dihadiri oleh Asisten II, Kepala BPN, Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah, Kasi SKP BPN serta Kabag Perlengkapan Setdakab Aceh Utara— menyimpulkan 6 (enam) poin kesepakatan sebagai berikut: (1) ganti rugi tanah untuk lokasi kampus Unimal tidak mungkin dilakukan lagi; (2) agar didata ulang kembali masalah kepemilikan lahan, (3) untuk meminta pertanggungjawaban kepada Koperasi di Reuleut, (4) Supaya diberi penayah atau solusi terhadap 10 (sepuluh) orang pemilik tanah yang berkedudukan di luar Reuleut, (5) supaya dalam tempo 4 (empat) bulan terhitung dari masa rapat ini diselenggarakan maka masalah ini diselesaikan, dan (6) duduk satu meja kembali dengan Rektor Unimal dan para pengurus Koperasi Pertanian Terpadu Cot Teungku Nie Reuleut (KPTCTNR).²⁵⁴

Jika memperhatikan pada berbagai kesempatan musyawarah yang telah dilaksanakan oleh para pihak —orang kampus dan orang kampung— dan ternyata masih terdapat berbagai tuntutan orang kampung kepada orang kampus, apakah kemudian proses musyawarah yang sudah dilaksanakan ini dianggap gagal? Hal ini tentunya perlu dianalisis lebih mendalam, namun demikian dalam pandangan penulis proses berkomunikasi antara para pihaklah yang harus diperbaiki, terutama dari kalangan orang kampus. Acapkali, kesalahpahaman bahkan konflik timbul dikarenakan miskomunikasi ataupun mispersepsi di antara para pihak. Untuk itu, orang kampus perlu melakukan refleksi ulang —bukan hanya terhadap komitmen dan upaya apa saja yang sudah dilakukan kepada orang kampung— tetapi

²⁵⁴ Lihat, Dokumen Catatan Rapat Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Aceh Utara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, Rabu 19 Agustus 2009.

juga refleksi atas model komunikasi yang sudah dibangun. Walaupun Humas Unimal menyatakan bahwa,

“...Humas sebagai focal point dari Universitas Malikussaleh telah menjalankan tugas, peran dan fungsinya dalam membangun komunikasi efektif dengan warga sekitar kampus. Sewaktu saya diangkat kembali menjadi Humas Universitas Malikussaleh hal pertama yang saya lakukan adalah menjalin silaturahmi dengan tokoh/pimpinan disekitar wilayah kampus utama Reuleut yaitu dengan Geuchik, Tengku Imum Chik dan Ketua Pemuda, dari Gampong Reuleut Timu, Reuleut Barat, Paya Gaboh dan Cot Keumuneng. Silaturahmi ini di samping untuk memperkenalkan diri juga dalam rangka menggali informasi dan membina hubungan dengan para tokoh masyarakat tersebut. Sehingga, dengan membuka diri seperti itu banyak hal yang kita bisa dapatkan, maka ketika ada potensi konflik kita bisa lebih dahulu melakukan pencegahan untuk tidak menjadi masalah yang lebih besar. Sama halnya di Blang Pulo kita juga melakukan komunikasi yang intensif baik dengan pimpinan, tokoh masyarakat dan pemuda di gampong tersebut.”²⁵⁵

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian orang kampung menilai berbeda. Orang kampus, khususnya dari kalangan Pimpinan Unimal, dalam berbagai konflik yang terjadi dianggap kurang bersosialisasi dengan masyarakat,²⁵⁶ selain itu orang kampus juga dinilai membatasi diri dengan orang kampung maupun aparaturnya Pemerintah Daerah. Sikap memasang barikade ini pada masa-masa setelah tahun 2010 kebanyakan diakibatkan dari berbagai kasus korupsi yang menimpa Unimal²⁵⁷ yang membuat Unimal lebih sibuk

²⁵⁵ Komunikasi Personal dengan Kepala Humas Unimal, Heikal, tanggal 31 Mei 2012.

²⁵⁶ Wawancara dengan Tgk. Fajri - Tuha Peut Reuleut Timur, tanggal 19 April 2012, di Reuleut; wawancara dengan Jakfar Hanafiah - Keuchik Reuleut Timur, tanggal 19 April 2012 di Reuleut; wawancara dengan Syaiful Bahri - Camat Blang Pulo, tanggal 23 Mei 2012 di Muara Batu.

²⁵⁷ Tentang maraknya penyidikan polisi terhadap kasus korupsi di Unimal, lihat *Atjeh-Post.com*, 4 Mei 2012; *Wartaaceh.com*, 6 April 2012; *Acehtraffic.com*, 16 April 2012; *The Aceh Traffic.com*, 27 October 2011.

mengurus diri sendiri dan membatasi sosialisasi dengan pihak kampung.

Informasi yang penulis dapatkan dari Camat Muara Batu bahwa pihak Kecamatan tidak dapat memberikan apapun bantuan kepada orang kampus Unimal dikarenakan sebelumnya telah ada larangan dari pihak orang kampus untuk tidak terlibat. Terkait dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini sendiri —di awal pertemuan dengan Camat Muara Batu— peneliti melihat adanya perubahan sikap yang kentara, bahwa kedatangan peneliti awalnya diterima dengan sangat baik dan ramah namun ketika pembicaraan masuk pada konflik yang terjadi diantara orang kampus dengan orang kampung, Camat menyatakan dengan intonasi yang tinggi: “kami gak bisa bicara begini bu... konflik dengan unimal, karena unimal sendiri pernah bilang, gak ada urusan dengan kecamatan.... itu aja ibu buat nanti! Camat sendiri gak berani masuk, karena itu wilayah teritorial mereka itu... mereka tunduk langsung kesana... ke Jakarta... ke pusat.... jadi tidak ada urusan dengan kecamatan.”²⁵⁸ Unimal telah berhasil mengisolasi diri dari pihak yang kampung yang mengitarinya. Dan, di atas segalanya Unimal telah memperlihatkan dirinya berbeda dengan instansi pemerintah daerah lainnya; memperlihatkan diri sebagai lembaga otonom yang hanya berurusan dengan pusat sehingga anggaran dari Pemda Kabupaten Aceh Utara dan kota Lhokseumawe pun sangat sedikit menyentuh mereka.²⁵⁹

Terkait dengan hal ini, penulis beranggapan bahwa beban persoalan internal Unimal terkait dengan manajemen perencanaan dan keuangan²⁶⁰ —sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian

²⁵⁸ Wawancara dengan Saiful Bahri, Camat Muara Batu, tanggal 23 Mei 2012. Informasi terkait dengan siapa yang menyampaikan pernyataan demikian kepada pihak Kecamatan Muara Batu tidak dapat ditelusuri dan dikonfirmasi lebih lanjut dikarenakan Camat Muara Batu juga tidak ingin mengungkapkan sumbernya.

²⁵⁹ Wawancara dengan Azhari Cage, Anggota DPRK Aceh Utara, di Reuleut, tanggal 18 April 2012.

²⁶⁰ Kasus-kasus penyalahgunaan anggaran yang saat ini masih dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Lhokseumawe telah mempengaruhi sebahagian besar orang kampus. Kerap terdengar keluhan dari Biro Administrasi Umum dan Keuangan khususnya bahwa panggilan dan

sebelumnya dari tulisan ini— telah menyebabkan komunikasi Unimal dengan pihak eksternal seperti orang kampung menjadi bermasalah atau terdistorsi. Penelitian ini juga menemukan bahwa konflik yang terjadi diantara orang kampus Unimal dengan orang kampung di sekitar kampus utama Reuleut maupun kampus Bukit Indah tidak akan pernah selesai jika dibiarkan terus berlarut-larut. Indikasi terhadap hal ini dapat dilihat dari masih terjadinya pencurian di lingkungan kampus Unimal²⁶¹ dan selama orang kampung masih menduduki lahan-lahan Unimal tanpa ijin.²⁶²

Pembiaran terhadap kondisi ini penulis rasakan sendiri, khususnya pada saat penelitian ini berlangsung dan adanya permintaan dari orang kampung yang menjadi informan penelitian ini untuk dapat menjembatani komunikasi dengan pimpinan Unimal. Penulis telah meminta Rektor Unimal secara khusus atau diwakilkan kepada unsur pimpinan lainnya untuk ‘duduk bersama’ dan membahas kemungkinan kolaborasi atau kemitraan yang dapat dibangun, namun dengan alasan bahwa “.... nanti saja, masih ada hal lain terkait dengan permasalahan Unimal yang lebih menjadi prioritas”²⁶³ maka proses musyawarah ini tidak dapat berjalan.²⁶⁴

pemeriksaan dari pihak kepolisian mengakibatkan terganggunya aktivitas kerja di unit tersebut.

²⁶¹ Peristiwa pencurian terakhir yang dilaporkan terjadi pada minggu pertama bulan Juli Tahun 2012 ini di kantor administrasi Fakultas Hukum di Komplek Kampus Bukit Indah. Pencurian tersebut telah mengakibatkan hilangnya 1 (satu) unit laptop inventaris kantor.

²⁶² Diantaranya adalah pembiaran hewan ternak di lingkungan kampus serta pemanfaatan areal lahan Unimal untuk berjualan, seperti di jalan utama – gerbang masuk luar Komplek Kampus Bukit Indah.

²⁶³ Secara pribadi dan mewakili permintaan pedagang kantin di lingkungan Kampus Bukit Indah, penulis telah meminta kesediaan dari Rektor Unimal. Sedianya pertemuan ini akan difasilitasi oleh Aceh Peace Consultative Management (APCM) untuk kemudian diharapkan dapat mencapai titik temu dan kemitraan di antara para pihak. Namun kemudian Rektor Unimal tidak antusias lagi dalam membicarakan masalah ini.

²⁶⁴ Kondisi pembiaran ini juga terekam dari pernyataan Pembantu Rektor IV – Iskandar Zulkarnain – pada saat wawancara dan membahas tentang konflik yang terjadi antara orang kampus dengan orang kampung. Ia menyampaikan bahwa “Konflik hari ini yang muncul adalah kampus jangan

Senada dengan hal ini, informasi yang penulis dapatkan dari Camat Muara Batu bahwa yang bersangkutan pernah mendengar dari Imum Mukim Bungkah yang pernah berkomunikasi langsung dengan pihak Unimal. Jawaban yang didapat dari pihak Unimal adalah, “.....kita perbaiki urusan internal dulu, baru nanti duduk dengan Muspika.”²⁶⁵ Terhadap hal ini, pihak Kecamatan khususnya Camat Muara Batu dan Imum Mukim menyampaikan bahwa jika Unimal memang tidak meminta bantuan kepada pihak Kecamatan maka Kecamatan juga akan membatasi diri untuk tidak terlibat dengan permasalahan-permasalahan yang timbul antara orang kampus dengan orang kampung Reuleut. Padahal, dalam pandangan Camat maupun Imum Mukim Muara Batu, koordinasi yang harus selalu diutamakan. Camat memberi contoh ketika demo, “.... kalau Pak Rektor langsung menelpun dan meminta tolong kami untuk menghentikan demo, kami bisa melakukan itu. Kami bisa minta *geuchiek* untuk menghentikan itu. Kami bisa menekan *Keuchiek*, (sedangkan) Rektor tidak akan bisa... sepintarnya orang tidak akan bisa menekan *Keuchiek*, cuma Camat yang bisa.”²⁶⁶ Camat meminta agar bisa saling kerjasama. Untuk kemaslahatan dan kemajuan bersama. Camat juga pernah meminta KKN di kecamatan dengan tujuan memperdekat hubungan dengan masyarakat sekitar. Hal ini bermakna bahwa orang kampus Unimal telah menyia-nyiakan kesempatan yang ada dan bahkan telah ditawarkan oleh orang kampung untuk dapat membentuk kemitraan atau kolaborasi sebagai bagian dari resolusi konflik.

Camat Muara Batu dalam diskusi dengan kelompok peneliti berulang kali menyampaikan,

dipisahkan. Tapi kondisi di Reuleut sendiri tidak mendukung. Dari jumlah tanah seluruhnya di awal yang 84 Ha, dan 5 Ha adalah tanah hibah, hanya tinggal 60 Ha saja”. Ketika tim peneliti mengeksplorasi lebih lanjut terkait dengan pengukuran luas tanah tersebut, beliau mengatakan “itu belum dilakukan karena dianggap belum penting pada saat ini.” Wawancara dengan Iskandar Zulkarnaen, PR IV Unimal, tanggal 23 April 2012, di Blang Pulo.

²⁶⁵ Wawancara dengan Syaiful Bahri - Camat Muara Batu, tanggal 23 Mei 2012 di Muara Batu.

²⁶⁶ Wawancara dengan Amsidar, Mukim Mane, tanggal 23 Mei 2012, di Muara Batu.

"kami dari kecamatan kalau diajak akan mencoba bersama-sama menyelesaikan masalah itu. Kami juga akan netral disitu, kalau memang ada masyarakat kami yang salah, ya kami juga harus meluruskan itu. Karena Unimal berada di Muara Batu. Imbasnya juga akan dirasakan oleh muara batu juga. Bukan hanya orang Reuleut tapi semua 24 desa akan terkena imbasnya. Karena kalau muncul anggapan negatif bahwa Muara Batu seolah-olah tidak mendukung pendidikan imbasnya dirasakan semua. Kecamatan akan mendukung Unimal, sehingga masyarakat enak, dosen enak, mahasiswa juga enak kuliah di Unima."²⁶⁷

Hambatan dalam penyelesaian konflik dapat bersumber dari para pihak. Dalam konteks konflik yang terjadi di Indonesia, diketahui bahwa upaya untuk memahami konteks dari konflik itu sendiri diabaikan oleh para pihak. Fakta menunjukkan bahwa elit politik sibuk dengan urusan lain, media massa sibuk memprovokasi, sehingga konflik yang lazimnya bisa diselesaikan dan diakhiri dengan cepat, praktis tidak dapat dilakukan.²⁶⁸ Unimal, dalam bahasa Pramoedya Ananta Toer, "lebih sibuk mengurus diri sendiri dan buta terhadap yang lain."

Lebih lanjut, konflik, permasalahan, atau apapun namanya — menurut Pramoedya Ananta Toer²⁶⁹ "adalah pencerminan dari ketidakmampuan yang memerintah."²⁷⁰ Dan ketidakmampuan ini "berasal dari diri semua yang memerintah, ketidakmampuan mengerti kawulanya sendiri, kebutuhannya, kepentingannya."²⁷¹ Ketidakmampuan, menurut Pramoedya, tidak sama dengan

²⁶⁷Wawancara dengan Syaiful Bahri, Camat Muara Batu, tanggal 23 Mei 2012, di Muara Batu.

²⁶⁸Dikutip dari <http://ina.propatria.or.id/article/highlights/article.php?aid=817>, Rangkuman Hasil Diskusi pada Focus Group Discussion, diselenggarakan oleh ProPatria Institute pada hari Selasa, 17 Februari 2009.

²⁶⁹Pramoedya Ananta Toer, *Arok Dedes*, Cetakan ke 8, Jakarta: Lentera Dipantara, , 2006, hlm. 254.

²⁷⁰*Ibid.*, hlm.

²⁷¹*Ibid.*, hlm.

kedunguan namun sejenis.”²⁷² Dan kedunguan ini berasal “dari terlalu banyak mengurus diri sendiri, sehingga buta terhadap yang lain-lain.”²⁷³

Diskusi yang tim penulis lakukan dengan Syaiful Bahri, (Camat Muara Batu) dan Amsidar (Imum Mukim) juga telah mengungkapkan perasaan orang kampung selama ini terhadap orang kampus Unimal yang idealnya “beberapa hal bisa dilakukan (oleh orang kampus) dengan masyarakat terutama dalam bidang pertanian, SDM diberdayakan, sehingga masyarakat meningkat rasa cintanya pada unimal.”²⁷⁴ Lebih lanjut, Amsidar juga mempertanyakan kepedulian orang kampus Unimal kepada orang kampung,

“... ketika adanya program pembinaan pertanian (DPL) kenapa Unimal tidak mengambil tempat disana. Yang pernah (datang) malah dari PIM tentang pupuk organik, pembinaan petani. Sekarang malah kecamatan Muara Batu sedang mengalami masalah keong mas, setiap hari masuk koran tapi tidak ada kepedulian dari Unimal, padahal Unimal punya banyak ahli. Kecamatan akan siap menyediakan tempat dan sarana kalau ada kerjasama dengan unimal, agar bisa memberikan kontribusi pada masyarakat. Kasus padi di Reuleut juga sebenarnya bisa jadi jalan untuk mendekati masyarakat. Padi ketika baru keluar langsung memutih, seharusnya Unimal turun melihat langsung hal ini. Tapi ini tidak, buka kaca mobil pun tidak... jadi sangat nikmat dengan arogansinya tersebut.”²⁷⁵

Hal ini bermakna orang kampus Unimal harusnya melakukan berbagai upaya untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di Unimal —dengan tidak membiarkan— segala hal yang dapat memicu konflik ini menjadi semakin runcing. Hal-hal yang sudah ditawarkan oleh orang kampung maupun unsur pemerintahan di daerah harusnya disambut untuk kemudian dicarikan solusi terbaik dalam menyelesaikannya. Orang kampus harusnya membangun kerjasama atau kemitraan dengan orang kampung dalam berbagai kegiatan. Hal ini menjadi bagian penting dalam upaya menyelesaikan

²⁷² *Ibid.*, hlm.

²⁷³ *Ibid.*, hlm.

²⁷⁴ Wawancara dengan Syaiful Bahri, Camat Muara Batu, 23 Mei 2012.

²⁷⁵ Wawancara dengan Amsidar, Mukim Mane, tanggal 23 Mei 2012, di Muara Batu.

konflik yang ada. Selama ini berbagai program penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pengamalan Tridharma Perguruan Tinggi hendaknya dapat diarahkan untuk memfokuskannya kepada orang kampung sekitar kampus sebagai khalayak sasaran utama.

Kemitraan sebagai upaya membangun dan memajukan orang kampung sekitar kampus juga dapat dilakukan dalam berbagai hal, diantaranya pendistribusian zakat pegawai Unimal, mengusahakan kerjasama untuk penyediaan Rumah Pondok Tumbuh (RPT) atau indekost mahasiswa yang dikelola oleh orang kampung, penyediaan sebahagian areal di lingkungan kampus sebagai sentra bisnis bagi orang kampung. Penulis yakin, upaya untuk membangun perekonomian orang kampung sekitar dapat menjadi prioritas utama yang direncanakan dan dilakukan oleh orang kampus, yang kemudian juga dibarengi dengan upaya memajukan orang kampung dari segi pendidikan, misalnya membentuk kelompok belajar dan diskusi kampung, membuka akses baca bagi orang kampung pada Perpustakaan kampus, layanan informasi, jasa maupun konsultasi dalam berbagai aspek keilmuan yang dimiliki oleh akademika Unimal. Intinya, orang kampus harus mulai memikirkan sebuah rencana aksi yang komprehensif dan kolaboratif untuk dilakukan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang melanda Unimal. Rencana ini juga harus mempertimbangkan sebuah upaya yang ditujukan untuk merubah *mind-set* berpikir orang kampung maupun orang kampus terhadap satu sama lainnya pada saat ini. Strategi kolaborasi yang akan dibangun nantinya diantara orang kampus dengan orang kampung harus dilandasi pada kemauan untuk merubah konflik yang ada menjadi kemitraan. Merujuk pada tulisan Suporaharjo,²⁷⁶ orang kampus Unimal dapat menerapkan 4 (empat) desain umum untuk kolaborasi yang konstruktif di antara para pihak yaitu: (1) adanya perencanaan yang apresiatif; (2) penetapan strategi yang kolektif; (3) selalu dibukanya ruang untuk berdialog dan; (4) menegosiasikan penyelesaiannya, maka Unimal mulai saat ini perlu untuk melakukan

²⁷⁶ Lihat, Suporaharjo, *Review Strategi Penyelesaian Konflik Sosial atas Tanah: Studi Kasus Konflik antara Komunitas Ketajek dengan Perusahaan Daerah Perkebunan Jember di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

review atas strategi yang telah dijalankan saat ini dan menyusun kembali *blue-print* mengenai usaha-usaha penyelesaian konflik.



Bab 7

Penutup

7.1. Kesimpulan

Penelitian tentang interaksi sosial, akulturasi dan konflik antara komunitas Kampus Unimal dengan masyarakat Reuleut dan Blang Pulo ini memperlihatkan hasil bahwa konflik sudah dimulai sejak tahun 2001 dan mengalami eskalasi hingga tahun 2011. Upaya resolusi konflik sudah dilakukan oleh banyak pihak; Pemda Aceh Utara, Unimal, mahasiswa dan juga aparat hukum (polisi, kejaksaan dan pengadilan). Namun tidak ada sama sekali penyelesaian yang tuntas atas konflik ini bahkan akhir-akhir ini terlihat tidak adanya antusiasme untuk mengubah konflik menjadi konsensus atau kerja-sama yang produktif. Akhirnya konflik bukannya berkurang, malah semakin menguat, mengalami eskalasi yang semakin mengkristal. Namun, bukan hanya konflik yang terlihat dari hubungan sosial komunitas kampus dengan masyarakat kampung di sekitarnya. Ada juga akulturasi yaitu hubungan yang saling mempengaruhi, saling membutuhkan, saling bekerja-sama, saling asih-asah-asuh yang membentuk kesadaran dan cara berpikir yang baru di kedua-belah pihak. Hubungan sosial ini akan mengalami penurunan dalam kualitas, dan proses akulturasi akan mengalami kegagalan jika konflik antara masyarakat kampung dengan komunitas kampus Unimal dibiarkan berlarut-larut.

Masyarakat memandang kampus Unimal sebagai sumber mata air ilmu pengetahuan, tempat bersemayamnya para cerdik cendikia, tempat lahirnya ide-ide baru dan tempat menghasilkan para sarjana yang terdidik, memiliki moralitas yang luhur. Meskipun sebagian masyarakat ada yang memandang kampus Unimal sebagai sumber uang atau sumber mata-pencaharian, kampus masih dipandang dengan kacamata yang jernih yang dianggap akan membawa dampak perubahan ke arah yang lebih baik. Kehadiran kampus Unimal di tengah-tengah masyarakat kampung yang masih guyub dipandang akan membawa kemajuan dan manfaat tidak hanya bagi kampung, melainkan untuk keseluruhan Aceh. Meskipun dulu, ketika konflik

dimulai tahun 2002, kampus Unimal dianggap sebagai "wakil pemerintah pusat" yang tidak sinkron dengan ide-ide populis masyarakat untuk membangun 'kemandirian' Aceh. Unimal ketika tahun-tahun 2002 hingga 2009 dianggap sebagai aset pemerintah pusat sehingga komunitas kampus Unimal mengalami banyak gangguan keamanan dalam bentuk pencurian, penculikan staf (pada masa 2002-2005), dan intrusi ternak ke dalam wilayah kampus serta demo-demo yang membarikade lalu-lintas karyawan dan dosen serta mahasiswa untuk mengakses kampus.

Akulturasinya yang terjadi dalam interaksi antara warga kampung dengan komunitas kampus Unimal sangat sedikit atau kecil karena kedua pihak sulit terhubungkan satu sama lainnya; warga kampung mengalami kesulitan dan distorsi dalam memanfaatkan kampus dan pihak kampus juga cenderung *reluctant* (enggan) dalam memanfaatkan kampung sebagai peluang dan tantangan akademis. Kedua pihak hampir tidak memiliki kreativitas dalam menghasilkan konsensus-konsensus dan kerja-sama yang produktif. Kampung juga menyimpan banyak konflik internal mereka sendiri. Bahkan ketika konflik internal tidak bisa mereka selesaikan, mereka akan menghadapkan wajah kepada kampus untuk meminta kompensasi dan *peng ie saka* (uang bantuan sekeadarnya) kepada kampus yang dianggap sebagai sumber kemapanan.

Konflik tidak akan selesai dengan sendirinya atau dengan pembiaran. Sejak 2010 Unimal tidak bersedia melanjutkan pembicaraan musyawarah tentang konflik di Reuleut maupun di Blang Pulo sehingga intrusi pihak *gampong* ke wilayah kampus semakin menjadi-jadi. Tembok-tembok pembatas bukit di sepanjang jalan masuk ke Kampus Bukit Indah yang melewati *gampong* Blang Pulo dan Padang Sakti semakin banyak yang tergerus, sebagiannya karena masyarakat membuat tempat-tempat usaha. Warung-warung pun semakin ramai bermunculan di mulut pintu masuk Kampus Bukit Indah. Di Reuleut, ternak sapi dan kambing warga semakin bebas memasuki areal kampus dan mengotori jalan-jalan dan ruang kuliah. Kasus-kasus pencurian pun merajalela tanpa ada upaya tegas dan kreatif untuk mengatasinya. Setidaknya bisa diupayakan adanya program-program kerjasama yang saling menguntungkan, semacam simbiosis mutualisme antara kampus dan kampung.

Konflik tidak akan mereda dengan pembiaran. Menyerahkan urusan konflik kepada rezim waktu bukanlah cara yang bijak dalam menyelesaikan konflik. Kepemimpinan terlihat dari sikap responsivitasnya dalam menanggapi masalah. Pemimpin yang sukses akan melihat kesempatan di setiap masalah, bukan malah melihat masalah dalam setiap kesempatan, meskipun masalah akan tetap terus ada dimana pun kita berada. Karena konflik Unimal dibiarkan terus berlarut-larut tanpa adanya upaya definitif untuk menyelesaikan, maka yang terjadi adalah eskalasi konflik. Eskalasi konflik Unimal berasal dari ketidakmampuan pemimpin —dalam hal ini pihak Bupati Aceh Utara dan para pejabat Unimal— dalam memahami kebutuhan, kepentingan sehingga buta terhadap lingkungan kawulanya.

Penyelesaian konflik dengan masyarakat sekitar Kampus Unimal Reuleut dan Blang Pulo pernah sangat antusias diupayakan pada masa Rektor Profesor A. Hadi Arifin (1996-2010). A. Hadi Arifin sangat responsif dalam menangani problem sosial dengan warga sekitar kampus, meskipun banyak juga terjadi persoalan dari upaya yang eksekutif tersebut. Komunikasi yang sudah dilakukan oleh A. Hadi Arifin seharusnya dilanjutkan oleh kepemimpinan sekarang. Kepemimpinan Unimal sekarang terlihat enggan (*reluctant*) dalam menghadapi masyarakat sekitarnya. Keengganan berkomunikasi dari pihak Unimal terutama disebabkan adanya anggapan bahwa lingkungan sekitar atau masyarakat *gampong* atau *kawula* atau warga memiliki kepentingan ekonomi personalnya dalam berkonflik dengan pihak kampus Unimal. Padahal kepentingan ekonomi personal dari orang-orang *gampong* tidaklah menjadi hal yang fundamental. Persoalan fundamental dari konflik ini adalah minimnya frekuensi musyawarah, atau *duk pakat* (mufakat) antara pihak Unimal, Pemda Kabupaten Aceh Utara dan masyarakat sekitar kampus. Komunikasi adalah akar dari semua masalah.

Upaya penyelesaian konflik yang sudah berlangsung satu dekade antara masyarakat Reuleut dengan Unimal beberapa kali menghasilkan resolusi setelah pemda Aceh Utara ikut memberikan perhatian dalam bentuk bantuan bagi pemilik lahan melalui koperasi. Namun, resolusi ini kemudian menimbulkan masalah baru secara internal dimana warga masyarakat merasa tidak puas sehingga membuat rencana mengembangkan konflik secara lebih luas. Maka, resolusi yang seharusnya bisa menghasilkan perdamaian dan

konsensus atau kerja-sama, justru memberikan jalan bagi eskalasi konflik. Konflik dalam penelitian ini dilihat sebagai suatu bentuk dinamika interaksi sosial yang terjadi di antara orang kampus dengan orang kampung yang tidak bisa dihindari (*inevitable conflict*). Setiap hubungan atau interaksi akan menghasilkan konflik. Setiap konflik akan menghasilkan resolusi atau konsensus atau perdamaian. Proses ini semacam siklus, dan konflik akan kembali ada jika resolusi atau konsensus atau perdamaian dirasa tidak puas sehingga menimbulkan eskalasi konflik (baru).

Ketidakmampuan Unimal dalam mengatasi persoalan konflik dengan warga *gampong* sekitar kampus juga berasal dari masalah internal lembaga ini yang sudah berlarut-larut sejak lama, kusut masai dan centrang-prenang yang mengakibatkan manajemen tak berfungsi secara optimal. Masalah internal Unimal hanya dua yang sangat krusial: (1) masalah keuangan dimana banyak terjadinya korupsi dan kolusi; (2) masalah perencanaan yang amburadul dan tidak pernah konsisten dalam pengembangan dan pembangunan kampus. Masalah internal inilah yang kemudian mengakibatkan pihak Unimal tidak antusias dalam berkomunikasi dengan *gampong-gampong* di sekitarnya.

7.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis hubungan sosial, akulturasi dan konflik antara komunitas kampus Unimal dengan masyarakat kampung Reuleut dan Blang Pulo, peneliti merekomendasikan beberapa hal:

Pertama, hubungan sosial yang sudah ada antara komunitas kampus dengan warga kampung sekitar haruslah dipererat lagi dengan mengunjungi kampung-kampung sekitar kampus Unimal, mencoba mendalami dan memahami masalah yang mungkin ada dan jelas dihadapi oleh masyarakat kampung seperti kesulitan mereka dalam mengadakan dan mengelola musrenbang (musyawarah rencana pembangunan kampung). Pihak Unimal dengan sumberdaya manusia yang handal tentu bisa membantu masyarakat untuk lebih merasakan keberadaan kampus dengan segala potensinya. Pihak Unimal seharusnya mengadministrasikan program pengabdian dosen secara fungsional dan dimasukkan kedalam perencanaan kampung. Beasiswa untuk masyarakat sekitar juga perlu dihidupkan kembali, selain program Beasiswa Bidik Misi yang bersifat nasional. Hubungan sosial

yang dilandasi pemberian *rewards* atas prestasi atau pencapaian keilmuan (siswa dan mahasiswa) dari kalangan masyarakat adalah hubungan yang kuat.

Kedua, proses akulturasi yang sudah terjadi semenjak kampus dipindahkan ke lokasi kampung, harusnya lebih diperdalam dan ditingkatkan kualitasnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harusnya dirasakan oleh warga kampung dari pintu-pintu kampus yang senantiasa terbuka untuk memberikan mata-air ilmu pengetahuan, untuk memberikan kesejukan kultural, siraman ilmu dan cahaya kandil pengetahuan. Pihak Unimal seharusnya membuat dan merancang program-program yang lebih berdaya guna bagi masyarakat. Setiap tahunnya Unimal memiliki anggaran pengabdian yang bisa digunakan untuk mengurangi intensitas konflik dan menaikkan penerimaan masyarakat terhadap kampus. Misalnya penghijauan kampus dan sekitar kampus, akan sangat menurunkan intensitas konflik. Program pengabdian dosen —semisal menyumbangkan buku-buku untuk perpustakaan *gampong*, pesantren atau *dayah* atau *meunasah-meunasah* dan masjid-masjid— akan sangat berdampak positif bagi penciptaan iklim ilmiah yang kondusif sehingga kampus tidak menjadi menara gading yang —dalam bahasa Pramoedya Ananta Toer— hanya "terlalu banyak mengurus diri sendiri dan buta terhadap yang lain-lain." Program beasiswa juga perlu diperkenalkan kepada masyarakat Aceh umumnya dan masyarakat sekitar lokasi-lokasi kampus pada khususnya supaya masyarakat sekitar merasakan peningkatan kualitas hidup secara signifikan dengan kehadiran kampus Universitas Malikussaleh di tengah-tengah kampung mereka.

Ketiga, Unimal perlu menyelesaikan masalah internalnya sendiri (kasus-kasus korupsi dan masalah manajemen perencanaan yang amburadul) agar bisa berkonsentrasi untuk menyelesaikan konflik dengan warga *gampong* dan mengubah konflik menjadi konsensus dan kerja-sama produktif. Misalnya potensi zakat Unimal yang cukup besar seharusnya bisa dipakai untuk memberikan sumbangan untuk perayaan hari-hari besar agama Islam, meskipun kegiatan ini tidak produktif. Konsep zakat produktif pun harus memahami bahwa ada kebutuhan-kebutuhan spiritual dan sosial yang sangat konsumtif yang tidak bisa dipaksakan untuk harus bersifat produktif selamanya. Perencanaan Unimal selama ini tidak jelas menempatkan fakultas-fakultas dan unit-unit pendukung akademis, fasilitas dan lain-lain

secara konsisten. Jika Kampus Bukit Indah diperuntukkan untuk ilmu-ilmu sosial dan humaniora, maka seyogyanya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Hukum (FH) dan Fakultas Ekonomi (FE) dikonsentrasikan di lokasi tersebut. Selama ini ada beberapa gedung laboratorium Fakultas Teknik yang dibangun di Kampus Bukit Indah, padahal lahan di Kampus Reuleut masih sangat lapang dan lega. Pembangunan beberapa gedung laboratorium Fakultas Teknik yang menimbulkan keresahan warga Reuleut. Juga di Kampus Reuleut yang selama ini diperuntukkan untuk ilmu-ilmu alam dan teknik —Fakultas teknik dan fakultas Pertanian— masih belum konsisten dalam perencanaan; ada rencana untuk membuka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di lokasi Kampus Reuleut yang membuat masyarakat bingung dan kecewa.

Keempat, pihak Pemda Kabupaten Aceh Utara (dalam hal ini juga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten [DPRK] Aceh Utara) perlu memikirkan anggaran yang bisa memberikan dampak kepada kedua-belah pihak (*dual-impact*) seperti pembangunan jalan, penghijauan, pembuatan *food-court* atau *food-center* atau warung-warung (*kiosk*) kebutuhan selain makanan di sekitar atau di dalam kampus. Pihak Pemkab Aceh Utara seharusnya juga memikirkan untuk bagaimana membangun sesuatu yang berguna secara akademis (untuk kepentingan Unimal) dan sekaligus bersifat aksiologis (untuk kepentingan masyarakat sekitar). Misalnya membangun asrama mahasiswa yang dikelola oleh masyarakat *gampong* atau membangun pondokan-pondokan atau rumah-rumah *kost* di lahan warga sekitar kampus seperti yang dilakukan pihak Universitas Indonesia yang bekerja-sama dengan Yayasan Supersemar untuk membangun Rumah Pondok Tumbuh (RPT) di Desa Kukusan yang terletak di belakang Kampus UI Depok yang mengadopsi konsep pembangunan di atas lahan masyarakat dengan dibiayai oleh dana pemerintah. Masyarakat pun pada akhirnya akan merasakan dampak dari kehadiran kampus dan mahasiswa secara signifikan.

Kelima, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan pihak Unimal perlu terus melanjutkan program *Unimal Goes Green* untuk menjadikan kampus-kampus sebagai oase-oase ilmu. Program ini bisa menjadi program berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dalam pemeliharaan dan penyiraman dengan memberikan uang kepada warga yang berpartisipasi dalam penanaman dan penyiraman pohon

atau semacam *affirmative action* untuk membuat skema *cash for tree* di lingkungan kampus dan *gampong-gampong* sekitarnya. Ekologi kampus juga berdampak pada terbentuknya karakter-karakter konfliktual di dalamnya. Kondisi kampus yang panas dan tidak teduh, tanpa pepohonan yang memadai ikut memperburuk dan menyumbang kepada semakin buruknya konflik. Kontur tanah kampus Bukit Indah dan kampus Reuleut yang berbukit sebenarnya merupakan modal untuk menciptakan setting ekologi yang nyaman, asri, teduh, hening dan ilmiah. Ilmu pengetahuan hanya dapat berkembang dari lingkungan yang aman, nyaman dan teduh serta hijau, bukan dari lingkungan yang panas, gersang dan penuh debu; bukan juga dari lingkungan yang penuh kebencian dan konflik.

Keenam, pihak Unimal harus menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak bagi warga *gampong*. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diciptakan. Misalnya pekerjaan kebersihan klas-klas perkuliahan, ruang-ruang kantor, ruang-ruang publik, tempat baca, dan lain-lain tempat bisa diberikan kepada warga sekitar kampus secara lebih banyak lagi. Lebih baik banyak pekerjaan dengan sedikit honor daripada sedikit pekerjaan dengan honor yang besar. Jam kerjanya juga bisa dijadwalkan lebih sedikit. Selama ini pekerjaan membersihkan ruang kelas dan perkantoran dan unit-unit lainnya diberikan pada sedikit orang yang menangani banyak ruang. Juga pekerjaan penjagaan keamanan sebaiknya tidak dikelola oleh kantor pusat universitas atau biro-biro, melainkan seharusnya didesentralisasikan ke fakultas-fakultas atau unit-unit tertentu. Selama ini prioritas lebih diberikan kepada bidang pekerjaan keamanan (satpam/satuan pengamanan) ketimbang kepada pekerjaan untuk menciptakan kebersihan. Seharusnya penciptakaan iklim kampus yang bersih lebih menjadi prioritas ketimbang keamanan yang juga tidak pernah sepi dari pencurian dan pengrusakan meskipun sudah banyak tenaga satpam yang menjaganya. Pekerjaan teknis juga seharusnya menjadi prioritas kedua setelah kebersihan. Selama ini Unimal memang sudah memberikan pekerjaan honorer untuk masyarakat sekitar untuk bidang-bidang pekerjaan teknis seperti teknisi listrik. Namun bidang ini juga perlu diperluas dan diperbanyak. Unit-unit tertentu sebenarnya bisa menerima pekerja lokal dari *gampong-gampong* sekitar untuk menjadikan manajemen pengelolaan kampus

jadi lebih simpel dan mudah. Jarak sangat menentukan motivasi kerja seseorang.

Ketujuh, Unimal perlu membuka jurusan-jurusan ilmu budaya atau humaniora. Jurusan-jurusan ini akan memberikan pengaruh kultural kepada Aceh dan lingkungan *gampong-gampong* sekitarnya secara mendalam. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang dihormati masyarakat Aceh, Unimal selayaknya membuat terobosan (*breakthrough*) yang membanggakan secara ilmiah.

KEPUSTAKAAN

A. Buku dan Jurnal.

- Ali, Fachry dan Bachtiar Effendi. *Kalla dan Perdamaian Aceh*, Jakarta: LSPEU Indonesia, 2009.
- Ali, Rajab (*et al.*). "Hubungan Antara Identitas Etnik Dengan Prasangka Terhadap Etnik Tolaki Pada Mahasiswa Muna Di Universitas Haluoleo Kendari-Sulawesi Tenggara", dalam *Jurnal Psikologi Undip*, Semarang, Vol. 7, No. 1, 2000.
- Apridar. *Tsunami Aceh: Azab atau Bencana?*, Jakarta: Penerbit Al-Kautsar, 2005.
- Bahari, (*et al.*), *Model Resolusi Konflik Berbasis Pranata Adat Pada Masyarakat Melayu Dan Madura Di Kalimantan Barat*, 2007, terdapat pada <http://elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/byId/50999>.
- Bowen, John R. "Consensus and Suspicion: Judicial Reasoning and Social Change in an Indonesian Society 1960-1994", dalam *Law and Society Review*, vol 34, No. 1, 2000.
- Brookfield, S., *Developing Critical Thinkers: Challenging Adults to Explore Alternative Ways of Thinking and Acting*, Milton Keynes: Open University Press, 1987.
- Craib, Ian, *Teori-teori Sosial Modern: dari Parsons sampai Habermas*, (alih bahasa: Paul S. Baut dan T. Effendi), Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Crow, Karim D. "Aceh—The 'Special Territory' in North Sumatra: A Self-Fulfilling Promise?", dalam *Journal of Muslim Minority Affairs*, vol. 20, No. 1, Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln, (eds.), *Handbook of Qualitative Research*, Edisi Bahasa Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Drexler, Elizabeth F. "The Social Life of Conflict Narratives: Violent Antagonists, Imagined Histories, and Foreclosed Future in Aceh, Indonesia", dalam *Anthropological Quarterly*, Volume 80, Number 4, Michigan: Michigan State University, 2007.

- Giddens. Anthony, *Sociology* (5th edition), Cambridge: Polity, 2006.
- Gillin, John Lewis & John Philip Gillin. *Cultural Sociology, A Revision of an Introduction to Sociology*, New York: The Macmillan Company, 1954.
- J. Prang, Amrizal. *Aceh dari Konflik ke Damai*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Landis, Judson R., *Sociology: Concepts and Characteristics*, Belmont, California: Wadsworth, 1989.
- Merton, Robert K., *Social Theory and Social Structure: Toward the Codification of Theory and Research*, Illinois: Glencoe, 1959.
- Narwoko, J. Dwi & Bagong Suyanto. (eds), *Sosiologi: Teks Pengantar dan Penerapan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Pranowo, M. Bambang. "Orang Kampus dan Orang Kampung", dalam M. Bambang Pranowo, (et al.), *Steriotip Etnik, Asimilasi dan Integrasi Sosial*, Jakarta: Pustaka Grafika Kita, 1988.
- Rist, Ray C., *Mempengaruhi Proses Kebijakan dengan Penelitian Kualitatif*, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (ed), *Handbook of Qualitative Research*, Edisi Bahasa Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, edisi keenam, (alihbahasa oleh Alimandan), Jakarta: Kencana, 2007.
- Schwandt, Thomas A., *Pendekatan Konstruktivis-Interpretivis dalam Penelitian Manusia*, , dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (ed), *Handbook of Qualitative Research*, Edisi Bahasa Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1982.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sumardjo (et al.). "Kajian Kelompok Keagamaan di Sebelas Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta", Bogor: Kerjasama LP IPB dengan Departemen Agama RI, 2005.
- Sumardjo dan Aman Wirakartakusumah. "Peran Perguruan Tinggi Mewujudkan Dinamika Kedamaian dalam Kehidupan Masyarakat", dalam *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*, Vol. 03, No. 03, 2009.

- Suporaharjo, *Review Strategi Penyelesaian Konflik Sosial atas Tanah: Studi Kasus Konflik antara Komunitas Ketajek dengan Perusahaan Daerah Perkebunan Jember di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Syamsuddin, M. (et al.). "Dampak Pembangunan Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia terhadap Kehidupan Masyarakat Sekitar", dalam *Jurnal Fenomena*, Vol. 3 No. 1, 2005.
- Thaib, Lukman. "Aceh's Case: Possible Solution to a Festering Conflict", dalam *Journal of Muslim Minority Affairs*, vol. 20, No. 1, 2000.
- Toer, Pramoedya Ananta, *Arok Dedes*, Cetakan ke 8, Jakarta: Lentera Dipantara, 2006.
- Willis, Evan, *The Sociological Quest: An introduction to The Study of Social Life*, New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 1996.
- Wiratmadinata. *An Evolving Model for Conflict Transformation and Peace Building in Aceh (Analysis of The Aceh Peace Process from an Achehnese Perspective)*, Banda Aceh: AJRC, 2008.
- Zubaidah. *Peran Organisasi Perempuan Aceh dalam Proses Penyelesaian Konflik Bersenjata*, Jakarta: Program Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003.

B. Kamus dan Kepustakaan Lainnya

- Aceh Utara dalam Angka*, Lhokseumawe: BPS Aceh Utara, 2011.
- Dokumen Laporan Akhir Studi Evaluasi Calon Lokasi Kampus Universitas Malikussaleh, Tahun 1992.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan RI, 2002.
- Memorandum Akhir Jabatan Rektor Unimal masa Rektor Prof. A. Hadi Arifin, SE., M.Si., Tahun 2010.
- Putusan PN Lhokseumawe Nomor 76/Pid.B/2006/PN-LSM, Tahun 2006.
- Schall, Nikolaus dan Michael Becker, *Methodfinders Practitioner's Guide*, GTZ – FRCS Project Team, 2004.

C. Surat Kabar, Majalah, Internet

Aceh Traffict

Aceh Traffict, 27 October 2011.

Acehtraffict, 3 November 2011.

Acehtraffict, 13 April 2012.

Acehtraffict, 16 April 2012.

Atjeh Post

Atjeh Post, 9 Maret 2012.

Atjeh Post, 4 Mei 2012.

Bisnis Indonesia

Bisnis Indonesia, 08 Juni 2009.

Harian Aceh

Harian Aceh, 14 Juli 2011.

Harian Aceh, 20 September 2011.

Harian Aceh, 3 November 2011.

Harian Aceh, 15 November 2011.

Rakyat Aceh

Rakyat Aceh, 7 Oktober 2008;

Rakyat Aceh, 17 November 2011.

Serambi Indonesia

Serambi Indonesia, Sabtu 17 Juni 2006.

Serambi Indonesia, 2 November 2011.

Serambi Indonesia, 3 November 2011.

Serambi Indonesia, 15 November 2011.

Tempo

Tempo, 9 Desember 1989.

Tempo, 15 November 2002.

Tempo, 17 November 2002.

Warta Aceh

Warta Aceh, 6 April 2012.

Waspada

Waspada, 2 November 2011.

[http://aceh.tribunnews.com/2011/11/03/seratusan-warga-demo-unimal.](http://aceh.tribunnews.com/2011/11/03/seratusan-warga-demo-unimal)

<http://fkmaceh.blogspot.com/2011/10/1001-kisah-di-unimal.html>

[http://harian-aceh.com/2011/07/14/dprk-tolak-laboratorium-unimal-dibangun-di-kampus-bi.](http://harian-aceh.com/2011/07/14/dprk-tolak-laboratorium-unimal-dibangun-di-kampus-bi)

[http://ichwanmuis.com.](http://ichwanmuis.com)

[http://ina.propatria.or.id/article/highlights/article.php?aid=817.](http://ina.propatria.or.id/article/highlights/article.php?aid=817)

[http://sawingbahar.wordpress.com.](http://sawingbahar.wordpress.com)

[http://www.beyondintractability.org.](http://www.beyondintractability.org)

[http://www.fkmaceh.blogspot.com/2011/10/1001-kisah-di-unimal.html.](http://www.fkmaceh.blogspot.com/2011/10/1001-kisah-di-unimal.html)

[http://www.iisd.org/csconservation/conflict_tree.aspx.](http://www.iisd.org/csconservation/conflict_tree.aspx)

[http://www.Methodfinder.net.](http://www.Methodfinder.net)

[http://www.ohrd.wisc.edu/onlinetraining/resolution/aboutwhatisit.htm.](http://www.ohrd.wisc.edu/onlinetraining/resolution/aboutwhatisit.htm)

[http://www.olorado.edu/conflict/pace/glossary.htm.](http://www.olorado.edu/conflict/pace/glossary.htm)

[http://www.wmc-ianws.com.](http://www.wmc-ianws.com)



Penelitian tentang interaksi sosial, akulturasi dan konflik antara komunitas Kampus Unimal dengan masyarakat Reuleut dan Blang Pulo ini memperlihatkan hasil bahwa konflik sudah dimulai sejak tahun 2001 dan mengalami eskalasi hingga tahun 2011. Upaya resolusi konflik sudah dilakukan oleh banyak pihak; Pemda Aceh Utara, Unimal, mahasiswa dan juga aparat hukum (polisi, kejaksaan dan pengadilan). Namun tidak ada sama sekali penyelesaian yang tuntas atas konflik ini bahkan akhir-akhir ini terlihat tidak adanya antusiasme untuk mengubah konflik menjadi konsensus atau kerja-sama yang produktif. Akhirnya konflik bukannya berkurang, malah semakin menguat, mengalami eskalasi yang semakin mengkristal. Namun, bukan hanya konflik yang terlihat dari hubungan sosial komunitas kampus dengan masyarakat kampung di sekitarnya. Ada juga akulturasi yaitu hubungan yang saling mempengaruhi, saling membutuhkan, saling bekerja-sama, saling asih-asah-asuh yang membentuk kesadaran dan cara berpikir yang baru di kedua-belah pihak. Hubungan sosial ini akan mengalami penurunan dalam kualitas, dan proses akulturasi akan mengalami kegagalan jika konflik antara masyarakat kampung dengan komunitas kampus Unimal dibiarkan berlarut-larut.

Editor:

Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum

Al Chaidar, S.IP

T. Nazaruddin, S.H., M. Hum

Malahayati, S.H., L.L.M.

Laila M. Rasyid, S.H., M.Hum

Penerbit:

UNIMAL PRESS

